

HIMPUNAN SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN

Periode, Januari-Maret 2006



**Biro Hukum dan Humas
Departemen Pertanian**

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Gerakan Pemberantasan Avian Influenza (AI)	1
---	---

Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Penyerahan Peta Tematik Mendukung Pengelolaan Lahan dan Air	9
--	---

Sambutan Menteri Pertanian Pada Seminar Panen Raya Padi di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan	19
--	----

Pengarahan Menteri Pertanian Pada Acara Penandatanganan “Kesepakatan Bersama Aksi Diversifikasi Pangan” Antara Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian Dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Pusat	27
--	----

Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Seminar “Kebijakan di Bidang Pertanian Untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional”	35
---	----

Pidato Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Perkemahan Wirakarya Nasional 2006	49
--	----



Keynote Address of Keynote Address of The Minister of Agriculture of The Republic of Indonesia At The International Seminar and Workshop of Maize	58
Sambutan Menteri Pertanian Pada Seminar Nasional "Diversifikasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional" Lustrum V Universitas Muhammadiyah	67
Opening Address of The Minister of Agriculture At The Seminar of Development In Biofuel Production And Biomass Technology	80
"Keynote Speech" Menteri Pertanian Republik Indonesia Pada Acara "Forum Nasional Pembaharuan Agraria Dan Pembangunan Pedesaan"	87
Sambutan Pemerintah Pada Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI Dengan Menteri Pertanian Dan Menteri Luar Negeri Mengenai Pengesahan Atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perjanjian Internasional Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian	104



**Sambutan Pemerintah Pada Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan
Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perjanjian
Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan
Dan Pertanian 115**

**Pidato Menteri Pertanian Pada Pengukuhan Masyarakat
Agrobisnis dan Agroindustri Indonesia 128**

**Pengarahan Menteri Pertanian Pada Apresiasi Keberlanjutan
Pengelolaan Program P4K Pasca 2005 Oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota 136**

**Pendapat Akhir Pemerintah Pada Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai
Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang
Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman
Untuk Pangan Dan Pertanian 151**

**Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Peresmian
Kandang Terpadu Sistem Closed House Dan
Pelepasan Ekspor Perdana Pakan Dan Obat Hewan
PT. Santika Duta Nusantara 165**



Speech of the Minister of Agriculture At The Opening Ceremony of International Workshop on “Client Oriented Agro-meteorological Services to Support Agriculture Development”	184
--	-----

Sambutan Kunci Menteri Pertanian Pada Pembukaan Trubus Agro Expo 2006	195
---	-----



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA
GERAKAN PEMBERANTASAN AVIAN INFLUENZA (AI)**

Sumedang, 2 Februari 2006

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth.

- Sdr Gubernur Propinsi Jawa Barat atau yang mewakili;
- Sdr Bupati Kabupaten Sumedang dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Sdr Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat;
- Sdr Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;
- Para Relawan dari Palang Merah Indonesia (PMI) dan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB);
- Para Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Pada hari ini sungguh saya merasa berbahagia karena kita menyaksikan suatu acara yang tidak bersifat seremonial tetapi



merupakan langkah-langkah kongkrit kita dalam memberantas penyakit Avian Influenza (AI) atau yang di masyarakat dikenal sebagai “Flu Burung” di Kabupaten Sumedang.

Kita saksikan sendiri betapa relawan-relawan masyarakat yaitu dari PMI dan mahasiswa FKH IPB turut serta memberantas AI secara “Door to door” langsung ke masyarakat di lapangan. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadlirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunianya kita dapat hadir pada acara pagi hari ini dalam rangka pemberantasan AI di Kabupaten Sumedang.

Gerakan seperti ini juga akan dilakukan di beberapa wilayah yang menunjukkan bahwa kegiatan ini telah menjadi suatu gerakan nasional yang berkesinambungan. Namanya suatu gerakan artinya sudah menjadi beban dan tanggung jawab tidak saja oleh pemerintah lagi, tetapi juga oleh masyarakat luas. Kalau gerakan ini terus menerus kita lakukan, maka Insya Allah Indonesia pada tahun 2008 dapat mengendalikan AI.



Para hadirin dan undangan yang saya hormati,

Untuk ini saya minta kepada Pimpinan dan Kepala Daerah agar terus menerus menjaga momentum ini jangan sampai lengah sedikitpun. Daerah-daerah harus lebih proaktif tidak hanya menunggu bantuan atau petunjuk dari Pusat ataupun menunggu sampai ada orang meninggal baru bergerak. Tidak ada alasan lagi untuk keterbatasan peralatan, bahan dan sarana lainnya dalam pemberantasan AI. Pemerintah Pusat telah menyediakan dana untuk ini, walaupun dana ini dapat dianggap sebagai pemicu. Diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat juga membiayainya.

Kita saksikan sendiri betapa relawan-relawan masyarakat yaitu dari PMI dan mahasiswa FKH IPB turut serta memberantas AI secara “Door to door” langsung ke masyarakat di lapangan. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadlirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunianya kita dapat hadir pada acara pagi hari ini dalam rangka pemberantasan AI di Kabupaten Sumedang.

Gerakan seperti ini juga akan dilakukan di beberapa wilayah yang menunjukkan bahwa kegiatan ini telah menjadi suatu gerakan nasional yang berkesinambungan. Namanya suatu gerakan artinya sudah menjadi beban dan tanggung jawab tidak saja oleh pemerintah lagi, tetapi juga oleh masyarakat luas. Kalau gerakan ini terus menerus kita lakukan, maka Insya Allah Indonesia pada tahun 2008 dapat mengendalikan AI.

Para hadirin dan undangan yang saya hormati,

Untuk ini saya minta kepada Pimpinan dan Kepala Daerah agar terus menerus menjaga momentum ini jangan sampai lengah sedikitpun. Daerah-daerah harus lebih proaktif tidak hanya menunggu bantuan atau petunjuk dari Pusat ataupun menunggu sampai ada orang meninggal baru bergerak. Tidak ada alasan lagi untuk keterbatasan peralatan, bahan dan sarana lainnya dalam pemberantasan AI. Pemerintah Pusat telah menyediakan dana untuk ini, walaupun dana ini dapat dianggap sebagai pemicu. Diharapkan



pemerintah daerah dan masyarakat dapat juga membiayainya. Perkembangan penyakit AI akhir-akhir ini menunjukkan karakteristik yang cukup menarik. Kalau pada awalnya kasus-kasus penyakit AI dijumpai pada industri peternakan ayam ras sektor 1 dan sektor 2, tetapi kini telah bergeser kepada peternakan-peternakan rakyat atau di pemukiman-pemukiman penduduk di perumahan-perumahan di perkotaan atau pada sektor 3 dan sektor 4. Perkembangan yang menarik ini perlu kita waspadai karena kematian pada unggas sudah jauh menurun tetapi penularan terhadap unggas lain selain ayam ras dan unggas kesayangan telah terjadi, selain itu munculnya kasus penyakit tidak dapat diduga.

Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan terjadinya wabah raya (Pandemi) rantainya semakin pendek. Pengalaman ini memberi pelajaran kepada kita bahwa terjadinya "*Cluster-cluster*" pada sekelompok warga sebanyak lima kali sebagai bukti makin dekatnya wabah raya tersebut. Tetapi hal ini akan dapat kita atasi dengan teknologi yang ada. Oleh karena itu menjadi tugas kita semua untuk



mengantisipasi melakukan deteksi dini terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

Wilayah Pantura sudah dinyatakan tertular dan untuk kedua kalinya terjadi kasus-kasus baik pada unggas maupun pada manusia., demikian juga Kabupaten Sumedang. Kejadian-kejadian AI di wilayah Pantura dan sebagian wilayah lainnya ternyata telah menyerang burung puyuh yang penanganannya lebih rumit karena digolongkan sebagai sektor 3 dan 4.

Hadirin yang saya hormati.

Perkembangan lainnya yang cukup menarik adalah telah diketemukannya virus AI sejenis pada unggas dan pada manusia secara bersamaan. Berarti terjadinya penularan dari unggas kepada manusia mungkin saja terjadi dan semakin menguak tabir rahasia yang selama ini menjadi tanda tanya besar, walaupun lokasi kejadiannya amat berjauhan. Selain itu telah terdeteksi bermacam-macam sub type virus AI yang



berbeda dari sebelumnya. Tantangan ini saya berikan kepada para peneliti, penyidik penyakit hewan dan kalangan universitas untuk meneliti lebih jauh tentang perilaku virus Avian Influenza.

Hadirin yang saya hormati,

Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan awal dari langkah-langkah kita untuk secara serius memberantas AI. Dalam waktu dekat Bapak Presiden akan mencanangkan suatu gerakan Deteksi Dini AI untuk mengingatkan kita bersama betapa pentingnya pemberantasan AI. Deteksi Dini (*Early Detection*) harus diikuti dengan Respon Dini (*Early Respon*) dan Laporan Dini (*Early Reporting*). Ditengarai bahwa ketiga factor ini kita masih lemah. Kita tidak ingin dinilai sebagai titik yang lemah dalam pemberantasan AI secara regional dan global.

Kepada seluruh pihak terkait dalam upaya pemberantasan penyakit ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya, khususnya kepada



masyarakat yang telah ikut aktif membantu dan berpartisipasi.
Demikian sambutan saya semoga upaya-upaya yang mulia ini
diberkati oleh Allah Swt.

Sumedang, 2 Februari 2006

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA
PENYERAHAN PETA TEMATIK MENDUKUNG
PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR**

Jakarta, 3 Februari 2006

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,

Yang Saya Hormati,

- Saudara Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- Saudara Kepala Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan
- Saudara Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Saudara Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian beserta jajarannya.



Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir menyaksikan penyerahan peta tematik berupa (1) Peta Tutupan Lahan Indonesia dari ALPAN, (2) Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dari Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, dan (3) Peta Geohidrologi dan Peta Cekungan Air Tanah dari Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Atas nama pimpinan Departemen Pertanian saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan LAPAN, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah berkenan mendiseminasikan peta-peta yang dihasilkan kepada Departemen Pertanian sebagai salah satu pengguna utamanya.

Kepada saudara Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air yang telah menginisiasi kerjasama lintas sektoral untuk



memperoleh data spasial dalam mendukung program pembangunan pertanian saya ucapkan terima kasih. Melalui penyerahan data spasial ini berarti kita telah memulai bekerja dan berkoordinasi secara lintas sektoral dengan menggunakan data dan informasi dari sumber yang sama. Itulah sebabnya mengapa saya sengaja “ menyempatkan diri secara khusus” untuk menerima peta ini.

Saudara-saudara yang Saya hormati,

Kebutuhan akan data spasial lintas sektoral sebenarnya sudah lama disadari dan dirasakan oleh pimpinan Departemen Pertanian, karena tanpa data spasial, maka penentuan prioritas program, sinergi antar sektor dan sub sektor akan sulit dipantau progresnya. Untuk itu maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya meminta agar program-program di Departemen Pertanian secara bertahap dan konsisten dapat memanfaatkan data spasial dan temporal semaksimal mungkin dengan meminimalkan data tabular seperti yang banyak dilakukan selama ini.



Berkaitan dengan data spasial dan temporal, salah satu program kerja Departemen Pertanian dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang sangat strategis adalah Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, dan Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Untuk merealisasikan program tersebut telah ditetapkan target swasembada pangan utama, yaitu beras berkelanjutan, jagung pada tahun 2007, kedelai pada tahun 2015, gula pada tahun 2009 dan daging sapi pada tahun 2010. Untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan data dan informasi lahan dan air spasial dan temporal yang memadai baik jumlah, jenis, dan mutu menurut ruang dan waktu di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat dirancang strategi optimasi sistem produksi existing dan pengembangan wilayah baru lebih terinci dalam hal: posisi lokasi, luas dan dinamika serta efektifitas penggunaan dananya.

Optimasi dan pengembangan wilayah baru secara progresif dapat dipantau keberhasilannya apabila dinamika



perubahan penggunaan dipantau secara spasial dan temporal dapat dipantau secara reguler. Mengingat begitu strategisnya peran lahan dan air sebagai media tumbuh dan berkembangnya komoditas budidaya (tanaman maupun ternak) termasuk manusia pengelolanya, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk Direktorat Jenderal yang secara khusus menangani pengelolaan lahan dan air. Amanah yang begitu besar ini harus dapat dijalankan dengan baik dan benar, karena suatu saat rakyat akan menagih tanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan.

Hadirin yang berbahagia,

Dari sisi ketersediaan lahan, menurut data Badan Pusat Statistik (2002), kita memiliki lahan yang relatif luas berturut-turut lahan sawah beririgasi 4.784.974 ha, lahan sawah tadah hujan seluas 2.348.673 ha, lahan kering Ladanghuma 13.363.991 ha dan lahan pasang surut 615.201 ha. Sayangnya sampai saat ini pencapaian swasembada pangan, diluar daging, sebagian besar masih bertumpu pada lahan sawah, utamanya



lahan sawah beririgasi. Faktanya, peningkatan produksi salah satu jenis komoditas (misalnya jagung) biasanya diikuti dengan penurunan jenis komoditi (misalnya jagung) biasanya diikuti dengan penurunan jenis komoditi lainnya (padi). Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa komoditas-komoditas tersebut sebagian besar diusahakan pada lahan yang sama, yaitu lahan sawah beririgasi dengan faktor pembatas utama ketersediaan air menurut ruang dan waktu. Dua kata kunci untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah Optimasi dan pengembangan areal pertanian baru dengan dukungan data dan informasi spasial dan temporal sumber daya lahan air.

Saudara-saudara sekalian,

Penggunaan peta tutupan lahan, peta penunjukan kawasan hutan maupun peta geohidrologi serta peta cekungan air tanah akan memberikan banyak manfaat bagi Departemen Pertanian, terutama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk optimasi dan pengembangan



areal pertanian baru dalam rangka pemenuhan peningkatan permintaan kebutuhan akan produk pertanian. Kepada saudara Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, saya minta agar peta tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan efisiensi dalam: (1) pendayagunaan sumber daya lahan dan air serta sistem produksi pertanian (2) minimalisasi resiko dalam rangka optimasi dan pengembangan areal pertanian baru.

Mengingat data dan informasi spasial tentang tutupan lahan, penunjukan kawasan hutan dan geohidrologi serta cekungan air tanah sangat penting tidak saja bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air tetapi juga bagi eselon 1 lingkup Departemen Pertanian lainnya.

Oleh karena itu saya minta agar dapat disusun *Decision Support Sytem* yang user friendly agar lebih mudah dimanfaatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pemantauan program-program Departemen Pertanian .



Prototipe hasil tersebut saya minta paling lambat pada akhir tahun 2006 dapat disosialisasikan di seluruh jajaran eselon 1 Departemen Pertanian agar informasi yang telah kita terima dapat segera dimanfaatkan dan semakin besar manfaatnya.

Kepada LAPAN, saya berharap agar Departemen Pertanian dapat dibantu dalam penyediaan data tutupan lahan multi temporal paling tidak 3 kali pengambilan (akhir musim hujan, musim kemarau dan awal musim hujan, agar pola tanam dan dinamika produktivitas lahan dapat direpresentasikan secara utuh. Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat dirancang strategi optimasi peningkatan Indeks pertanaman dan produktivitas bahkan perluasan areal baru secara simultan.

Kepada Badan Geologi Nasional, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, saya berharap agar pada areal lahan kering dapat dihasilkan peta air tanah dangkal maupun air tanah dalam, karena dengan demikian berarti ada peluang besar



untuk peningkatan cropping intensity dan produktivitas lahan kering yang sampai saat ini masih *under-utilized*.

Kepada Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan, saya berharap agar di propinsi potensial perluasan areal pertanian (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) secara bertahap tersedia peta yang sama pada skala yang relatif besar, agar alokasi perluasan areal baru dapat dideliniasi lebih akurat.

Akhimya atas nama Departemen Pertanian , saya berharap agar rintisan kerjasama antar sektor ini dapat diintensifkan pelaksanaannya, dan diekstensifkan cakupannya serta didiversifikasi jenisnya agar sinergi dalam pendayagunaan sumber daya lahan dan air dapat diimplementasikan secara nyata.

Demikian, terima kasih atas perhatian Saudara-saudara sekalian, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.



Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 3 Februari 2006

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**Sambutan
Menteri Pertanian
Pada Seminar
Panen Raya Padi di Kabupaten Soppeng
Propinsi Sulawesi Selatan
Tanggal, 11 Februari 2006**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati :

**Saudara Gubernur Sulawesi Selatan,
Bupati, Ketua DPRD dan Muspida Kabupaten Soppeng.
Para Pejabat Eselon I dan II, baik dari Pusat maupun
Daerah.**

**Bapak/Ibu para tokoh masyarakat, dan alim ulama,
pengurus KTNA, penuluh pertanian, para kontak tani/
petani, stake holder serta para hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan-Nya kita bertemu di tempat



ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita mampu membangun sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Hari ini saya sangat berbahagia dapat hadir ditengah-tengah para petani dan masyarakat untuk melaksanakan Panen Padi Perdana di pulau Jawa tahun 2006 yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka tahun 2006 ini secara nasional produksi padi diharapkan dapat mencapai 54,86 juta ton GKG atau setara dengan 31,07 juta ton beras. Produksi ini akan diperoleh melalui upaya peningkatan produktivitas dan perluasan areal panen. Peningkatan produktivitas dapat dipercepat apabila petani menggunakan benih unggul produksi tinggi dan bermutu dengan produktivitas minimal 6,5 ton/ha GKG, seperti Ciherang,



Gilirang, dan Way Apo Buru, serta menggunakan pupuk secara berimbang termasuk penggunaan pupuk organik. Dalam kaitan itu, saya telah mengeluarkan keputusan mengenai rekomendasi pemupukan N, P dan K spesifik lokasi untuk setiap kecamatan untuk padi sawah di propinsi penghasil utama padi. Rekomendasi ini diharapkan bermanfaat bagi upaya petani, peningkatan produksi padi, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu saya berharap agar para penyuluh pertanian segera mensosialisasikan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi tersebut kepada para kelompok tani.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga yang wajar, tahun 2006 pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi dengan volume 6 juta ton yang terdiri dari 4,3 juta ton Urea, 700.000 ton SP-36, 600.000 ton ZA dan 400.000 ton NPK, dengan harga pupuk bersubsidi ditetapkan sama seperti tahun 2005 yang lalu . dalam merencanakan kebutuhan riil pupuk bersubsidi , serta mencegah terjadinya perembesan ke sektor lain, maka diharapkan mulai 1 april 2006 penyaluran pupuk ke kelompok tani dilakukan melalui sistem tertutup yang



didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Saya mengharapkan, melalui arahan Bapak Gubernur dan Bupati, para penyuluh pertanian mulai lagi membina kelompok tani agar dapat kembali diberdayakan sebagai motor penggerak pembangunan pertanian pada tingkat pertanian.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pada periode tiga bulan kedepan, kita akan melaksanakan panen raya MT.2005/2006 di sentra-sentra padi seluas 5,5 juta hektar. Dalam periode ini kita akan menghasilkan 15 juta ton beras atau hampir separuh dari kebutuhan beras nasional yang berjumlah sekitar 31 juta ton. Dalam rangka pengamanan harga gabah/beras khususnya pada saat panen raya, mulai tanggal 1 januari 2006, sesuai Inpres 13/2005 harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dalam negeri adalah Rp.1.730/kg kadar air maksimum 25%, gabah kering giling (GKG) Rp.2.250/kg di penggilingan, sedangkan beras adalah Rp 3.550/kg di gudang penyimpanan. oleh karena itu saya telah meminta Perum BULOG dan Badan



Ketahanan Pangan melalui LUEP untuk mulai mempersiapkan pembelian gabah dari petani agar harga gabah tidak jatuh sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi para petani kita. Perum Bulog diminta lebih mengoptimalkan perannya membeli gabah dari petani.

Disamping itu, Perum Bulog diminta agar tidak hanya membeli gabah dari mitra Bulog seperti penggilingan padi saja, tetapi juga membeli langsung kepada kelompok tani, karena kelompok tani tentunya yang paling mengetahui jumlah gabah yang ada di kelompoknya. Dalam kaitan itu pula, saya mengharapkan para KTNA provinsi dan kabupaten agar senantiasa menyuarkan dan memperjuangkan kepentingan para petani dalam mengamankan harga gabah dalam periode panen raya ini. Sistem penyuluhan pertanian akan disempurnakan agar para KTNA dan kelompok tani dapat berperan aktif dalam penanganan pasca panen dan mengamankan harga, baik gabah maupun beras dengan ikut serta mengawasi proses pengadaan beras yang tepat waktu dan tepat lokasi serta transparan.



Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pada periode panen raya ini kita lebih perlu memperhatikan sektor hilir, khususnya berkenaan dengan aspek penanganan pasca panen dan aspek pemasaran. Seperti kita ketahui kehilangan hasil panen padi (*losses*) masih sangat besar sekitar 20,5% (BPS, 1996). Kita harus mampu menekan kehilangan hasil ini, agar kita dapat menyelamatkan hasil panen para petani kita..

Pemerintah akan mengantisipasi terhadap rendahnya kualitas gabah petani akibat hujan dan banjir. Upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan dalam penanganan pasca panen meliputi mensosialisasikan gerakan pelayanan pasca panen pada daerah-daerah sebra produksi padi, menumbuhkembangkan kelembagaan pasca panen dengan membentuk forum kecamatan pasca panen dan memberdayakan UPJA, mengoptimalkan penggunaan alsin pasca panen (perontok, pengering, RMU, LDM), memfasilitasi pengadaan alsi pasca panen dengan dana pembantuan di kabupaten/kota.



Cuaca yang sangat basah disamping menyebabkan terjadinya banjir juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan populasi dan serangan OPT seperti wereng dan tungro. Fenomena ini agar dapat diamati dan diantisipasi secara lebih dini. Meskipun demikian kita tidak perlu khawatir berlebihan mengingat banjir pada lahan sawah dan serangan OPT pada MT.2005/2006 sampai dengan saat ini jumlahnya masih lebih rendah dibanding dengan MT. 2004/2005.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Saya akhiri sambutan saya dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng serta seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produksi padi nasional. Saya ucapkan selamat kepada para petani yang sedang melakukan panen semoga hasil panennya menjadi berkah bagi kita sekalian.



Semoga ALLAH SWT memberikan Berkah dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



Pengarahan
Menteri Pertanian
Pada Acara Penandatanganan
“Kesepakatan Bersama Aksi Diversifikasi Pangan”
Antara
Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian
Dengan
Tim Penggerak
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Pusat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati,

- Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat;
- Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Departemen Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan;
- Para Eselon I dan Lingkup Departemen Pertanian
- Para Undangan dan hadirin yang berbahagia



Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara penandatanganan “Kesepakatan Bersama Aksi Diversifikasi Pangan” antar Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian dengan Tim Penggerak PKK Pusat.

Acara penandatanganan kesepakatan bersama ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan program pangan dan gizi melalui keterpaduan program perbaikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang guna meningkatkan status gizi anggota keluarga.

Saudara hadirin dan undangan yang berbahagia,

Pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam agenda pembangunan nasional karena : Pertama, akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi manusia; Kedua, kualitas



pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang penting bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas; Ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat diutamakan berasal dari potensi sumberdaya wilayah setempat.

Negara atau wilayah mempunyai pasokan pangan yang baik apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya, dan masing-masing rumah tangga/keluarga mampu memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan ketahanan pangan yang baik terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup guna menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas di masa yang akan datang.



Saudara hadirin dan undangan yang berbahagia,

Memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan keberhasilan pemantapan ketahanan pangan dan kondisi negara yang sedang melakukan penataan dengan berbagai permasalahan yang kompleks, karena secara substansi dan esensi, hasil-hasil pembangunan ketahanan pangan membutuhkan waktu lama dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Perlu kita pahami bahwa pemantapan ketahanan pangan di tingkat keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek ketersediaan saja, tetapi juga terhadap akses akan pangan yang terkait erat dengan tingkat pendapatan keluarga dan kemampuan pangan dan gizi keluarga, serta kerentanan sumber pangan yang digambarkan oleh kualitas daya dukung sumberdaya alam.

Dengan menggali potensi sumber pangan yang ada di sekitar kita, akan menumbuhkan keinginan untuk



membudidayakan beranekaragam bahan pangan di pekarangan, sehingga mempunyai nilai dan manfaat bagi seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Pekarangan sebagai tempat terdekat dengan keluarga dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber gizi keluarga yang tersedia setiap waktu dan dapat berfungsi sebagai tabungan keluarga

Sejalan dengan HATINYA PKK (Halaman, Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman) fungsi pekarangan lebih ditingkatkan, dimana pekarangan bukan hanya sebagai penyedia aneka pangan tetapi mempunyai arti yang lebih luas sebagai tempat yang indah dipandang, teratur dan sebagai tempat rekreasi keluarga. Melalui HATINYA PKK diharapkan agar setiap anggota keluarga mampu menolong dirinya sendiri dan mampu mewujudkan ketahanan pangan keluarga sebagai dasar ketahanan pangan nasional.

Apabila keluarga mau dan mampu mengenali potensi yang ada di sekitarnya dan mau melaksanakan, maka masalah kekurangan pangan dan gizi dapat diantisipasi secara dini.



Sudah barang tentu apa yang saya sampaikan di atas memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penanganannya. Untuk itu, pada masa yang akan datang kelembagaan masyarakat yang berperan langsung dalam mendukung ketahanan pangan, seperti kelompok PKK perlu secara terus menerus diberdayakan. Melalui pemberdayaan keluarga yang selama ini dilakukan oleh TP. PKK diberbagai tingkatan dengan 10 Program Pokoknya, diharapkan pembangunan ketahanan pangan akan semakin mantap.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, perlu dilakukan Aksi Diversifikasi Pangan yang disignifikan dengan 10 Program Pokok PKK yang selama ini telah dikenal sampai di tingkat pedesaan; yang meliputi peningkatan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Saudara hadirin dan undangan yang berbahagia,

PPK sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pengabdian dan tumbuh sebagai gerakan kemasyarakatan



yang bebas dari kepentingan-kepentingan politik, merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat khususnya keluarga. Beberapa kegiatan pemerintah yang telah dilaksanakan dan bersinergi dengan PKK antara lain penyediaan pangan yang bergizi melalui pemanfaatan pekarangan, peningkatan kesehatan keluarga dan pemberian makanan tambahan melalui Posyandu serta melaksanakan PIN untuk meningkatkan kesehatan BALITA.

Salah satu upaya yang telah dilaksanakan yang sejalan dengan program pembangunan ketahanan pangan adalah pengembangan penganekaragaman pangan yang beragam, bergizi dan seimbang. Pengembangan tersebut di tingkat rumah tangga. Kesemua aspek tersebut memerlukan keterlibatan ibu rumah tangga dalam merencanakan dan menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas di masa yang akan datang.

Saya menyambut dengan baik kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dengan Tim Penggerak PKK ini, dan melalui kesepakatan bersama tentang "Aksi Diversifikasi Pangan".



Saya mengharapkan agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terus ditingkatkan sehingga manfaat dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya keluarga.

Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**Keynote Speech
Menteri Pertanian
Pada Seminar
“Kebijakan di Bidang Pertanian Untuk Menjaga
Ketahanan Pangan Nasional”**

Makassar, 11 Februari 2006

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati :

**Saudara Gubernur Sulawesi Selatan,
Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mitra Timur,
Hadirin dan undangan yang berbahagia,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia -NYA kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat hadir mengikuti seminar untuk mendiskusikan salah satu agenda nasional yang menjadi fokus dan perhatian kita semua yaitu mengenai pemantapan ketahanan pangan nasional .



Selanjutnya, saya menyampaikan penghargaan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan Mitra Timur, yang telah berinisiatif untuk mengundang seluruh pemangku kepentingan seperti kepala daerah, anggota DPRD, Bikotrat, LSM, Pelaku usaha, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan pembangunan ketahanan pangan nasional. Saya berharap seminar ini dapat memberikan pencerahan, sumbangan pemikiran, dan arahan dalam membangun dan memantapkan ketahanan pangan nasional, sebagaimana diharapkan oleh seluruh komponen bangsa ini .

Para undangan dan hadirin yang berbahagia ,

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam konteks pembangunan suatu negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk besar. Perhatian terhadap peningkatan ketahanan pangan (*food security*), mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan social (*social security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan yang mengarah pada ketahanan social.



Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai : “Kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Inti permasalahan dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah besarnya laju pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan perubahan selera. Dinamika dalam jumlah, mutu, keragaman jenis dan keamanannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional, terkendala oleh karena adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam dan penerapan teknologi yang belum



optimal. Apabila permasalahan ini tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka dikhawatirkan akan mengganggu neraca pangan nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan pengelolaan sumber daya alam yang optimal, penyediaan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan SDM yang memadai.

Sementara itu, upaya pemantapan ketahanan pangan nasional juga dihadapkan pada keterbukaan ekonomi dan perdagangan global yang bebas (AFTA, APEC, dan WTO). Kondisi ini menuntut seluruh komponen bangsa untuk memperhatikan perkembangan perdagangan internasional sebagai bagian dari pengelolaan kebijakan pangan nasional.

Peserta Seminar yang saya hormati,

Situasi ketahanan pangan nasional tahun 2005 dan awal tahun 2006 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup mantap. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan



pangan antara lain: (a) kecenderungan meningkatnya produksi beberapa komoditas pangan pokok, (b) meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, kecuali konsumsi beras yang sedikit turun, (c) lebih stabilnya pergerakan harga-harga pangan, kecuali terjadinya kenaikan harga bahan pangan pokok setelah kenaikan harga BBM pada bulan Oktober yang lalu, dan (d) meningkatnya peranserta masyarakat dan pemerintah daerah, yang ditunjukkan oleh semakin beraragamnya kreativitas pemerintah daerah dalam menangani ketahanan pangan.

Beberapa masalah memang masih dihadapi dan memerlukan pemecahan yang lebih mendasar antara lain: (a) terjadinya kerawanan pangan di NTT dan NTB serta di Papua karena kondisi sumberdaya alam yang terbatas atau karena bencana alam; (b) semakin menurunnya daya beli masyarakat sehingga aksesnya terhadap bahan pangan secara ekonomi juga menurun; serta (c) permasalahan keamanan pangan karena penggunaan bahan yang tidak aman seperti formalin, boraks, pewarna, sintesis yang berbahaya bagi kesehatan.



Hadirin yang berbahagia,

Orientasi pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan tidak dapat dilepaskan dari perubahan lingkungan strategis pangan global. Perubahan lingkungan strategis pangan global telah mengarah kepada semakin terbukanya dan menyatunya pasar pangan domestik dengan pasar pangan internasional.

Keterbukaan ekonomi dan perdagangan global tersebut menuntut kita untuk memperhatikan perkembangan perdagangan internasional sebagai bagian dalam pengelolaan kebijakan pertanian dan pangan nasional. Indonesia mempunyai keunggulan mutlak (*absolute advantage*) sekaligus keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai Negara agraris dan maritime, yang merupakan potensi sumber pangan yang sangat besar. Kedua keunggulan tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Dengan



begitu, perekonomian yang dikembangkan di Indonesia memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestic, berkelanjutan, memiliki kemampuan bersaing serta berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, ketika Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melakukan berbagai hal untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan internasionalnya, banyak Negara maju ternyata tidak mengurangi subsidiya terhadap sector pertanian, bahkan justru semakin proteksionis. Oleh karena itu Negara-negara maju dapat memasok pasar dunia dengan harga bahan pangan dan produk pertanian yang lebih rendah. Selain itu, Negara-negara tersebut juga memberlakukan berbagai bentuk hambatan perdagangan ke negaranya. Dalam situasi demikian usaha pertanian dalam negeri dihadapkan pada yang tidak adil dan seimbang.

Menyikapi keadaan perdagangan internasional yang kurang menguntungkan (*unfair trade*) tersebut, maka kebijakan pembangunan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan



harus menerapkan kebijakan *protection and promotion*. Kebijakan promosi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk pangan domestic. Kebijakan proteksi diperlukan untuk memberikan "*the same playing field*" kepada para petani kita. Kebijakan promosi dan proteksi ini harus dilakukan secara simultan, karena dalam era perdagangan yang unfair tadi, hanya melalui proteksi kita dapat melakukan promosi pengembangan pangan nasional. Apabila kebijakan promosi dilakukan tidak bersama-sama dengan proteksi maka petani kita, yang pada umumnya adalah petani kecil tidak akan mampu bersaing.

Sebagai perwujudan dari kebijakan tersebut, pemerintah telah melakukan: (a) kebijakan eksternal, antara lain dengan menyusun konsep *Strategic Product/Special Safeguard Mechanism (SP)* untuk beberapa komoditi pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, gual. World Trade Organization (WTO) dapat menerima konsep tersebut, dan Indonesia menjadi leader kelompok G-33, untuk memperjuangkan kepentingan Negara-negara berkembang dalam forum WTO,;



(b) melakukan penyesuaian tariff bea masuk beras dari Rp. 430 menjadi Rp. 450/kg, jagung dari 0% menjadi 5%, kedele dari 0% menjadi 10%, dan gula dari Rp 700 menjadi Rp 790/kg, dan terakhir menjadi Rp. 530/kg; (c) penerapan kebijakan non tariff barrier (tataniaga, karantina, kehalalan, dsb) termasuk pengaturan impor (beras) pada periode tertentu; serta (d) pemberian insentif produksi lainnya (subsidi pupuk dan benih serta penetapan harga pembelian pemerintah/HPP).

Khusus mengenai kebijakan perberasan, melalui Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan, telah dilakukan penyempurnaan paket kebijakan perberasan yang komprehensif, yang berpihak pada petani konsumen, terutama kelompok miskin dan rawan pangan. Pokok-poko kebijakan perberasan nasional tersebut adalah :

1. Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi, kualitas padi, dan produksi padi nasional termasuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dalam rangka pendapatan petani.
2. Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan



ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

3. Memberikan dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pasca panen gabah/beras, guna meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil.
4. Melaksanakan kebijakan harga pembelian gabah dan beras oleh pemerintah.
5. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.
6. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitas harga beras dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah.
7. Menetapkan kebijakan impor dan ekspor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.

Peserta Seminar yang berbahagia,

Menindaklanjuti Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang telah dideklarasikan oleh



Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudoyono di Jatiluhur pada bulan Juni tahun 2005 lalu dan dalam rangka memantapkan pembangunan ketahanan pangan nasional, Dewan Ketahanan Pangan pada saat ini sedang menyelesaikan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Dalam kebijakan tersebut, pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan, untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional sepanjang waktu dan merata; melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Dalam aspek ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air; (b) menjamin produksi pangan utamanya dari produksi dalam negeri; (c) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; dan (d) meningkatkan kapasitas



produksi nasional dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan.

Dalam aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk : (a) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan, sehingga efisiensi perdagangan dapat ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan akibat distribusi yang tidak efisien; (b) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah; dan (c) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi pangan, serta peningkatan nilai tambah.

Dalam aspek konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peranserta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai



implementasi pemenuhan hak atas pangan; (c) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; dan (d) semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dsb).

Dengan arah dan kebijakan ketahanan pangan tersebut, diharapkan kemandirian pangan nasional akan terwujud, yang antara lain: ditandai oleh indikator secara mikro, yaitu pangan terjangkau secara langsung oleh masyarakat dan rumah tangga, maupun secara makro yaitu pangan tersedia, terdistribusi dan dikonsumsi dengan kualitas gizi yang berimbang, pada tingkat wilayah dan nasional.

Hadirin, peserta Seminar yang saya hormati,

Demikian beberapa pokok pikiran mengenai pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Saya mengharapkan dari Seminar dengan tema “Kebijakan di Bidang



Pertanian untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” ini dapat dihasilkan rumusan alternative kebijakan pembangunan pertanian menuju kemandirian ketahanan pangan nasional. Semoga Allah SWT selalu bersama kita. Selamat mengikuti Seminar ini.

Terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



PIDATO SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN PADA ACARA
PERKEMAHAN WIRAKARYA NASIONAL 2006

Gorontalo, Tanggal 16 s.d 22 Februari 2006

Yang terhormat

**Gubernur Gorontalo, Kakak Fadel Muhammad, beserta pejabat
pemerintah Provinsi Gorontalo**

**Bupati Gorontalo, Kakak David Bobihoe Akib, dan Pejabat
pemerintah Kabupaten Gorontalo**

**Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kakak Azrul Azwar
dan rekan kerja**

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, Kakak Abdulloh Paneo

Pimpinan Saka Taruna Bumi Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah.

Adik adik peserta Perkemahan Wirakarya Nasional Tahun 2006

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh



Salam Pramuka

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan kenikmatan yang tak terhingga banyak dan ragamnya, termasuk nikmat kesehatan, dan nikmat keimanan, sehingga pada sore hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Perkemahan Wirakarya Nasional Tahun 2006, di daerah sentra produksi jagung nasional, daerah yang subur dan penuh panorama yang indah yakni Gorontalo.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten yang telah memfasilitasi kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional Tahun 2006, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan insya Alloh mempunyai daya guna yang tinggi bagi generasi penerus kita.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Kwarnas dan Kwarda Gerakan Pramuka serta pimpinan Saka



Tarunabumi yang telah mempunyai inisiatif dan motivasi tinggi untuk melaksanakan kegiatan tingkat nasional ini. Ucapan terima kasih tidak lupa, juga saya sampaikan kepada masyarakat Gorontalo, khususnya adik-adik pramuka yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang tidak dapat dilupakan serta menjadi kenangan tersendiri.

Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, membawa saya pribadi untuk larut dalam kenangan yang tidak terlupakan pada kurun waktu 25 tahun yang lalu, yakni kegiatan semapor yang mengantarkan saya berteman dengan Nona Rossy, Tidak tahunya nona tersebut, sekarang ini menjadi pasangan ideal saya. Itulah kenangan paling manis saya sewaktu aktif pada gerakan pramuka, tetapi saya ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak menjadikan kegiatan nasional ini untuk mencari pasangan, atau kenalan akrab pramuka, namun kalaulah setelah sekian tahun bertemu kembali, yach itulah namanya jodoh, yang harus kita terima dengan senang dan ikhlas.



Kakak- kakak dan adik-adik yang saya hormati

Perlu kita sadari bersama bahwa kegiatan berorganisasi bagi generasi muda seperti gerakan pramuka, sangatlah bermanfaat baik segi aktivitas, kekeluargaan, maupun latihan kepemimpinan. Banyak para aktivis gerakan pramuka mulai tingkat siaga, penggalang, penegak dan pandega terdahulu, selanjutnya sekarang ini menjadi pimpinan tingkat nasional, seperti Presiden kita, Kakak Dr Susilo Bambang Yudhoyono, atau Ketua MPR, Kakak Dr. Nurhidayat Wahid. Jiwa kekeluargaan yang ditanamkan pada gerakan pramuka juga menjadi andil persuasive untuk mereda segala macam kerusakan moral dan konflik generasi muda, bahkan menjadi modal pengokohan persatuan bangsa kita dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Demikian juga aktivitas gerakan pramuka yang dikenal tak pernah sepi dengan kreativitas, dan motivasi baik kegiatan kesehatan jasmani, intelektual, maupun spiritual.

Dalam hubungan dengan kegiatan gerakan pramuka, kami menghimbau kepada ketua Kwarnas, Kwarda , kwarcab



dan kwaran gerakan pramuka untuk dapat melakukan sinergisme program dan kegiatan dengan Departemen Pertanian dalam rangka melahirkan generasi muda yang peduli terhadap kegiatan pertanian. Perlu kita sadari bahwa petani kita seperti petani jagung di Gorontalo, yang aktif sekarang ini, rata-rata usia mereka adalah 50 tahun, syukur alhamdulillah mereka sangat bersemangat, namun tenaga mereka akan dimakan dengan usia. Inilah yang dimaksud dengan agging generation.

Disamping permasalahan tersebut, minat generasi muda untuk sekolah atau kuliah di bidang pertanian menunjukkan kecenderungan menurun, demikian juga minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Apabila hal ini tidak ditangani dengan serius, maka akan terjadi *lost farmers generation*. Selanjutnya saya berharap kecenderungan generasi muda Gorontalo justru menunjukkan minat yang sebaliknya, yakni generasi muda yang menjadi garda terdepan untuk mempertahankan sentra produksi jagung tingkat nasional yang dapat mengantarkan Gorontalo menjadi Agropolitan jagung tingkat internasional.



Mendasari bayang-bayang agging farmers generation, dan lost farmers generation, sekali lagi saya mengharapkan kakak-kakak ketua kwarnas dan kwarda, kwarcab dan kwaran untuk mengagendakan kegiatan kecintaan dunia pertanian pada kegiatan kepramukaan setiap tingkatan gerakan pramuka. Alhamdulillah kakak ketua kwarnas dan kwarda telah tanggap dengan harapan saya, dengan kegiatan penanaman jagung seluas 100 ha pada acara perkemahan Wirakarya tahun 2006 di Gorontalo. Semoga kegiatan ini menjadi contoh bagi kegiatan kepramukaan ditempat lain.

Sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, Departemen Pertanian akan mengupayakan pengangkatan tenaga penyuluh, dengan program satu desa satu penyuluh. Dengan jumlah desa 45.000, maka akan memberikan peluang angkatan kerja di bidang penyuluhan yang cukup banyak. Adapun kriteria pendidikan yang dipersyaratkan bagi penyuluh pertanian adalah lulusan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) atau Sekolah Menengah Kejuruan bidang keahlian pertanian yang telah dilatih.



Tepuk Pramuka

Kakak- kakak, dan adik-adik yang saya hormati

Kita harus bangga dan bersyukur kepada Alloh Swt yang menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi jagung, menurut kakak Fadel Muhammad, produksi jagung Gorontalo pada tahun 2006 ini ditargetkan menjadi 13 juta ton dari 12 juta ton tahun 2005. Dengan target tersebut akan menurunkan impor jagung yang pada tahun 2006 masih menunjukkan angka 400 ribu ton. Selanjutnya saya mendukung program Dewan Jagung Nasional, yang mentargetkan Indonesia akan swasembada jagung pada tahun 2007. Target tersebut bukanlah khayalan, mengingat Sulawesi memiliki lahan seluas 1,6 juta hektar yang sangat cocok untuk pengembangan budidaya jagung.

Sebagai upaya mendukung program sentra jagung nasional, kakak Fadel Muhammad telah melakukan pengamanan jagung seperti penetapan harga dasar jagung, pemasaran, dan pengolahan jagung. Selain itu Kakak Fadel Muhammad juga telah melakukan kerjasama antar Provinsi, antar Pulau bahkan dengan



manca negara seperti Korea dan Malaysia.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya menghimbau dalam memacu peningkatan produksi jagung, tidak melupakan nasib petani jagung itu sendiri, dan pelestarian kesuburan lahan jagung itu sendiri. Petani jagung diharapkan dapat merasakan kenikmatan dan kesejahteraan dari apa yang diperbuat selama ini, sehingga dapat mensekolahkan putra putrinya dengan status yang lebih tinggi, memenuhi makanan sehat, baik dan halal, mempunyai dana kesehatan yang cukup, dan dapat melakukan rekreasi keluarga dengan bahagia. Sedang kesuburan lahan merupakan hal yang harus dipertahankan, mengingat generasi muda kita masih menginginkan lahan untuk mempertahankan swasemada jagung.

Tepuk Pramuka

Kakak- kakak dan adik-adik yang saya hormat

Pada akhir sambutan ini, saya ingin mengajak semuanya untuk menghargai petani. Hanya saja pesan ini merupakan



pesan leluhur kita, yakni apabila memakan makanan, baik jagung, nasi, singkong maupun daging ayam, atau produksi pertanian lainnya, hendaknya jangan sampai terdapat sisa, karena mungkin saja sisanya itu adalah yang barokah. Disamping itu, saya mengharapkan agar setiap kegiatan kantor hendaknya menggunakan produksi petani kita sendiri.

Siapa yang akan memanfaatkan produksi petani kita, ya kita sendiri. Akhirnya selamat berkemah dan berkarya.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh.

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**KEYNOTE ADDRESS OF
THE MINISTER OF AGRICULTURE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AT
THE INTERNATIONAL SEMINAR AND WORKSHOP OF
MAIZE**

GORONTALO, 15 FEBRUARY 2006

Assalaamu'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh

- **Honorable Minister of Science and Technology,**
- **Governor of Gorontalo,**
- **Distinguish guests and speakers,**
- **Ladies and Gentlemen**

It is a great privileged for me to be here with you in this important occasion. It is indeed a matter of great honor for me to be with you on the occasion of this workshop, which is planned to review, discuss, and promote partnership in the



development, utilization, and trade of maize. The initiative to organize this event has come from Gorontalo, a province with a good example of focused development program. On behalf of the Ministry of Agriculture, I would like to acknowledge a significant role that has been played by Pak Fadel Muhammad, Governor of Gorontalo in promoting maize development in this province. Pak Fadel Muhammad is also very active, as the chairman of “*Dewar Jagung Nasional*”, to promote maize production in the country.

Ladies and Gentlemen,

Maize has shown its important role in Indonesia economy. Its contribution to the country's GDP has steadily increased. In 2000, maize contribution to the national economy was Rp 9.4 billion and became double in the year 2003. The crop has wide adaptability. It has an important component in the cropping systems of this country. It is grown from lowland altitude to highland elevation, under upland and lowland paddy field after rice. Maize crop performs well



under shaded canopy of coconut trees, and also under other industrial trees.

Traditionally, maize is one of the basic diet in many areas in Indonesia, including in this island. The crop is a staple for people in eastern part of the countries like Madura, Flores, Sumba, and Timor. It continues to be the staple diet for the local population in certain areas. Besides its use as food grain, maize is an important contributor to feed grain and livestock forage, both as green, as well as dry stalks. More recently, maize grain has emerged as an important industrial raw material and is being processed for the manufacture of starch, its by products, and also as main component of the livestock feed, particularly for the rapidly growing poultry industry.

Despite recent advances in increasing domestic maize production during the last fifteen years, Indonesia still need to import more than one million ton of maize per year. In 1991, we produced only 6.26 million ton and just last year we were able to harvest 12.1 million ton. That was still not adequate to



meet our increasing need for feed and food industries. The increasing and steadily important of maize is mainly due to increased demand for feed and food industries. During the last five years, the need of maize for feed and food industries increased at the rate of 10% to 15% per year. If there is no extra effort in increasing production, we will have to keep importing this commodity. We know that maize importation is getting more expensive and the availability of maize in the world market is declining.

Distinguish Guests, Ladies and Gentlemen,

The exploding demand for maize presents an urgent challenge for us. At the global level, the proportion of maize demand met through imports is not expected to change. For us, particularly with large population, the accelerating demand for maize must be met by domestic production with a higher rate of growth. We do hope to be self sufficient in maize beginning in 2007. We even intend to supply and export maize to our neighboring countries like Malaysia and South Korea.



Our target is to produce 14,5 million ton grain in 2010 and will increase up to 18 million ton in 2015. This production target is more than what we need for projected domestic consumption. Then, the question is how can we achieve this target ?

Maize has been chosen as one of prioritized food crop under Government Revitalization Program. This means maize is an important crop for the country. Our scientists have indicated that Indonesia has a comparative advantage in producing maize both for domestic consumption and for exporting to supply the regional market, particularly for the Asean countries. They also have assured me that the opportunity to increase our maize production is great. Therefore, I have asked my staff to formulate a realistic plan and program to achieve this target.

A road map for maize development has been developed, both for increasing productivity and harvested areas. One of the program is to increase the use of improved varieties particularly hybrids in the high productive areas and open pollinated varieties for the less favorable environment. The target is 50% of areas are planted to hybrids in the year 2010.



With the adoption of other improved technology, we would like to get the average yield at national level of above 4.0 t/ha within the next five years. The current level of national productivity (3.35 t/ha) is far from the yield potential of 6-8 t/ha of composite varieties and 9-12 t/ha of hybrid ones.

Ladies and Gentlemen,

Despite the increasing role of some private seed companies, the adoption of improved varieties both open pollinated and hybrids is still low. I would like to ask to private seed companies to play a grates role in providing more quality seeds. Unfortunately, on the other hand, publicly bred varieties particularly hybrids are not yet grown by farmers. The supply of quality seeds, I understand, has been a major constraint on maize productivity development. There has been very limited national seed growers which take advantage of improved hybrids bred by government research institute. With this regard, I would like to see a manually collaborative partnerships between the maize research institutes with the national seed



companies. This will also create more employment opportunity and income for our farmers.

We can further enhance adoption of other improved technology such as appropriate fertilizers application, better management of land and water resources.

As for the increased area there are prospective lands under both irrigated and rain fed faddy field for maize planting after rice. It is estimated that there is about 450 thousands ha for this ecosystems. In Java, recent reports indicated that more maize is being planted under rice field during dry season. To some extent, maize has been replacing soybean. And there are large unused areas under dry land and upland ecosystems outside Java. Based on the land availability and suitability, we estimate that there is near one million ha area potential for maize expansion. Not yet to consider the wish come out from this island: to plant one million hectare of maize in Sulawesi within the next five years under the Celebes Corn Belt work plan. With this regard, I appreciate very much the effort by



Dewan Jagung National (National Corn Board) to work with the national and regional governments and private sectors in increasing national maize production. Their programs seem to be realistic and they have integrated components of maize producers, consumers, business community, and more importantly the local governments. This is in line with the program of the Ministry of Agriculture.

So, let us work together to promote increased maize production. Recently, a team consists of scientists and officials from Ministry of Agriculture has started to work together with concerned businessmen under National Chambers of Commerce. The idea is to formulate such a realistic and workable work plan and activities. I strongly encourage this partnerships to work harder and more intensive.

In the end, ladies and gentlemen, I hope the deliberation of this seminar will generate and promote a well thought and integrated maize development program for enhancing the production of maize.



Thank you very much.

May God bless us all,

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia,

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
pada
SEMINAR NASIONAL
“DIVERSIFIKASI UNTUK Mendukung KETAHANAN
PANGAN NASIONAL”
LUSTRUM V UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

YOGYAKARTA 18 FEBRUARI 2006

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

Saudara Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang
saya hormati,

Saudara Ketua HKTI,

Saudara Direktur PT ISM Bogasari Flour Mills,

Saudara Ketua Pusat Studi Pembangunan IPB,

Para Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta,

Para peserta seminar dan hadirin yang berbahagia.



Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti Seminar Nasional dengan tema “Diversifikasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka LUSTRUM V Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Saya menyambut baik diselenggarakannya Seminar Nasional Diversifikasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional ini. Penyelenggaraan seminar semacam ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penganeka-ragaman pangan melalui partisipasi aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stake holders*), yang secara aktif berperan dalam pengembangan penganekaragaman pangan.

Kami menghargai dan menyambut baik prakarsa ini, dan memberikan dukungan agar upaya tersebut menjadi upaya



bersama dari masyarakat dan pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan yang antara lain mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Saudara-saudara yang saya muliakan,

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sepenuhnya menjadi hak azasi manusia.

Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, sehat dan halal merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumberdaya manusia yang berkualitas.



Sumberdaya manusia merupakan unsur terpenting untuk pembangunan, karena sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapus kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutu dan bergizi, sehat dan halal tersedia setiap saat, cukup, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan, sehingga pangan yang diedarkan dan atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesejahteraan jiwa manusia.



Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia harus selalu diupayakan untuk dicukupi dan disediakan setiap waktu, di setiap rumah tangga. Pangan yang kita konsumsi disamping sebagai sumber karbohidrat seperti beras, umbi-umbian dan serelia lainnya, harus juga sebagai sumber protein, vitamin dan mineral seperti ikan, daging, telur, buah, sayur dan bahan pangan lainnya. Dengan semakin lengkapnya pangan yang dikonsumsi, maka pangan akan bermanfaat tidak saja sebagai sumber tenaga dan pertumbuhan, namun juga akan bermanfaat untuk kesehatan, daya tahan tubuh dan bahkan juga untuk kecerdasan.

Saudara peserta seminar yang berbahagia,

Berdasarkan data Susenas, dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa konsumsi pangan tingkat rumah tangga baik energi maupun protein mengalami peningkatan. Dari data yang ada konsumsi energi dari 1.851 kkal/kap/hari pada tahun 1999 menjadi 1.997 kkal/ kap/hari pada tahun 2005. Sedangkan dalam hal mutu tampak terjadi perubahan ke arah yang diharapkan yaitu: terjadi penurunan konsumsi pangan padi-



padian yang cukup berarti yaitu dari 346,30 gram /kapita/hari tahun 1999 menjadi 319 gram/kapita/hari tahun 2005 atau 126,30 kg/kapita/tahun menjadi 116,44 kg/kapita/ tahun. Disamping itu, terjadi peningkatan konsumsi beberapa kelompok pangan lainnya yaitu pangan hewani meningkat dari 59,30 gram/kapita/hari tahun 1999 menjadi 87,40 gram/kapita/hari tahun 2005 atau 28,84 kg/ kapita/tahun menjadi 49,64 kg/kapita/tahun, sayuran dan buah-buahan meningkat dari 162,30 gram/kapita/hari pada tahun 1999 menjadi 223,40 gram/ kapita/hari pada tahun 2005 atau 74,83 kg/kapita/ tahun menjadi 91,25 kg/ kapita/tahun.

Hasil yang kita capai tersebut di atas tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dan sedang dilaksanakan dalam mendukung diversifikasi pangan yaitu: (1) peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan, penggalan potensi pangan lokal maupun tradisional dan pemanfaatan pekarangan, pengembangan produk pangan olahan serta peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan; (2)



peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, dan seimbang; (3) pengembangan teknologi produksi dan pengolahan bahan pangan; (4) usaha Peningkatan nilai tambah pangan lokal maupun tradisional; (5) internalisasi dan sosialisasi, promosi dan publikasi tentang penganekaragaman pangan; (6) pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pangan dan (7) pendidikan bagi anak – anak usia dini (TK dan SD) tentang penganekaragaman pangan, termasuk pengenalan atas bahan pangan dan makanan yang berasal dari sumberdaya dan budaya lokal.

Disamping keberhasilan tersebut di atas, masih banyak permasalahan yang kita hadapi dalam pemantapan diversifikasi pangan yaitu: (1) sosialisasi dan promosi pangan lokal dan olahannya masih rendah; (2) pemanfaatan pangan lokal belum optimal dan keberadaannya belum terjamin; (3) produk pangan lokal dan olahannya masih rendah pada mutu, keamanan dan kemasannya; (4) SDM yang peduli dan mampu masih terbatas dalam usaha pengolahan pangan lokal dan (5) konsumsi pangan kurang bergizi dan seimbang.



Mengingat masih banyaknya permasalahan yang kita hadapi dalam pemantapan diversifikasi pangan, kebijakan pengembangan konsumsi diarahkan; (1) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (2) mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan, (3) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/ pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita dan gizi buruk).

Hadirin/Hadirat yang saya hormati,

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional adalah melalui diversifikasi pangan, yaitu proses pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis pangan saja, tetapi memanfaatkan macam-



macam bahan pangan. Pengembangan produk pangan tersebut mencakup aspek produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan di tingkat rumah tangga.

Beranekaragaman pangan yang tersedia terutama ditentukan oleh produksi pangan dan perkembangan teknologi pengolahan pangan yang dapat menghasilkan bermacam produk pangan yang beranekaragam. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang serta meningkatnya kemampuan daya beli untuk mengakses pangan, akan mendorong keberhasilan upaya penganeekaragaman pangan. Sumber penyediaan pangan tersebut diutamakan berasal dari produksi pangan dalam negeri atau pangan lokal.

Untuk mewujudkan hal ini, salah satu upaya yang ditempuh adalah meningkatkan diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan lokal dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, kearifan dan budaya lokal. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 68 tahun



2002 tentang Ketahanan Pangan, diversifikasi pangan dilakukan dengan: (1) meningkatkan keanekaragaman pangan, (2) mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan dan (3) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

Pasal 9 pada PP No. 68 tahun 2002 dinyatakan bahwa peningkatan diversifikasi pangan dapat melalui pengembangan teknologi pengolahan pangan. Pengembangan teknologi pengolahan pangan ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi pembina teknis dan pelaku usaha dalam menciptakan dan menerapkan teknologi tepat guna agar terjadi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pangan dan olahannya. Sedangkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan diversifikasi pangan adalah tanggung jawab kita bersama.



Para peserta seminar yang saya muliakan,

Produk pangan yang aman, bermutu, halal dan sehat sebenarnya sudah lama menjadi tuntutan masyarakat konsumen dan akhir-akhir ini tuntutan tersebut semakin luas. Tuntutan masyarakat tersebut sebenarnya sudah wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Yang dimaksud halal dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya, termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan yang dalam pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Agama Islam.

Masalah akhir-akhir ini yang perlu menjadi perhatian kita lebih serius adalah dengan maraknya pemberitaan media



massa tentang bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti penggunaan formalin, borak dan lain-lain untuk bahan pengawet makanan, serta penggunaan rhodamin B untuk pewarna dan lain sebagainya. Dengan adanya masalah ini saya menghimbau dan mengajak kita semua agar berhati-hati dan selalu mewaspadaai terhadap penggunaan bahan yang berbahaya dan terlarang ini.

Saudara peserta seminar yang saya hormati,

Melalui seminar ini, diharapkan dapat didiskusikan secara mendalam terhadap pengembangan diversifikasi pangan untuk memantapkan ketahanan pangan nasional melalui melalui partisipasi aktif seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dalam seminar ini, diharapkan terhimpunnya berbagai masukan dari narasumber dan peserta sebagai bahan untuk penyempurnaan strategi pengembangan diversifikasi pangan.



Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah berupaya menyelenggarakan seminar nasional hari ini.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Pebruari 2006

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**OPENING ADDRESS OF THE MINISTER OF
AGRICULTURE
AT THE SEMINAR OF
DEVELOPMENT IN BIOFUEL PRODUCTION AND
BIOMASS
TECHNOLOGY**

Jakarta, 21 February 2006

**Prof. Yasuyuki Sagara of the University of Tokyo,
Prof. Ahmad Anshori Mattjik, Rector of IPB,
Prof. Komaruddin Abdullah of IPB,
Distinguished Guests and Participants,
Ladies and gentlemen.**

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

First of all let us pray to Allah the Almighty for His blessings bestowed to all of us that today we can all be here to attend the seminar on the ***Development in Biofuel/ Production***



and Biomass Technology organized jointly by Bogor Agriculture University (IPB) and the University of Tokyo, Japan. The important issues presented in this seminar is indeed in line with the common global problems of the increase of international crude oil prices from less than 30 USD per barrels about five years ago to more than 60 USD per barrels since last year. What are the roles of Agriculture sector in reducing this burden to our society due to high cost of energy? This is a very challenging question as the problem has multiple impacts on society livelihood.

Ladies and gentlemen,

The Government of Indonesia (GOI) has published the Presidential Decree (Perpres) Number 1, 2006 dated 25 January 2006 on National Energy Policy. In this policy, it is expected that the sources of energy mix of Indonesia will be balanced, which are now depending mainly (more than 50%) on fossil-based fuels. In the future, says in 2025, it is expected that the contribution of energy from fossil-based fuels could be reduced to be less than 20%, while from new and renewable



energy sources such as biomass, water, wind, solar, and nuclear are increasing for more than 5%, of which biofuels will contribute more than 5%.

To achieve those important goals, GOI has also published the President's Order (Inpres) Number 5, 2006, on provision and the use of biofuels as other sources of energy. The Ministry of Agriculture has been assigned to be responsible for four main tasks:

1. driving the provision of the plants producing raw materials of biofuels, including their seeds,
2. providing extension on the development of plants producing raw materials of biofuels,
3. facilitating the provision of the seed and planting materials of plants producing raw materials of biofuels, and
4. integrating the development and post harvest activities of the plants producing raw materials of biofuels.

The Ministry of Agriculture has taken several steps to implement both the Presidential Decree and the President's



Order. Directorate General of Estate Crops will facilitate the first three assignments mentioned above, while the Directorate General of Processing and Marketing of Agriculture Products will facilitate the integration of the development activities and post harvest activities of the plants producing raw materials of biofuels. In order to provide various aspects of technologies related to biofuels, our Agency for Agriculture Research and Development (AARD) continue to carry out R&D, especially on searching and screening the potential plants producing raw materials of biofuels in Indonesia.

Dear Guests and participants,

Ministry of Agriculture has been providing continuous support and facilitation to provide enough food supply for ever growing population, and inevitably the future agriculture sector is also expected to provide renewable energy such as biofuels. For Indonesia, the development of biofuels is relatively a new area, and we have limited knowledge and experience. For this reason, we have to learn from other



countries, which succeed in using biofuels as sources of renewable energy.

As the second largest palm oil producing country in the world, after Malaysia, in term of raw material availability, Indonesia has basically ready to develop biofuels, especially Crude Palm Oil (CPO) based biodiesel. Nevertheless, at the same we have to manage the optimum balance between the need of CPO as raw material for cooking oil and other foods, and as raw material for biodiesel.

Besides CPO, the potential plants producing raw material of biodiesel are *Jatropha curcas* (Physic nut), sweet potato, cassava, sorghum, and sugar cane. However, we still face many handicaps to be considered for planning, such as provision of improved planting materials, continuous supply of raw materials, and farmer institutions.

Ladies and gentlemen,

I believe this seminar, as other seminars organized on biofuels, will help the government in improving the development planning of biofuels in Indonesia. I hope this seminar provides policy recommendations on the development of Biofuels in the future.

Beside that, opportunities offered from research cooperation with other countries or international institutions must be well managed in order to develop technology innovations, especially on biofuels. The cooperation should be built on equal and mutual benefits basis. Under this understanding, we can move forward and hand-in-hand with our worldwide partners. I wish you all to have fruitful discussions.

Finally, with Bismillahirrahmanirrohiim, or in the name of Allah SWT, I declare the seminar of the "Development in Biofuel Production and Biomass Technology" in officially opened.



Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Minister of Agriculture,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



“KEYNOTE SPEECH”
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
“FORUM NASIONAL PEMBAHARUAN AGRARIA
DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN”

Jakarta, 21 Pebruari 2006

Assalamu’alaikum Warakhmafullahi Wabarakatuh,

Yth Sdr. Pimpinan Komisi II DPR RI

Yth Sdr. Pimpinan Komisi IV DPR RI

Yth. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri

Yth. Sdr.Kepala Badan Pertanahan Nasional

Yth. Sdr. Para Deputi lingkup Badan Pertanahan Nasional

Yth. Sdr. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian

Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria

Yth Sdr. Para Pejabat Departemen Teknis dan Lembaga Terkait

Yth Para Pengurus Organisasi Profesi dan Organisasi Petani

Yth. Para Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat



Hadirin Sekalian yang Saya Hormati

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti Forum Nasional Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan.

Forum Nasional Pembaharuan Agraria dan Pembangunan Pedesaan yang diselenggarakan atas kerja sama Departemen Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ini saya pandang penting dan memiliki nilai strategis. Yang pertama karena forum ini akan menilai konsep bahan *Country Report* Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan yang akan disampaikan delegasi Indonesia, di *international Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD)* pada 7 – 10 Maret 2006 di Brazil,. Yang kedua forum ini diharapkan dapat melakukan identifikasi berbagai inisiatif dan program-program pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan di Indonesia, yang akan dan



telah dijalankan selama ini baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi *civil society*. Serta yang ketiga forum ini akan membuka pemahaman tentang pentingnya pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan di Indonesia.

Saudara-Saudara Peserta Forum Nasional yang saya hormati,

Pada tahun 1979, *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah menyelenggarakan *World Conference on Agrarian Reform and Rural Development* di Roma, dan Indonesia telah mengirimkan sebuah delegasi besar yang waktu itu dipimpin oleh Menteri Pertanian. Sejak pertemuan FAO 1979 hingga saat ini, tidak dipungkin masih terjadi proses hambatan yang signifikan untuk mewujudkan pembaruan agraria di Indonesia, yang tercermin antara lain dari ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian serta masih terbatas dan lemahnya akses petani kepada sumber daya lahan.



Terkait dengan sumber daya lahan pertanian, pembangunan pertanian swat ini dihadapkan kepada masalah dan sekaligus tantangan, antara lain :

1. Semakin bertambahnya jumlah rumah tangga petani (RTP) gurem yang menguasai lahan dibawah 0,5 ha. Jumlah petani gurem telah bertambah dari 10,8 juta KK pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta KK pada tahun 2003 yang berarti meningkat 2.4 % per tahun.;
2. Laju konversi lahan pertanian dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data BPS (tahun 2004), telah mencapai : (1) alih fungsi lahan sawah ke non sawah = 187.720 ha per tahun, dengan rincian : (a) alih fungsi ke non pertanian = 110.164 ha per tahun dan (b) alih fungsi ke pertanian lainnya = 77.556 ha per tahun; (2) alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian, sebesar 9.152 ha per tahun;
3. Belum terjaminnya kepastian hak atas tanah petani (*land tenure*), sehingga posisi petani dalam mengakses sumber pembiayaan perbankan sangat lemah
4. Degradasi lahan pertanian akibat pengelolaan lahan yang tidak menerapkan kaidah teknis konservasi tanah dan air



mengakibatkan jumlah lahan kritis di Indonesia makin bertambah. Pada tahun 1992 luas lahan pertanian kritis di luar kawasan hutan mencapai + 18 juta hektar, pada tahun 2005 meningkat menjadi $\pm$ 25 juta hektar .

5. Lahan terlantar (*idle land*) yang terjadi karena masalah landreform cukup luas, apabila masalah ini dapat dipecahkan maka peluang untuk perluasan areal pertanian semakin terbuka lebar.

Menyikapi masalah penyusutan lahan pertanian produktif yang sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, apabila tidak segera diambil langkah kebijakan yang tepat untuk mengendalikannya, maka ketergantungan Indonesia terhadap pasokan pangan dan luar akan semakin meningkat dan ketahanan pangan nasional dapat terganggu.

Ada kecenderungan, alih fungsi lahan pertanian semakin sulit dikendalikan mengingat adanya anggapan bahwa sektor pertanian sudah tidak memiliki daya tank, karena nilai *land rent*



usaha pertanian jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai *land rent* untuk usaha non pertanian (misalnya properties, industri/ pabrik).

Faktor-faktor yang menyebabkan cepatnya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain:

1. Faktor kependudukan : pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf kehidupan masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan tanah akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat.
2. Kebutuhan tanah untuk kegiatan non-pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan tanah yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah.
3. Faktor ekonomi, yaitu tingginya tingkat keuntungan (*land rent* atau rentabilitas lahan) yang diperoleh sektor non-pertanian dan rendahnya *land rent* dari sektor pertanian itu



sendiri. Rendahnya insentif untuk berusaha disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya, seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian tanah pertaniannya.

4. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian sehingga tidak memenuhi skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
5. Degradasi lingkungan, yang berdampak kepada rusaknya tatanan hidrologi menyebabkan kuantitas dan kontinuitas peyediaan air irigasi terutama di musim kemarau menjadi langka sementara di musim hujan menjadi bencana banjir.
6. Pembangunan di daerah yang lebih mengutamakan pembangunan pada sektor yang menjanjikan keuntungan jangka pendek guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal



ini antara lain tercermin dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non-pertanian, serta diabaikannya prinsip prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

7. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada. Kewajiban untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya dan mencegah kerusakannya telah diatur dalam Pasal 15 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria), yang dilengkapi dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) UUPA. Selanjutnya, ketentuan terhadap pelanggaran peruntukan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wlayah masih belum ada sanksi hukumnya.

Sampai saat ini telah banyak peraturan per undang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian,



namun demikian peraturan peraturan tersebut belum mampu secara efektif mengendalikan terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Oleh karena itu diperlukan adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan secara serius, konsisten dan berkelanjutan.

Saudara para peserta Forum Nasional yang berbahagia,

Departemen Pertanian telah menetapkan 3 (tiga) program pembangunan pertanian tahun 2005 — 2009, yaitu

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, yang bertujuan untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan, melalui ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan, akses masyarakat terhadap pangan, diversifikasi pangan, dan keamanan pangan (sehat dan halal).
2. Program Pengembangan Agribisnis, dimaksudkan untuk memfasilitasi 1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk



pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional; 2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani.

Secara umum sasaran pembangunan pertanian jangka panjang (2025), adalah terwujudnya pertanian industrial yang berdaya saing; (b) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri; (c) tercapainya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian; dan (d) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian.

Untuk mensinergiskan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Indonesia, pada bulan Juni 2005



Presiden RI telah mencanangkan program revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Revitalisasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi. Terkait dengan aspek keagrariaan dalam RPPK tersebut, pemerintah berencana untuk mewujudkan lahan pertanian abadi seluas 15 juta hektar di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan target lahan pertanian abadi tersebut saya menilai mustahil tercapai tanpa adanya program reforma agraria.

Dalam rangka revitalisasi pertanian, pengembangan lahan pertanian dapat ditempuh melalui : (a) reformasi keagrariaan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air serta meningkatkan rasio luas lahan perkapita, (b) mengendalikan konversi lahan pertanian dan pencadangan lahan abadi untuk pertanian sekitar 15 juta hektar, (c) fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru), serta (d) penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan sebagai penyedia lapangan kerja dan



peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.

Untuk itu, salah satu strategi pembangunan pertanian ke depan adalah pembangunan agroindustri pedesaan. Pengembangan agroindustri pedesaan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pedesaan melalui pengembangan agroindustri pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri pedesaan diarahkan untuk : (a) mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya, (b) mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, dan (c)



mengembangkan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Saudara-saudara sekalian Yang Kami Hormati

Khusus untuk Departemen Pertanian, terdapat kesenjangan antar kewenangan yang diberikan secara institusional yang relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk mewujudkan pembangunan pertanian. Program landreform merupakan prasyarat pokok untuk pembangunan pertanian, karena akan memperbaiki struktur penguasaan sehingga layak secara ekonomi. Implikasinya, diperlukan dukungan yang kuat dari pihak - pihak lain terhadap Departemen Pertanian untuk mewujudkan reforma agraria karena kewenangan Departemen Pertanian dalam reforma agraria (*landreform*) sangat terbatas.

Peluang peranan Departemen Pertanian dalam pembaruan agraria antara lain adalah : (1) perluasan areal



budidaya pertanian (terutama di luar Jawa); (2) mendorong penguatan aspek legalitas penguasaan tanah petani; (3) peningkata produktivitas lahan pertanian dan pendapatan petani; (4) konsolidasi tanah dan konsolidasi usaha IU pertanian; (5) perbaikan sistem penyakapan, khususnya bagi hasil; dan (6) membangun organisasi tani yang kuat dan mandiri.

Secara umum strategi pelaksanaan reforma agraria adalah sebagai berikut (a) Jangka Pendek (1) Peningkatan akses petani berlahan garapan sempit terhadap lahan garapan usahatani . Khususnya di lahan-lahan bekas perkebunan yang terlantar, perlu dibuat sistem kelembagaan yang memungkinkan petani menggarap lahan tersebut dengan tetap memperhitungkan status (formal) garapan dan jangka waktu penggarapan, (2) Peningkatan akses petani terhadap sumber-sumber agraria lainnya terutama modal; (3) Peningkatan produktivitas usahatani agar keuntungan yang diperoleh per unit luas garapan bertambah; (4) Perluasan kesempatan kerja luar pertanian di pedesaan, terutama melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian; (5) Meningkatkan



efektivitas pengawasan terhadap peraturan yang berkenaan dengan konversi tanah pertanian ke non pertanian agar laju konversi tanah pertanian dapat dikurangi, (b) Jangka menengah/ panjang : (1) Perluasan tanah pertanian produktif; (2) Simultan dengan perluasan tanah pertanian, pengembangan transmigrasi perlu disempurnakan dan dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif; (3) Perluasan kesempatan kerja non pertanian di pedesaan yang diarahkan pada industri yang berbasis sumber daya pedesaan; (4) Reforma pajak tanah perlu dilaksanakan dengan pengenaan pajak yang tinggi pada tanah diatas pajak maksimum; (5) Setahap demi setahap, persiapan untuk melaksanakan reforma agraria di lokasi-lokasi yang secara politik-ekonomi-sosial budaya adalah layak, harus terus dilakukan secara sistematis dan, konsisten, diantaranya adalah mempersiapkan kelembagaan masyarakat yang kuat dan pengaturan sistem penyakapan



Saudara-Saudara sekalian Yang Saya Hormati.

Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam sambutan ini dan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Pertanahan Nasional dan Konsorsium Pembaharuan Agraria yang telah berhasil menyelenggarakan Forum Nasional Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan ini. Semoga dengan diselenggarakan Forum Nasional ini, dapat dilakukan penilaian kritis terhadap konsep *Country Report* yang telah disusun, dan dapat terumuskannya konsep final dari *Country Reprot* Indonesia dalam rangka ICARRD, serta terbukanya peluang bagi dialog konstruktif antar masing-masing kelompok kepentingan dalam memajukan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan di Indonesia.

Selanjutnya, dengan mengucapkan *Bismillah hiroh-manirrohhim* Forum Nasional Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan ini, secara resmi saya buka.



Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan taufik
dan HiadayahNya kepada kita semua, Amien.

Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi wabarokatuh.

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN PEMERINTAH
PADA
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR-RI
DENGAN MENTERI PERTANIAN DAN
MENTERI LUAR NEGERI
MENGENAI PENGESAHAN ATAS RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI SUMBER
DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN
PERTANIAN**

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

***Saudara Pimpinan dan pars Anggota Komisi IV DPR-RI
yang terhormat,***

Pada kesempatan yang baik ini, pertama kali kami sampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada hari



ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas konstitusional. Atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPR-RI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan Pemerintah pada acara pengesahan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* atau Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGTPP) yang diajukan oleh Pemerintah.

Selanjutnya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Kerja yang telah berhasil menyelesaikan pembahasan RUU ini. Dari laporan yang disampaikan kepada kami, dapat diketahui bahwa pembahasan telah dilaksanakan secara komprehensif, kritis, mendalam, dan sungguh-sungguh; terutama atas topik yang berkaitan dengan manfaat (keuntungan/kerugian) serta implikasi dari akses Perjanjian ini, kesiapan Pemerintah untuk mengimplementasikan Perjanjian ini, dan agenda Pemerintah dalam rangka



memanfaatkan peluang dari Perjanjian ini. Kami sangat menghargai kesungguhan kita mengkaji hal itu, yang berlandaskan pada upaya untuk menjaga kelestarian dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sumberdaya genetik kita bagi kepentingan pembangunan nasional.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Kami ingin menyampaikan sekali lagi, bahwa dengan mengaksesi Perjanjian Internasional SDGTPP, Indonesia akan memperoleh berbagai manfaat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional berkelanjutan, antara lain dalam bentuk:

- Meningkatkan kemampuan nasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman melalui bantuan pengembangan kapasitas dari sistem pendukung Perjanjian ini;
- Menanggulangi pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik tanaman secara ilegal serta pengembangannya oleh negara/pihak lain;
- Pengembangan kerja sama regional dan internasional



dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;

- Menjamin akses dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
- Mendapatkan manfaat dari pembentukan Sistem Multilateral untuk pertukaran sumber daya genetik tanaman yang telah disepakati bersama;
- Memperoleh manfaat dari: (i) transfer teknologi dari negara Pihak lain atau dari pusat-pusat riset pertanian internasional; (ii) bantuan pembangunan kapasitas (*capacity-building*) terutama dalam bidang pengembangan dan penguatan pelatihan, pendidikan dan fasilitas yang relevan pada upaya konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengembangan sumber daya genetik tanaman serta untuk melaksanakan riset dalam eksplorasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya genetik tanaman.

Mendapatkan manfaat yang maksimal dari: a) program internasional yang terkait, misalnya *Global Plan of Action*; b)



koleksi *ex situ* yang tersimpan pada pusat-pusat riset pertanian internasional (*International Agricultural Research Centers*);
c) sistem informasi global; dan

Sementara itu, dengan menjadi Pihak dari Perjanjian ini akan berimplikasi pada sejumlah kewajiban bagi Indonesia, diantaranya adalah:

- Membayar iuran anggota yang akan ditentukan dalam Pertemuan Badan Pengatur;
- Menyediakan akses pada sumber daya genetik tanaman yang relevan kepada Pihak lain, atau kepada perorangan atau badan hukum di dalam yurisdiksi negara Pihak tersebut, serta kepada pusat-pusat riset pertanian internasional yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pengatur Perjanjian.
- Menjamin dalam peraturan nasionalnya, bahwa standar Perjanjian Pengalihan Materi (*Material Transfer Agreement* - MTA) yang ditetapkan oleh Badan Pengatur diterapkan dalam transaksi akses dan tukar-menukar sumber daya genetik tanaman yang masuk dalam daftar yang sudah



disepakati bersama dalam Perjanjian ini.

- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia wajib memberikan informasi terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang tidak bersifat rahasia dan yang terkait dengan kepentingan negara RI kepada sistem informasi Perjanjian.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa kesiapan Pemerintah untuk mengimplementasikan Perjanjian ini meliputi kesiapan mengenai kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dan pendanaan.

Untuk melaksanakan Perjanjian ini pemerintah telah memiliki Komisi Nasional Plasma Nutraf dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Penelitian Pengembangan Pertanian yang mengelola sumberdaya genetik secara *ex situ*. Dengan diaksesi Perjanjian ini, penguatan atau perluasan fungsi, peran dan peningkatan kinerja kelembagaan ini akan menjadi prioritas utama Pemerintah.



Dari segi peraturan, pemerintah telah mempunyai peraturan perundangan yang mendukung implementasi Perjanjian Internasional tentang SDGTPP, antara lain Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman; Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Keanekaragaman Hayati Cartagena; dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, Disamping itu, pemerintah masih memandang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung implementasi Perjanjian ini, yaitu: RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik; RUU tentang Indikasi Geografis; Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pencarian, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah Tanaman, Penyelesaian peraturan perundang-undangan tersebut menjadi prioritas Pemerintah dalam waktu dekat ini.

Walaupun jumlahnya masih terbatas, Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mendukung implementasi Perjanjian Internasional tentang SDGTPP, terutama yang



berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman. Di masa mendatang, Pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan pendanaan bagi pengelolaan SDGTPP ini.

Sehubungan dengan itu, pemerintah memohon DPR-RI untuk memberikan dukungan politik baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk anggaran, serta pengawasan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai program yang terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman.

Hal penting lain dari Perjanjian International tentang SDGTPP adalah ketetapan mengenai Sistem Multilateral tentang akses dan pembagian keuntungan yang difasilitasi. Berdasarkan pengaturan Sistem Multilateral memungkinkan pembagian keuntungan secara adil dan lebih merata bagi pemilik atau pengguna. Lebih penting lagi ialah mengalirnya keuntungan/ manfaat bagi petani yang telah melaksanakan pelestarian dan memanfaatkan SDGTPP secara berkelanjutan.



Dalam Pasal 9 Perjanjian Internasional SDGTPP ini diantaranya para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani yang berkaitan dengan SDGTPP berada pada pemerintah nasionalnya (Perundang-undangan Nasionalnya). Pemerintah mengambil langkah melindungi dan mendorong hak petani, diantaranya melalui:

- a. melindungi pengetahuan tradisional yang relevan dengan SDGTPP;
- b. hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan dari pemanfaatan yang dihasilkan dari SDGTPP;
- c. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam tingkat nasional, berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan SDGTPP.

Perlindungan Hak Petani sudah difasilitasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pembagian keuntungan dari hasil komersialisasi SDGTPP akan ditentukan aturannya pada saat Sidang Badan Pengatur yang akan dilaksanakan pada tahun ini.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah mempunyai keinginan agar Indonesia dapat menjadi anggota Dewan Pengatur (*Governing Body*) dari Perjanjian ini. Di dalam Dewan Pengatur akan ditetapkan berbagai hal strategis untuk implementasi Perjanjian ini, seperti menetapkan sasaran mobilitas pendanaan bagi kegiatan, rencana, dan menetapkan program prioritas untuk negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan.

Selain itu apabila diperlukan, sebagai anggota Badan Pengatur Indonesia dapat mengusulkan amandemen dari Perjanjian ini sesuai dengan kepentingan nasional. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi IV DPR-RI.. yang mendukung keinginan Pemerintah ini dengan membahas RUU ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Semoga proses selanjutnya dalam pengesahan RUU ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya, atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan, Fraksi-fraksi, dan



Anggota Komisi IV DPR-RI, khususnya kepada Panja yang telah berhasil menyelesaikan pembahasan RUU ini.

Semoga Allah SWT, meridhoi langkah-langkah kita dalam penyelesaian RUU ini dan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Atas Nama Pemerintah

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN PEMERINTAH
PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK
TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN**

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

**Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

Pada kesempatan yang berharga ini, kami sampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini.



kebutuhan karbohidrat sebagai makanan pokok. Sementara itu, 60% kebutuhan pangan pokok di dunia disediakan oleh empat jenis tanaman saja, yaitu gandum, padi, jagung dan kentang. Dari empat jenis tanaman itu, pemenuhan pangan pokok dari produksi domestik di Indonesia terkonsentrasi pada padi dan jagung. Jenis tanaman sumber pangan pokok lainnya bagi penduduk Indonesia yang beragam adalah singkong, ubi jalar dan sagu.

Sedikitnya jumlah jenis tanaman penyedia kebutuhan pangan pokok ini mengancam keberlanjutan ketahanan pangan, karena kerentanannya terhadap perubahan lingkungan yang tak dapat diperkirakan. Masalah itu dapat diantisipasi dengan adanya cadangan sumber daya genetik yang beraneka ragam sebagai materi dasar untuk merakit varietas tanaman unggul baru yang dapat mengatasi dinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan. Namun demikian, Indonesia tidak memiliki kendali dalam memanfaatkan cadangan tiga jenis sumber daya genetik tersebut. Oleh karena itu, upaya pelestarian keanekaragaman sumber daya genetik

tanaman wajib lebih diintensifkan oleh Indonesia baik sumber daya genetik yang berasal dari dalam negeri maupun negara lain

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian atau *the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, telah diresmikan dan disahkan oleh FAO pada tanggal 3 November 2001, dalam sidang *the 31st Meeting of the United Nations Food and Agriculture Organisation's Conference* di Roma, Italia dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004, setelah 40 negara mengesahkan Perjanjian ini. Sampai saat ini, 85 negara sudah mengesahkan Perjanjian ini sehingga secara otomatis mereka menjadi anggota Badan Pengatur (*Governing Body*). Indonesia masih mempunyai waktu hingga 14 Maret 2006 untuk mendepositkan pengesahan Perjanjian ini agar supaya dapat menjadi anggota Badan Pengatur yang besar manfaatnya.



Sebagai anggota Badan Pengatur, Indonesia mempunyai peluang strategis dalam mendorong imlementasi Perjanjian ini termasuk juga dalam menetaapkan sasaran mobilitas pendanaan bagi kegiatan, rencana, dan menetapkan program prioritas untuk negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan. Selain itu apabila diperlukan, sebagai anggota Badan Pengatur Indonesia dapat mengusulkan amandemen dari Perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan nasional.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan mengesahkan Perjanjian ini, Indonesia akan memperoleh manfaat, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan nasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman melalui bantuan pengembangan kapasitas dari sistem pendukung Perjanjian ini;



2. Penanggulangan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik tanaman secara ilegal serta pengembangannya oleh negara atau pihak lain;
3. Pengembangan kerja sama regional dan internasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
4. Penjaminan akses dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
5. Mendapatkan akses terhadap sumber daya genetik yang telah disepakati bersama, yang tersimpan di negara Pihak Perjanjian, maupun dari pusat-pusat riset pertanian internasional;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia baik di pusat maupun di daerah melalui: transfer teknologi dari negara Pihak lain atau dari pusat-pusat riset pertanian internasional; bantuan dalam bidang pengembangan dan penguatan pelatihan, pendidikan dan fasilitas yang relevan pada upaya konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengembangan sumber daya genetik tanaman.



Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan mengesahkan Perjanjian ini Indonesia akan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Menyediakan akses pada sumber daya genetik tanaman yang relevan kepada Pihak lain, atau kepada perorangan atau badan hukum di dalam yurisdiksi negara Pihak tersebut, serta kepada pusat-pusat riset pertanian internasional yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pengatur Perjanjian;
2. Mendorong badan-badan penelitian publik, atau perseorangan atau badan hukum yang berada dalam yurisdiksi Indonesia, untuk menyertakan sumber daya genetik tanamannya ke dalam Sistem Multilateral;
3. Menjamin dalam peraturan nasionalnya bahwa standar Perjanjian Pengalihan Materi (*Material Transfer Agreement* - MTA) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur diterapkan dalam transaksi akses dan tukar-menukar sumber daya genetik tanaman.



4. Memberikan informasi terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang tidak bersifat rahasia dan yang terkait dengan kepentingan negara RI kepada sistem informasi Perjanjian, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
5. Menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang melekat pada sumber daya genetik tanaman, informasi dan/atau teknologi yang diterima dari Sistem Multilateral ataupun dari kerja sama pembangunan kapasitas maupun dari transfer teknologi dan tukar-menukar informasi pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) sumber daya genetik tanaman;
6. Melaksanakan upaya kebijakan dan hukum untuk mendorong pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman guna mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan baik di tingkat nasional, regional maupun global;
7. Membayar furan anggota yang akan ditentukan dalam Pertemuan Badan Pengatur (*Governing Body*);



Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah telah melakukan persiapan untuk mengimplementasikan Perjanjian ini yang meliputi kesiapan di bidang kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dan pendanaan. Di bidang kelembagaan pemerintah telah memiliki Komisi Nasional Plasma Nutfah dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Penelitian Pengembangan Pertanian yang mengelola sumberdaya genetik secara *ex situ*. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan fungsi dan otoritas pengelola plasma nutfah yang telah ada sekarang ini, pemerintah berencana membentuk Komisi Sumber Daya Genetik yang merupakan amanah dari RUU Pemanfaatan dan Pelestarian SDG yang sekarang dalam tahap penyusunan.

Di bidang peraturan, Pemerintah telah memiliki peraturan perundangan yang mendukung implementasi Perjanjian tentang SDGTPP, antara lain: Undang-Undang No.



12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman; Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Keanekaragaman Hayati Cartagena; PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Namun demikian, Pemerintah masih memerlukan peraturan perundang undangan baru yang antara lain: RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik; RUU tentang Indikasi Geografis; Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pencarian, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah Tanaman.

Di bidang pendanaan, walaupun jumlahnya masih terbatas, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mendukung implementasi Perjanjian ini, terutama yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman. Di masa mendatang pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan pendanaan bagi pengelolaan sumber daya genetik tanaman.



Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, kami sampaikan agenda pemerintah dalam rangka memanfaatkan peluang dari perjanjian ini, antara lain:

1. Penguatan pemuliaan tanaman yang meliputi peningkatan kemampuan pemulia dan pengembangan ilmu pemuliaan, termasuk pemanfaatan bioteknologi.
2. Peningkatan kemampuan dan jumlah pemulia serta infrastrukturnya diperlukan untuk menangani kegiatan-kegiatan mulai dari eksplorasi, koleksi, karakterisasi, dokumentasi, dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian yang berorientasi peningkatan kesejahteraan petani.
3. Penguatan sistem perbenihan, termasuk harmonisasi peraturan perbenihan pada tingkat nasional maupun internasional. Disamping itu diperlukan pengembangan sistem perbenihan dan industri perbenihan yang mampu



memenuhi kebutuhan benih nasional, mengurangi ketergantungan pada benih impor dengan tetap mendorong peran serta masyarakat dan mengakomodasikan kondisi-kondisi yang memelihara keanekaragaman genetik.

4. Melakukan usaha-usaha penelusuran/penggalan asal usul dan perkembangan sumber daya genetik hasil karya petani, swasta, maupun Lembaga Pemerintah, baik yang terdapat di dalam negeri maupun di negara lain.
5. Berupaya melestarikan dan mengevaluasi sumber daya genetik tradisional yang selama ini terabaikan; memanfaatkan akses sumber daya genetik dari pihak luar melalui sistem multilateral; memperluas dan meningkatkan usaha diversifikasi pangan.
6. Berupaya menjamin adanya dominasi lokal dalam penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan keuntungan secara finansial, dalam memanfaatkan sumber daya genetik, baik yang berasal dari kerjasama bilateral maupun dengan FAO.



Sehubungan dengan itu, Pemerintah memohon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memberikan dukungan politik baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk anggaran, dan pengawasan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai program yang telah disetujui serta mengusahakan jaminan kesinambungannya serta ikut mewakili pertemuan-pertemuan internasional yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat atas disahkannya Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* atau Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian.



Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Atas Nama Pemerintah

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**Pidato Menteri Pertanian
Pada Pengukuhan Masyarakat Agrobisnis dan
Agroindustri Indonesia**

Tanggal 27 Februari 2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Undangan yang saya hormati,

Kekayaan sumberalam yang berlimpah dalam jumlah dan ragam di Indonesia merupakan *Comparative Advantage* untuk menghasilkan berbagai produk pertanian. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fondamental perekonomian sehingga perlu didayagunakan melalui pembangunan pertanian modern sehingga menjadai keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Dengan demikian struktur perekonomian yang terbangun akan memiliki akar landasan yang kokoh dan berbasis pada sumberdaya domestik, berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan.



Dalam konteks makro, peran strategis sektor pertanian dalam perekonomian nasional antara lain terlihat pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan masyarakat. Disamping itu, sektor pertanian juga memberikan kontribusi tak langsung berupa efek penggandaan yang cukup besar. Sehingga, sektor pertanian layak menjadi sektor andalan.

Pada saat krisis ekonomik terjadi tahun 1997/1998, perekonomian nasional mengalami kontraksi luar biasa. Pada waktu itu sektor pertanian terbukti mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional karena hanya mengalami kontraksi kecil, dan selanjutnya setelah periode “pemulihan” laju peningkatan PDB pertanian dan peternakan kembali meningkat positif.

Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati,

Pencapaian PDB sektor pertanian terus berlanjut. Pada tahun



2004 mencapai Rp 277.452,7 Milyar (atas dasar harga konstan) dan pada tahun 2005 hingga triwulan III total PDB pertanian mencapai Rp. 156.420,4 Milyar. Selama tahun 2005, secara umum produksi tanaman pangan seperti; jagung, kedelai dan kacang tanah mengalami peningkatan terhadap tahun 2003, kecuali padi. Produksi padi, sedikit mengalami penurunan akibat menurunnya luas panen sebagai dampak kekeringan.

Pencapaian produksi tanaman hortikultura secara kumulatif mengalami peningkatan dari tahun 2004 hingga tahun 2005 sebesar 5,65 dan 5,88 persen. Kinerja produksi perkebunan tahun 2005 untuk komoditas karet, sawit, tebu dan lada menunjukkan pertumbuhan positif, sementara untuk komoditas kopi, teh dan cengkeh produksinya relatif menurun dibanding tahun 2003. Untuk subsektor peternakan, populasi semua ternak mengalami peningkatan tahun 2005 dibanding tahun 2004.



Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati,

Revitalisasi Pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan bertujuan untuk : (1) Mengurangi kemiskinan; (2) Mengurangi Pengangguran; (3) Meningkatkan daya saing usaha dan produk; (4) Membangun ketahanan pangan; (5) Membangun pedesaan; (6) Membangun dan mengurangi ketimpangan antar daerah; (7) Membangun kesinambungan kegiatan pembangunan PPK; dan (8) Melestarikan lingkungan hidup.

Pembangunan pertanian masih banyak dihadapkan pada permasalahan permintaan produk pertanian, terutama pangan, yang semakin meningkat. Tetapi disisi lain kapasitas sumberdaya lahan pertanian terutama lahan dan air makin terbatas dan mengalami degradasi.

Kelangkaan permodalan dan akses petani kesumber pembiayaan juga merupakan salah satu hal fundamental dalam meningkatkan kinerja usahatani dan kesejahteraan petani yang



masih terpuruk. Rumah tangga petani masih mendominasi populasi penduduk miskin di pedesaan yang mencapai 36 juta jiwa. Ketidak mampuan masyarakat pedesaan mengakses permodalan ke sumber pembiayaan formal disebabkan keterbatasan sumber pembiayaan formal dan penetapan syarat kredit yang sangat ketat dan kurang sesuai dengan sifat usaha pertanian yang musiman.

Departemen Pertanian memfasilitasi peningkatan akses petani dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan usaha jalan usahatani, pembangunan infrastruktur pemasaran berupa Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Terminal Agribisnis, pasar lelang, serta membangun berbagai pola kemitraan usaha (*contract farming*).

Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati,

Upaya peningkatan kesejahteraan petani dan peternak melalui perbaikan pengelolaan usahatani tidak mudah dilakukan karena dengan ciri ukiran pengusahaan relatif kecil



maka petani sulit memperoleh tambahan manfaat dari skala usaha (*economic of scale*). Sebagai gambaran, rata-rata kepemilikan lahan pertanian hanya sekitar 0,5 ha per rumah tangga jelas jauh memadai. Persoalan menjadi makin kompleks karena, selain kendala yang sudah dijelaskan di atas, kelembagaan petani yang dapat mengorganisir perbaikan pola produksi (kelompok tani) dan mengintegrasikan pelaksanaan berbagai program pembangunan lain saat ini tidak berjalan.

Kelembagaan kelompok tani yang pembentukannya dulu lebih didominasi atas “inisiasi dari atas” ternyata banyak kurang mampu mengakomodasi “kepentingan” petani, sehingga lembaga tersebut akhirnya tidak mampu bertahan lama.

Selain karena besarnya ketergantungan terhadap “uluran tangan” lembaga atas desa, lemahnya sumber “*interdependensi*” dalam kelompok menjadi faktor kritis keberlanjutan aktivitas kelompok Implementasi otonomi daerah yang diharapkan dapat memberikan “energi baru” bagi pengembangan kelembagaan



kelompok tani hingga kini tampaknya juga belum secara nyata mampu mengubah “status” dan “potret” keberadaan kelembagaan petani tersebut. peningkatan kinerja petani dan sektor pertanian secara umum saat ini membutuhkan partisipasi kerja seluruh unsur bangsa, tidak terkecuali peran serta lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat pertanian sendiri. “Masyarakat Agrobisnis dan Agroinduksi Indonesia (MA)” sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat yang berkiprah dalam pembangunan agrobisnis dan agroindustri dapat berperan serta dalam berbagai aspek, dari proses produksi dan pemasaran produk pertanian, pemberdayaan rumah tangga petani hingga pada upaya pelestarian sumberdaya pendukung pertanian. Manfaat keberadaan dan keberlanjutan aktifitas MAI akan ditentukan oleh penilaian masyarakat pertanian dan kesungguhan kerja keras dari para pengurusnya.

Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati,

Demikian arahan singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pendorong anggota dan



pengurus MAI untuk berkiprah lebih banyak dan riil untuk memajukan sektor pertanian dan kesejahteraan para petani.

Wabillahitaufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



PENGARAHAN
MENTERI PERTANIAN
PADA
APRESIASI KEBERLANJUTAN
PENGELOLAAN PROGRAM P4K PASCA 2005
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

JAKARTA, 2 MARET 2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati

- Gubernur Provinsi Riau dan Gubernur Provinsi Bali
- Para Bupati dan Walikota
- Deputi Penanggulangan Kemiskinan dan Ketenaga-kerjaan Bappenas
- Deputi II Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan
- Para Pejabat lingkup Departemen Pertanian
- Para Penanggung Jawab P4K tingkat Provinsi
- Para Hadirin sekalian,



Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadhirat Allah subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kita bertemu di sini dalam kerangka upaya "Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan". Kita hadir di sini, para Bupati/Walikota dari 127 daerah otonom serta pejabat lainnya dari Pusat dan Daerah, karena terikat komitmen kita, kepedulian kita, dan tanggung jawab kita, untuk bersama-sama, bahu-membahu mengatasi permasalahan kemiskinan di perdesaan.

Para hadirin yang saya muliakan,

Persoalan-persoalan kemiskinan semakin hari semakin terasa kompleks permasalahannya. Pada hakekatnya kemiskinan tidak dapat dihapuskan sama sekali sampai akhir zaman, namun kita dapat terus berupaya untuk mengurangi dan mengendalikan perkembangannya. Di semua negara di dunia, wajah kemiskinan selalu dapat kita jumpai, baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa



penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar dan cenderung terus meningkat. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin tercatat 11,3 persen dan tahun 2002 meningkat menjadi 18,2 persen, antara lain akibat dampak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Pada tahun 2004 jumlah tersebut sedikit berkurang menjadi 16,7 persen. Dari jumlah tersebut sekitar 69 persen tinggal di perdesaan dan sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Pemerintah terus melakukan upaya melalui berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Kemiskinan erat kaitannya dengan pengangguran. Angka pengangguran terbuka pada saat krisis ekonomi tahun 1997 mencapai 5 juta jiwa. Setelah krisis ekonomi angka tersebut terus meningkat, pada tahun 1999 menjadi 6 juta jiwa, pada tahun 2003 menjadi 9,5 juta jiwa dan pada tahun 2004 menjadi sekitar 9,9 juta jiwa. Angka-angka tersebut di atas menyiratkan kecenderungan meningkatnya angka kemiskinan pula. Dengan demikian, pengurangan angka pengangguran



dapat terkait langsung dengan pengurangan angka kemiskinan. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dapat memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan.

Hal ini bermakna bahwa upaya penanggulangan kemiskinan antara lain perlu ditempuh melalui pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan.

Departemen Pertanian merupakan Salah satu departemen yang paling terkait langsung dengan persoalan-persoalan kemiskinan. Melalui kebijakan-kebijakan makro maupun mikro Departemen Pertanian telah berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya yang ditakukan adalah dengan dirintisnya program pembinaan terhadap petani-nelayan kecil sejak tahun 1979.

Pada tahun 1970-an umumnya proyek-proyek pembangunan dijalankan dengan mengharapkan bertakunya *"trickle down effect"* maupun efek *"bola salju"*, sehingga mengasumsikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat otomatis



dinikmati oleh semua khalayak dari berbagai strata sosial-ekonomi masyarakat. Namun kenyataannya hal itu tidak terjadi. Hasil-hasil pembangunan umumnya hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan, yang umumnya terdiri dari para petani yang memiliki asset-asset memadai untuk berperan dalam akseterasi pembangunan pertanian. Sedangkan para petani-nelayan kecil hampir tidak tersentuh oleh program-program akselerasi tersebut.

Petani-nelayan kecil di perdesaan umumnya terdiri dari para petani berlahan sempit, buruh tani, buruh nelayan, penyakap, dan sebagainya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berperanserta dalam pembangunan dan berada dalam keterpurukan sosial-ekonomi. Hal itu secara berangsur-angsur menurunkan rasa percaya diri mereka dan memupus harapan mereka. Pada saat itulah Departemen Pertanian memulai sebuah upaya rintisan melalui apa yang sampai saat ini dikenal sebagai P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil). Rintisan itu merupakan suatu terobosan dengan mewujudkan



perhatian dan kepedulian langsung kepada para petani-nelayan kecil, yang *notabene* adalah para keluarga miskin di perdesaan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pembinaan terhadap petani-nelayan kecil pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tiga tujuan strategis, yaitu:

Pertama, memperkuat kapasitas petani-nelayan kecil dan kelembagaannya. Petani-nelayan kecil perlu dibukakan kesempatan untuk membangun kapabilitas individu dan kolektifnya guna memperbesar akses mereka kepada peluang-peluang ekonomi, infra-struktur dan pelayanan sosial. Dengan demikian, mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan secara lebih seimbang, dan bernegosiasi secara lebih efektif tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Kedua, memperbaiki akses petani-nelayan kecil secara lebih merata terhadap sumberdaya alam dan teknologi produksi. Salah satu faktor penting adalah mengupayakan



akses petani-nelayan kecil kepada sumberdaya alam, seperti lahan, air dan hutan. Ketimpangan distribusi lahan seringkali disebabkan oleh sejumlah faktor, baik politik, budaya, maupun sejarah yang telah bertangsiung lama.

Ketiga, meningkatkan akses petani-nelayan kecil kepada modal finansial dan pasar. Modal investasi dan modal kerja sangat diperlukan oleh petani-nelayan kecil untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendiversifikasi pendapatan mereka. Umumnya, pasar keuangan di perdesaan masih belum mendukung kebutuhan ini. Salah satu atasannya adalah karena lembaga-lembaga keuangan itu harus melayani keperluan modal yang jumlahnya kecil-kecil, sementara itu petani-nelayan kecil tidak memiliki agunan. Akibatnya, lembaga-lembaga keuangan cenderung tidak tertarik untuk menyalurkan pinjaman kepada petani-nelayan kecil. Karena itu, upaya pemberdayaan difokuskan pada pemupukan modal sendiri melalui pengembangan lembaga keuangan perdesaan yang profesional dan responsif. Salah satu langkah penting adalah mendorong kebiasaan petani-nelayan kecil untuk menabung dan mengelola lembaga keuangannya



sendiri dengan baik.

Investasi di bidang pertanian menjadi kurang berhasil jika hanya berkonsentrasi pada sisi peningkatan produksi dan tidak mempertimbangkan keterkaitannya dengan pengembangan pasar serta infra-struktur. Pendekatan yang terpadu dan berkesinambungan dalam aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, diperlukan untuk meningkatkan pendapatan perdesaan dan secara nyata memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, penganeekaragaman sumber pendapatan petani-nelayan kecil, baik melalui pengembangan usaha-usaha *non-farm* maupun *off-farm*, adalah juga merupakan faktor yang penting dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Penganeekaragaman sumber pendapatan akan menurunkan tingkat risiko yang dihadapi oleh petani-nelayan kecil akibat perubahan kondisi pasar yang demikian pesat, dan membantu mereka mengatasi masa-masa sulit akibat pengaruh musim. Pendekatan satu kesatuan keluarga (*total family approach*)



dalam P4K memberikan kesempatan bagi keluarga-keluarga petani-nelayan kecil untuk melibatkan seluruh anggota keluarga mereka dalam pengembangan usaha mikro. Dengan demikian, pengangguran di perdesaan yang umumnya berwujud *disguised unemployment* secara tidak langsung dapat dikurangi.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Departemen Pertanian memulai P4K pada tahun 1979 dengan mengintroduksi instrumen pemberdayaan berjalur ganda (*dual track*). *Jalur pertama* memusatkan perhatian dan upaya dalam pemberdayaan petani-nelayan kecil melalui penguatan kapasitas kelembagaan petani-nelayan kecil atau KPK (Kelompok Petani-nelayan Kecil). *Jalur kedua* memusatkan perhatian dan upaya dalam pemberdayaan matapencaharian dan usaha yang mapan dan berkelanjutan yang dimiliki dan dikelola oleh para petani-nelayan kecil maupun KPK. Jalur ini ditempuh melalui pelayanan pengembangan usaha dan keuangan mikro, yang membantu keluarga miskin di perdesaan



memperkuat kapasitasnya di dalam menghasilkan pendapatan, sehingga mereka sanggup keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan berbagai pengalaman kaji tindak dan pematapan metode, P4K telah berlalu selama tiga fase. Tiap fase memiliki karakteristik fokus pendekatan. Fase III dimulai pada tahun 1998 melalui kerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). Kerjasama tersebut telah selesai pada akhir tahun 2005.

Setelah berakhirnya kerjasama dengan ADB dan IFAD maka keberlanjutan Program P4K tergantung dari komitmen kita semua untuk terus memberdayakan penduduk miskin perdesaan umumnya dan petani-nelayan kecil khususnya.

Pemerintah telah merintis suatu jalan untuk memberdayakan para petani-nelayan kecil. Sejumlah kelompok petani-nelayan kecil telah terbentuk bahkan sebagian telah berkembang menjadi lembaga ekonomi perdesaan, seperti



koperasi dan sebagainya. Rintisan tersebut akan sia-sia jika upaya tersebut berhenti begitu saja. Perlu tekad dan tindakan untuk meneruskan dan menyempurnakannya.

Para hadirin yang saya hormati,

Sampai akhir fase III, P4K telah menjangkau 646.681 rumahtangga petani nelayan kecil yang tergabung dalam sekitar 58 ribu kelompok (KPK) di 127 kabupaten. Status kelompok-kelompok itu terdiri dari berbagai kategori menurut tingkat kemandiriannya. Ada sekitar 814 KPK yang termasuk dalam kategori A, 12.369 KPK dalam kategori B dan 31.762 KPK dalam kategori C. Masing-masing kategori memerlukan perlakuan pelayanan yang berbeda, namun pada prinsipnya adalah membantu mereka berproses menuju kemandirian.

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka kesempatan untuk melanjutkan pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan



pola P4K ada di tangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat, melalui Departemen Pertanian, khususnya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, akan tetap mendukung program ini melalui alokasi dana dekonsentrasi. Namun, tentu saja jumlahnya menjadi tidak sebanyak alokasi pembiayaan kegiatan P4K selama ini. Dana dekonsentrasi tersebut terutama dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembinaan teknis. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana APBD-nya guna betul-betul meneruskan dan bahkan mengembangkan Program P4K di daerahnya masing-masing.

Sebagai contoh, untuk melayani permodalan usaha mikro yang dikembangkan oleh para KPK, disarankan agar Pemerintah Daerah menyediakan dana penjaminan di lembaga-lembaga keuangan yang ada. Dana penjaminan tersebut dapat digunakan untuk menarik permodalan guna pengembangan usaha mikro para KPK. Dana penjaminan ini besarnya satu dibanding sepuluh.



Artinya, jika kita ingin menarik dana sebesar satu milyar, maka dana penjaminan yang diperlukan adalah sebesar seratus juta. Sebenarnya, Pemerintah Pusat saat ini sedang mengupayakan untuk dapat menyediakan dana penjaminan semacam itu sebesar Rp 500 milyar, untuk dapat menarik dana sekitar Rp 5 triliun guna pengembangan usaha-usaha agribisnis di perdesaan. Jika para Gubernur dan para Bupati juga mengupayakan hal yang sama di wilayahnya masing-masing, maka diharapkan bahwa sumber-sumber permodalan bagi para petani-nelayan kecil akan menjadi lebih terbuka.

Selain alokasi dana dekonsentrasi, Departemen Pertanian juga berkomitmen untuk melimpahkan seluruh asset yang selama ini dikelola untuk melaksanakan Program P4K kepada Pemerintah daerah guna meneruskan dukungannya kepada KPK-KPK yang telah ada maupun penduduk miskin lainnya yang selama ini belum terjangkau.

Kami sedang mempersiapkan seluruh kelengkapan persyaratan guna memproses pelimpahan asset tersebut ke



Departemen Keuangan. Namun demikian, sambil proses itu berjalan Departemen Pertanian akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang pelimpahan asset sementara, sehingga semua pihak memiliki dasar pijakan dalam pengelolaannya.

Akhirnya, saya berharap apresiasi ini dapat menjadi pertemuan yang memperkuat komitmen kita kepada penduduk miskin di perdesaan. Semoga Allah subhanahu wata'ala melindungi kita dan memudahkan segala urusan kita di dalam membantu saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahiim, acara apresiasi ini saya nyatakan dibuka.



Billahittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 2 Maret 2006

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK
TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN**

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

**Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia yang terhormat,**

Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,

Pada kesempatan yang berharga ini, kami sampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini.



Atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas disahkannya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* atau Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Keanekaragaman hayati Indonesia sebagai sumber daya alam yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia wajib dijaga, dilestarikan, dan dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar keanekaragaman hayati tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan rakyat Indonesia untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta kehidupan makhluk lainnya.



Di dunia, keanekaragaman hayati pada sistem pertanian telah mengalami kemerosotan. Sejak awal perkembangan pertanian, sekitar 12.000 tahun yang lalu, masyarakat dunia memanfaatkan sekitar 10.000 jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan ternak. Saat ini hanya sekitar 150 jenis tanaman saja yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan 12 jenis di antaranya menyumbang 80% kebutuhan karbohidrat sebagai makanan pokok. Sementara itu, 60% kebutuhan pangan pokok di dunia disediakan oleh empat jenis tanaman saja, yaitu gandum, padi, jagung dan kentang. Dari empat jenis tanaman itu, pemenuhan pangan pokok dari produksi domestik di Indonesia terkonsentrasi pada padi dan jagung. Jenis tanaman sumber pangan pokok lainnya bagi penduduk Indonesia yang beragam adalah singkong, ubi jalar dan sagu.

Sedikitnya jumlah jenis tanaman penyedia kebutuhan pangan pokok ini mengancam keberlanjutan ketahanan pangan, karena kerentanannya terhadap perubahan lingkungan yang tak dapat diperkirakan. Masalah itu dapat diantisipasi dengan



adanya cadangan sumber daya genetik yang beraneka ragam sebagai materi dasar untuk merakit varietas tanaman unggul baru yang dapat mengatasi dinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan. Namun demikian, Indonesia tidak memiliki kendali dalam memanfaatkan cadangan tiga jenis sumber daya genetik tersebut. Oleh karena itu, upaya pelestarian keanekaragaman sumber daya genetik tanaman wajib lebih diintensifkan oleh Indonesia baik sumber daya genetik yang berasal dari dalam negeri maupun negara lain.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian atau *the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, telah diresmikan dan disahkan oleh FAO pada tanggal 3 November 2001, dalam sidang *the 31st Meeting of the United Nations Food and Agriculture Organisation's Conference* di Roma, Italia dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004, setelah 40 negara



mengesahkan Perjanjian ini. Sampai saat ini, 85 negara sudah mengesahkan Perjanjian ini sehingga secara otomatis mereka menjadi anggota Badan Pengatur (*Governing Body*). Indonesia masih mempunyai waktu hingga 14 Maret 2006 untuk mendepositkan pengesahan Perjanjian ini agar supaya dapat menjadi anggota Badan Pengatur yang besar manfaatnya. Sebagai anggota Badan Pengatur, Indonesia mempunyai peluang strategis dalam mendorong imlementasi Perjanjian ini termasuk juga dalam menetapkan sasaran mobilitas pendanaan bagi kegiatan, rencana, dan menetapkan program prioritas untuk negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan. Selain itu apabila diperlukan, sebagai anggota Badan Pengatur Indonesia dapat mengusulkan amandemen dari Perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan nasional.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan mengesahkan Perjanjian ini, Indonesia akan



memperoleh manfaat, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan nasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman melalui bantuan pengembangan kapasitas dari sistem pendukung Perjanjian ini;
2. Penanggulangan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik tanaman secara ilegal serta pengembangannya oleh negara atau pihak lain;
3. Pengembangan kerja sama regional dan internasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
4. Penjaminan akses dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
5. Mendapatkan akses terhadap sumber daya genetik yang telah disepakati bersama, yang tersimpan di negara Pihak Perjanjian, maupun dari pusat-pusat riset pertanian internasional;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia baik di pusat maupun di daerah melalui: transfer



teknologi dari negara Pihak lain atau dari pusat-pusat riset pertanian internasional; bantuan dalam bidang pengembangan dan penguatan pelatihan, pendidikan dan fasilitas yang relevan pada upaya konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengembangan sumber daya genetik tanaman.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan mengesahkan Perjanjian ini Indonesia akan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Menyediakan akses pada sumber daya genetik tanaman yang relevan kepada Pihak lain, atau kepada perorangan atau badan hukum di dalam yurisdiksi negara Pihak tersebut, serta kepada pusat-pusat riset pertanian internasional yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pengatur Perjanjian;
2. Mendorong badan-badan penelitian publik, atau



perseorangan atau badan hukum yang berada dalam yurisdiksi Indonesia, untuk menyertakan sumber daya genetik tanamannya ke dalam Sistem Multilateral;

3. Menjamin dalam peraturan nasionalnya bahwa standar Perjanjian Pengalihan Materi (*Material Transfer Agreement* - MTA) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur diterapkan dalam transaksi akses dan tukar-menukar sumber daya genetik tanaman.
4. Memberikan informasi terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang tidak bersifat rahasia dan yang terkait dengan kepentingan negara RI kepada sistem informasi Perjanjian, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
5. Menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang melekat pada sumber daya genetik tanaman, informasi dan/ atau teknologi yang diterima dari Sistem Multilateral ataupun dari kerja sama pembangunan kapasitas maupun dari transfer teknologi dan tukar-menukar informasi pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) sumber daya genetik tanaman;



6. Melaksanakan upaya kebijakan dan hukum untuk mendorong pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman guna mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan baik di tingkat nasional, regional maupun global;
7. Membayar iuran anggota yang akan ditentukan dalam Pertemuan Badan Pengatur (*Governing Body*);

Saudara Pimpinan dan pars Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah telah melakukan persiapan untuk mengimplementasikan Perjanjian ini yang meliputi kesiapan di bidang kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dan pendanaan. Di bidang kelembagaan pemerintah telah memiliki Komisi Nasional Plasma Nutfah dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Penelitian Pengembangan Pertanian yang mengelola sumberdaya genetik secara *ex situ*. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan fungsi dan otoritas pengelola plasma nutfah yang telah ada sekarang ini, pemerintah berencana membentuk Komisi Sumber Daya



Genetik yang merupakan amanah dari RUU-Pemanfaatan dan Pelestarian SDG yang sekarang dalam tahap penyusunan.

Di bidang peraturan, Pemerintah telah memiliki peraturan perundangan yang mendukung implementasi Perjanjian tentang SDGTPP, antara lain: Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman; Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Keanekaragaman Hayati Cartagena; PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Namun demikian, Pemerintah masih memerlukan peraturan perundang undangan baru yang antara lain: RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik; RUU tentang Indikasi Geografis; Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pencarian, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah Tanaman.

Di bidang pendanaan, walaupun jumlahnya masih terbatas, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mendukung implementasi Perjanjian ini, terutama yang berkaitan



dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman. Di masa mendatang pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan pendanaan bagi pengelolaan sumber daya genetik tanaman.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, kami sampaikan agenda pemerintah dalam rangka memanfaatkan peluang dari perjanjian ini, antara lain:

1. Penguatan pemuliaan tanaman yang meliputi peningkatan kemampuan pemulia dan pengembangan ilmu pemuliaan, termasuk pemanfaatan bioteknologi.
2. Peningkatan kemampuan dan jumlah pemulia serta infrastrukturnya diperlukan untuk menangani kegiatan-kegiatan mulai dari eksplorasi, koleksi, karakterisasi, dokumentasi, dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian yang berorientasi



peningkatan kesejahteraan petani.

3. Penguatan sistem perbenihan, termasuk harmonisasi peraturan perbenihan pada tingkat nasional maupun internasional. Disamping itu diperlukan pengembangan sistem perbenihan dan industri perbenihan yang mampu memenuhi kebutuhan benih nasional, mengurangi ketergantungan pada benih impor dengan tetap mendorong peran serta masyarakat dan mengakomodasikan kondisi-kondisi yang memelihara keanekaragaman genetik.
4. Melakukan usaha-usaha penelusuran/penggalian asal usul dan perkembangan sumber daya genetik hasil karya petani, swasta, maupun Lembaga Pemerintah, baik yang terdapat di dalam negeri maupun di negara lain.
5. Berupaya melestarikan dan mengevaluasi sumber daya genetik tradisional yang selama ini terabaikan; memanfaatkan akses sumber daya genetik dari pihak luar melalui sistem multilateral; memperluas dan meningkatkan usaha diversifikasi pangan.
6. Berupaya menjamin adanya dominasi lokal dalam penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya



manusia dan keuntungan secara finansial, dalam memanfaatkan sumber daya genetik, baik yang berasal dari kerjasama bilateral maupun dengan FAO.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah memohon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memberikan dukungan politik baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk anggaran, dan pengawasan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai program yang telah disetujui serta mengusahakan jaminan kesinambungannya serta ikut mewakili pertemuan-pertemuan internasional yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat atas disahkannya Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengesahan



International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture atau Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Atas Nama Pemerintah

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA
PERESMIAN KANDANG TERPADU SISTEM *CLOSED*
HOUSE
DAN PELEPASAN EKSPOR PERDANA PAKAN DAN OBAT
HEWAN
PT SANTIKA DUTA NUSANTARA**

Subang, 4 Maret 2006

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yang terhormat:

- Sdr Menteri Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah RI;
- Sdr Gubernur Propinsi Jawa Barat beserta jajaran Pemerintahan Propinsi Jawa Barat;
- Sdr Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prop. Jawa Barat;
- Sdr Pejabat Eselon I Departemen Pertanian RI;
- Sdr Bupati Kabupaten Subang beserta jajaran



Pemerintahan Kabupaten Subang;

- Sdr Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Subang;
- Sdr. H. Asep Sulaiman Subanda selaku Direktur PT. Santika Duta Nusantara sebagai Tuan Rumah beserta jajaran karyawannya;
- Para Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara pagi hari ini. Sungguh saya merasa berbahagia karena dapat menghadiri suatu acara yaitu “Peresmian Kandang Terpadu Sistem Closed House dan Pelepasan Ekspor Perdana Pakan dan Obat Hewan PT Santika Duta Nusantara” dengan tema “Integrasi Peternakan dan Tanaman Pangan Menuju Agroindustri yang Kuat dan Mandiri” yang bertempat di Lokasi Commercial Broiler Farm PT. Santika Duta Nusantara, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Subang. Kita patut merasa bangga dengan prestasi perusahaan ini yang telah merintis usahanya mulai dari kecil hingga mampu berkembang seperti sekarang



dan telah merencanakan untuk mengeksport produknya ke luar negeri.

Para Hadirin dan undangan yang saya hormati,

Salah satu yang perlu mendapat perhatian dari berkembangnya perusahaan ini adalah adanya kerjasama dengan Sistem Kemitraan (Pola Inti dan Plasma) yang terjadi antara perusahaan ini dengan para peternak kecil yang tersebar di beberapa kabupaten di propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Dalam kerjasama Inti - Plasma ini mengikutsertakan perusahaan perbibitan dan perusahaan pakan ternak sebagai pemasok kebutuhan utama yaitu DOC dan pakan ternak yang telah terjalin dengan baik. Sungguh ini adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah, tetapi berkat kegigihan Bapak H. Asep Sulaiman Subanda dengan menerapkan konsep "Keakuratan, Kecepatan dan Kemudahan pelayanan yang memuaskan dalam menjalankan sistem kemitraan", dan tentu saja kepercayaan dari kedua pihak dapat terlaksana dengan baik dan berkembang dengan pesat. Konsep ini harus tetap



dipertahankan, dan tentu saja hal ini dapat menjadi contoh kemitraan yang baik. Untuk ini saya minta kepada Pimpinan dan Kepala Daerah agar di wilayahnya masing-masing dapat membina dan mengembangkan Sistem Kemitraan, karena sudah terbukti bahwa di tengah persaingan usaha yang ketat sekarang ini sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.

Para hadirin dan undangan yang saya hormati,

Selain kerjasama yang baik, kita tidak boleh melupakan hal lain dalam mengembangkan budidaya peternakan ayam pedaging. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi di bidang ini yang sudah sedemikian maju. Tujuannya adalah untuk memperoleh dan meningkatkan hasil produksi yang berdaya saing di era global saat ini. Alhamdulillah, kita bisa belajar kepada Bapak H. Asep yang tidak melupakan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan mulai diterapkannya penggunaan Kandang Terpadu dengan Sistem Closed House yang canggih, dimana tercipta suasana yang ideal dalam performance dan pertumbuhan ayam yang dipelihara di



kandang tersebut dan dapat dipantau sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan,

Dengan adanya kegiatan yang mengintegrasikan kegiatan penanaman jagung dengan kegiatan peternakan unggas seperti yang telah dirintis oleh perusahaan ini berarti telah melakukan suatu efisiensi yang sangat dibutuhkan dalam era pasar persaingan bebas yang sangat kompetitif saat ini. Sehingga produksi yang dihasilkan baik berupa jagung dan turunannya maupun daging ayam dan telur serta hasil produksi lainnya akan dapat bersaing baik dipasar domestik maupun luar negeri. Apabila kita lihat lebih lanjut, keterpaduan usaha penanaman jagung dengan usaha peternakan unggas merupakan suatu kombinasi kegiatan yang saling menguntungkan. Limbah jagung berupa daun, batang, bongkol jagung, dan limbah lainnya dapat digunakan sebagai pakan ternak dan kotoran ternak unggas dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang sangat berguna bagi kesuburan



tanah. Sehingga dihasilkan sinergisme yang saling menguntungkan.

Sebenarnya disinilah salah satu bentuk kekuatan kita sehingga diharapkan kita dapat menggali potensi keuntungan komparatif yang kita miliki saat ini untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Peluang untuk memasarkan produk yang dihasilkan sangat besar baik bagi pasar di dalam negeri dengan penduduk Indonesia yang telah mencapai sekitar 220 juta jiwa maupun pasar ekspor yang dapat menghasilkan devisa yang sangat diperlukan.

Disinilah diperlukan kejelian melihat masalah yang selama ini dianggap sebagai penghambat menjadi suatu peluang yang dapat direbut dan digunakan sebaik mungkin untuk keuntungan kita bersama.

Kalau selama ini sering dikeluhkan bahwa jagung produksi dalam negeri kualitasnya rendah dan terpencar-pencar sehingga memerlukan biaya dalam pengumpulannya, saat ini



PT. Santika Duta Nusantara sudah dapat membuktikan persoalan-persoalan tersebut ternyata dapat diatasi.

Dengan kemitraan yang telah terjalin antara petani/ peternak plasma dan perusahaan inti maka masing-masing pihak mempunyai kepastian dalam kegiatan usahanya. Petani jagung mempunyai kepastian jalur pemasaran hasil produksi jagungnya kepada pihak inti dengan harga yang wajar, demikian juga dengan perusahaan inti yang memperoleh kepastian pasokan jagung bagi produksi pakan dan kebutuhan usahanya. Kepastian pemasaran dan pasokan bahan baku dan efisiensi merupakan faktor-faktor yang sangat penting dewasa ini. Sehingga model kerjasama kemitraan inti-plasma perlu terus disempurnakan dan direplikasi di wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

Para hadirin dan undangan yang saya hormati,

Pada saat ini yang perlu mendapat perhatian yang sangat serius adalah merebaknya wabah Penyakit Avian



Influenza (AI) / Flu Burung. Penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat menular ke manusia ini Cara penyebarannya melalui berbagai macam media diantaranya melalui kotoran dan lendir unggas yang sakit. Penyakit ini menyerang berbagai macam ternak unggas antara lain ayam, itik, entok, angsa, burung dan juga termasuk burung liar.

Perkembangan ini perlu kita waspadai karena meskipun kematian pada unggas sudah jauh menurun tetapi telah terjadi penularan terhadap unggas lain dan pada manusia. Selain itu munculnya kasus penyakit tidak dapat diduga. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kecenderungan terjadinya wabah raya (Pandemi) dengan rantai yang semakin pendek. Pengalaman ini memberi pelajaran kepada kita bahwa terjadinya “cluster-cluster” pada sekelompok warga menjadi bukti makin dekatnya wabah raya tersebut. Tetapi hal ini akan dapat kita atasi dengan teknologi yang ada dan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tugas kita semua untuk mengantisipasi dengan melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.



Hadirin yang saya hormati.

Bagaimana masyarakat peternak dan umum dapat ikut berpartisipasi mencegah dan memberantas penyakit Flu Burung ? Sebenarnya tidak sulit. Kuncinya adalah **KEBERSIHAN !!** Kebersihan kandang, kebersihan alat-alat kandang, kebersihan petugas kandang yang berkontak langsung dengan ternak, kebersihan pemilik ternak, kebersihan lingkungan, dll. Kebersihan kandang dan lingkungan dapat dilakukan dengan penyemprotan desinfektan secara rutin.

Masalah Flu Burung telah menjadi issue global, marilah kita mencegahnya dimulai dari lingkungan kita masing-masing dalam skala kecil. Insya Allah dengan cara yang sederhana ini lingkungan kita tidak tercemar virus Flu Burung; kita terhindar dari penyakit ini dan terhindar dari kerugian yang sangat besar.



Hadirin yang saya hormati,

Demikian sambutan saya, dan dengan mengucapkan Bismillah... Saya resmikan penggunaan ***“Kandang Terpadu Sistem Closed House dan Pelepasan Ekspor Perdana Pakan dan Obat Hewan PT. Santika Duta Nusantara”***, semoga usaha ini dapat berkembang lebih baik di masa mendatang dan membawa manfaat bagi perusahaan, para petani peternak dan keluarganya serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat di daerah ini.

Wassalam Warohmatullohi Wabarokatuh.

Subang, 4 Maret 2006

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



Sambutan
Menteri Pertanian/
Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
Pada Acara Pertemuan Bupati
Dalam Rangka Penanganan Kerawanan Pangan

Surabaya, 9-10 Maret 2006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Selamat Ma'am bagi kita semua;

Yang sacra hormati;

- Gubernur Propinsi Jawa Timur;
- Para Bupati dari 60 Kabupaten yang daerahnya termasuk rawan pangan;
- Para Pembicara dari instansi terkait;
- Para Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi;
- Para Kepala Dinas Pertanian, dan hadirin yang berbahagia.



Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka konsolidasi Penanganan Kerawanan Pangan.

Selamat datang dan terima kasih saya sampaikan kepada para hadirin, khususnya para Bupati, yang telah berkenan mengikuti acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang telah membantu kelancaran acara ini.

Pertemuan kita pada hari ini saya anggap sangat penting, karena apa yang akan dibicarakan dan dibahas nanti adalah masalah yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, mengurangi, dan bahkan menghapuskan kerawanan pangan, karena pemenuhan pangan untuk dapat hidup sehat dan aktif bagi setiap individu merupakan salah satu hak asasi manusia.



Dalam upaya pemantapan ketahanan pangan, salah satu masalah pangan, yang harus ditangani adalah persoalan kerawanan pangan, sebagaimana akan kita bahas dalam pertemuan ini. Hal ini sangat penting kita perhatikan, karena berdasarkan Peta Kerawanan Pangan yang disusun Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dan *World Food Program (WFP)*, di Indonesia masih terdapat 100 kabupaten/ kotamadya yang tergolong rawan pangan.

Dari 100 kabupaten/kotamadya rawan pangan tersebut, menurut panitia pada kesempatan ini diundang 60 Bupati yang daerahnya rawan pangan, yaitu 30 kabupaten yang masuk prioritas 1, 30 kabupaten prioritas 2, sedangkan 40 kabupaten prioritas 3 akan diadakan pertemuan berikutnya.

Penetapan daerah rawan pangan tersebut dilakukan melalui proses analisis dengan menggunakan 10 indikator yang tercakup dalam 3 dimensi kerawanan pangan kronis, yaitu Aspek Ketersediaan Pangan, Aspek Akses Terhadap Pangan dan Matapencaharian serta Aspek Kesehatan dan Gizi.



Ketiga dimensi tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kerawanan pangan yang bersifat kronis dan memerlukan penanganan jangka panjang. Namun jika kita perhatikan lebih jauh, ternyata ada lima masalah utama penyebab kerawanan pangan di 60 kabupaten tersebut, yaitu: (1) faktor ketersediaan pangan yang tidak seimbang dengan kebutuhan; (2) faktor kemiskinan dan daya beli; (3) faktor distribusi pangan yang terganggu; (4) faktor pengetahuan masalah gizi yang masih rendah dan (5) faktor terbatasnya prasarana lain seperti air bersih, listrik dan sebagainya.

Melihat kompleksitas berbagai permasalahan tersebut, saya mengharapkan para Bupati selaku pimpinan daerah dapat mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai instansi dan perangkat di daerahnya untuk bersama-sama mengatasi masalah kerawanan pangan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal ini, kelembagaan **Dewan Ketahanan Pangan** di daerah yang diketuai oleh Bupati hendaknya dapat didayagunakan dan



berperan aktif untuk menjadi motor penggerak penanganan kerawanan pangan di daerah.

Pemerintah menyadari, bahwa untuk mengatasi masalah kerawanan pangan bukanlah pekerjaan yang mudah, karena selain memerlukan koordinasi yang mantap juga memerlukan sumber daya dan pendanaan yang memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam keterbatasannya pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kerawanan pangan terhadap 100 kabupaten /kotamadya rawan pangan melalui ***Dana Alokasi Khusus (DAK)***. Untuk itu, saya mengharapkan agar DAK ini benar-benar digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, sehingga manfaat dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan ini, selain sudah ada DAK, saya juga mengharapkan kepada para Bupati agar dapat mengalokasikan APBD untuk



penanganan kerawanan pangan tersebut. Saya yakin berbagai Departemen telah memberikan arahan yang jelas bagaimana memanfaatkan DAK tersebut.

Gubernur Jawa Timur, Para Bupati dan hadirin yang saya hormati;

Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan agar memanfaatkan instrumen SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) dalam pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, karena melalui SKPG penanganan kerawanan bisa lebih efektif. Untuk itu, kelembagaan SKPG saya harapkan bisa direvitalisasi sesuai dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi sekarang ini.

Keberhasilan SKPG, disamping ditentukan oleh bekerjanya fungsi-fungsi koordinatif dalam instansi pemerintah, seperti bekerja aktifnya Kelompok Kerja (Pokja) Kewaspadaan Pangan dan Gizi, juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat



dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ada, seperti Dasa Wisma, Posyandu dan PKK.

Dalam kerangka memfasilitasi partisipasi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat *grassroot* inilah pemerintah mengembangkan Desa Mandiri Pangan. Pada saat ini, pemerintah melalui APBN memfasilitasi pengembangan Desa Mandiri Pangan di 122 kabupaten. Untuk itu, sebagaimana telah kita sepakati bersama, dalam pertemuan-pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Propinsi, para Bupati/Walikota dan Gubernur telah sepakat untuk mengembangkannya Desa Mandiri Pangan melalui APBD masing-masing.

Saya mengingatkan bahwa Kesepakatan tersebut merupakan janji kita kepada rakyat, yang pada waktunya nanti akan ditagih dan dimintakan pertanggungjawaban kita semua. Saya minta para Bupati dapat mengimplementasikan apa yang telah kita sepakati tersebut.



Gubernur Jawa Timur, Para Bupati dan hadirin yang saya hormati;

Sejalan dengan komitmen global untuk memerangi kelaparan dan mengurangi jumlah penduduk miskin di dunia, saya mengharapkan penganangan *“Aliansi Nasional Melawan Kelaparan”* dapat segera diwujudkan dan nantinya bisa diikuti di daerah.

Pembentukan *“Aliansi Nasional Melawan Kelaparan”* ini sangat penting untuk menggerakkan dukungan dan partisipasi berbagai pihak, khususnya dukungan partisipasi masyarakat yang peduli dengan masalah kelaparan khususnya, dan kemanusiaan pada umumnya.

Untuk itu, saya mengharapkan kegiatan yang akan dilakukan *“Aliansi Nasional Melawan Kelaparan”* nantinya bisa benar-benar dirasakan dan berkontribusi secara nyata dalam penanganan kerawanan pangan.



Demikian sambutan saya. Dan Pertemuan Bupati Dalam Rangka Penanganan Kerawanan Pangan ini saya buka secara resmi.

Wabilahitaufik Walhidayah, Wassalam Mualikum Wr. wb.

Surabaya, 9 Maret 2006

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**Speech of the Minister of Agriculture
At The Opening Ceremony of International
Workshop on "Client Oriented Agro-meteorological
Services to Support Agriculture Development"**

Jakarta, 9 March 2006

**Assalaamu'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh,
Excellency of:**

- **Head of Indonesian Agency of Meteorology and Geophysics (BMG),**
- **Chairman of Indonesian Agricultural Meteorology Association (PERHIMPI),**
- **Prof. Dr. Justika S. Baharsjah,**
- **Distinguish guests, ladies and gentlemen**

First of all let us thanks God for His blessing for our good health and spirit so that we can meet here this morning. It is a great pleasure for me to be here with you for an important occasion of the opening ceremony of the Workshop on "Client



Oriented Agro-meteorological Services to Support Agriculture Development”.

To those who come from abroad, Dr. Sivakumar from WMO and colleagues from working group of Regional V, South West Pacific you are especially welcome to Indonesia. Amid all the troubles reported by the media you witness that all look fine. I believe that you already enjoyed your stay in Bukittinggi Sumatra and now in this rather crowded capital, Jakarta.

Ladies and Gentlemen,

A healthy agricultural sector has been shown to be a prerequisite for sustained economic growth in most countries. Adequate supplies of affordable food are essential for poverty alleviation and economic development. Agriculture is also one of the most weather dependent of all human activities. Variations in weather and climate as well as their interaction with agricultural operations, from planting to harvesting determine appreciable parts of the yield variations. Farmers, herders,



foresters and fishermen had to adapt to the range and frequency of shocks that caused by climate variability. For that purpose they have tried to use the available knowledge and information to develop their coping strategies.

Along with the growing regional cooperation, agricultural trades among countries become more common. These have gradually shifted the paradigm in many developing countries from sustainable agricultural development.

Sustainable agriculture not only requires a sound technology but also those economically feasible and socially acceptable. Deprivation from markets in the developed countries has pushed many farmers in the third world out of business. For a sound agricultural planning and the use of appropriate agricultural technology agro-meteorological information is imperative.

The growing interest on the possible impact of natural and human induced climate variability and long-term climate



change on agriculture and forestry have created new demands for information from and assessments by agro-meteorologists. The growing demands for food and concerns with the need in achieving greater efficiency of the natural resource use while conserving the environment is placing a much greater emphasis on understanding and climatic resources. A better understanding can lead to a sustainable utilization of the resources for the benefit of agriculture and forestry. The need for reorienting and recasting meteorological information, fine tuning of climatic analysis and presentation in forms suitable for agricultural decision making and insulation of marginal farmer; with small holdings from the adverse impacts of weather vagaries has become more pressing.

Distinguished guests, ladies and gentlemen,

Timely provision of accurate information of climate and agro-meteorology is seen as the crucial role of national meteorological service. Here, in Indonesia just a couple years back the service has not only been provided by the



Meteorological and Geophysical Agency of Indonesia (BMG) of the Ministry of Transportation, but the government has also made great concern in focusing service for agriculture by creating the new institution called the Indonesian Agro-climate and Hydrology Research institute (IAHRI) of the Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD), organizes the Climate Anomaly Forum and provides the Center for Flood and Drought under the Directorate General of Crop Protection of the Ministry of Agriculture.

Even those with agro-meteorological observation and monitoring network not always have service provision, indicating the shortcoming in analytical capability. Along with limitation both in professional staff and operational budget, the service is constrained by less precise understanding of the diverse agricultural users and their requirements. Of agricultural users, varieties of farming practices and agricultural research and education require a more detail information of weather and climate with different emphasis.

Beside the specific agro-meteorological information,



more general information is also required by agricultural policy makers, planners and agricultural institutional support system in advance for better planning. As the world facing global challenges in climate change, desertification and biodiversity where many of the national services play crucial role, their best service is expected to increase the understanding on the nature and finding ways to mitigate and adapt.

Analysis of valuable long historical dataset that have been collected using the freely available packages that tailored for climate analysis are necessary to create information that relevant to agriculture. The national meteorological services can take advantage of the advance in computer and communication technology and improved analytical capability that often with lower cost to strengthen the capability and improves service delivery.

However, with limited resources available, particularly in the less developed world the more plausible way to benefit from the progress is through close cooperation among countries



within a region. By putting together the best available resources and expertise the limited resource can be more efficiently utilized for the best outputs.

Distinguished guests, ladies and gentlemen,

Beyond daily and seasonal farm management decisions for which agro-meteorological information can play a valuable part, risk management and early warning are two other important roles for agricultural weather information. Weather and climate information can be used with new technological tools and data base infrastructures to assess risk and to quantify probabilities associated with weather and climate variability. The implications are enormous not only for agricultural extension services who are providing the linkage between new research results and operational applications but also for policy level decision makers who are responsible for food security and marketing decisions for their agricultural products. Such early warning information allows improved long term planning opportunities that will benefit agriculture.



The objective is to provide appropriate information derived from both meteorological data and agricultural data sources. Meteorological data are collected hourly to daily and are merged into climate data bases which expand the use from real-time.

Operational applications to historical or comparative studies of weather and climate. Building a long period of record becomes imperative for the greater understanding of the role of weather and climate variability or trends within an agricultural region. Agricultural data, on the other hand, are collected in many different formats in the field and have a wide temporal and spatial variability as well.

Ladies and gentlemen,

Among others, one difficult thing in the area of agro-meteorology is how the climate information should be disseminated to users effectively and how the users can use the information to reduce the vulnerability of their agriculture system to climate hazards and to improve the performance of



their system in enhancing variable climate. Our Ministry has set up a number of programs in collaboration with National Agency for Meteorology and Geophysics and other institutions to develop capacity of farmers to manage climate risk. In this regard, I would like to ask PERHIMPI and related institutions/organizations to construct "Agricultural Calendar" (Kalender Pertanian), which can be used as a practical guidance for farmers in conducting farming practices. Of course, since Indonesia's natural resources is nridely diverse, the agricultural calendar should be constructed for locally specific region or agro-ecosystem.

One of the programs that has been implemented at limited districts is to improve farmers' knowledge and understanding on climate information application through "farmer field school program". At the initial stage, the program was aimed to increase farmers' capacity to tailor their farming activities to seasonal and interannual climate forecast. However, as the spectrum of climate information application is very wide, not only on farm level but also at off farm level, the curriculum for the field school should be further designed to increase



capacity of farmers to use seasonal and interannual climate forecast for designing management strategy of their agribusiness activities. However, our knowledge on climate information application on agriculture is still limited, and therefore further supports from international agencies such as WMO and ADPC is very essential.

Distinguished guests, ladies and gentlemen,

Finally, profound gratitude to the organizing committee, particularly the PERHIMPI, Indonesian Association of Agricultural Meteorology and The Meteorological and Geophysical Agency of Indonesia that have worked hard to make this workshop materialized my sincerely gratitude is also addressed to Bogor Agriculture University (IPB), the Asian Disaster Preparedness Centre (ADCP), World Meteorological Organization (WMO) and all sponsors who have contributed to support the committee. This professional association with has members are from all the spectrum of research, education and practicing agriculturists actually have bridge the science of



agriculture meteorology to the real world of agriculture, the farmers, extension workers and policy makers and planners. In the name of ALLAH the most Merciful, most Beneficial, Bismillahirrohmannirrohim I declare the International Workshop on Client-oriented Agro-meteorological Service to Support Agriculture Development officially open.

Thank you very much.

May God bless us all,

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Minister of Agriculture
of the Republic of Indonesia,
ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN KUNCI
MENTERI PERTANIAN
PADA
PEMBUKAAN TRUBUS AGRO EXPO 2006**

JAKARTA, 2-12 MARET 2006

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

- **Para pejabat pemerintah pusat maupun daerah,**
- **Para pelaku agribisnis,**
- **Para profesional, pelajar/mahasiswa dan hobiis, serta**
Hadirin, undangan dan peserta TRUBUS AGRO EXPO
2006 yang berbahagia

Marilah pada kesempatan ini, tiada hentinya kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri TRUBUS AGRO EXPO 2006 yang diselenggarakan pada tanggal 2-12 Maret 2006.



Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk membuka acara TRUBUS AGRO EXPO 2006 ini, sehingga saya dapat bertatap muka secara langsung dengan saudara-saudara sekalian, para pelaku agribisnis dan petani yang turut membesarkan bidang pertanian.

Pendekatan pembangunan pertanian dalam era reformasi pembangunan yang mengarah kepada tata pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mendorong sebesar-besarnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku agribisnis dalam bidang pertanian ke depan mempunyai peran yang semakin besar dalam memajukan pertanian dan merupakan mitra Departemen Pertanian dalam mengembangkan agribisnis pada umumnya dan dalam melaksanakan diseminasi informasi pasar dan inovasi pertanian pada khususnya.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Sampai saat ini, pertanian di Indonesia masih di dominasi oleh petani kecil dengan produk pertanian dan mutu



yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan petani, antara lain permodalan, penguasaan lahan, keterampilan, pengetahuan, aksesibilitas pasar, dan posisi tawar yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, terutama dalam menentukan komoditas yang diusahakan dan teknologi yang akan diterapkan. Selain itu, rendahnya pendapatan mempengaruhi keterbukaan diri mereka terhadap informasi dari luar terutama yang bersifat pembaharuan. Dengan demikian, pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dituntut untuk secara terus menerus mengupayakan dan membuka kran informasi agar dapat diakses oleh petani dengan mudah dan cepat.

Di lain pihak, informasi di bidang pertanian yang dihasilkan oleh lembaga penelitian pertanian berlimpah. Beratus varietas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan telah dihasilkan oleh Departemen Pertanian maupun swasta. Namun kecepatan dan tingkat pemanfaatan inovasi yang dihasilkan tersebut cenderung melambat bahkan menurun, sehingga menyebabkan rendahnya adopsi di tingkat petani.



Sebagai ilustrasi, dari hasil penelitian di lima kabupaten lokasi kegiatan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi (P4MI) menyebutkan bahwa petani mendapatkan informasi teknologi terutama melalui media interpersonal yaitu sesama petani, orang tua dan PPL. Sehingga umumnya mereka menerapkan teknologi yang sudah turun temurun. Hasil survei juga menunjukkan bahwa pemanfaatan media cetak sebagai sumber informasi teknologi pertanian oleh responden sangat sedikit yaitu rata-rata 3% untuk yang berpendapatan rendah dan 6 % untuk yang berpendapatan tinggi. Media radio dan televisi hanya digunakan sebagai sumber informasi oleh masing-masing 17% dan 16% petani, dan itu pun hanya digunakan sebagai hiburan, bukan sebagai sumber informasi pertanian.

Melihat begitu banyaknya petani yang belum mendapat akses ke media baik tercetak maupun elektronik, maka media interpersonal masih sangat diperlukan. Dengan demikian, peran penyuluh di masa depan sangat diharapkan dalam menyebarluaskan informasi pertanian. Peran ini tentunya tidak

hanya dapat diharapkan dari penyuluh pemerintah saja, tetapi juga peran penyuluh swakarsa/swasta sangat diharapkan. Oleh sebab itu, pelaku agribisnis diharapkan dapat sekaligus memberikan penyuluhan dan membina langsung petani di lapangan. Terjadinya kesenjangan antara informasi yang ada dilembaga penelitian dan petani disebabkan oleh tidak sinambungannya rantai sistem litbang pertanian dan sistem penyuluhan pertanian.

Para undangan dan peserta TRUBUS AGRO EXPO 2006 yang berbahagia,

Untuk menghasilkan suatu inovasi teknologi pertanian diperlukan serangkaian kegiatan seperti kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian yang saling terkait satu dengan lainnya. Rangkaian kegiatan ini selanjutnya dikenal dengan mekanisme sistem litbang pertanian. Pada tahap penelitian, lembaga penelitian melakukan serangkaian kegiatan yang berdasarkan kaidah ilmiah dan sistematis menghasilkan



komponen teknologi pertanian. Lembaga pengkajian selanjutnya melakukan uji adaptasi dan uji multilokasi suatu komponen teknologi terhadap kesesuaian iklim dan lahan untuk menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi. Selanjutnya lembaga pengkajian bersama dengan lembaga teknis lain di daerah melakukan uji kesesuaian sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan terhadap teknologi spesifik lokasi untuk memperoleh model pengembangan dan paket teknologi.

Tahap akhir rangkaian tersebut adalah penerapan teknologi itu sendiri dalam bentuk pengembangan usaha agribisnis. Pada tahap ini berbagai stake-holder pembangunan pertanian seharusnya terlibat secara sinergis, termasuk di dalamnya masyarakat, sektor swasta, lembaga penyuluhan, dan lembaga pengkajian teknologi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 03/Kpts/HK.060/1/2005 tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian.



Memperhatikan fungsi sistem penyuluhan pertanian yang sangat penting dalam sistem alih teknologi dan mekanisme umpan balik dalam sistem litbang pertanian, maka Departemen Pertanian melalui kegiatan revitalisasi penyuluhan sedang melakukan penataan sistem penyuluhan termasuk kelembagaan penyuluhannya yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Penyuluhan yang pada saat ini masih terus dikaji secara mendalam oleh para wakil rakyat di DPR-RI.

Dengan sumber daya pemerintah yang semakin terbatas, saya mengharapkan peran Saudara semua selaku pelaku agribisnis hendaknya lebih ditingkatkan khususnya dalam bidang sistem alih teknologi ini. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian akan semakin banyak dan lebih cepat sampai ke petani, sehingga petani mempunyai banyak pilihan teknologi yang akan diterapkan, tentunya dengan bimbingan penyuluh/petugas lapangan. Namun demikian, bagaimana pun hasil penelitian jika tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tidak akan digunakan. Oleh sebab itu, umpan balik dari masyarakat diperlukan untuk perencanaan penelitian selanjutnya.



Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Saya menyambut baik dan menghargai prakarsa TRUBUS untuk mempertemukan keinginan konsumen dan kemampuan pasokan penjual melalui pameran. Sebab sering terjadi di satu pihak masyarakat membutuhkan suatu komoditas unggulan, di lain pihak produsen kelebihan pasokan. Untuk itu, kesenjangan ini perlu dijumpatani dengan pemberian informasi yang memadai. Saya mendapat informasi, melalui pameran ini juga disajikan keragaan hasil penelitian berupa produk, alat maupun jasa di bidang pertanian. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui secara langsung perkembangan produk pertanian di Indonesia. Selain kegiatan itu, saya dilaporu juga bahwa Expo ini juga menyelenggarakan acara pendukung seperti seminar dan lomba-lomba tanaman dan hewan piaraan. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan masyarakat akan lebih menaenali potensi agribisnis Indonesia. Disamping itu, kita dapat menggali potensi pengembangan beragam komoditas pertanian unggulan dan membangun jaringan usaha di bidang agribisnis.



Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para pelaku agribisnis untuk mengembangkan pertanian Indonesia yang memiliki sumber daya genetik dan plasma nutfah yang sangat potensial, terutama komoditas hortikultura khas Indonesia. Jika tanaman hortikultura ditangani dan dikembangkan dengan baik berdasarkan kaidah-kaidah pembangunan pertanian berkelanjutan melalui penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan dibarengi dengan peningkatan rasa percaya diri yang lebih baik dimasa datang terhadap produk karya anak bangsa, maka saya yakin Indonesia akan menjadi negara pengepor buah, sayur, dan tanaman hias yang dapat sejajar dengan Thailand.

Saya sangat yakin potensi pasar hortikultura masih luas terbuka, terutama bagi kepentingan konsumsi dalam negeri maupun tujuan ekspor. Oleh sebab itu, marilah kita mulai mencintai dan mengkonsumsi buah dan sayur lokal baik untuk keperluan pemenuhan nutrisi sehari-hari di rumah atau untuk keperluan pertemuan-pertemuan. Untuk itu, saya mengajak kalangan pengusaha catering, hotel, dan restoran untuk



berperan aktif dalam mempromosikan dan mengkampanyekan produk-produk lokal tersebut.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Saya menghargai upaya TRUBUS sebagai penyedia informasi, untuk selalu meningkatkan kualitas dan akurasi publikasinya sehingga materi yang ditulis dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, isi informasinya juga sesuai dengan keinginan pengguna dan sejalan dengan tren yang sedang berkembang.

Hal ini terbukti dari digunakannya TRUBUS sebagai salah satu referensi penyuluh lapangan untuk bahan penyuluhan. Hanya sayangnya mereka menyatakan bahwa harga majalah cukup mahal, sehingga mereka tidak dapat melanggan secara kontinyu. Untuk itu, saya mengharapkan kiranya TRUBUS dapat berpartisipasi dalam pengembangan penyuluhan dengan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi para penyuluh.



Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim saya buka dengan resmi pameran TRUBUS AGRO EXPO 2006. Selamat berpameran, berlomba dan selalu tingkatkan prestasi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS





Himpunan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2006



Himpunan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2006



Himpunan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2006



Bg. Umum f



GRAND STRATEGI BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

1. GERAKAN INDUSTRIALISASI PERTANIAN DI PERDESAAN
2. PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI
3. PENGEMBANGAN PASAR DOMESTIK
4. PENGEMBANGAN EKSPOR HASIL PERTANIAN
5. PENGENDALIAN IMPOR PRODUK PERTANIAN
6. PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN
7. PENGEMBANGAN TERMINAL DAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS
8. UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (UP3HP)

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPERTEMEN PERTANIAN**

2002



GRAND STRATEGI BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

- 1. GERAKAN INDUSTRIALISASI PERTANIAN DI
PERDESAAN**
- 2. PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI**
- 3. PENGEMBANGAN PASAR DOMESTIK**
- 4. PENGEMBANGAN EKSPOR HASIL PERTANIAN**
- 5. PENGENDALIAN IMPOR PRODUK PERTANIAN**
- 6. PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN**
- 7. PENGEMBANGAN TERMINAL DAN SUB TERMINAL
AGRIBISNIS**
- 8. UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN
HASIL PERTANIAN (UP3HP)**

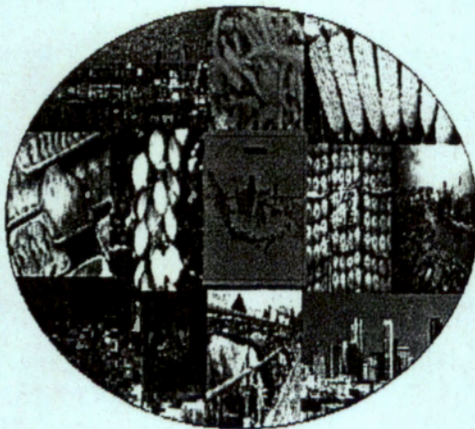
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPERTEMEN PERTANIAN**

2002





**GERAKAN INDUSTRIALISASI
PERTANIAN DI PERDESAAN
“(GERINDA) 2020”**



**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2002**



DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
II. AGROINDUSTRI SEBAGAI BASIS GERAKAN INDUSTRIALISASI PERDESAAN.....	3
III. KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI	7
IV. TUJUAN DAN SASARAN	11
V. PROGRAM	13



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagian besar negara maju di dunia saat ini telah melewati tahap kritis pembangunannya. Tahap kritis yang dimaksud adalah terjadinya transformasi yang gradual sekaligus konsisten dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa. Transformasi tersebut tidak semata mata ditunjukkan oleh semakin besarnya *share* sektor industri dalam pembangunan yang melampaui *share* sektor pertanian. Namun lebih jauh lagi, menyangkut masalah demokratisasi, hak azazi manusia, lingkungan serta *dignity* (kehormatan) sebuah bangsa.

Sejalan dengan kenyataan diatas maka tahapan dan proses industrialisasi juga harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Setelah lebih dari setengah abad merdeka, terlihat secara jelas bahwa proses industrialisasi di Indonesia sangat lambat. Hal ini terlihat antara lain dari semakin senjangnya ekonomi desa-kota. Dualisme ekonomi desa-kota telah mengakibatkan kota menjadi pusat segala-galanya dan ekonomi pedesaan hanyalah pendukung ekonomi perkotaan.

Dalam jangka panjang apabila dualisme ekonomi desa-kota tidak dapat diatasi maka dapat dipastikan akan muncul masalah lain yang lebih rumit, seperti; urbanisasi besar-besaran, rusaknya kultur asli bangsa seperti gotong royong dan kekeluargaan, kriminalitas yang meningkat serta yang tidak kalah pentingnya semakin senjangnya

pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat kaya pemilik modal akan semakin kaya sementara penduduk miskin semakin bertambah besar.

Melihat berbagai fenomena yang mungkin terjadi tersebut, maka diperlukan upaya yang terencana dan terarah untuk mengatasinya. Untuk itu, industrialisasi pertanian perdesaan merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan sesegera mungkin. Industrialisasi pedesaan sesungguhnya adalah gerakan ekonomi kerakyatan. Hal ini bukan saja dikarenakan besarnya keterlibatan rakyat di dalamnya namun akan langsung menyentuh problem dasar yang dihadapi rakyat pada umumnya yakni; rendahnya pendapatan, kurangnya kesempatan kerja dan lemahnya posisi tawar terhadap ekonomi kota dan usaha besar.

Pencanangan **Gerakan Industrialisasi Pertanian di Perdesaan 2020** atau "**GERINDA 2020**" adalah perwujudan terbentuknya agribisnis modern yang berkerakyatan dengan bertumpu pada *high technology*, SDM bermutu tinggi, padat modal, unit bisnis yang tangguh (memenuhi skala ekonomi) dan derajat kompatibilitas antar subsistem agribisnis yang tinggi.

Secara umum "**GERINDA 2020**" akan dicirikan dengan meningkatnya jumlah proyek dan nilai investasi sektor industri pertanian di daerah perdesaan, untuk itu dukungan infrastruktur menjadi sangat penting perannya disamping perbaikan iklim usaha.



BAB II

AGROINDUSTRI SEBAGAI BASIS GERAKAN INDUSTRIALISASI PERDESAAN

Wacana industrialisasi perdesaan di Indonesia telah berlangsung lama, bahkan secara parsial upaya yang mengarah pada hal tersebut telah dilakukan melalui berbagai program pemerintah. Khusus untuk sektor pertanian telah dikenal berbagai bentuk program seperti pengembangan pola PIR, UPJA, pemberian bantuan peralatan dan teknologi mulai dari subsistem hulu hingga hilir. Namun demikian wajah industrialisasi perdesaan khususnya yang berbasis pertanian hingga saat ini masih belum memuaskan. Indikator utamanya adalah belum meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional secara signifikan.

Hal ini terutama disebabkan struktur industrialisasi pertanian yang ada umumnya belum banyak menyentuh dan melibatkan partisipasi masyarakat bawah (masyarakat pedesaan) khususnya para pelaku agribisnis kecil dan menengah. Oleh karenanya hasilnya pun belum banyak dapat dinikmati.

Belum tercerminnya sifat kerakyatan dalam industrialisasi pertanian saat ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain ; kebijakan makro yang kurang berpihak kepada petani kecil, rendahnya akses petani terhadap modal, teknologi dan pasar, mekanisme pasar yang tidak sehat, kesenjangan infrastruktur antara perdesaan dan perkotaan serta minimnya kelembagaan ekonomi diprdesaan.

Industrialisasi pertanian atau dikenal dengan agroindustri semestinya dapat menjadi pilihan yang strategis dalam menanggulangi permasalahan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan adanya kemampuan yang tinggi dari sektor agroindustri dalam hal perluasan kesempatan kerja, mengingat sifat industri pertanian yang padat karya dan bersifat massal. Industrialisasi pertanian yang berbasis pada masyarakat tingkat menengah dan bawah merupakan sektor yang sesuai untuk menampung banyak tenaga kerja dan menjamin perluasan berusaha sehingga akan efektif dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan. Berkembangnya agroindustri juga akan meningkatkan penerimaan devisa dan mendorong terjadinya keseimbangan pendapatan antara sektor pertanian dan non pertanian. Dengan demikian kebijaksanaan pembangunan agroindustri diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat diwilayah produksi pertanian dan mendorong penawaran hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan agroindustri.

Dari sudut pandang makro ekonomi, pangsa agroindustri dalam nilai tambah industri mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 1974, agroindustri hampir menyumbang separuh nilai tambah sektor industri, yaitu 48,5 %. Pada tahun 1985, pangsa tersebut menjadi 20,7 %. Kecenderungan penurunan ini diperkirakan akan semakin besar walaupun nilai tambah yang diberikan meningkat. Selanjutnya dari segi penyerapan agroindustri memiliki pangsa 30,8 % sehingga agroindustri merupakan penyerap tenaga kerja tertinggi pada sektor industri.

Dari berbagai kajian, diperkirakan potensi agroindustri sebagai salah satu sumber devisa cukup baik, namun hal ini tergantung dari kemampuan bersaing dan memanfaatkan setiap peluang dipasar dunia. Artinya apabila pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dikembangkan lebih baik lagi maka perbaikan pendapatan petani dapat dilakukan. Namun demikian kenyataan yang ada saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Hingga saat ini, umumnya produk hasil pertanian dijual dalam bentuk segar dan walaupun telah dilakukan kegiatan pascapanen tetapi masih sebatas aktivitas pada tahap tertentu misalnya : pencucian (washing), pembersihan (clearing), pengkelasan (grading), dan pembungkusan (packeging). Keseluruhan tahapan proses kegiatan pascapanen tersebut dilakukan dengan teknik yang sangat sederhana dan peralatan yang belum memenuhi standar alat yang diisyaratkan bagi penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian dengan karakter produk yang sangat *sensitive/perishable*

Keadaan ini sudah tentu tidak dapat menghasilkan suatu produk bermutu sesuai dengan kegiatan pasar atau dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah dibakukan bagi komoditas pertanian pun belum mampu diadopsi oleh kalangan tersebut. Persoalan ini ditambah dengan masih belum terisialisasinya standar mutu tersebut di kalangan masyarakat paling bawah sehingga kesadaran mutu belum berkembang.

Pada aspek teknologi ditemukan masalah yang meliputi kurangnya penerapan teknik pengelolaan hasil (panen, pascapanen dan pengolahan) pertanian karena ketrampilan dan pengetahuan yang terbatas dan penggunaan jenis alat mesin yang kurang sempurna. Hal ini terkait pula dengan masalah informasi teknologi yang sampai ke pedesaan

Mengingat urgensi industrialisasi pertanian sebagai pilar strategis pembangunan pertanian, maka sangat rasional jika menempatkan industrialisasi pertanian dipedesaan sebagai suatu gerakan nasional yang melibatkan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah, para pakar, lembaga masyarakat serta praktisi bisnis.



BAB III

KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI

Untuk mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan industrialisasi di perdesaan maka telah dirasakan perlu melakukan semacam gerakan nasional industrialisasi perdesaan (GERINDA) dengan kebijakan, program dan *time schedule* yang tegas. Sebagai sebuah gerakan maka "GERINDA" adalah upaya terpadu semua pihak baik pemerintah dan masyarakat untuk bergerak secara bersama-sama dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya pembangunan untuk mempercepat proses industrialisasi perdesaan dengan agroindustri sebagai motornya. GERINDA harus merupakan puncak pyramid dari segala upaya yang dilakukan. Dengan demikian, GERINDA adalah pertarungan pemerintah dan rakyat Indonesia pada kelangsungan masa depan bangsanya. Keberhasilan GERINDA 2020 merupakan wujud kesuksesan pembangunan perekonomian nasional.

Gerakan Industrialisasi Pertanian di Perdesaan 2020 (GERINDA 2020) sangat erat kaitannya dengan upaya penumbuh kembangan usaha produktif masyarakat pertanian di perdesaan. Selama ini dari pangsa (share) usaha pertanian terhadap pendapatan Rumah Tangga perdesaan sebesar 60.45 %, sebagian besar (54.35 %) berasal dari kegiatan on farm dan hanya 6.10 % saja yang berasal dari kegiatan off farm (khususnya pengolahan dan pemasaran), padahal kita sadari bersama bahwa nilai tambah tertinggi dapat diperoleh disektor off farm.

Mengingat nilai tambah tertinggi ada disektor hilir maka sangat strategis bila sektor tersebut mendapat prioritas pengembangan, dan lebih jauh keberhasilan sektor tersebut diharapkan akan memicu berkembangnya industri hulu, khususnya berupa pengembangan industri agro otomotif yang menghasilkan mesin dan peralatan yang diperlukan baik sektor hulu maupun hilir. Sehingga pada akhirnya budaya industrial akan mewarnai seluruh sistem dan usaha agribisnis.

Mengacu pada hal tersebut, GERINDA 2020 pada intinya diarahkan pada pengorganisasian produksi hasil pertanian secara terpadu antara sektor hulu dan sektor hilirnya melalui pembentukan suatu usaha komersial (commercial business) yang berawal dari produksi benih unggul, produksi hasil pertanian, penanganan segar sampai pengolahan dengan pemakaian teknologi yang efisien, layak usaha (viable) dan dengan partisipasi penuh dari masyarakat pertanian di perdesaan, dengan karakteristik sebagai berikut :

- Skala usaha komersial (commercial business).
- Partisipasi penuh masyarakat tani dan kelembagaan ekonomi di perdesaan
- Keterkaitan dan kesepadanan antara penangkar benih, sentra produksi, packaging dan industri pengolahan.
- Kelancaran akses bagi petani dan pengusaha terhadap pasar dan sumberdaya keuangan
- Pemakaian teknologi yang efisien, layak usaha (viable) dan menguntungkan dengan dukungan SDM yang terampil

- Iklim usaha industrial yang menunjang seperti ketersediaan lahan, sarana dan prasarana, kemudahan ijin usaha serta penekanan biaya transportasi.

Apabila GERINDA dimulai pada tahun 2005 maka pada tahun 2020 adalah waktu yang cukup untuk mengukur apakah gerakan ini telah mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Jangka waktu antara 2003 – 2005 dipergunakan sebaik-baiknya untuk penancangan, sosialisasi dan penyiapan serta perumusan berbagai kebijakan yang diperlukan. Diharapkan dengan program jangka pendek, menengah dan panjang maka dalam jangka waktu 15 tahun gerakan ini telah sampai pada pematapannya.

Sebagai sebuah gerakan dengan pekerjaan yang besar dan rumit, maka tantangan yang dihadapi tidak ringan. Masalah kualitas sumberdaya manusia, keadaan politik dan keamanan serta perekonomian yang belum stabil, demikian pula keterbatasan dana pembangunan akan merupakan tantangan serius upaya industrialisasi di perdesaan. Oleh karena itu, pilihan kegiatan yang akan dilakukan harus benar – benar tepat.

Industrialisasi pertanian di perdesaan membutuhkan investasi yang sangat besar. Oleh sebab itu, kebijakan utama yang perlu ditempuh adalah upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya investasi baik domestik maupun asing. Hal ini tentu saja harus didukung dan diawali dengan pengembangan infrastruktur perdesaan yang semakin baik, seperti sarana jalan, pengairan, listrik dll.

Selanjutnya adalah konsistensi pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian daerah dalam membangun daerahnya sendiri akan mempercepat proses industrialisasi perdesaan. Demokratisasi, transparansi serta law enforcement di segala lini selanjutnya akan menambah kuatnya bangun industri perdesaan.

Khusus untuk pengembangan agroindustri, beberapa kebijakan pelayanan yang perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangannya antara lain : (1) Penyediaan dana investasi bagi industri skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan pangsa pasar yang ada; (2) Membuat “cetak biru” pembangunan agroindustri dengan memperhatikan lokasi sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja dan kondisi social budaya dan lingkungan; (3) Pengendalian kondisi ekonomi makro yang kondusif bagi pengembangan agroindustri; dan (4) Memilah – milah skala agroindustri yang perlu mendapatkan pelayanan dan yang sudah saatnya harus diawasi, supaya tidak mengarah pada monopoli suatu usaha agroindustri tertentu (PSE, 1999).

Selanjutnya untuk menghadapi tantangan pasar global yang akan melibatkan Indonesia pada perdagangan yang semakin kompetitif, dituntut kesiapan disegala sektor. Untuk itu, pilihan bagi upaya membangun sektor pertanian adalah merubah secara terencana corak pertanian dari subsisten, tradisional menjadi maju, efisien dan tangguh sebagai wujud pertanian modern yang berdaya saing tinggi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

GERINDA 2020 pada intinya memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan dinikmati oleh keluarga petani perdesaan
2. Meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan yang sekaligus mencegah arus urbanisasi
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani melalui penciptaan sumber pendapatan tambahan dalam rumah tangga petani.
4. Merupakan proses pembelajaran industrialisasi perdesaan yang diawali dengan industrialisasi pertanian yang mempunyai potensi yang sangat besar diperdesaan.
5. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh industri pengolahan hasil pertanian sebagai trigger dan prasyarat pembangunan ekonomi wilayah.
6. Mendorong pengembangan sektor pertanian on farm melalui penyediaan alternatif pasar yaitu industri pengolahan di perdesaan sekaligus memanfaatkan secara optimal produk utama dan *by product* hasil pertanian.
7. Mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan sebagai prasyarat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan daya beli, usaha – usaha produktif dan kesempatan kerja.
8. Menyediakan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi kaum wanita sebagai antisipasi issue “gender” karena industri

rumah tangga dapat dikerjakan oleh ibu/perempuan dengan lebih baik, lebih teliti, efisien dan efektif.

9. Mendorong berkembangnya "Workshop" dengan industri penunjang di perdesaan yang menghasilkan alat – alat pasca panen dan alat –alat pengolahan dan komponen pendukung lainnya.



BAB V

PROGRAM

Sebagai sebuah gerakan yang terpadu dan melibatkan banyak pihak maka program GERINDA 2020 tidak dapat dilakukan oleh sebuah instansi tertentu saja, melainkan harus merupakan *concern* bersama. Sebagai sebuah gerakan maka GERINDA 2020 memerlukan penancangan sebagai tonggak kesepakatan bersama segenap bangsa. Penancangan haruslah dilakukan oleh pemimpin tertinggi di negeri ini dan mendapat dukungan penuh dari berbagai komponen bangsa. Untuk mendukung realisasi gerakan diperlukan program dalam skala nasional dan lokal yang melibatkan sasaran utama secara langsung. Untuk itu, maka program implementasi GERINDA 2020 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Program Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)

Program ini bertujuan untuk mempercepat tumbuh kembangnya unit-unit usaha pengolahan hasil pertanian di pedesaan. Unit-unit usaha rumah tangga, usaha skala kecil dan menengah dipedesaan yang memiliki potensi dan dinilai mampu mengembangkan usahanya akan difasilitasi oleh UP3HP, yaitu berupa pembinaan terpadu yang mencakup segi pembinaan teknis pengolahan, mutu olahan, penciptaan dan pemanfaatan peluang pemasaran maupun penguatan kelembagaan usahanya melalui peningkatan dalam bidang manajemen usaha dan

permodalan mencakup modal usaha dan investasi (pengoptimalan penggunaan peralatan).

Maksud program UP3HP adalah sebagai salah satu upaya fasilitasi bagi pemberdayaan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian agar dapat menerapkan manajemen mutu, manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna dan memudahkan mengakses sarana pengolahan dan permodalan serta pemasaran hasil.

Sasaran program ini selama 5 tahun kedepan diarahkan pada penumbuhan 330 unit UP3HP di 30 Propinsi dan seluruh kabupaten/kota yang akan mencakup lebih kurang 82.500 rumah tangga.

2. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Dengan adanya informasi pasar maka peluang pasar dapat diketahui oleh setiap pelaku usaha dan distorsi pasar yang terjadi selama ini terhadap produk perkebunan di pasar internasional dapat dihindari.

3. Pembangunan Infrastruktur dan Jaringan Pemasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah mempermudah akses bagi produsen maupun konsumen atau pedagang perantara atau ritel kepada pasar serta untuk lebih menciptakan transparansi dalam pasar terutama dalam penciptaan harga. Disamping itu

infrastruktur pemasaran juga akan berperan dalam meningkatkan efisiensi pemasaran.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah pembangunan Terminal Agribisnis (TA) pada pusat – pusat konsumsi seperti perkotaan besar (co. ibu kota propinsi) dan Sub Terminal Agribisnis (STA) yang ditempatkan dipada lokasi dimana disamping terdapat pusat konsumsi juga cukup dekat ke sumber/sentra produksi sebagai tempat pengumpulan dan perdagangan sebelum dibawa ke TA (umumnya di ibu kota kabupaten).

4. Promosi Produk Pertanian

Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan terjadinya aliran yang lancar dari produk segara maupun olahan ke pengguna akhir serta terjadinya peningkatan nilai dan volume dari aliran tersebut.

Kegiatan ini tidak hanya sebatas slogan, spanduk, iklan dll, tapi yang lebih penting diarahkan pada penciptaan permintaan (demand creation) melalui munculnya kegiatan – kegiatan operasional penjualan atau usaha – usaha trading dan penjualan dilapangan serta pembentukan selera terhadap produk domestik (kecintaan pada produk dalam negeri).

5. Pengembangan Pusat – pusat Pertumbuhan Agroindustri di Daerah.

Kegiatan ini diarahkan inklusif dengan pembangunan daerah yang bersangkutan dan didasarkan atas keunggulan masing – masing daerah dengan focusing pada keterpaduan antara sentra produksi dengan industri pengolahannya.

6. Pengembangan Laboratorium Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Kegiatan ini diharapkan akan mendorong pengembangan dan pembinaan sistem jaminan mutu secara terpadu antara petani sebagai pemasok dengan agroindustri dan eksportir selaku penerima. Disamping itu dikembangkan pula sistem jaminan mutu bagi proses dan produktivitas agroindustri.

7. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian

Kelembagaan; meliputi lembaga keuangan, Litbang, pengembangan SDM, Organisasi ekonomi petani.

Salah satu program aksi yang saat ini tengah dikembangkan guna mengoptimalkan kelembagaan pengolahan hasil pertanian adalah pengembangan **Agribisnis Perberasan Berbasis Penggilingan padi.**

Kegiatan ini didasari peran penting usaha penggilingan padi dalam peningkatan nilai tambah usahatani padi. Tujuan dari kegiatan ini adalah ; memanfaatkan usaha penggilingan padi sebagai media pendorong peningkatan produksi dan produktivitas padi melalui fasilitasi penyediaan input serta

perbaikan mutu hasilnya; mengembangkan usaha penggilingan padi sebagai pilar pendukung pengembangan lumbung pangan di pedesaan serta mengembangkan diversifikasi usaha penggilingan padi kearah pengolahan hasil samping (pakan) dan bengkel alat mesin pertanian, penyedia suku cadang serta unit pelayan jasa aslin.

Kegiatan ini diharapkan akan mengoptimalkan peran PERPADI sebagai agent of development khususnya di perdesaan mengingat aktivitas anggota PERPADI merupakan salah satu motor penggerak ekonomi perdesaan.

8. Pengembangan Workshop-wokshop dengan industri penunjang di perdesaan yang menghasilkan alat – alat pasca panen dan alat –alat pengolahan dan komponen pendukung lainnya.

9. Pengembangan Sistem Kemitraan Terpadu

Untuk menjamin dan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan usaha di bidang agribisnis yang pada umumnya berskala kecil, diperlukan suatu pola system pengembangan yang terpadu, salah satunya dapat dilakukan melalui system kemitraan terpadu, yaitu suatu system kemitraan untuk memperkuat eksistensi integrasi vertical suatu atau sekelompok komoditas, dimana kemitraan yang terbentuk merupakan pengejawantahan dari kebersamaan berusaha, bertumbuh dan berkembang bersama, bekerjasama sambil bersaing (coopetition) serta keadilan dalam pembagian nilai tambah. Melalui kemitraan yang

terbentuk diharapkan keterbatasan – keterbatasan yang dimiliki oleh para partisipan kemitraan dapat diatasi secara bersama-sama.



GRAND STRATEGY

PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI (INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN)



**Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
DEPARTEMEN PERTANIAN**

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
II. KONDISI SAAT INI	2
III. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS	7
IV. ARAH, SASARAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI	8
V. PROGRAM PENGEMBANGAN	10
VI. PRIORITAS PENGEMBANGAN	11



I. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah kelanjutan dan peningkatan. Di masa lalu, dengan orientasi pada peningkatan produksi, maka yang menjadi motor penggerak sektor pertanian adalah usahatani dimana hasil usahatani menentukan perkembangan agribisnis hilir dan hulu. Hal ini memang sesuai pada masa itu, karena target pembangunan sektor pertanian masih diorientasikan untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin. Selain itu, konsumen juga belum *demanding demand* pada atribut-atribut produk yang lebih rinci dan lengkap.

Dewasa ini, dan terlebih lagi di masa yang akan datang, orientasi sektor pertanian telah berubah kepada orientasi pasar. Dengan berlangsungnya perubahan preferensi konsumen yang makin menuntut atribut produk yang lebih rinci dan lengkap serta adanya preferensi konsumen akan produk olahan, maka motor penggerak sektor pertanian harus berubah dari usahatani kepada agroindustri. Dalam hal ini, untuk mengembangkan sektor pertanian yang moderen dan berdaya saing, agroindustri harus menjadi lokomotif dan sekaligus penentu kegiatan sub-sektor usahatani dan selanjutnya akan menentukan sub-sektor agribisnis hulu.

Agroindustri adalah industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara (*intermediate product*) maupun produk akhir (*finish product*). Termasuk di dalamnya adalah penanganan pasca panen, industri pengolahan makanan dan minuman, industri biofarmaka, industri bio-energy, industri pengolahan hasil ikutan (*by-product*) serta industri agrowisata.

Paling sedikit ada lima alasan utama kenapa agroindustri penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masa depan, yakni karena:

- a. Industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia.
- b. Produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar sehingga kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan;

- c. Memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir (*forward and backward linkages*), sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya;
- d. Memiliki basis bahan baku lokal (keunggulan komparatif) yang dapat diperbaharui sehingga terjamin sustainabilitasnya;
- e. Memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri dengan agroindustri sebagai motor penggerakannya.

Dengan keunggulan komparatif sumberdaya alam yang ada serta melihat peluang yang luar biasa lebarnya, maka dalam jangka panjang pengembangan agroindustri nasional ditujukan untuk membawa Indonesia menjadi *New Agroindustrial Country (NAC)*.

II. KONDISI SAAT INI

2.1 Kinerja Agroindustri

Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997 hanya berpengaruh temporer terhadap jumlah (unit) usaha agroindustri baik skala menengah, besar, kecil maupun skala rumah tangga. Industri skala menengah dan besar pada tahun 1996 sampai dengan 1998 sudah terjadi penurunan jumlah dari jumlah 5.608 unit berkurang menjadi 5.357 unit. Industri skala kecil menurun dari 91.922 unit menjadi 52.524 unit. Demikian juga industri skala rumah tangga menurun dari 963.210 unit berkurang menjadi 719.668 unit. Setelah itu jumlah unit usaha skala menengah-besar, kecil dan rumah tangga menunjukkan kenaikan yang konsisten dan pada tahun 2000 telah berturut-turut menjadi 5.612 unit, 82.430 unit, dan 828.140 unit .

Dilihat dari total outputnya, maka krisis ekonomi hampir tidak punya dampak terhadap agroindustri. Hal ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa total output terus mengalami pertumbuhan yakni sebesar Rp. 59.667 milyar (1996), Rp. 68.660 milyar (1997), Rp. 111.802 milyar (1998), Rp. 126.552 milyar (1999), dan Rp. 145.392 milyar (2000).



Tabel 1. Kondisi agroindustri tahun 1996-2000

No	Skala Usaha/Kegiatan	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Industri Skala Menengah dan Besar					
	a. Jumlah Usaha (unit)	5.608	5.544	5.357	5.459	5.612
	b. Tenaga kerja (orang)	810.221	791.393	840.923	809.666	836.000
	c. Total output (milyar Rp.)	49.199	56.578	94.568	107.897	125.855
2.	Industri Skala Kecil					
	a. Jumlah Usaha (unit)	81.892	91.922	52.524	67.214	82.430
	b. Tenaga kerja (orang)	639.533	780.136	402.558	521.157	594.923
	c. Total output (milyar Rp.)	4.407	6.479	6.592	7.466	8.319
3.	Industri Skala Rumah Tangga					
	a. Jumlah Usaha (unit)	930.904	963.210	719.668	789.901	828.140
	b. Tenaga kerja (orang)	1.866.7	1.794.7	1.487.2	1.645.0	1.722.7
	c. Total output (milyar Rp.)	75 6.061	94 5.603	58 10.642	03 11.189	11 11.218

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS), 2000

Dibanding dengan produk segar, produk olahan mampu memberikan nilai tambah yang sangat besar. Data BPS menunjukkan bahwa perolehan devisa dari ekspor produk olahan dari tahun 1997 sampai dengan 2000 adalah rata-rata sebesar US\$ 4.638,2 juta sementara ekspor produk segar hanya mencapai US\$ 119,2 ribu (Tabel 2). Dari komoditi yang ada, ekspor produk olahan hasil perkebunan merupakan penyumbang terbesar dari perolehan devisa.

Dilihat dari data impor, maka pada kurun waktu yang sama (1997-2000) rata-rata impor produk olahan mencapai US\$ 1.894,7 juta sedangkan impor produk segar mencapai US\$ 1.358,9 juta. Besarnya nilai impor ini menunjukkan bahwa industri pengolahan masih perlu dikembangkan lagi khususnya industri pengolahan hasil perkebunan.

2.2. Kendala

Sebagai sektor yang mempunyai kekuatan untuk menjadi penggerak ekonomi nasional, agroindustri telah memperlihatkan peran yang sangat besar. Namun demikian agenda pengembangan agroindustri juga menghadapi sejumlah kendala yang antara lain adalah :

- a. Rendahnya jaminan ketersediaan dan mutu bahan baku.
- b. Mutu produk agroindustri yang masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan pasar, khususnya pasar internasional.
- c. Sumberdaya manusia (SDM) yang masih belum profesional.
- d. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti belum berkembangnya workshop-workshop yang mengembangkan alat-alat pengolahan.
- e. Teknologi pengolahan yang masih belum berkembang.
- f. Sumber pendanaan yang masih kecil.
- g. Pemasaran yang belum berkembang.
- h. Belum adanya kebijakan yang mengendalikan ekspor bahan mentah untuk melindungi dan merangsang berkembangnya agroindustri di dalam negeri.

2.3 Peluang Pengembangan Agroindustri

Peluang pengembangan agroindustri di Indonesia terbuka sangat luas, hal ini dimungkinkan karena adanya dukungan faktor internal dan eksternal yang kuat. Faktor internal yang memperkuat pengembangan agroindustri adalah :

- a. Besarnya jumlah penduduk yang menjadi pasar produk agroindustri;
- b. Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat yang mendorong permintaan akan produk pangan olahan. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan akan produk pangan dan minuman olahan meningkat dari Rp.4.770 (6,19% dari total pengeluaran untuk makanan) pada tahun 1988 menjadi Rp.9.089 (7,06% dari total pengeluaran untuk pangan) pada tahun 2000.
- c. Cukup tersedianya sebagian besar bahan baku produksi di dalam negeri;

- d. Kapasitas produksi beberapa usaha agroindustri yang masih dapat ditingkatkan;



Tabel 2. Ekspor-Impor produk agroindustri (1997-2000)

(US\$.000)

No.	Komoditi	1997		1998		1999		2000	
		Export	Impor	Export	Impor	Export	Impor	Export	Impor
1.	Perkebunan								
	a. Segar	32		397	-	2.260	-	738	-
	b. Olahan	5.180.084	1.522.337	4.079.492	1.247.042	4.090.548	1.427.774	3.886.447	1.257.265
2.	Tanaman Pangan								
	a. Segar	39.847,00	1.399.689	94.374	1.666.586	43.044	2.165.362	20.460	1.310.366
	b. Olahan	70.729,00	369.182	62.811	221.425	48.143	260.974	38.598	425.331
3.	Hortikultura								
	a. Segar	46.666	144.387	30.194	123.624	52.424	206.024	41.838	206.493
	b. Olahan	94.255	13.883	47.484	10.000	299.847	31.218	257.015	31.218
4.	Peternakan								
	a. Segar	19.965	196.420	19.976	41.435	28.423	50.726	36.035	104.546
	b. Olahan	46.983	172.154	92.272	122.546	90.008	160.587	168.041	305.707
Total Produk Segar		106.510	1.740.495	144.941	1.831.644	126.150	2.422.112	99.070	1.621.405
Total Produk Olahan		5.392.051	2.077.556	4.282.059	1.601.013	4.528.545	1.880.552	4.350.102	2.019.520

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS), 2001

akseta/Renstra agroindustri

Faktor eksternal yang mendukung bagi pengembangan agroindustri adalah:

- a. Perekonomian dunia yang semakin membaik;
- b. Naiknya permintaan dunia akan produk agroindustri;
- c. Tingginya konsumsi produk agroindustri di masyarakat negara maju.

III. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Beberapa perkembangan lingkungan strategis yang menjadi perhatian dalam pengembangan agroindustri adalah antara lain :

3.1 Lingkungan domestik

Reformasi pembangunan yang mengarah kepada tuntutan transparansi, demokratisasi, partisipasi, otonomi daerah dan *good governance*, menuntut terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan nasional termasuk pembangunan agroindustri. Karena itu, pembangunan agroindustri kedepan diarahkan kepada peningkatan sebesar besarnya peran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah yang sebelumnya berperan sebagai perencana dan pelaksana diharapkan hanya menjadi sebagai fasilitator, stimulator dan promotor pembangunan. Karena itu, dalam rangka meningkatkan efektifitas pengembangan agroindustri, tuntutan sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku usaha agroindustri baik ditingkat pusat maupun daerah yang lebih harmonis sangat diharapkan sekali.

3.2 Lingkungan internasional

Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional (GATT/WTO) dan regional (APEC, AFTA, MEE, NAFTA) serta blok-blok lainnya, maka pasar didalam negeri terintegrasi kuat dengan pasar regional/internasional dan memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi serta menghapus segala proteksi dan subsidi. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan agroindustri kedepan karena :

- a. Setiap negara harus meningkatkan daya saing produknya agar dapat berperan dalam perdagangan dunia;

- b. Dengan semakin terbukanya informasi yang didorong oleh revolusi transportasi dan telekomunikasi menyebabkan kebijakan yang bersifat distorsi seperti kebijakan stabilisasi harga semakin sulit dilaksanakan pemerintah, karena dinamika harga internasional akan secara cepat langsung mempengaruhi kebijakan dalam negeri;
- c. Globalisasi akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dalam hal keragaman, mutu dan keamanan produk agroindustri yang dihasilkan. Karena itu, permintaan akan berubah dari *komoditi* ke *produk* dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan produk;
- d. Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan telah mempengaruhi pasar produk pertanian, sehingga proses produksi pertanian harus didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi sumberdaya alam (*eco-labelling*); dan
- e. Peningkatan kepedulian juga terjadi pada aspek hak asasi manusia (HAM) dan gender serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan merek dagang.

Disamping hal tersebut di atas, sekarang ini masih banyak negara, khususnya negara-negara maju, yang memberlakukan tarif eskalasi pada produk yang berasal dari negara lain yang masuk ke pasar mereka. Ini akan menghambat masuknya produk-produk agroindustri dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.

IV. ARAH, SASARAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

4.1 Arah Pengembangan

Program pengembangan agroindustri diarahkan untuk:

- a. Mengembangkan cluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya.
- b. Mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar.
- c. Mengembangkan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

4.2 Sasaran Pengembangan Agroindustri

Sasaran program pengembangan agroindustri adalah:

- a. Meningkatnya *share* produk olahan dalam ekspor hasil pertanian.
- b. Meningkatnya konsumsi domestik produk olahan yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.
- c. Berkembangnya industri pengolahan di sentra-sentra produksi pertanian, baik skala rumah tangga, kecil, menengah, besar dan koperasi.

4.3 Strategi Pengembangan Agroindustri ✓

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka strategi pengembangan agroindustri dititik beratkan pada:

- a. Pengembangan dilakukan melalui Gerakan Industrialisasi Pedesaan (GERINDA).
- b. Menumbuhkembangkan agroindustri yang menghasilkan komoditas unggulan ekspor.
- c. Mengembangkan agroindustri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan substitusi produk impor seperti industri gula.
- d. Mengembangkan agroindustri tertentu di pedesaan melalui pola kemitraan dengan petani (pendekatan kesesuaian komoditas dengan kondisi sosial budaya dan geografis).
- e. Meningkatkan kualitas SDM agroindustri dengan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan manajemen industri.
- f. Memperkuat keterkaitan antar agroindustri, dan antar agroindustri dengan sektor ekonomi lainnya.
- g. Penyebaran agroindustri yang disesuaikan dengan potensi SDA yang dimiliki daerah setempat, sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan di daerah tersebut.
- h. Melakukan restrukturisasi industri pengolahan skala besar untuk meningkatkan daya saing di pasar global.



V. PROGRAM PENGEMBANGAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan berdasarkan kebijaksanaan pengembangan industri pengolahan serta melihat peluang dan kendala yang ada maka program pengembangan industri pengolahan dititikberatkan pada:

a. *Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Pedesaan (skala rumah tangga, kecil, menengah, dan koperasi)*

Penumbuhan usaha industri pengolahan berbasis pedesaan umumnya berupa unit usaha bersama yang menyerap, melibatkan dan dimiliki oleh warga pedesaan. Usaha berlangsung melalui suatu pola kemitraan antara inti dan plasma (kelompok tani). Industri pengolahan berbasis pedesaan (skala rumah tangga, kecil-menengah) yang terdiri dari industri pengolahan makanan minuman, industri bio-farmaka, industri bio-energy dan industri pengolahan hasil ikutan/samping dikembangkan dengan tujuan :

- (1) Meningkatkan nilai tambah hasil panen di pedesaan, baik untuk konsumsi langsung, maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan.
- (2) Memberikan jaminan mutu dan harga sehingga tercapai efisiensi agribisnis.
- (3) Mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu.
- (4) Sebagai wahana pengenalan, penguasaan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat pedesaan dalam sistem agribisnis.

b. *Pengembangan Industri Pengolahan Skala Besar*

Industri pengolahan skala besar yang meliputi industri pengolahan makanan-minuman, bio-farmaka, bio-energy dan industri pengolahan hasil ikutan dikembangkan untuk kegiatan/berorientasi ekspor dan bernilai tambah tinggi pada daerah-daerah yang dinilai prospektif sebagai akselerator pusat pertumbuhan wilayah dengan melibatkan usaha agroindustri di pedesaan yang berlokasi di daerah sekitarnya sebagai unsur pendukung dari wilayah belakang (*hinterland*). Tujuan pengembangan Industri Pengolahan skala besar tersebut adalah:

- (1) Meningkatkan daya saing produk guna penetrasi pasar ekspor.

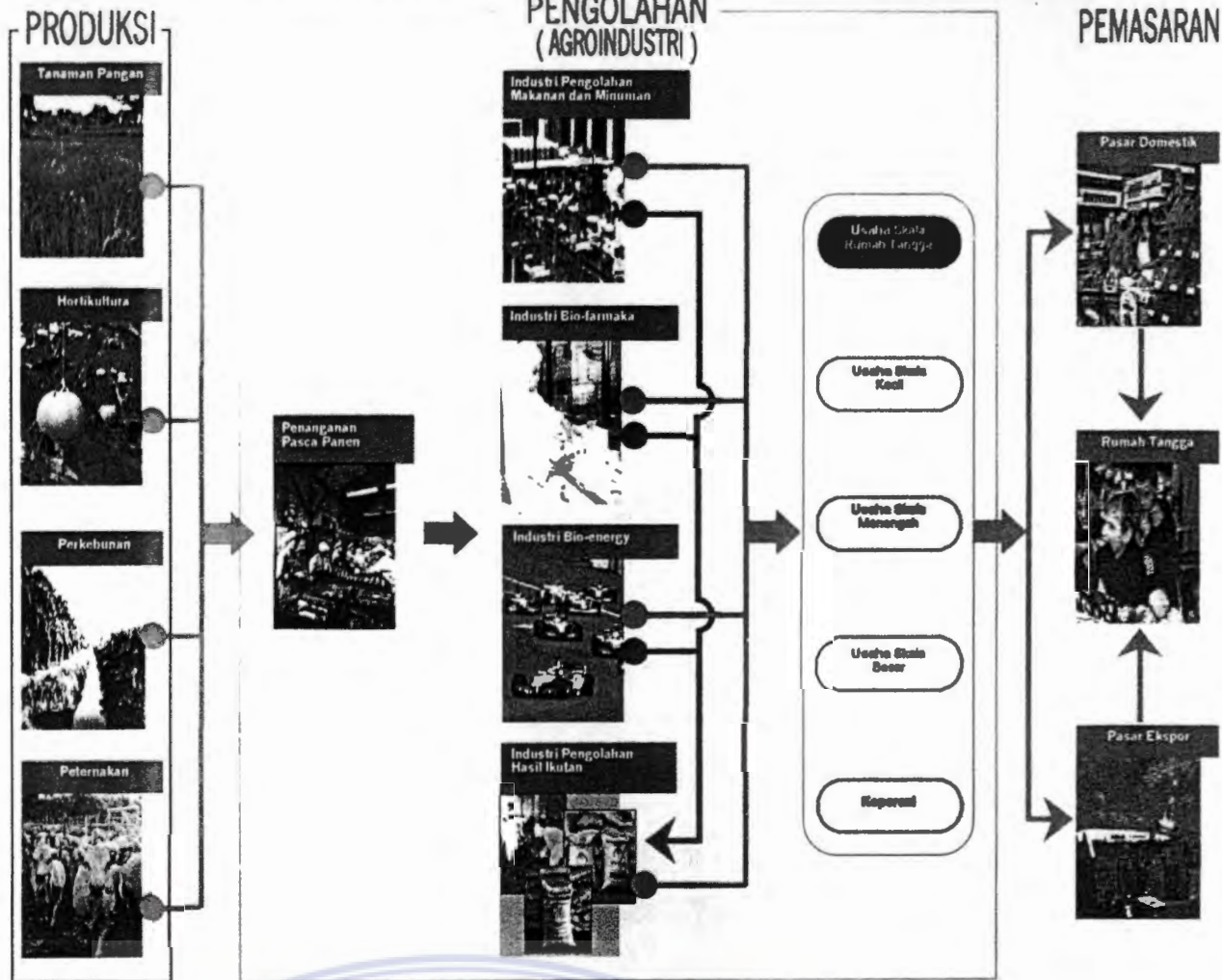
- (2) Perbaiki mutu produksi yang sejalan dengan liberalisasi perdagangan dunia.
- (3) Mendorong penyebaran agroindustri ke berbagai daerah yang prospektif.
- (4) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha industri.
- (5) Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif guna menarik minat investasi di bidang agroindustri.
- (6) Pembinaan industri pengolahan skala besar dengan kemitraan.

VI. PRIORITAS PENGEMBANGAN

Prioritas utama pengembangan agroindustri akan difokuskan pada sinergi antara keunggulan komparatif sumberdaya dengan orientasi pasar, yakni:

- a. Industri pengolahan hasil perkebunan seperti industri pengolahan minyak sawit dan kelapa, industri coklat olahan, industri gula, industri biji mete olahan, industri kopi bubuk/instan, dan industri teh olahan.
- b. Industri pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura seperti industri buah dan sayur dalam kaleng, industri minuman sari buah, industri tepung tapioka dan derivatnya, industri pakan ternak, dan industri makanan ringan.
- c. Industri pengolahan hasil peternakan seperti industri susu olahan, industri daging dalam kaleng, dan industri penyamakan kulit.
- d. Industri pengolahan hasil ikutan/samping seperti industri agro-composting, industri pakan ternak, industri coco fiber dan coco peat, industri karbon aktif, industri minuman dari buah jambu mete, industri nata de-coco dan lain-lain.





GRAND STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR DOMESTIK



DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2002

KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	KONDISI PASAR DOMESTIK SAAT INI.....	2
2.1.	Pasar Produk Tanaman Pangan.....	2
2.2.	Pasar Produk Hortikultura.....	6
2.3.	Pasar Produk Peternakan.....	8
2.4.	Pasar Produk Perkebunan.....	10
III.	PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS...	12
3.1.	Lingkungan Eksternal.....	12
3.2.	Lingkungan internal.....	14
IV.	STRATEGI.....	16
V.	KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL.....	18
VI.	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	KONDISI PASAR DOMESTIK SAAT INI.....	2
2.1.	Pasar Produk Tanaman Pangan.....	2
2.2.	Pasar Produk Hortikultura.....	6
2.3.	Pasar Produk Peternakan.....	8
2.4.	Pasar Produk Perkebunan.....	10
III.	PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS...	12
3.1.	Lingkungan Eksternal.....	12
3.2.	Lingkungan internal.....	14
IV.	STRATEGI.....	16
V.	KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL.....	18
VI.	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22



I. PENDAHULUAN

Konsumsi antara maupun konsumsi akhir oleh konsumen atau pasar merupakan tujuan akhir dari setiap kegiatan ekonomi. Sesuai dengan target konsumennya secara geografis, pasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar internasional (ekspor) dan pasar domestik. Data menunjukkan bahwa pasar domestik untuk produk-produk pertanian sangat besar. Apabila lima persen saja dari penduduk Indonesia yang berpenghasilan dengan daya beli seperti masyarakat maju (katakanlah pasar untuk produk-produk berkualitas dan bernilai tinggi), maka besarnya pasar ini sudah lebih dari setengah besarnya pasar Singapura.

Negara maju memperhitungkan Indonesia sebagai pasar produk pertaniannya dan produk-produk lainnya dengan perhitungan sekitar 10% penduduk dengan daya beli yang mampu menjangkau harga yang mereka tawarkan. Besarnya pasar ini sudah mencapai 20 juta jiwa, angka tersebut lebih dari separoh penduduk Malaysia, yaitu jika semua penduduk Malaysia diasumsikan memiliki daya beli yang dapat menjangkau harga yang ditawarkan.

Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan Indonesia memperhitungkan pasar domestik dengan daya beli yang dianggap cukup memadai adalah sekitar 20 % yaitu sekitar 40 juta jiwa. Sisanya

dari penduduk Indonesia masih lebih kurang 190 juta jiwa dengan daya beli yang lebih rendah, namun tetap menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk pertanian baik segar maupun olahan, paling tidak dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan kemajuan ekonomi dan peningkatan pendapatan, maka pasar yang terakhir ini pun akan bergeser ke kelompok pasar lainnya yang membutuhkan dan dapat menjangkau kualitas tertentu dengan harga yang lebih tinggi.

Bagaimana merebut pasar ini, strategi apa yang sebaiknya dirancang, dan kebijakan operasional apa yang perlu dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini dan situasi lingkungan strategis, akan dicoba diuraikan dalam bagian-bagian berikut telaahan ini.

II. KONDISI PASAR DOMESTIK SAAT INI

2.1. Pasar Produk Tanaman Pangan

Pada umumnya pasar domestik produk tanaman pangan masih terbuka lebar yang ditandai dengan neraca perdagangan yang negatif. Beras masih diimpor dalam jumlah yang cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan kedele dan jagung, bahkan dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan beras dan dengan trend yang meningkat sekalipun pada waktu yang sama

produksi dalam negeri juga meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan terhadap produk tanaman pangan.

Bila dicermati secara seksama, kondisi pemasaran hasil tanaman pangan dalam negeri dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Struktur Pasar Hasil Tanaman Pangan Tidak Sempurna dan Belum Berkeadilan

Struktur pasar hasil tanaman pangan baik segar maupun olahan belum efisien dan tidak mencerminkan pasar bersaing sempurna, namun cenderung berbentuk pasar oligopsoni atau monopsoni. Pada struktur pasar tersebut, maka posisi pembeli sebagai penentu harga dan petani sebagai penerima harga sehingga posisi tawar petani menjadi lemah. Dilain pihak, harga yang diterima petani menjadi relatif rendah dan harga yang harus dibayar konsumen cukup tinggi sebagai akibat panjangnya rantai pemasaran. Demikian pula dengan margin pemasaran yang diperoleh petani belum proposional, petani seringkali menerima keuntungan yang lebih kecil dibanding dengan pelaku pasar lainnya. Selain itu, kebijakan perdagangan impor hasil tanaman pangan belum berpihak kepada petani.



2. Sistem Pemasaran dan Distribusi Hasil Tanaman Pangan Belum Efisien

Beberapa faktor yang menyebabkan sistem distribusi kurang efisien antara lain belum memadainya sarana dan prasarana transportasi. Jaringan distribusi yang belum mapan menyebabkan tersendatnya aliran produk sehingga sering terjadi kelangkaan penyediaan barang di beberapa pasar. Belum mapannya jaringan distribusi, menyebabkan petani sering terpaksa menjual hasilnya kepada para tengkulak dengan harga yang tidak menguntungkan. Keberadaan sentra produksi yang terpencar dengan skala yang kecil menyebabkan proses transportasi menjadi tidak efisien.

3. Sistem Informasi Pasar Belum Mapan dan Efektif

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran hasil tanaman pangan adalah tersedianya informasi pasar yang cepat, tepat dan akurat serta mudah diakses oleh pelaku pasar. Informasi pasar masih sulit diperoleh baik jenis, kualitas maupun aktualitasnya. Beberapa hal yang mempengaruhinya, antara lain :

- a. Jaringan informasi pasar ini masih terbatas hanya pada beberapa daerah, sementara di banyak sentra produksi dan pasar potensial belum tercakup dalam sistem informasi pasar.

- b. Sarana-prasarana informasi berupa institusi pelayanan informasi pasar belum tersebar di daerah produsen. Kecepatan dan ketepatan informasi pasar sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kelengkapan sarana.
 - c. Jenis data dan informasi yang dikumpulkan dan disebarluaskan belum mendorong terjadinya transaksi dan perubahan perilaku petani dalam merespon permintaan pasar yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pasokan.
 - d. Petugas pelayanan informasi belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Luas dan banyaknya daerah produksi dan konsumsi belum mampu dicakup oleh petugas, disamping pengetahuan dan ketrampilannya masih kurang.
4. **Promosi Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Masih Kurang**

Berbagai jenis produk komoditas tanaman pangan baik segar maupun hasil olahan belum banyak diketahui oleh pasar. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya promosi produk unggulan daerah baik di pasar lokal maupun di pasar internasional.



5 Kemampuan Pelaku Kegiatan Pemasaran Masih Lemah

Pengetahuan dan kemampuan petani sebagai produsen dan sebagai pelaku pasar masih kurang, mereka masih mengalami kesulitan dalam mengakses pasar dan informasi. Hal ini diakibatkan oleh program penyuluhan pertanian belum banyak menyentuh aspek pengolahan dan pemasaran, kemampuan dan pengetahuan aparat pembina juga belum memadai. Rangkaian ini mengakibatkan rendahnya kemampuan petani dalam mengadopsi perubahan teknologi sehingga pada akhirnya akan menyebabkan harga yang diterima petani relatif rendah.

2.2. Pasar Produk Hortikultura

Sub sektor hortikultura memegang peranan penting dalam pertanian Indonesia secara umum. Komoditas hortikultura, khususnya buah-buahan dan sayuran, merupakan bahan pangan sumber vitamin dan protein nabati yang esensial bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal perolehan devisa negara, sub sektor ini sudah menunjukkan prestasinya. Data BPS menunjukkan dalam tahun 1995 nilai ekspor komoditas hortikultura beserta olahannya mencapai US\$ 147.103.758 dan tahun 1999 naik 31,4% menjadi US\$ 193.338.815.



Peluang pasar domestik hortikultura masih sangat terbuka tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga sebagai komoditas substitusi impor, walaupun volume impor hortikultura relatif kecil jumlahnya. Pada tahun 2000 misalnya volume impor sayur dan buah-buahan masing-masing sebesar 297.203 ton (3,9% dari total produksi) dan 299.906 ton (3,6% dari total produksi).

Dengan jumlah penduduk sebanyak 230 juta jiwa maka potensi penyerapan pasar domestik sangat terbuka lebar, apalagi tingkat konsumsi buah dan sayuran masyarakat Indonesia saat ini masih dibawah standar yang ditetapkan FAO.

Sesuai dengan ketentuan FAO, maka untuk hidup sehat seorang manusia harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahan sebanyak 65,75 kg per kapita pertahun. Pada saat ini konsumsi buah-buahan Indonesia baru mencapai 40 kg per kapita per tahun, sedangkan konsumsi sayuran baru mencapai 38 kg per kapita per tahun. Dengan gambaran tersebut maka konsumsi domestik untuk sayuran pada tahun 2000 mencapai 7.668.220 ton (produksi nasional baru mencapai 7.559.186 ton), sedangkan konsumsi buah-buahan mencapai 8.216.360 ton (produksi nasional baru mencapai 8.337.900 ton).



Dengan demikian bila kita meningkatkan konsumsi untuk buah dan sayuran masing-masing sebanyak 1 kg per kapita per tahun, maka akan terjadi peningkatan konsumsi sebesar 460 juta ton buah dan sayur. Bila hal ini dapat dilakukan maka betapa besar manfaatnya dirasakan oleh petani produsen kita. Hal ini tidaklah terlalu sukar dicapai karena dengan peningkatan 1 kg per kapita per tahun, maka kita hanya membutuhkan peningkatan konsumsi 2,7 gr per orang per hari. Apabila peningkatan konsumsi ini dapat dilakukan maka tugas berikutnya adalah bagaimana meningkatkan produksi domestik kita.

2.3. Pasar Produk Peternakan

Widya Pangan dan Gizi (WPG) telah menetapkan standar gizi nasional dan untuk konsumsi daging telah ditetapkan sebesar 10,1 kg/kapita/tahun. Data sejak tahun 1995 - 2000 menunjukkan konsumsi daging nasional belum pernah mencapai standar yang ditetapkan. Yang tertinggi adalah tahun 1995 dan 1996, mencapai 80 % dari standar. Selebihnya pada umumnya berada dibawah 40 %. Konsumsi telur juga masih relatif kecil yaitu pada tahun 1999 sebesar lebih kurang 3 kg/kapita/tahun. Demikian pula dengan konsumsi susu yang masih cukup rendah sebesar 4,2 kg/kapita/tahun pada tahun 1998.



Apabila dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia misalnya, konsumsi ketiga jenis produk ini sangat jauh dibawah. Untuk tahun 1999, rata-rata konsumsi daging di Malaysia mencapai 88,3 kg/kapita/tahun, telur mencapai 42,3 kg/kap./tahun dan susu mencapai 55,7 kg/kap./tahun. Dengan kata lain, konsumsi daging, telur, dan susu penduduk Indonesia hanya sekitar masing-masing 7 %, 8 %, dan 11 % dari konsumsi penduduk Malaysia.

Katakanlah terdapat sepertiga dari penduduk Indonesia dengan daya beli seperti penduduk Malaysia (kemungkinan lebih besar lagi), sedang sisanya katakanlah tidak mengkonsumsi daging sama sekali. Seharusnya rata-rata konsumsi daging penduduk Indonesia adalah sebesar 29.4 kg/kap./tahun, telur sebesar 14.1 kg/kap/tahun, dan susu sebesar 18,6 kg/kap/tahun. Angka-angka ini jauh dari rata-rata konsumsi saat ini yaitu masing-masing sebesar 10,1 kg/kap/thn., 3 kg/kap/thn., dan 4,2 kg/kap/thn.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis di atas adalah bahwa penduduk Indonesia dengan daya beli yang setara dengan penduduk Malaysia masih mengkonsumsi produk peternakan jauh dibawah rata-rata konsumsi penduduk Malaysia. Artinya bahwa potensi meningkatkan konsumsi ini masih sangat besar. Ada dua kemungkinan penyebab mengapa tingkat konsumsi ini rendah. Pertama kebiasaan makan daging, telur dan susu belum menjadi

budaya masyarakat Indonesia. Bila ini yang menjadi penyebab, maka peluang meningkatkan pasar domestik sangat besar melalui promosi. Kemungkinan kedua adalah produksi dalam negeri yang masih kecil dan sebagian masih diimpor sehingga harga dalam negeri relatif cukup tinggi yang tidak memungkinkan konsumsi lebih tinggi.

2.4. Pasar Produk Perkebunan

Pada tahun 2000, produk perkebunan memberikan sumbangan terhadap GDP nomor dua setelah tanaman pangan, yaitu sebesar 4,96%. Konsumsi produk perkebunan pada umumnya dalam bentuk hasil olahan, sehingga harga pada tingkat konsumen merupakan harga bahan baku primer ditambah biaya pengolahan yang harganya relatif lebih tinggi dari kebutuhan primer. Komoditas perkebunan secara tradisional lebih banyak diekspor dari pada dikonsumsi di dalam negeri. Seperti contohnya, konsumsi kakao, dalam bentuk pasta, bubuk/*powder*, coklat batangan/*cooking chocolate*, dimana untuk negara maju konsumsi per kapita lebih dari 4 kg per tahun, sedangkan untuk negara berkembang, konsumsi kakao per kapita kurang dari 1 kg per tahun. Sedangkan untuk konsumsi kopi di Indonesia adalah sebesar 0,6 kg per kapita, sedangkan untuk negara Eropa diatas 5 kg per kapita. Adanya kecenderungan menurunnya harga kopi dunia maupun nasional, dapat mendukung peningkatan konsumsi dalam negeri melalui kegiatan promosi.

Sebagai kebutuhan pokok, konsumsi gula Indonesia diperkirakan masih terus meningkat pada dekade mendatang. Hasil suatu analisis menunjukkan bahwa, laju peningkatan konsumsi pada periode tahun 2000 – 2010 adalah 2,09 % per tahun. Proyeksi tersebut dilandasi asumsi pertumbuhan ekonomi pada dekade mendatang sekitar 4 % per tahun serta laju peningkatan penduduk sekitar 1.3 % per tahun. Berdasarkan proyeksi tersebut, konsumsi gula Indonesia pada tahun 2005 dan 2010 masing-masing adalah 3.41 dan 3.76 juta ton. Dengan menggunakan proyeksi tersebut, konsumsi gula pada tahun 2002 diperkirakan mencapai 3.21 juta ton.

Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu bahan baku pembuatan minyak goreng, yang merupakan bahan pangan pokok selain gula. Kecenderungan konsumsi minyak goreng terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Konsumsi CPO pada dekade terakhir meningkat cukup tajam dengan laju sekitar pertumbuhan 8 % per tahun, dan pada tahun 2000 konsumsi CPO nasional diperkirakan mencapai sekitar 3 juta ton. Pada dekade mendatang, konsumsi CPO di dalam negeri diperkirakan akan meningkat dengan laju antara 6 % pada tahap awal dan menurun menjadi sekitar 2.5 % pada akhir dekade. Untuk periode 2000 – 2005, konsumsi domestik diperkirakan meningkat dengan laju 6 % - 5 % per tahun. Selanjutnya, untuk periode 2005 – 2010, laju peningkatan konsumsi diperkirakan adalah 5 % - 2.5 % per tahun. Dengan laju

pertumbuhan tersebut, maka konsumsi domestik pada tahun 2005 dan 2010 masing-masing adalah 3.92 juta ton dan 4.58 juta ton.

Dalam rangka peningkatan konsumsi dalam negeri terhadap komoditas perkebunan, harus dipahami benar bahwa komoditas perkebunan harus dibedakan atas dua jenis, yaitu komoditas segar (umumnya sebagai bahan baku industri) dan produk olahan. Untuk produk olahan, maka peningkatan konsumsi dalam negeri dapat dilakukan melalui aktivitas promosi disamping peningkatan mutu dan nilai produk.

III. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1. Lingkungan Eksternal

Liberalisasi perdagangan dunia yang sedang dan akan berlangsung merupakan tantangan yang dihadapi pembangunan agribisnis khususnya pengembangan pasar domestik ke depan. Komitmen-komitmen dalam WTO/AFTA/APEC untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan hasil-hasil agribisnis mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Oleh karena itu, untuk menghadapi liberalisasi perdagangan tersebut bagi Indonesia tidak ada pilihan kecuali mempercepat peningkatan daya saing.

Dewasa ini telah terjadi sejumlah perubahan nilai pada konsumen dalam negeri yang mempengaruhi perilaku dalam membeli suatu produk agribisnis. Perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kaitan kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk yang sehat (*healty*), aman (*safe*)
2. Perubahan gaya hidup (*life style*) masyarakat telah merubah pola dan gaya konsumsi produk-produk agribisnis yang telah meluas pada dimensi psikologis dan kenikmatan. Perubahan ini menyebabkan meningkatnya tuntutan keragaman produk dan keragaman kepuasan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu nilai bersama (*global value*) yang turut dipertimbangkan dalam keputusan ekonomi. Produk-produk agribisnis yang secara langsung atau tidak langsung melanggar HAM dalam proses produksinya akan mengalami pemboikotan (*embargo*) di pasar internasional.
4. Meningkatkan kesadaran konsumen mengenai keamanan pangan dan pelestarian lingkungan telah mendorong masyarakat internasional akan produk eksotik yang dihasilkan melalui

budidaya organik tanpa menggunakan pestisida dan pupuk an-organik

Keempat perubahan tersebut di atas telah merubah perilaku konsumen dalam mengevaluasi suatu produk yang akan dibeli. Bila di masa lalu konsumen hanya mengevaluasi suatu produk berdasarkan atribut utama yakni jenis dan harga, maka dewasa ini dan terlebih-lebih di masa yang akan datang, konsumen sudah menuntut pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Hal-hal tersebut telah melembaga baik secara internasional (misalnya *sanitary* and *phytosanitary* pada WTO) maupun secara individual negara (menjadi standar mutu produk agribisnis setiap negara).

5. Regulasi dan Penyempurnaan Kebijakan dan Peraturan yang terkait dengan kegiatan pemasaran domestik baik kebijakan dan peraturan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (UU Otonomi daerah).

3.2. Lingkungan internal

1. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan terjadi beberapa perubahan penting. Bila sebelumnya peran pemerintah dalam pembangunan agribisnis sangat dominan, saat ini berubah menjadi regulator, fasilitator, stimulator atau

promotor pembangunan agribisnis. Pembangunan agribisnis pada era otonomi daerah akan lebih mengandalkan kreativitas rakyat di setiap daerah. Selain itu, bila pada masa sebelumnya peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan peranan pemerintah daerah, adanya otonomi daerah akan memperbesar peranan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya akan menangani aspek-aspek pembangunan agribisnis yang tidak efektif atau efisien ditangani pemerintah daerah atau menangani aspek-aspek pembangunan agribisnis yang menyangkut kepentingan beberapa daerah dan nasional. Selain itu tuntutan jaman menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan daripada pemerintah.

Perubahan tersebut membawa implikasi penting bagi pengelolaan pembangunan agribisnis, yaitu: (1) Pembangunan agribisnis akan ditentukan oleh pelaku ekonomi yakni usaha-usaha agribisnis mulai dari usahatani keluarga (petani), usaha kecil-menengah, koperasi dan usaha besar. Karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memfasilitasi berkembangnya usaha-usaha agribisnis khususnya usahatani keluarga, usaha kecil-menengah dan koperasi; (2) pemerintah pusat harus lebih memampukan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan agribisnis; dan (3) Kemampuan pemerintah dalam mengorkestra seluruh potensi pembangunan

agribisnis perlu lebih ditingkatkan sehingga sinkronisasi program baik jenis, spatial maupun waktu dapat diwujudkan guna menumbuh-kembangkan kreativitas pelaku agribisnis.

2. Organisasi ekonomi petani perlu ditumbuh-kembangkan untuk ikut menangani tidak hanya industri hulu tetapi juga industri hilir agribisnis, sehingga nilai tambah yang ada pada industri hulu dan hilir agribisnis dapat dinikmati oleh para petani maupun pengolah yang secara individu menguasai usahatani. Pengembangan organisasi ekonomi petani yang demikian juga dapat memperkuat *bargaining power* petani baik di pasar input usahatani maupun pada pasar hasil agribisnis.

IV. STRATEGI

Tujuan strategis (*strategic goals*) yang hendak dicapai dengan upaya pengembangan pasar domestik ini adalah:

- 1) Terciptanya dan bertumbuhnya pasar yang pasti bagi produk-produk segar pertanian,
- 2) Terciptanya dan bertumbuhnya pasar yang pasti bagi produk-produk olahan pertanian.



Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, dengan mempelajari kondisi pasar dalam negeri saat ini yang cukup besar dan masih terbuka untuk diisi, selanjutnya dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang ada, maka dibedakan dua strategi yaitu satu untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dan satu untuk komoditas perkebunan.

Untuk Tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan, maka strategi yang ditempuh adalah :

Promosi yang gencar dalam rangka meningkatkan permintaan dan memperluas pasar terhadap produk dalam negeri baik segar maupun olahan, yang akan meningkatkan pangsa pengeluaran konsumen dalam negeri untuk produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Untuk komoditas perkebunan, strategi yang ditempuh adalah:

Promosi yang gencar dalam rangka meningkatkan permintaan dan memperluas pasar terhadap produk-produk olahan dalam negeri, yang akan meningkatkan pangsa pengeluaran konsumen untuk produk perkebunan.

V. KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL

Pengembangan pemasaran dalam negeri diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang transparan dan berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien, serta meningkatnya pangsa produk lokal di pasar domestik yang terefleksi dari peningkatan konsumsi terhadap produk pertanian Indonesia. Ruang lingkup kebijakan operasional pengembangan pasar domestik hasil pertanian, meliputi:

1. Menciptakan harga yang wajar

Perbaikan sistem pemasaran akan lebih diarahkan pada terbentuknya mekanisme penentuan harga yang wajar, yang pada gilirannya akan menyangkut pembagian keuntungan yang layak bagi produsen dan pelaku pemasaran. Harga yang baik adalah harga yang dapat memberikan keuntungan bagi para produsen, oleh karena itu harga yang tercipta sebaiknya paling tidak bisa menutupi biaya produksinya. Sedangkan dari sisi konsumen, harga yang baik adalah tingkat harga yang sesuai dengan kualitas produknya. Posisi penentuan harga akan sangat menentukan dalam hal mendapatkan harga yang wajar. Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani diperlukan terciptanya harga yang wajar di tingkat petani. Penciptaan harga yang wajar di tingkat petani dapat dilakukan melalui perbaikan struktur dan mekanisme pasar, perbaikan jenis

komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, terciptanya proses pembentukan harga yang transparan.

2. Difersifikasi produk atau pengembangan produk baru dan pengembangan hasil-hasil olahan.

Tujuan dari kebijakan operasional ini adalah menciptakan produk olahan baru maupun pengembangan atau ekspansi produk olahan lama sebagai pasar (*derived demand*) bagi produk on-farm. Sudah barang tentu pasar untuk hasil olahan ini pun harus terus dikembangkan agar dapat menjangkau segmen pasar yang terus berkembang. Peningkatan mutu suatu produk sesuai permintaan konsumen terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Kegiatan usaha untuk menghasilkan suatu produk olahan yang berasal dari hasil ikutan, misalnya produk hasil ikutan kelapa seperti sabut kelapa dan arang kelapa perlu mendapat perhatian kita.

3. Penciptaan aturan/peraturan atau iklim usaha yang kondusif.

- a. Review kebijakan pasar yang sudah ada dan perumusan opsi-opsi kebijakan, mulai dari pusat sampai daerah.
- b. Regulasi dan deregulasi peraturan pemasaran hasil pertanian.

- c. Perbaikan kebijakan sistem distribusi hasil pertanian.
 - d. Perbaikan mekanisme jual-beli hasil pertanian
 - e. Peningkatan dan perbaikan peraturan jaminan mutu dengan penerapan Standar Nasional Indonesia – SNI dan mengadaptasi ketentuan-ketentuan SPS-TBT
 - f. Memberikan pelayanan sertifikasi jaminan mutu dan produk-produk organik
4. Pengembangan asosiasi dan koperasi pemasaran serta kelembagaan pemasaran lainnya

Pengembangan kelembagaan pemasaran ditingkat petani merupakan suatu langkah strategis didalam meningkatkan efisiensi pemasaran yang sekaligus dapat memberikan nilai tambah kepada petani dari aspek pemasaran. Pembentukan lembaga pemasaran ditingkat petani juga dapat mewujudkan petani produsen untuk mendapatkan hak-haknya secara wajar dan sekaligus meningkatkan posisi tawar petani didalam pemasaran

Perlunya dibentuk assosiasi petani komoditi atau suatu wadah bagi sekelompok petani dengan berbagai macam fungsi antara lain untuk memasarkan produknya dengan tujuan agar mendapatkan harga pasar yang wajar.



5. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Saluran Pemasaran.

Para pelaku yang terlibat dalam pemindahan produk dan jasa mulai dari produsen sampai konsumen sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Oleh karena itu untuk mendukung pemasaran maka sarana transportasi perlu mendapatkan perhatian karena sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan distribusi barang. Dalam persaingan global maka ketepatan distribusi sangat menentukan di dalam persaingan merebut pasar. Semua yang terlibat sepanjang mata rantai perjalanan produk tersebut disebut sebagai saluran distribusi (mata rantai pemasaran). Semakin pendek mata rantai tersebut maka semakin tercipta efisiensi pemasaran (dengan asumsi harus efektif). Karakteristik saluran distribusi komoditas pertanian kita yang dihasilkan sebagian besar petani kita cenderung bersifat panjang dan dengan nilai rendah. Hal ini akan kurang menguntungkan posisi petani kita dalam persaingan harga. Karena tingginya biaya pemasaran akibat panjangnya saluran distribusi akan mempersempit keleluasaan produsen (petani) untuk menentukan harga jualnya. Hal ini akan menciptakan tingginya biaya pemasaran yang selanjutnya mengurangi daya saing produk di pasar. Pembentukan pasar lelang diharapkan dapat meningkatkan harga jual pada tingkat petani dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan meningkatkan efisiensi pemasaran.



VI. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Promosi.

Tujuan utama kegiatan promosi adalah memastikan terjadinya aliran yang lancar dari produk segar maupun olahan ke pengguna akhir serta terjadinya peningkatan nilai maupun volume dari aliran tersebut.

Yang dimaksud dengan promosi di sini adalah lebih dari pada sekedar slogan, spanduk, iklan, dlsb., tapi yang lebih penting adalah penciptaan permintaan (*demand creation*) melalui munculnya kegiatan-kegiatan operasional penjualan atau usaha-usaha trading dan penjualan dilapangan, serta pembentukan selera terhadap produk domestik.

Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui, mendorong bertumbuhnya pedagang-pedagang jalanan produk-produk pertanian, mengadakan produk pertanian atau olahan dengan harga murah bersubsidi sehingga pada waktunya konsumen akan mencarinya sekalipun dengan harga normal. Menggalakkan budaya-budaya tertentu yang membutuhkan produk pertanian, sebagai contoh kebiasaan mengungkapkan perasaan melalui pemberian hadiah berupa produk pertanian, bunga misalnya atau keranjang buah. Di samping



itu aliansi dan kerja sama pemasaran juga merupakan sebagian dari berbagai kegiatan yang dapat dilakukan.

Memanfaatkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di masyarakat, sebagai contoh, kecenderungan kembali ke alam dengan menggalakkan konsumsi makanan tambahan atau obat-obatan jamu-jamuan yang terbuat dari bahan baku hasil pertanian dengan *promotional gimmic* tertentu yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya, "dengan mengkonsumsi susu kambing akan tetap awet muda".

2. Pembangunan infrastruktur pemasaran.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mempermudah akses bagi produsen maupun konsumen atau pedagang perantara (grosir) atau ritel kepada pasar serta untuk lebih menciptakan transparansi dalam pasar terutama dalam penciptaan harga. Di samping itu infrastruktur pemasaran juga akan berperan dalam meningkatkan efisiensi pemasaran.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah pembangunan Terminal Agribisnis (TA) dan Sub-terminal Agribisnis (STA). Pembangunan TA ditempatkan pada pusat-pusat konsumsi seperti perkotaan besar, sebagai contoh ibu kota provinsi misalnya. STA ditempatkan pada

lokasi di mana di samping terdapat pusat konsumsi juga cukup dekat ke sumber/sentra produksi sebagai tempat pengumpulan dan perdagangan sebelum dibawa ke TA. STA bisa ditempatkan di ibu kota kabupaten misalnya. Pembangunannya sebaiknya di mulai dengan TA baru STA, dst. Demikianpula dengan penyediaan fungsi TA/STA dapat dikembangkan secara bertahap dimulai dengan fungsi yang paling sederhana yaitu sebagai sumber informasi dan tempat melakukan transaksi. Selanjutnya fungsi peningkatan nilai tambah melalui peningkatan mutu dapat ditambahkan kemudian dan seterusnya fungsi-fungsi fasilitasi pemasaran lainnya.

Pengembangan jaringan informasi pasar dan inteligensi pemasaran merupakan berbagai kegiatan dalam kelompon kebijakan ini di samping infrastruktur pemasaran lainnya.

3. Pengembangan produk khas dengan market nice tertentu.

- a. pengembangan produk-produk pertanian organic,
- b. produk-produk khas daerah tertentu.



4. Pengembangan perdagangan antar pulau.

Tujuan kebijakan mengembangkan perdagangan antar pulau ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan antar daerah. Masing-masing daerah didorong untuk menggali potensi wilayah masing-masing, sehingga kelebihan produksinya dapat diantar pulaukan. Agar perdagangan antar pulau ini berjalan dengan lancar perlu tersedia data mengenai:

- a. Komoditi andalan
- b. Musim atau waktu panen
- c. Suplai dan demand komoditas tertentu di masing-masing daerah

Dengan mulai berlakunya otonomi daerah dimana masing-masing daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan / meningkatkan PAD maka sektor pertanian menjadi salah satu pilihan antara lain dengan mengembangkan perdagangan antar pulau ataupun antar propinsi perlu lebih dikembangkan dengan melakukan pemberahan pada perangkat-perangkat peraturan daerah, melakukan kerja sama antar pemerintah kabupaten untuk komoditi tertentu, dan lainnya.



**5. Pengembangan sistem penyidikan dan informasi pasar
(*market intelligent and market information*).**

Pada era informasi seperti sekarang ini, kebutuhan informasi sangat penting, bahkan ada yang mengatakan siapa yang menguasai informasi akan memenangkan persaingan. Kebutuhan informasi ini bukan hanya bagi pelaku bisnis yang berskala besar, juga mutlak diketahui oleh para petani kita yang jumlahnya besar dengan skala usaha yang kecil-kecil. Mungkin karakteristik sistem informasi kita sudah cukup baik (karena informasi sudah dapat diakses pada wilayah pedesaan sekalipun, seperti melalui radio dan televisi), akan tetapi pengetahuan dan tingkat kemampuan memanfaatkan informasi tersebut belum banyak dimiliki oleh petani kita.

Agar semua pelaku termasuk petani dapat mengetahui situasi pasar termasuk harga yang berlaku, ketersediaan perangkat keras dan lunak diperlukan untuk mendukung penyebaran informasi pasar. Media informasi, seperti bulletin, *news letter*, majalah dan lain-lain berperan penting dalam penyebaran informasi.



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	KONDISI PASAR DOMESTIK SAAT INI.....	2
2.1.	Pasar Produk Tanaman Pangan.....	2
2.2.	Pasar Produk Hortikultura.....	6
2.3.	Pasar Produk Peternakan.....	8
2.4.	Pasar Produk Perkebunan.....	10
III.	PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS...	12
3.1.	Lingkungan Eksternal.....	12
3.2.	Lingkungan internal.....	14
IV.	STRATEGI.....	16
V.	KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL.....	18
VI.	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22



GRAND STRATEGY PENGEMBANGAN EKSPOR HASIL PERTANIAN



**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

2002



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	
Latar belakang	1
Arah pengembangan ekspor produk pertanian.....	2
II. KONDISI SAAT INI.....	2
Keragaan ekspor dan posisi produk pertanian Indonesia di dunia..	2
Keragaan ekspor Impor dan Neraca perdagangan	3
Pasar ekspor produk pertanian Indonesia.....	5
III. PERMASALAHAN	
Permasalahan dari sisi permintaan	7
Permasalahan dari sisi penawaran.....	9
IV. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS.....	10
Lingkungan global yang diatur menurut ketentuan GATT –WTO....	10
Perjanjian perdagangan regional – AFTA 2003.....	11
Perkembangan perjanjian bilateral.....	12
V. STRATEGI PERKEMBANGAN EKSPOR HASIL PERTANIAN....	13
Strategi berorientasi internal.....	13
Strategi berorientasi eksternal.....	14
VI. KEBIJAKAN OPERASIONAL.....	15
VII. PROGRAM AKSI PENINGKATAN EKSPOR.....	17

dengan tuntutan konsumen, pemasaran, perijinan dan lain-lain dimana "*Commodity Board*" tersebut yang menjadi media mempertemukan seluruh *stakeholder* untuk bersinergi.

4. ***Menciptakan atau merevitalisasi berbagai macam regulasi Pemerintah yang mendukung ekspor.***

Diantaranya adalah kebijakan yang terkait dengan bidang pemasaran antara lain tata cara atau prosedur perijinan ekspor/impor, kebijakan fiskal, pajak dan pungutan serta kebijakan pendukung pemasaran lainnya. Dalam rangka mendukung industri gula nasional perlu ditertibkan lisensi impor misalnya ijin hanya diberikan kepada importir produsen, tidak importir umum dengan pengaturan Nomor Pengenal Importir Khusus.

5.2. Strategi berorientasi Eksternal

1. ***Peningkatan akses pasar ekspor produk Pertanian di pasar global, regional maupun pasar spesifik.***

Perluasan pemasaran juga dapat dilakukan dari pasar tradisional ke pasar non tradisional atau "*new market penetration*", misalnya untuk hasil pertanian yang berupa minuman penyegar (Kopi, Teh dan Kakao) dilakukan ekspansi ke pasar Timur Tengah dan Australia.

2. ***Pembangunan Sistim Informasi Pemasaran Ekspor produk pertanian.*** Dengan adanya informasi pasar maka peluang pasar dapat diketahui oleh setiap pelaku usaha dan distorsi pasar yang terjadi selama ini terhadap produk pertanian di pasar internasional dapat dihindari.

Penguatan kerjasama dengan "jaringan pemasaran" baik yang berada di pusat-pusat perdagangan komoditi maupun di negara tujuan melalui penguatan sumberdaya pemasaran.

3. ***Menyusun market intelligence terhadap produk pertanian secara periodik.***

Melakukan evaluasi dan analisa terhadap perubahan persaingan, trend pasar, tuntutan konsumen dan perubahan regulasi/ peraturan internasional sehingga mengurangi hambatan tarif dan non tarif yang dihadapi, dan dapat meningkatkan kemampuan berkompetisi di pasar

global, regional dan spesifik. Kesemuanya dilakukan untuk memperoleh peluang peningkatan ekspor produk pertanian

4. **Menciptakan skala internasional dalam kemampuan "Trading"** termasuk kemampuan promosi dan advokasi terhadap produk yang dipasarkan.
5. **Meningkatkan lobi di forum perdagangan global, regional, bilateral, dan forum internasional lainnya.** Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan posisi tawar produk pertanian di pasar internasional dan memenangkan daya saing melalui pemanfaatan insentif yang tersedia pada masing-masing cara perdagangan tersebut.

VI. KEBIJAKAN OPERASIONAL

1. Melakukan perencanaan ekspor produk pertanian baik secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Upaya menghasilkan produk pertanian yang sesuai dengan tuntutan konsumen secara bersamaan memiliki daya saing pada aspek Harga, Mutu, Jumlah (Jaminan kontinuitas pasokan) dan "appearance" dari produk ekspor.
3. Membangun "Sistim Informasi Pasar" Produk pertanian " terutama dalam rangka memperbaiki distorsi informasi harga dan struktur harga produk yang terjadi ditingkat petani.
4. Upaya meningkatkan kualitas SDM pertanian agar dapat mengadopsi dan beradaptasi dengan teknologi, kemampuan menerima dan mengolah informasi pasar menjadi keuntungan yang kompetitif pada semua stakeholder pertanian. Memobilisasi sumber kecerdasan pada semua stakeholder pertanian dan masyarakat sekitar.
5. Mensosialisasikan cara dan peraturan pemasaran internasional produk pertanian.
6. Meningkatkan Akses Pasar Internasional bagi produk pertanian melalui pengembangan "Jaringan Pemasaran" pengembangan Trading House,

penyelenggaraan promosi dagang dan advokasi produk di pasar-pasar internasional.

7. Mengevaluasi, revitalisasi dan re-engineering policies yang diperlukan baik dalam lingkup internal maupun lingkup eksternal dalam rangka memacu ekspor hasil pertanian. Sebagai contoh adalah mengevaluasi kebijakan dibidang prosedur ekspor, pajak ekspor, tarif impor serta implikasinya bagi seluruh stakeholder yang ada.
8. Menciptakan iklim birokrasi yang transparan dan efisien sehingga biaya ekspor dapat lebih murah.



PROGRAM AKSI PENINGKATAN EKSPOR KOMODITAS PRIORITAS

I. KOMODITI TANAMAN PANGAN :

BERAS :

1. Meningkatkan sertifikasi beras organic
2. Promosi varietas beras baru
3. Identifikasi potensi pasar ekspor

II. KOMODITI PERKEBUNAN :

1. KELAPA SAWIT :

- Mengadakan kesepakatan kerjasama di bidang promosi , pemasaran dan advokasi dengan negara penghasil CPO lainnya
- Melakukan promosi untuk meningkatkan akses ke pasar non tradisional : Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur

2. KOPI :

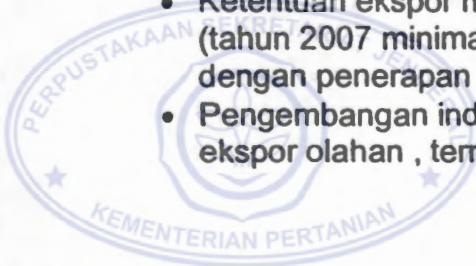
- Pengembangan industri hilir kopi untuk meningkatkan ekspor produk olahan kopi (melalui pemberian insentif bagi investor)
- Melakukan kesepakatan kerjasama pemasaran dengan negara penghasil kopi robusta (Vietnam, India)

3. KAKAO :

- Penerapan secara ketat terhadap persyaratan mutu biji kakao untuk ekspor dan revisi SNI
- Pengembangan industri pengolahan kakao bubuk dan kakao butter untuk meningkatkan ekspor produk olahan kakao

4. JAMBU METE :

- Ketentuan ekspor mete dalam bentuk olahan secara bertahap (tahun 2007 minimal 50 % ekspor dalam bentuk kupasan) dengan penerapan PE mete gelondong
- Pengembangan industri olahan mete untuk meningkatkan ekspor olahan , termasuk industri pengupas mete skala kecil



5. KARET :

- Melakukan kesepakatan kerjasama dibidang pemasaran dengan negara penghasil karet lainnya

III. KOMODITI PETERNAKAN :

KULIT :

- Perbaikan tataniaga ekspor

IV. HORTIKULTURA :

MANGGIS :

- Peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan ekspor (efisiensi, kualitas dan kuantitas)
- Pengembangan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran di sentra produksi dan pelabuhan ekspor
- Promosi ekspor



I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hingga saat ini sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, mengingat peranannya dalam penyerapan lapangan kerja serta penghasil devisa dari sector non migas. Meskipun kinerja ekspor sector pertanian pada periode krisis ekonomi menunjukkan kecenderungan menurun, namun dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya masih memberikan nilai positif. Dengan potensi sumber daya pertanian yang cukup besar, Indonesia pernah menjadi eksportir terbesar antara lain untuk gula dan lada.

Resesi perekonomian global yang terjadi sejak tahun 1998 mengakibatkan perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar negara di dunia misalnya di AS dari 4,1 % pada tahun 2000 menjadi 1,3 % pada tahun 2001, Eropa Barat 3,4 %/th pada tahun 2000 menjadi 1,8 % /th pada tahun 2001 serta Jepang dari 1,5 % /th pada tahun 2000 menjadi negatif 0,5 % /th pada tahun 2001. Pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan mengalami penurunan dari 4,7 % /th pada tahun 2000 menjadi 2,6 % pada tahun 2001.

Kondisi perekonomian global dan krisis multidimensional yang dihadapi didalam negeri juga berpengaruh pada penurunan kinerja ekspor berbagai produk termasuk produk-produk pertanian yaitu berupa produk ternak, tanaman pangan dan hortikultura dan produk tanaman perkebunan primer maupun olahannya. Data BPS menunjukkan bahwa perolehan nilai ekspor produk pertanian periode Januari – Mei 2001 – 2002 belum memberikan pencerahan bagi perekonomian nasional dimana kontribusi ekspor sektor pertanian dari total ekspor nasional adalah 4,05 % atau senilai 991,2 juta dollar AS pada tahun 2001 dan 4,47 % atau senilai 995 juta dollar AS pada tahun 2002, atau hanya tumbuh sebesar 0,42 %.

Disisi lain pertumbuhan kecil namun tetap positif tersebut memberikan makna bahwa ditengah kondisi krisis sekalipun sektor pertanian masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional karena berbagai ekspor hasil pertanian memiliki kandungan lokal yang cukup tinggi.

Namun demikian, dengan makin mengarahnya perekonomian dunia kepada liberalisasi perdagangan global dimana hambatan perdagangan tidak

saja dari aspek tarif namun juga dari aspek keamanan pangan, lingkungan, dll ; maka kinerja ekspor hasil pertanian nasional mengalami hambatan yang cukup besar dan berakibat pada banyaknya produk pertanian ekspor yang mengalami penolakan oleh negara pengimpor utama karena tidak memenuhi persyaratan negara pengimpor.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor produk pertanian diperlukan reformasi dan revitalisasi berbagai program, kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ekspor. Kebijakan pengembangan ekspor produk pertanian dan aktivitas pada seluruh sub sistem agribisnis dari hulu sampai hilir yang diperlukan sebagai upaya mendukung kebijakan pengembangan ekspor harus berdasarkan sinyal atau permintaan pasar.

2. Arah Pengembangan Ekspor Produk Pertanian

Selama ini ekspor hasil pertanian yang sebagian besar merupakan ekspor hasil perkebunan didominasi oleh ekspor komoditi primer. Dalam jangka panjang, pengembangan ekspor sektor pertanian difokuskan kepada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan rencana tersebut, maka pengembangan agroindustri mutlak diperlukan yang pada gilirannya akan mendukung upaya pengembangan ekspor sektor pertanian.

II. KONDISI SAAT INI

2.1. Keragaan Ekspor dan Posisi Produk Pertanian Indonesia di Dunia

Total ekspor produk pertanian Indonesia hanya berkisar 1,39 % pada tahun 2000 atau bernilai US 7,764 milyar dari total ekspor produk pertanian dunia yang mencapai US 558,280 milyar pada tahun 2000. Kinerja ekspor produk pertanian Indonesia terus mengalami penurunan sejak 4 tahun terakhir dan kondisi ini cenderung terus menurun sampai sekarang. Hal ini berbeda dengan negara Asia lainnya seperti Cina, Thailand dan Filipina justru menunjukkan peningkatan ekspor yang cukup berarti. Perkembangan ekspor produk pertanian dunia dan pangsaanya selama periode 1998 - 2000 tertera pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Ekspor Produk Pertanian¹ Dunia dan Pangsa², 1998 - 2000

Negara	Nilai (US \$ Milyar)			Pangsa (%)	
	1998	1999	2000	1999	2000
Dunia	562.270	545.640	558.280	12.2	9.0
China	14.314	14.209	16.384	16.2	6.6
Thailand	11.523	11.762	13.278	33.8	19.2
Malaysia	9.539	9.214	7.681	25.5	7.8
Indonesia	7.706	7.544	7.764	16.2	12.5
Philipina	2.201	1.771	2.538	20.9	6.4

Sumber : WTO Annual report diolah (2000)

Catatan :

1. Produk pertanian terdiri dari produk primer dan olahan
2. Pangsa terhadap total ekspor negara yang bersangkutan

2.2. Keragaan Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Produk Pertanian Indonesia 1997 - 2001

Tabel 2. Keragaan Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Produk Pertanian Indonesia 1997 - 2001

(US \$ 000)

Deskripsi/Tahun	1997	1998	1999	2000	2001
Hsl Tnm Pangan					
Ekspor	110.575	157.185	91.187	59.059	56.363
Impor	1.768.871	1.888.011	2.426.336	1.735.697	1.404.472
Defisit	-1.658.296	-1.730.826	-2.335.149	-1.676.638	-1.348.109
Hsl Tnm Perkebunan					
Ekspor	5.180.116	4.079.889	4.092.807	3.887.184	3.444.386
Impor	1.522.338	1.247.042	1.427.774	1.257.265	1.550.976
Surplus	3.657.778	2.832.847	2.665.033	2.629.919	1.893.410
Hsl Tnm Hortikultura					
Ekspor	140.921	77.678	352.270	298.853	156.788
Impor	224.668	113.111	137.219	237.710	464.261
Defisit	-83.747	-35.433	215.051	61.143	-307.473
Hsl Prod. Peternakan					
Ekspor	66.947	112.247	118.430	204.076	224.602*
Impor	626.322	281.197	398.143	634.184	475.882*
Defisit	-559.375	-	-279.713	- 430.108	-251.280
		281.197			

Sumber : Data BPS, diolah (2001)

Keterangan : * Data s/d Sept. 2001

Berdasarkan keragaan data pada tabel 2. diatas dapat dilihat bahwa hampir semua produk pertanian mengalami defisit kecuali neraca perdagangan pada *sub sektor tanaman perkebunan* surplus. Jika dicermati keragaan neraca ekspor impor produk perkebunan selama 5 tahun terakhir selalu mengalami penurunan.

Defisit neraca perdagangan pada produk hasil tanaman pangan disebabkan oleh besarnya laju impor dan besarnya laju penurunan produksi tanaman pangan selama 3 tahun terakhir (1999 - 2001) terutama pada komoditas beras, jagung, kedelai, ubi jalar dan kacang hijau.

Neraca perdagangan komoditas tanaman hortikultura mengalami defisit pada tahun 1997, 1998 dan 2001, sedangkan pada tahun 1999 dan 2000 mengalami surplus. Tingginya impor produk hortikultura antara lain disebabkan oleh rendahnya bea tarif masuk sehingga produk hortikultura impor membanjiri pasar domestik.

Untuk neraca perdagangan sub sektor peternakan, defisit perdagangan ekspor impornya disebabkan oleh produk domestik belum dapat memenuhi kebutuhan didalam negeri sehingga dalam pemenuhan konsumsi ternak di dalam negeri perlu dilakukan impor yang cukup besar setiap tahunnya. Dilain pihak tingginya harga bahan baku impor seperti pakan ternak untuk industri pengolahan hasil peternakan juga terus meningkat selama 3 tahun terakhir (1998 - 2001).

Secara keseluruhan sektor pertanian masih mampu tumbuh secara positif dimana hampir semua sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif. *Hal ini menunjukan bahwa ekspor produk pertanian mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya pertanian yang mampu memberikan kontribusi besar sebagai sumber penghasil devisa negara .*



2.3. Pasar Ekspor Produk Pertanian Indonesia

Tabel 3. Pasar Ekspor Tradisional Produk Pertanian Indonesia dan Olahannya

Jenis Produk	Pasar Tradisional	Pasar Non Tradisional
Hasil Perkebunan : Lada, Kopi, Kelapa Sawit, Teh, Minyak Atsiri, Kakou, Mete, Tembakau, Karet	Europa Barat, Asia (Jepang, RRC, India, Asia Tenggara), Amerika Serikat,	Europa Timur, Australia, Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika
Hasil Tanaman Pangan : Beras Tepung gandum Ampas gandum Jagung Kedelai Minyak kedelai Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang-kacangan Ubi-ubian	Asia (Malaysia, Philipina, Timor-Timur) Singapura, Timur-Timur Korea, Jepang, Philipina, Jepang, Hongkong, Malaysia, Vietnam Afrika Selatan, India, Spanyol Korea, Singapura, China Singapura, Jepang, Malaysia Taiwan, Singapura, India Hongkong, Korea, Singapura	Jepang
Hasil Hortikultura : Manggis Mangga Rambutan	Jepang, Singapura, Malaysia, Taiwan, China, Saudi Arabia, Brunei, Pakistan, Eropa Barat, Arab Emirat, Qatar, Nigeria, Mauritius, Bahrain, Kuwait, Philipina, Amerika Serikat Jepang, Hongkong, Singapura, Qatar, Taiwan, Saudi Arabia, Brunei, Kuwait, Perancis Hongkong, Malaysia, Singapura, China, Qatar, Emirat Arab, Taiwan, Saudi Arabia, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris	
Kentang	Jepang, Rep.Korea, Taiwan,	

Tomat	Singapura, Philipina, Malaysia, Saudia Arabia, Lebanon, Saint Helena	
Bawang merah	Jepang, Taiwan, Singapura, Malaysia, Slovenia, Brunei, India, Spanyol, St Helena	
Kubis	Hongkong, Taiwan, Singapura, Philipina, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, Slovenia	
Wortel	Jepang, Rep. Korea, Taiwan, Singapura, Benin,	
Jamur	Emirat Arab, Malaysia, Saudia Arabia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Korea, Emirat Arab, Austria, Inggris, Belanda	
Hasil Prod. Peternakan :		
Daging Ayam	Jepang	
Babi hidup, Daging Babi, DOC, Telur Ayam, Daging Itik	Singapura	
Kambing, Domba	Timur Tengah, Malaysia	

Catatan :

- Pasar tradisional = pasar yang selama ini sudah ada (eksis)
- Pasar non tradisional = pasar yang akan dipenetrasi

Dari tabel 3. diatas terlihat bahwa potensi pasar produk pertanian Indonesia baik hasil produk perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan cukup besar dan telah pernah diekspor hampir keseluruhan negara yang ada di Dunia. Dalam rangka memenangkan, mempertahankan dan merebut pangsa pasar tersebut diperlukan berbagai macam upaya untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar, *consumer value perception* dan perbaikan kinerja sumberdaya manusia pengelolanya pada setiap sub sistem agribisnis/agroindustri yang ada.

III. PERMASALAHAN

Beberapa masalah pokok ekspor produk pertanian Indonesia adalah rendahnya daya saing produk pada aspek jaminan mutu *HACCP (Hazard Analytical Critical Control Point)* dan suplai, manajemen distribusi, *time delivery, cost efficiency, product appearance*, tuntutan atribut produk misalnya kesesuaian dengan *ISO series (ecolabeling, ecoefficiency)*, dll sesuai dengan tuntutan pasar. Keseluruhan aspek tersebut merupakan hambatan ekspor yang menurut tatacara aturan perdagangan global WTO dimasukkan dalam kategori SPS (*Sanitary dan Phytosanitary*) dan TBT (*Technical Barrier to Trade*).

Secara garis besar permasalahan yang mengganggu ekspor produk pertanian Indonesia adalah :

3.1. Permasalahan dari sisi Permintaan (Demand)

1. Permasalahan SPS menurut negara tujuan

Tujuan Amerika Serikat

Amerika Serikat memberikan penalti dalam bentuk diskon/reduksi harga secara otomatis kepada produk asal Indonesia untuk komoditas-komoditas kakao, lada, udang dan jamur dengan alasan antara lain terkontaminasi serangga, salmonella, logam berat dan antibiotik. Dalam hal ini Indonesia tidak bisa mengadu ke Komisi SPS WTO karena AS bisa membuktikan secara ilmiah dan Indonesia memang belum bisa mengatasinya.

Tujuan Jepang

Jepang menolak masuknya beberapa buah-buahan Indonesia seperti pisang dan beberapa jenis buah-buahan lainnya dengan alasan terkontaminasi lalat buah. Dalam hal ini Indonesia tidak mengajukan protes ke Komisi SPS WTO karena kenyataannya memang terjadi di Indonesia dan Indonesia sejauh ini belum mampu mengatasinya. Selain itu, Jepang juga menolak masuknya pucuk tebu asal Indonesia dengan alasan penyakit mulut dan kuku (PMK). Untuk kasus ini Indonesia mengadukannya ke Komisi SPS WTO karena Indonesia dalam daftar OIE merupakan salah satu negara yang dinyatakan bebas PMK. Saat ini pembahasannya sudah sampai pada sidang Komite dan harus terus

diperjuangkan sampai Jepang mengakui keputusan OiE tersebut dan menotifikasi ke Sekretariat WTO bahwa Jepang mencabut larangan tersebut.

Tujuan Taiwan

Beberapa komoditas hortikultura dari Indonesia seperti pisang, pepaya dan jeruk (citrus) mengalami pelarangan untuk masuk ke pasar Taiwan dengan alasan ditemukan beberapa lalat buah yang ternyata tidak terdapat di Indonesia. Karena Taiwan baru saja diterima menjadi anggota WTO, maka Indonesia perlu segera melakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di WTO.

Tujuan Malaysia

Kementerian Pertanian Malaysia melalui institusi Karantinanya menerapkan ketentuan yang melarang rambutan, nanas, pulasan dan longan dari Indonesia dengan alasan penyakit. Dalam situs resminya tersebut, Malaysia secara rinci menjelaskan jenis penyakit dari produk-produk tersebut.

2. Permasalahan TBT

Kasus-kasus penolakan ekspor produk pertanian asal Indonesia dengan alasan TBT sebagian besar karena faktor labelling yang dinilai membingungkan konsumen atau tidak mengikuti standar internasional. Selain itu, ada beberapa kasus dengan alasan mutu, seperti tercemarnya produk CPO Indonesia dengan solar.

3. Permasalahan Tarif

Diskriminasi tariff telah diterapkan oleh beberapa negara importir produk pertanian Indonesia. Sebagai contohnya, ekspor CPO Indonesia ke negara India mengalami perbedaan tarif yang cukup besar dengan minyak nabati atau vegetable oil yang berasal dari Amerika. Disamping itu, penerapan eskalasi tarif terhadap produk-produk olahan hasil pertanian oleh negara-negara importir juga mengakibatkan belum berkembangnya ekspor produk olahan hasil pertanian Indonesia.

4. Permasalahan Harga

Fluktuasi permintaan dan penawaran produk pertanian didunia juga berakibat pada fluktuasi harga produk pertanian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over supply pada musim panen raya.

Untuk beberapa produk pertanian tertentu menurunnya daya saing di pasar internasional karena faktor harga. Hal ini disebabkan tingginya inefisiensi di semua subsistem dalam rangkaian sistem agribisnis. Inefisiensi tersebut terjadi mulai dari pengadaan sarana produksi, budidaya, pengolahan panen dan pasca panen serta biaya transportasinya. Disamping itu perlambatan perekonomian global juga mendorong penurunan nyata terhadap permintaan dan penurunan harga produk pertanian seperti kopi. Selama tahun 2001, harga kopi Arabica terus menurun dari 145.5 cent/kg pada bulan Januari menjadi 128.0 cent/kg pada bulan September. Sementara harga kopi Robusta menurun dari 71.4 cent/kg menjadi 53.5 cent/kg pada periode yang sama.

5. Permasalahan Promosi :

Kurangnya promosi dan advokasi produk-produk pertanian Indonesia kepada pembeli langsung mengakibatkan belum mampunya ekspor produk pertanian Indonesia merebut atau meningkatkan pangsa pasar di perdagangan internasional.

3.2. Permasalahan dari sisi Penawaran (Supply)

1. Lemahnya daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional :
 - a. Daya saing produknya : kualitas maupun kuantitasnya; Tidak ada jaminan mutu atau mutu yang tidak seragam, tampilan produk serta standar kemasan banyak yang belum memadai dari sebagian besar produk pertanian yang dihasilkan
 - b. Harga; cost of production, handling dan distribusi yang tinggi
2. Tidak adanya jaminan suplai, terkait dengan pola tanam dan atau kurang baiknya manajemen distribusi produk-pertanian.
3. Daya saing SDM : profesionalisme birokrat dan swasta yang belum memadai, memerlukan adanya peningkatan kualitas SDM disemua lini.
4. Daya saing kelembagaan (pemasaran) : baik organisasinya maupun aturan mainnya (regulasi).
5. Daya saing infrastruktur (sarana-prasarana) ekspor :
 - a. Pisik : palka bongkar muat ekspor, sarana cold storage di pelabuhan ekspor, container yang sesuai untuk ekspor produk horti yang perishable
 - b. Perangkat kebijakan : berbagai kebijakan terkait Otda yang menghambat ekspor .

6. Daya saing service /pelayanan ekspor : Belum dapat diciptakannya ' one stop service' untuk kegiatan ekspor.

IV. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Sebagai konsekuensi dari negara yang mengikuti ketentuan perdagangan internasional yaitu sebagai negara anggota perdagangan di pasar global perlu mengikuti ketentuan atau azas pokok WTO dan pada perdagangan regional, mengikuti azas pokok ketentuan AFTA (2003) dan APEC (2010) serta ketentuan perdagangan bilateral atau spesifik negara mitra dagang. Ketentuan perdagangan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :

4.1. Lingkungan Global yang diatur Menurut Ketentuan GATT/ WTO

1. Kesepakatan dibidang Pertanian atau " AOA" (*Agreement on Agriculture*)

Penjabaran rinci dari perjanjian WTO dalam perdagangan produk pertanian yang harus dipatuhi dalam mengekspor produk pertanian adalah "*Agreement on Agriculture*" yang bertujuan meningkatkan akses pasar, pengurangan subsidi ekspor dan pengurangan bantuan kepada petani agar produksi petani menjadi lebih efisien. Pemanfaatan perjanjian dan kesepakatan ini belum banyak dilakukan sehingga peluang untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia belum dapat dicapai. Selama ini ketentuan WTO masih sering merupakan hambatan ekspor dari pada peluang peningkatan ekspor.

2. Perjanjian WTO yang berkaitan dengan SPS (*Sanitary and Phytosanitary*)

Penerapan SPS pada produk pertanian yang diperdagangkan harus memenuhi kebijakan standar sanitasi yang telah ditetapkan dimana ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlindungan hewan, tanaman dan lingkungan hidup. SPS pada dasarnya tidak boleh menjadi hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan internasional.

Selama ini ketentuan SPS negara-negara importir masih merupakan hambatan ekspor bagi produk pertanian Indonesia, perlu dicermati agar

penerapan SPS negara importir dapat dijadikan dorongan bagi peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar Global.

3. Beberapa isu kunci yang harus diperhatikan pada ketentuan perdagangan yang diterapkan oleh WTO adalah fungsi "Multifunctionality (non trade concern), export subsidies, trade facilitation dan, domestic support. Isu kunci ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengembangkan ekspor produk pertanian sekaligus mengurangi laju impor produk pertanian ke Indonesia.

4.2. Perjanjian Perdagangan Regional AFTA 2003

Perjanjian ini pada dasarnya mengatur ketentuan lalu lintas perdagangan produk antar anggota negara ASEAN , yaitu pada tahun 2003 arus lalu lintas barang dagangan termasuk produk perkebunan, uang pembayaran dan faktor penunjang lainnya yang berasal dari negara-negara anggota bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN hanya dengan hambatan tarif yang diperkenankan 0 - 5 %. Pada saat ini ada 10 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Phillipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar dan Kambodja.

Semua produk pertanian telah dimasukkan dalam daftar produk yang diatur tarifnya dalam program pengurangan tarif yaitu sebagian besar termasuk dalam IL ("Inclusion List") yaitu yang diatur pengurangan tarifnya sesuai dengan ketentuan "*Tarif Reduction Schedule*", tidak boleh ada QRs atau "*Quantitative Restriction*" dan Non Tarif Barrier (NTBs) dari produk tersebut harus dihapuskan dalam kurun waktu 5 tahun. Selain itu , ada juga tarif yang tidak memenuhi ketentuan tarif diatas dengan pertimbangan yang telah disepakati/diratifikasi oleh forum resmi ASEAN yaitu beberapa produk yang dimasukkan dalam "TEL (*Temporary Exclusion List*) yaitu sampai batas waktu tertentu ditolerir besarnya tarif yang ditetapkan, tidak diberlakukan ketentuan QRs dan bentuk NTBs lainnya. SL (*Sensitive List*) yaitu prinsipnya sama dengan TEL hanya jangka waktu yang ditolerir lebih lama yaitu tahun 2010 untu Indonesia. Umumnya produk yang dimasukkan kedalam SL adalah "Unprocessed Agriculture Products" yaitu gula dan Cengkeh untuk produk pertanian. Sedang untuk produk yang digolongkan dalam GE atau *General Exception* Tarif tidak termasuk produk pertanian. Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut mekanisme penurunan tarif yang disepakati adalah CEPT yaitu "*Common Effective Preferential Tariff* ".

Beberapa kesepakatan CEPT adalah (1) pencapaian tarif 0 - 5 % sebesar 85 % dari IL pada tahun 2000 ; (2) 90 % dari IL pada tahun 2001 ; (3) 100 % dari IL di tahun 2002 dengan fleksibilitas. Disamping itu dilakukan juga pemindahan kategori produk yang diperdagangkan dari TEL ke IL dan dari SL menjadi TEL serta mengurangi produk dari daftar pengecualian umum yaitu GE.

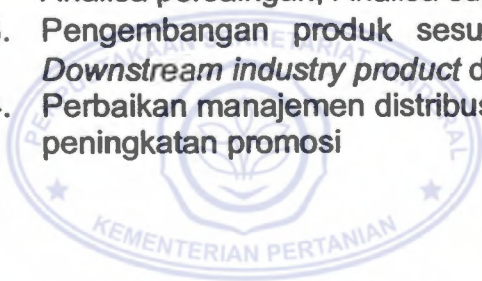
Persyaratan ekspor komoditi pertanian yang harus dipenuhi dalam AFTA dalam rangka memperoleh keringanan bea masuk bagi pelaku usaha pertanian adalah memakai Form D yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Form tersebut mengatur ketentuan asal barang atau "*Rules of Origin*" dari produk barang yang termasuk dalam IL skema CEPT-AFTA. Rules of Origin adalah menentukan barang yang mendapatkan konsesi yaitu besarnya local content/ASEAN content adalah sebesar 40 %, dimana spesifikasi produk tersebut harus termasuk dalam cakupan "*Legal Enactment*" produk CEPT.

4.3. Perkembangan Perjanjian Bilateral di bidang Pemasaran ("Counter Trade" atau Imbal Dagang)

Perjanjian bilateral dibidang perdagangan produk pertanian perlu dilakukan berdasarkan azas *win-win solution* antara lain melalui *counter-trade* atau *imbal dagang*, untuk itu diperlukan kemampuan lobi dan negosiasi disamping upaya menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar.

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekspor produk pertanian pada semua lini dilingkungan strategis tersebut adalah :

1. Adanya persyaratan mutu
2. Antisipisasi secara cermat terhadap dinamika perubahan pasar (misalnya Analisa persaingan, Analisa suplai demand, dll)
3. Pengembangan produk sesuai dengan permintaan pasar (misalnya *Downstream industry product* dan *Branding product*)
4. Perbaikan manajemen distribusi, jaminan suplai, jaringan pemasaran dan peningkatan promosi



V. STRATEGI PENGEMBANGAN EKSPOR HASIL PERTANIAN

Melihat perkembangan neraca perdagangan ekspor import produk hasil pertanian, perlu penanganan yang serius dari semua pihak baik antar instansi pemerintah, swasta, pelaku/praktisi agribisnis serta stakeholder lainnya. Penanganan harus dilakukan secara bersama-sama atau sinergi dengan mengintegrasikan strategi yang berorientasi internal dan eksternal yang dilakukan secara konsisten dan berkesungguhan oleh seluruh staholder. Strategi yang perlu dipertimbangkan diuraikan dibawah ini.

5.1. Strategi berorientasi Internal

1. **Penguatan kelembagaan Agribisnis/agroindustri Pertanian.**

Perbaikan kinerja pada setiap sub-sistem agribisnis yaitu SS-hulu; SS-Pertanian Primer; SS-Agribisnis hilir dan SS-Lembaga jasa. Tiap SS memiliki saling ketergantungan yang tinggi dengan SS lainnya sehingga pengembangan pemasaran produk juga sangat tergantung pada kelancaran hubungan atau kinerja masing-masing SS tersebut. Pada prinsipnya kerjasama tersebut berazaskan *Win - win solution* yaitu memberdayakan dihilir dan memperkuat dihilir.

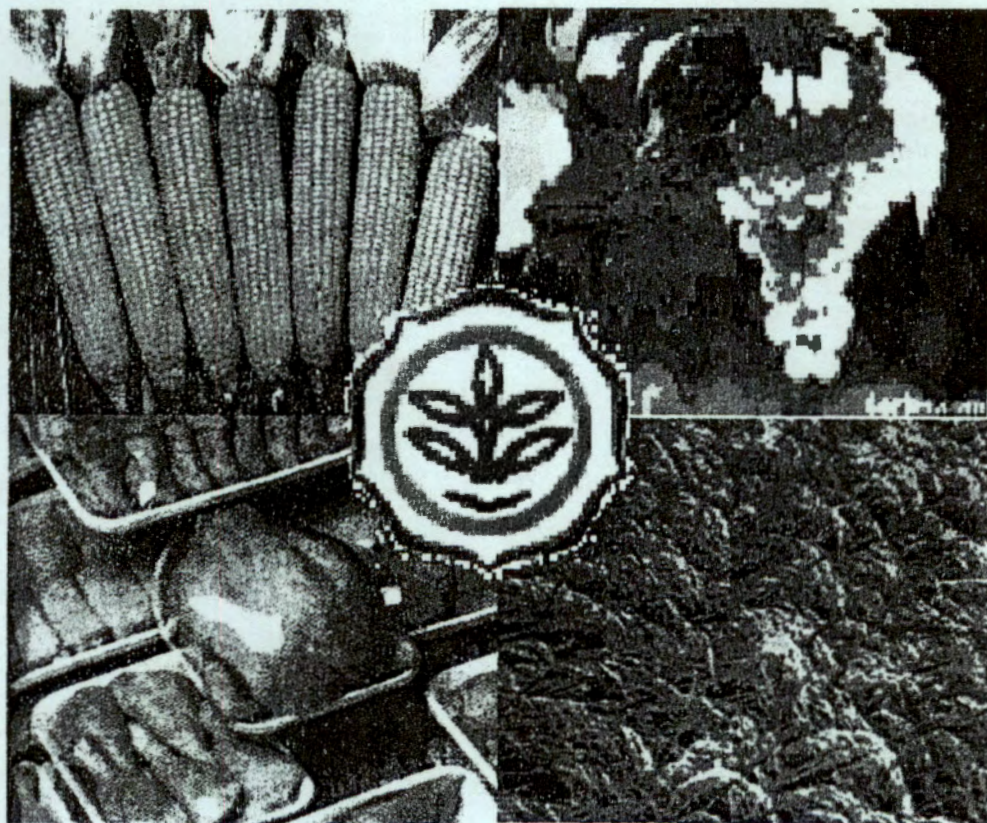
2. **Penetapan Rencana Induk Pengembangan Ekspor Produk Pertanian**

Mewujudkan kesamaan fokus pengembangan ekspor pada komoditi atau jenis produk yang disepakati secara nasional dan harus didukung oleh "*Political Will*" yang kuat. Rencana Induk pengembangan ekspor produk pertanian baik bagi produk ekspor utama dan produk ekspor non utama dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat yang terdiri dari *Segmenting* (Segmen pasar yang dipilih), *Targeting* (Pasar sasaran untuk setiap produk), and *Positioning* (memposisikan produk apakah sebagai *market leader* atau *market follower*), dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif yang dimiliki dan keuntungan kompetitif yang akan diperoleh.

3. **Fasilitasi program kerjasama pengembangan antar lembaga pemerintah atau non pemerintah melalui pembentukan "Commodity Board".**

Fasilitas tersebut terutama dibidang pengembangan produk (pengolahan), perbaikan mutu produk, pengusahaan hak paten sesuai

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR PRODUK PERTANIAN



DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN

2002

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
II. KONDISI SAAT INI	3
III. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS.....	10
IV. STRATEGI.....	13
V. PROGRAM AKSI.....	18



I. PENDAHULUAN

Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas pada tahun 2003 di kawasan AFTA dan APEC pada tahun 2010. Komitmen liberalisasi perdagangan dunia dibidang akses pasar adalah menurunkan proteksi tariff dan penghapusan bentuk non tariff perdagangan hasil pertanian. Hal tersebut juga harus dilakukan oleh Indonesia karena merupakan anggota dari masyarakat perdagangan dunia. Disisi lain Indonesia juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan dan peluang -peluang yang diberikan oleh lembaga internasional dimaksud. Implikasi dari berlakunya peraturan perdagangan dunia tersebut adalah berbagai produk pertanian Indonesia memperoleh persaingan ketat dari produk-produk sejenis yang diimport yang pada umumnya memiliki daya saing tinggi dalam kualitas dan harga jual . Produk pertanian domestik dituntut untuk mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara pesaing, agar produk tersebut masih tetap diminati di pasar lokal dan mempunyai pasar yang baik di pasar internasional. Untuk itu Indonesia perlu mulai menerapkan SNI untuk produk-produk agribisnisnya.

Perdagangan bebas merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha produk-produk pertanian Indonesia apabila tidak dapat meningkatkan daya saingnya. Membanjirnya komoditi pertanian dari negara lain dengan harga yang relatif lebih murah dapat menguntungkan konsumen tetapi dapat memberikan dampak yang negatif bagi industri pertanian di dalam negeri. Upaya-perbaikan secara menyeluruh untuk semua aspek yang mendukung kegiatan usaha perlu dilakukan apabila tidak ingin menjadi negara net importir bagi produk-produk pertanian, yang sesungguhnya dapat diusahakan didalam negeri dan menjadi gantungan hidup jutaan masyarakat pedesaan.

Kebijakan pengadaan pangan yang selama ini diterapkan adalah bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengadaan pangan tersebut dapat dipenuhi melalui

produksi domestik dan impor produk pangan dari negara lain. Ketergantungan pangan terhadap impor akan menciptakan kerentanan ketahanan pangan nasional berkaitan dengan resiko dan ketidakpastian penyediaan pangan dunia dan situasi pasar pangan internasional.

Salah satu hal pokok yang memerlukan penanganan dengan seksama dalam kaitannya dengan pelaksanaan impor adalah : *membatasi masuknya impor secara berlebihan yang dapat berdampak negatif pada pembangunan pertanian dan industrinya di dalam negeri dan tidak melanggar aturan internasional yang telah disepakati.*

Indonesia merupakan peluang pasar bagi negara lain mengingat jumlah penduduk yang besar, apabila tidak dapat dibatasi maka produk impor dapat merusak perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dalam dekade terakhir impor produk pertanian secara umum cenderung meningkat. Kebangkitan ekonomi dan industri pertanian dari keterpurukan akibat krisis akan mengembalikan permintaan dan permasalahan penyediaan produksi pangan.

Secara umum perdagangan produk pertanian selama 5 tahun terakhir selalu dalam posisi deficit, jumlah impor produk pertanian lebih besar dibandingkan dengan jumlah eksportnya. Hanya neraca perdagangan komoditi perkebunan yang mengalami surplus. Untuk memperkecil defisit neraca perdagangan komoditas defisit neraca perdagangan komoditas pertanian tersebut diatas, perlu dirumuskan suatu kebijakan operasional yang dituangkan dalam suatu strategi pengendalian impor.



Tabel 1. Neraca Perdagangan Produk Pertanian Tahun 1997-2001
(000 US\$)

(000 US \$)					
Produk / Tahun	1997	1998	1999	2000	2001
Tanaman Pangan *:					
Ekspor	110,575	157,186	91,187	59,059	56,363
Impor	1,768,871	1,888,011	2,426,336	1,735,697	1,404,476
Defisit	-1,658,296	-1,730,826	-2,335,149	-1,676,638	-1,348,109
Perkebunan *:					
Ekspor	5,180,116	4,079,889	4,092,808	3,887,185	3,444,387
Impor	1,522,337	1,247,042	1,427,774	1,257,265	1,550,976
Surplus	3,657,779	2,832,847	2,665,035	2,629,920	1,893,411
Peternakan*					
Ekspor	66,947	112,260	118,187	204,021	243,651
Impor	837,860	453,866	468,199	752,798	728,601
Defisit	-770,913	-341,606	-350,012	-548,777	-484,950
Hortikultura*					
Ekspor	139,438	80,196	355,930	295,539	171,151
Impor	273,430	124,473	147,435	243,012	253,171
Defisit	-133,992	-44,277	208,495	52,527	-81,720

Sumber : BPS diolah.

*= Data thn 2001 s/d Desember.

II. KONDISI SAAT INI

Produk pertanian yang diimpor Indonesia selama ini didominasi oleh komoditi kapas, kedelai dan olahannya, gandum dan olahannya, gula dan susu. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Produk lain yang juga diimpor dengan nilai yang besar adalah kulit, jagung, beras, ternak sapi, cengkeh, durian, kubis, anggrek, semangka dan bunga potong.



**Tabel 2. Komoditi Pertanian yang Dominan Diimpor
oleh Indonesia tahun 2001***

No	Komoditi	Nilai (US\$)
1	Kapas	1,065,586,305
2	Kedelai dan Olahannya	610,959,789
3	Gandum dan Olahannya	465,230,403
4	Gula	254,314,792
5	Susu	247,877,128
6	Kulit	155,774,349
7	Jagung	137,101,358
8	Beras	135,377,988
9	Ternak Sapi	60,993,340
10	Cengkeh	17,365,069
11	Durian	4,055,059
12	Kubis	599,684
13	Anggrek	423,920
14	Semangka	199,362
15	Bunga Potong	181,001

Sumber : BPS diolah

* = Data s/d Desember 2001

Hampir seluruh negara maju telah menerapkan peraturan impor kenegaranya dengan sangat ketat termasuk produk pertanian. Hal ini untuk menghambat masuknya impor secara berlebihan yang dapat merusak industri pertanian didalam negerinya, juga untuk menghindari masuk dan berjangkitnya wabah penyakit tanaman/ternak dan melindungi konsumennya dari berbagai penyakit yang dapat mematikan.

Memperhatikan beberapa permasalahan di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengendalikan impor komoditas pertanian yang dapat menguntungkan semua pihak. Pemerintah harus mengkaji dengan seksama pilihan kebijakan yang paling menguntungkan dengan meminimumkan resiko. Strategi pengendalian impor harus dilaksanakan tanpa melanggar aturan-aturan dalam WTO, AFTA dan APEC namun tetap dapat mengembangkan industri pertanian di dalam negeri. Untuk itu, pengendalian impor juga merupakan upaya mengoptimalkan pemanfaatan hak Indonesia dalam perjanjian-perjanjian perdagangan dunia tersebut. Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah

sebagai fasilitator dengan membuat berbagai kebijakan dan swasta sebagai pelaksana di lapangan.

Masalah utama yang memacu peningkatan impor adalah produksi hasil pertanian di dalam negeri belum mampu untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Pada sub-sektor peternakan misalnya, produksi daging (sapi dan unggas) dan susu masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi masih jauh lebih rendah dari angka konsumsi nasional. Hanya telur yang telah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dapat dilihat pada angka impor yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan (Tabel 3).

Tabel 3. Produksi, Konsumsi, Ekspor dan Impor Produk Utama Peternakan

Komoditi	1998	1999	2000	2001
Daging (ton)				
Produksi	1.228.500	1.194.200	1.445.200	1.450.700
Konsumsi Nasional	1.242.600	1.218.600	1.517.500	1.523.000
Konsumsi/kap/thn (kg)	4,24	4,20	5,16	5,11
Ekspor	3.352	3.775	1.483	2.756
Impor	24.092	32.752	72.806	43.445
Telur (ton)				
Produksi	529.800	640.400	783.300	793.800
Konsumsi Nasional	464.100	564.600	708.300	615.100
Konsumsi/kap/thn	2,29	2,82	3,48	3,47
Ekspor	283	236	369	1.537
Impor	208	2.687	1.748	902
Susu(ton)				
Produksi	375.382	435.998	495.646	505.024
Konsumsi nasional	838.400	1.047.400	1.322.100	1.330.000
Konsumsi/kap/thn	4,16	5,23	6,50	6,46
Ekspor	2.416	2.438	31.223	30.365
Impor	53.747	77.378	142.531	144.772

Sumber : Ditjend. Bina Produksi Peternakan dan BPS diolah

Impor daging tahun 2001 menunjukkan penurunan sebesar 40% dibandingkan tahun 2000. Impor telur tahun 2001 juga menunjukkan

penurunan sebesar 48% dibandingkan tahun 2000. Sedangkan impor produk susu tahun 2001 meningkat sebesar 0,9 % dibandingkan tahun 2000.

Volume impor sering tidak disesuaikan dengan angka kebutuhan yang sebenarnya di dalam negeri, sehingga apabila impor tidak dikendalikan dan jumlahnya membanjir dapat merusak industri peternakan di dalam negeri.

Walaupun sudah dilakukan penolakan terhadap impor komoditi tertentu ternyata banyak yang dapat masuk secara ilegal. Hal ini disebabkan karena penerapan penegakkan hukum yang masih belum tegas. Demikian juga halnya dengan penerapan tarif impor yang jauh dibawah *binding rate* bahkan tidak jarang 0%, mendorong masuknya impor secara berlebihan.

Permasalahan lain yang ditemui adalah banyak produk impor komoditi peternakan yang diragukan kehalalannya. Hal ini sangat merugikan konsumen terutama yang beragama Islam.

Tidak jarang produk komoditi peternakan yang diimpor memiliki kualitas/mutu yang rendah yang sudah kadaluwarsa, atau yang seharusnya ditujukan untuk negara lain tapi dikirim ke Indonesia.

Demikian juga halnya dengan produk tanaman pangan. Perdagangan produk-produk pertanian hasil tanaman pangan selama 5 tahun terakhir selalu dalam posisi defisit. Negatifnya neraca perdagangan Indonesia dalam periode tersebut terutama disebabkan oleh jumlah impor produk bahan pangan lebih besar dibandingkan dengan jumlah eksportnya. Dominasi impor produk-produk pangan tersebut pada tahun 2001, untuk gandum dan olahannya sebesar 3,03 juta ton, beras dan olahannya sebesar 0,65 juta ton, kedelai dan olahannya sebesar 1,136 juta ton, jagung dan olahannya sebesar 1,035 juta ton.

Negatifnya neraca perdagangan komoditas tanaman pangan tersebut selain disebabkan oleh jumlah impor produk bahan pangan lebih besar dibandingkan dengan jumlah eksportnya serta diperburuk lagi dengan

laju penurunan produksi beberapa komoditas tanaman pangan selama 3 tahun terakhir (1999 - 2001), yaitu antara lain beras (- 1.44 %) jagung (- 0.60 %), kedelai (-41.65 %), ubi jalar (-5.79 %) dan kacang hijau (- 1.45 %).

Tabel 4. Produksi, Konsumsi, Ekspor dan Impor Komoditas Utama Tanaman Pangan

TAHUN	PRODUKSI	KONSUMSI	IMPOR (TON)	EKSPOR (TON)
PADI(BERAS)				
1997	28,696,963.44	22,303,449.53	348,073.93	63.88
1998	28,599,765.30	22,604,546.10	2,894,957.42	1,980.82
1999	29,550,301.11	21,317,185.87	4,748,059.64	2,699.99
2000	30,160,472.91	21,354,152.82	1,354,901.04	1,189.36
2001	29,326,128.55	21,672,329.70	642,168.01	3,925.97
JAGUNG				
1997	7,715,063.72	748,182.81	1,098,352.17	18,956.95
1998	8,946,491.63	758,283.28	313,462.96	624,942.19
1999	8,097,855.64	768,520.10	618,059.97	90,645.85
2000	8,517,511.49	769,852.82	1,264,575.03	28,065.87
2001	8,229,369.28	781,323.63	1,035,296.97	90,473.86
KEDELAJ				
1997	1,244,462.34	1,896,463.37	616,375.01	5.88
1998	1,196,730.37	1,922,065.63	343,123.73	0.28
1999	1,267,846.61	2,211,036.44	1,301,754.62	4.62
2000	933,904.86	2,214,870.68	1,277,684.99	520.85
2001	756,781.08	2,247,872.25	1,136,419.44	1,188.05

Sumber : BPS diolah

- = Angka ramalan III BPS

Neraca perdagangan komoditi hortikultura juga menunjukkan deficit, hanya pada tahun 1999 saja yang menunjukkan surplus. Neraca pada tahun 2000 juga menunjukkan surplus sedikit dari nilai US\$ namun tidak dari volume, hal ini disebabkan karena adanya perubahan nilai rupiah terhadap dollar. Buah dan sayuran segar atau beku menduduki peringkat atas dalam total impor baik dari segi volume maupun nilai. Sedangkan nilai ekspor yang tertinggi diperoleh dari buah dan sayuran yang sudah diolah atau kering (Tabel 5).

Tabel 5. Volume Ekspor Komoditas Utama Hortikultura

Komoditi	1997	1998	1999	2000	2001*
	Vol (Ton)	Vol (Ton)	Vol (Ton)	Vol (Ton)	Vol (Ton)
Buah segar/beku					
Ekspor	85.306	83.370	95.193	28.680	21.428
Impor	198.906	71.627	104.322	238.394	241.396
Buah olahan/kering					
Ekspor	88.750	44.764	377.616	362.764	166.614
Impor	6.720	5.178	6.123	8.228	9.229
Sayuran segar/beku					
Ekspor	95.289	76.844	105.669	91.488	116.282
Impor	198.906	71.628	104.323	238.394	241.396
Sayuran kering/olahan					
Ekspor	88.750	44.765	377.616	362.765	166.614
Impor	6.720	5.178	6.123	8.228	9.229
Tanaman hias/bunga					
Ekspor	5.225	1.459	15.032	9.847	16.662
Impor	395	2.300	284	513	403
Neraca Perdagangan	-126.860	-93.050	197.512	-45.029	-248.105

*) data bulan Januari s/d Desember

Berbeda dengan komoditi pertanian lainnya, neraca ekspor-impor komoditi perkebunan selalu mengalami surplus. Komoditi perkebunan merupakan penyumbang devisa negara terbesar dari sektor non migas. Surplus perdagangan untuk tahun 1999 adalah sebesar US \$ 2.832.847.000 dan tahun 2001 adalah sebesar US \$ 1.893.411.000. Tidak seperti sebagian besar produk perkebunan yang ditujukan untuk ekspor, potensi produksi gula, kapas dan cengkeh untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri masih harus didukung oleh impor. Untuk gula, Indonesia merupakan penghasil utama dunia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Namun demikian saat ini produksi gula hanya mampu mencukupi kira-kira separuh kebutuhan nasional.

Impor komoditi perkebunan selama kurun waktu 4 tahun terakhir didominasi oleh komoditi gula, kapas dan cengkeh. Impor komoditi perkebunan terbesar adalah kapas, dimana pada tahun 2001 mencapai nilai US\$ 1.065.586.305. Tingginya impor kapas ini adalah untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil dalam negeri yang tidak mampu dipasok oleh produksi kapas lokal. Meskipun impor gula merupakan separuh dari kebutuhan gula di dalam negeri, namun volume impor gula tahun 2001

sebesar 938.766 ton menunjukkan kenaikan 6 % dibandingkan volume impor gula pada tahun 2000 yang besarnya 879.351 ton.

Volume impor cengkeh tahun 2001 mengalami kenaikan dibandingkan impor tahun 2000 dengan nilai kenaikan sebesar 2,98 %. Impor cengkeh tahun 2001 sebesar 13.261 ton, terjadi penurunan sebesar 395 ton dibandingkan impor untuk periode yang sama pada tahun 2000 sebesar 12.866 ton.

Impor kapas tahun 2001 sebesar 665.617 ton menunjukkan angka kenaikan sebesar 15.48% dari tahun 2000 sebesar 562.575 ton. Tabel 6 menggambarkan volume impor komoditi primer perkebunan.

Tabel 6. Volume Impor Komoditi Primer Perkebunan

Komoditi	1998	1999	2000	2001
Gula (ton)				
Produksi	1.496.027	1.493.067	1.575.355	1.635.273
Konsumsi	1.952.858	2.868.261	2.574.715	2.599.190
Ekspor	0	0	0	0
Impor	944.036	863.797	879.351	938.766
Kapas (ton)				
Produksi	5.337	4.000	4.000	4.000
Kebutuhan	654.870	458.568	562.115	562.115
Ekspor	7.815	10.144	21.238	14.444
Impor	453.685	456.374	562.575	665.617
Cengkeh (ton)				
Produksi	67.177	52.903	48.513	50.158
Konsumsi	113.600	119.250	125.200	131.500
Ekspor	20.157	1.776	4.655	2.575
Impor	1.183	22.610	12.866	13.261

Ket : 1. dari berbagai sumber

2. tahun 2001 angka proyeksi

Untuk periode 1997 -2000 luas areal tanaman tebu menunjukkan angka penurunan, demikian pula produksinya. Pada tahun 1999 produksi

gula menunjukkan angka 1.493.067 ton namun kebutuhan gula nasional pada tahun yang sama mencapai angka kira-kira 3.000.000 ton.

Komoditi kapas sebagian besar dihasilkan dari perkebunan rakyat pada propinsi Sulawesi Selatan, NTB dan NTT. Untuk periode 1998 - 2000 baik luas areal maupun produksinya terus menunjukkan angka menurun. Pada tahun 1997 luas areal tanaman kapas adalah 26.541 Ha dan turun menjadi 17.606 Ha pada tahun 2000 sedangkan produksinya 5337 ton tahun 1998 turun menjadi 4.000 ton tahun 2001.

Komoditi cengkeh sebagian besar juga diusahakan oleh perkebunan rakyat, juga menunjukkan angka penurunan luas areal dan produksinya.

III. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Semenjak penandatanganan LoI antara IMF dengan pemerintah (1998), Indonesia telah merombak kebijakan perdagangannya (khususnya pangan) dengan cukup drastis yaitu berupa penurunan tariff bea masuk beberapa produk pangan hingga 0% dan dormansi fungsi Bulog sebagai STE, dengan mengesampingkan kemitraan Indonesia dalam WTO.

Hal ini menimbulkan dampak yang cukup serius mengingat inefisiensi dan inefektivitas masih melekat pada produk pertanian Indonesia, khususnya tanaman pangan, yang melemahkan daya saing produk pangan Indonesia serta petani semakin tidak terlindungi.

Saat ini bidang pertanian dan pangan tidak lagi dicantumkan dalam LoI IV, karenanya sudah saatnya dilakukan "penataan ulang bidang pertanian" khususnya melalui peninjauan kembali mekanisme proteksi bea masuk yang diberlakukan selama ini dan peluang memperbaiki mekanisme proteksi pada kisaran yang tidak melampaui batas pagu maksimum bea masuk, khususnya pada produk-produk bahan pangan utama.

Meningkatnya impor komoditas pertanian antara lain disebabkan lebih rendahnya harga komoditas tersebut dipasar internasional dibanding harga domestic, dan kondisi ini diperburuk lagi dengan tidak

dimanfaatkannya batas pagu maksimum bea masuk (*ceiling binding rate*) sesuai komitmen Indonesia dalam WTO. Kesenjangan harga ini juga dimungkinkan sebagai akibat terjadinya penyelundupan baik secara fisik maupun secara administrative atau lebih dikenal dengan "*under invoicing*" yang saat ini disinyalir marak kembali.

Hal ini mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari bea masuk dan pajak impor lainnya. Disamping itu dengan tidak diketahuinya secara pasti total impor komoditas pangan utama (khususnya beras) akan berdampak pada rawannya system ketahanan pangan nasional. Hal ini akan menyebabkan upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan system ketahanan pangan nasional akan menjadi tidak efektif.

Jika praktek penyelundupan tersebut tidak segera dicegah akan menimbulkan dampak negative lain seperti persaingan yang tidak sehat antara importer yang benar dan jujur dengan importer yang melakukan kegiatan impor secara illegal. Produk dalam negeri akan bersaing secara tidak sehat dengan produk impor yang disinyalir bermuatan dumping dan subsidi ekspor, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan industri didalam negeri, dan mengurangi daya serap kerja. Hal ini terjadi antara lain disebabkan belum terwujudnya tertib impor, baik tertib pelakunya maupun tertib pelaksanaan impornya.

Penyelundupan tersebut disinyalir banyak terjadi diwilayah atau pelabuhan yang infrastruktur serta administrasinya masih lemah yaitu umumnya pelabuhan diluar pulau Jawa.

Disamping itu pemerintah juga telah merancang instrument guna memonitor pelaku impor dan pelaksanaan impornya melalui pemberlakuan NPIK yang telah ditetapkan oleh Memperindag melalui Kep. No.141/MPP/Kep/III/2002 tanggal 6 Maret 2002, yang untuk sementara diberlakukan terhadap delapan produk impor termasuk produk pangan utama yaitu : jagung, beras dan kedelai.

Otonomisasi telah memberi peluang bagi daerah untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengendalikan segenap proses pemenuhan pangan diwilayahnya, termasuk melalui pengendalian impor. Tuntutan yang timbul adalah bagaimana seluruh *stake*

holder yang ada mampu bekerjasama dalam suatu mekanisme kerja yang tepat dan koordinatif guna menerapkan pengendalian impor produk pangan baik legal maupun illegal dalam proses pemenuhan pangan diwilayahnya dalam kaitannya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Dengan telah diberlakukannya aturan WTO mengenai perdagangan komoditi pertanian dalam *Agreement on Agriculture*, maka hambatan pelaksanaan perdagangan dunia dapat dikatakan hampir tidak ada.

Sasaran umum *Agreement on Agriculture* (AoA) adalah untuk mendorong agar kebijaksanaan pertanian lebih berorientasi pasar dan semakin kurang tergantung pada penggunaan subsidi yang tidak terkendali dan pada proteksi dalam menghadapi impor. Tiap-tiap negara anggota harus dapat memanfaatkan aturan-aturan yang ada dalam AoA tersebut untuk melaksanakan pengendalian impor.

Banyak negara-negara maju menerapkan persyaratan-persyaratan yang dirasakan sangat memberatkan negara yang belum maju dalam perdagangan internasionalnya seperti HACCP dan persyaratan mutu lainnya melalui Sanitasi dan Phytosanitary (SPS). Dengan demikian nampaknya kesiapan negara yang belum maju dalam menghadapi perdagangan bebas mengalami kelambatan dalam mengantisipasi pasar.

Beberapa kelemahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan impor produk pertanian adalah :

1. Tidak tersedianya data akurat seberapa besar kebutuhan impor suatu komoditi setelah dipenuhi produk dalam negeri.
2. Banyak importir ilegal yang membuat angka komoditi tertentu melonjak.
3. Indonesia belum sepenuhnya menerapkan instrumen hambatan impor yang dilegalkan WTO.
4. Harga produksi produk pertanian dalam negeri belum mampu bersaing karena inefisiensi biaya produksi lokal.
5. Belum ditetapkan pengawasan mutu produk pertanian dalam negeri /importir secara optimal.
6. Belum dimanfaatkan tarif bea masuk yang tidak melebihi *ceiling binding rate* WTO.

IV. STRATEGI

Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi bagi pengendalian impor berdasarkan WTO yaitu ketentuan perdagangan bebas yang menyatakan :

- Negara-negara anggota tidak boleh melakukan diskriminasi. Bila memberikan perlakuan khusus terhadap suatu negara maka perlakuan yang sama harus juga diberikan kepada seluruh negara anggota WTO lainnya (Most-favoured-nation). Kecuali bila negara-negara dari suatu wilayah membentuk suatu kesepakatan perdagangan bebas yang tidak berlaku bagi produk-produk dari negara-negara diluar kelompok tersebut.
- Produk-produk impor setelah memasuki wilayah suatu negara harus diperlakukan sama dengan produk-produk domestik.

Dalam usaha mengendalikan impor maka perlu suatu strategi kebijakan yang berorientasi internal (lebih kearah memperkuat posisi produk-produk pertanian didalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk impor) dan eksternal (menerapkan berbagai peraturan perdagangan bebas yang tidak merugikan) yaitu:

A. Strategi berorientasi internal :

- Meningkatkan produksi hasil pertanian dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi. Sehingga dapat bersaing dengan produk impor, sehingga dapat meningkatkan kecintaan produk dalam negeri
- Meningkatkan daya saing komoditi dan efisiensi biaya produksi sehingga harga jual produk domestic dapat bersaing dengan produk impor yang masuk Indonesia. Disini diperlukan pemikiran yang holistic tentang pengembangan pertanian yang lebih berbasis lokal.

- Mengembangkan hasil pertanian yang lebih diarahkan ke pasar dalam negeri melalui pengembangan jaringan pasar, pengembangan jaringan kerja distribusi pemasaran yang dapat menguntungkan bagi pelaku agribisnis, pengembangan produk dan diversifikasi produk serta peningkatan permintaan konsumen melalui promosi.
- Menciptakan iklim makro yang dapat menumbuh kembangkan pengembangan pemasaran diantaranya melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter (tarif bea masuk, pengurangan pajak-pajak/pungutan perdagangan, kredit dengan bunga terjangkau), menghapus hambatan-hambatan perdagangan melalui deregulasi, atau kebijaksanaan yang memihak para pelaku agribisnis.
- Memperbaiki system informasi supply-demand produk pertanian dalam negeri dalam rangka mengatur keseimbangan produksi dan konsumsi dalam negeri serta volume impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama komoditi yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
- Mengingat kesepakatan internasional dilakukan oleh pemerintah pusat, maka seyogyanya antara pusat dan daerah terjadi komunikasi dan koordinasi yang efektif sehingga kebijakan yang diambil tidak akan bersifat *counter-productive* terhadap sektor lainnya.
- Meningkatkan akses para pelaku agribisnis terhadap pasar, informasi, permodalan, dan teknologi melalui peningkatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, merigernbangkan sistem informasi pasar, menumbuhkembangkan iernbaga-lembaga perkreditan di wilayah-wilayah pengembangan agribisnis dan meningkatkan bimbingan dan penyuluhan bagi para pelaku agribisnis terutama bagi para petani dan peternak.
- Membangun, mengembangkan dan memfungsikan sarana prasarana seperti Sub Terminal Agribisnis di sentra-sentra produksi dan Terminal Agribisnis di daerah-daerah konsumen.

- Mendorong tumbuh berkembangnya pemasaran kerelasiaan yang dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan diantara para pelaku agribisnisnya.
- Menegakan pengawasan terhadap impor komoditi pertanian yang ilegal

B. Strategi berorientasi external :

Menerapkan berbagai instrumen pembatasan impor secara rasional dan tidak diskriminatif, seperti :

- Tarif : memilah struktur tarif impor sesuai kode HS dan meningkatkan tarif bea masuk dibawah tingkat *binding rate* WTO. Dalam AoA ditetapkan bahwa tarif impor harus diturunkan secara bertahap yaitu rata-rata 24% dalam 10 tahun dari tingkat tahun 1986-1988 sebagai base period level bagi negara berkembang. Selain itu, tindakan tergolong *non-tariff border measures* yang berakibat menekan impor atau meningkatkan harga produk-produk impor harus diganti dengan *tariffs* yang memberikan tingkat perlindungan yang sama. Tarif yang dihasilkan dari proses *tarification* ini juga diturunkan rata-rata 24% dalam 10 tahun untuk negara-negara berkembang. Penurunan minimum yang diperkenankan untuk *individual tariff* adalah 15%. Disini dapat dilihat bahwa aturan perdagangan dunia telah memperkecil peran tarif dalam rangka mengendalikan impor.
- SPS : menerapkan system SPS dengan lebih ketat karena berkaitan dengan kesehatan manusia, hewan dan tanaman seperti menetapkan kandungan *salmonella* sesuai SNI atau menentukan penyakit-penyakit hewan yang dilarang masuk. SPS Agreement menetapkan, bahwa tindakan-tindakan yang sejalan dengan tingkat standards yang diakui oleh Badan-badan Internasional seperti *Codex Alimentarius* dan *The International Centre for Epizootics* dapat diterima WTO. Selain itu sebagai bagian dari upaya untuk mencapai

Greater Harmonization of Standard, negara-negara anggota dianjurkan untuk saling mengakui standard masing-masing bila hasil yang dicapai sama walaupun menggunakan cara yang berbeda. Kesepakatan ini tidak melarang suatu negara anggota menggunakan standara lebih tinggi asalkan bisa dibuktikan bahwa tindakan ini benar-benar perlu. Bila timbul sengketa dengan pihak ketiga, maka tindakan-tindakan yang diambil harus bisa dibenarkan secara ilmiah (*on the basis of sound science*). Dan berdasarkan hasil penilaian yang sesuai terhadap resiko terkait (*an appropriate assessment of risk involved*). Negara-negara anggota harus menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang mereka ambil tidak menimbulkan restriksi tambahan terhadap perdagangan melebihi dari keperluan untuk mencapai tujuan.

- **Non-tariff Barriers** : menerapkan berbagai peraturan yang mengatur persyaratan teknis dan standar/mutu, prosedur perijinan impor, pemeriksaan produk impor di pelabuhan untuk mengamankan penerimaan bea masuk, pemeriksaan produk impor di negara pengekspor sebelum dikapalkan, persyaratan asal barang dan kebijaksanaan penanaman modal. Pengaturan ini diperlukan agar penerapan persyaratan dimaksud berhasil mencapai sasaran tanpa menjadi hambatan tambahan yang tidak perlu dalam perdagangan, sehingga prinsip-prinsip dasar system perdagangan internasional yang bebas dan terbuka dapat dipenuhi.
- **Pengaturan importir** : menetapkan importir produsen atau menerapkan pola *approved importir* (misalnya yang telah diakreditasi kehalalannya oleh pihak MUI untuk ternak), menetapkan *Licensed Importer* (importir terbatas) atau menetapkan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) untuk produk-produk strategis seperti beras, jagung dan kedelai, hal ini dinilai tidak bertentangan dengan aturan WTO dan importir dapat dipantau setiap bulan,
- **Mengadakan *consumer education***, memberikan image kepada konsumen akan kualitas produk impor tersebut.

- Menerapkan instrument *safeguard* yang didahului oleh suatu kajian dengan data-data yang akurat, seberapa besar impor tersebut dapat mendistorsi pasar sehingga memberikan dampak yang negatif bagi pertumbuhan industri peternakan. Artikel XIX dari GATT memperbolehkan negara anggota mengambil tindakan darurat *safeguard* untuk melindungi suatu industri domestic tertentu dari peningkatan impor dengan tajam dan tidak terduga yang dilakukan secara fair (*sudden surges of fairly traded imports*) sehingga menimbulkan atau mengancam untuk menimbulkan *serious injury*. Kesepakatan ini juga memberikan keringanan-keringanan tertentu kepada negara-negara berkembang. Tindakan darurat safeguards tidak boleh dilakukan terhadap produk impor yang berasal dari suatu negara berkembang bila pangsa pasar negara tersebut tidak melebihi 3%, atau yang berasal dari beberapa negara berkembang yang masing-masing memiliki pangsa pasar kurang dari 3% dan secara kolektif kurang dari 9%. Negara-negara berkembang juga diberikan hak untuk memperpanjang masa berlaku suatu tindakan darurat *safeguard* hingga dua tahun melebihi normal maksimum. Juga diperkenankan memberlakukan kembali tindakan *safeguard* terhadap suatu produk yang telah pernah dikenakan tindakan serupa sebelumnya setelah melewati masa separuh waktu dari masa berlaku tindakan pertama, dan dilakukan setelah melalui persyaratan *non-application period* paling kurang dua tahun. Namun perlu diingat bahwa negara pengekspor bisa mengusahakan untuk memperoleh kompensasi melalui konsultasi. Bila kesepakatan tidak tercapai maka negara pengekspor dapat melakukan *retaliasi* dengan mengambil tindakan yang serupa setelah 3 tahun tindakan *safeguard* tersebut diberlakukan.
- Menggunakan isu moral/keagamaan seperti kehalalan pada ternak, karena hal ini dapat dibenarkan sesuai pasal XX/GATT/1994
- Mempelajari strategi perdagangan luar negeri pemasok utama produk pangan dunia khususnya Amerika Serikat contohnya kebijaksanaan kredit ekspor melalui GSM 102 yang berdampak pada persaingan perdagangan unfair dengan produk pangan lokal.

Langkah-langkah diatas umumnya memerlukan campur tangan pemerintah. Selain hal diatas, diharapkan bagi para pengusaha agribisnis mampu melakukan manajemen pemasarannya dengan baik, berwawasan pemasaran bermasyarakat yang mampu menentukan kebutuhan, keinginan serta kepentingan pasar sasaran, dan memenuhinya dengan lebih efektif dan lebih efisien dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

Guna pengembangan pasar para pelaku agribisnis harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Menentukan segmen pasar yang jelas (market segmentation)
2. Menentukan pasar sasaran untuk setiap komoditas/ produk (targeting)
3. Memposisikan produk dengan strategi pemasaran (positioning)
4. Mengidentifikasi pesaing
5. Menentukan strategi pemasaran (4p) yang jitu
6. Mengembangkan organisasi dan kelembagaan pemasaran yang kuat (koperasi)
7. Mengembangkan komoditas prospektif
8. Mengembangkan sumberdaya manusia
9. Menjamin kelancaran suplai produk dan mempertahankan pelanggan
10. Menjamin mutu produk

V. PROGRAM AKSI

Dalam rangka menerapkan strategi internal dan eksternal tersebut diatas, maka diperlukan program aksi yang dilaksanakan dalam jangka pendek (2003-2004) dan jangka panjang (2004-2010). Apabila program jangka pendek belum tuntas dilaksanakan, maka dapat dieprpanjang sampai tahun 2007. Tidak semua program aksi tersebut dapat digeneralisir, untuk beberapa komoditi tertentu mempunyai program aksi yang specific/khusus.

Program aksi dalam rangka mengendalikan impor yang bersifat umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dengan dukungan sarana dan prasarana
2. Memperbaiki penanganan pasca panen
3. Mengembangkan industri pengolahan
4. Mengenakan tariff bea masuk sesuai binding rate
5. Meningkatkan pengamanan pasar dalam negeri
6. Melaksanakan pemetaan distribusi produk pertanian di dalam negeri
7. Meningkatkan intensitas pemantauan harga di pasar induk dan pasar tradisional eceran.
8. Meningkatkan pelayanan pemasaran dengan mengembangkan jaringan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis
9. Meningkatkan pengawasan komoditas pertanian impor dipelabuhan

Program aksi khusus dari masing-masing komoditas prioritas adalah sebagai berikut :

1. Tanaman pangan meliputi : beras, kedelai dan jagung pipilan
2. Perkebunan meliputi : gula, kapas dan cengkeh
3. Peternakan meliputi : kulit, daging ayam dan susu.
4. Hortikultura meliputi : buah-buahan (durian, semangka, pisang), sayuran (kubis), dan tanaman hias (anggrek, mawar dan bunga potong)

Beras

Jangka pendek :

1. Meningkatkan tariff impor dari Rp. 430/kg menjadi Rp. 750/kg
2. Meningkatkan pengawasan impor di pelabuhan bekerjasama dengan Tim Penanggulangan Pemberantasan Penyelundupan (TP4).
3. Pengawasan beras yang beredar di pasar untuk mengetahui apakah sesuai dengan label

Jangka Panjang :

1. Meningkatkan ekspor beras kualitas tinggi
2. Memfungsikan kembali kelembagaan buffer stock

Kedelai

Jangka Pendek

1. Pengenaan tariff bea masuk dengan ceiling binding 27 % (saat ini diterapkan 0 %) dengan memperhatikan dampak terhadap produk tahu, tempe dan produk olahan lainnya.
2. Pengaturan tataniaga impor melalui importer produsen
3. Pengawasan kedelai yang beredar di pasar dalam negeri, melalui label dan BDKT.

Jangka Panjang

1. Pelabelan produk rekayasa genetik

Jagung

Jangka pendek/jangka panjang

1. Mengoptimalkan penanganan pra dan pasca panen dengan penyediaan sarana dryer dan silo
2. Pengenaan tariff bea masuk dengan ceiling binding 40 % (saat ini diterapkan 0 %) dengan memperhatikan dampak terhadap produk unggas.
2. Mengadakan pengawasan mutu jagung yang beredar di pasar dalam negeri dari aspek keamanan pangan bekerjasama dengan Badan POM.

Gula

Jangka Pendek

1. Peningkatan produksi melalui perubahan tanaman ratoon menjadi plank cane
2. Penggunaan varietas unggul yang mempunyai rendemen tinggi
3. Perluasan areal di luar pulau Jawa
4. Penerapan tariff bea masuk gula impor secara berkala, saat ini tariff yang diterapkan Rp. 550/kg untuk raw sugar dan Rp. 700/kg untuk white sugar
5. Menerapkan tataniaga impor raw sugar yang dilaksanakan oleh IP
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan impor terutama yang illegal dan pengawasan di pasar guna mengetahui kesesuaian dengan label
7. Penetapan SNI raw sugar

Jangka Panjang

1. Mengembangkan pengolahan hasil : meningkatkan produktivitas industri pengolahan yang ada dengan berbagai upaya teknis, menarik investor dalam rangka pengembangan dan pembangunan pabrik gula di dalam dan di luar Pulau Jawa serta pengembangan industri hilir berbasis tebu.

Kapas

Jangka Pendek

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas kapas
2. Meningkatkan produksi lebih diutamakan kepada pemenuhan kebutuhan ginery (pabrik pemintalan)

Jangka Panjang

1. Pengembangan produksi dan ginery untuk memenuhi bahan baku industri tekstil

Cengkeh

Jangka Pendek/Jangka Panjang

1. Peningkatan produksi dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan pabrik rokok.

Kulit

Jangka Pendek

1. Meningkatkan populasi ternak potong dan meningkatkan penggunaan teknologi pengolahan bahan baku kulit di RPH.
2. Pengenaan pungutan ekspor (PE) kulit mentah sebesar 30% dan kulit setengah jadi 20% yang perlu segera direalisasikan.

Daging Ayam

Jangka Pendek

1. Pengenaan tariff bea masuk daging ayam potongan sebesar 80% dengan memperhatikan persyaratan SPS dan halal

2. Meningkatkan efisiensi perunggasan nasional dengan pemanfaatan sumberdaya local dan mengendalikan penyakit ND

Susu

Jangka Pendek

1. Pengembangan sentra agribisnis peternakan sapi perah mulai dari pembibitan, pengolahan sampai dengan pemasaran
2. Pengenaan tariff bea masuk produk susu olahan sebesar 10%
3. Pengawasan susu yang beredar di pasar

Hortikultura

Jangka Pendek

1. Percepatan ekspor tanaman hias yang telah dicanangkan oleh Presiden RI bulan Mei 2001
2. Upaya peninjauan kembali penerapan impor tariff komoditi hortikultura yang berada jauh di bawah binding rate sebesar 40 - 50 %, sedangkan yang diterapkan saat ini hanya 5 - 10 %.

Jangka Panjang

1. Upaya memperbaiki system karantina dalam impor komoditi hortikultura
2. Mengubah image peranan karantina terhadap komoditi hortikultura import, yang sementara ini masih mengasumsikan peranan bea cukai lebih dominan dalam pemasukan komoditi impor hortikultura.



GRAND STRATEGY

PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN



**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

2002

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
II. KONDISI SAAT INI	3
III. KONDISI YANG DIHARAPKAN	7
IV. PERMASALAHAN	9
V. KEBIJAKSANAAN PENANGANAN PASCA PANEN	12
VI. STRATEGI PENANGANAN PASCA PANEN	14
VII. SASARAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN	18
VIII. PROGRAM PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN	19



BAB I PENDAHULUAN

Penanganan pascapanen hasil pertanian yang meliputi hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan hingga saat ini umumnya masih ditangani secara tradisional dan relatif tertinggal. Hal ini antara lain ditandai oleh peralatan panen dan pasca panen yang sederhana dan pengelolaan hasil panen yang kurang optimal. Oleh karenanya, kehilangan hasil masih sangat tinggi, mutu hasil umumnya masih sangat rendah dan sangat bervariasi. Akibat tidak langsungnya adalah hilangnya kesempatan petani, pekebun dan peternak menikmati pendapatan yang lebih baik.

Belum berkembangnya penanganan panen dan pascapanen dari hasil berbagai penelitian dan pengalaman lapangan disebabkan antara lain karena: (a) kemampuan dan pengetahuan petani, pekebun dan peternak dalam kegiatan penanganan pascapanen masih terbatas, (b) kelembagaan panen yang belum berkembang, (c) waktu panen yang kurang tepat, Terbatasnya alsin panen dan pascapanen (d) Alsin yang tersedia di tingkat petani belum dimanfaatkan secara optimal, (e) Penempatan dan penggunaan alsin yang tidak tepat, (f) belum mantapnya kemitraan usaha sehingga kebutuhan industri tidak dapat dipenuhi oleh produsen.

Untuk mengatasi berbagai masalah di atas, maka upaya transformasi penanganan panen dan pasca panen hasil pertanian dari tradisional ke moderen perlu dilakukan dengan segera dan terencana. Upaya terencana itu, disusun dalam bentuk strategy dasar (Grand Strategy) yang dapat dijadikan rujukan semua pihak

yang terkait dalam peningkatan penanganan pascapanen, dan secara praktis dapat diimplementasikan di lapangan oleh aparat pemerintah yang terdekat dengan pelaku.

Penyusunan *grandstrategy* ini didasarkan pada kondisi yang ada, kondisi yang diharapkan serta masalah yang menyebabkan adanya kesenjangan diantara keduanya, selanjutnya disusun sasaran, kebijakan, strategi dan program yang diharapkan merupakan pemecahan masalahnya. Program yang disusun dengan sendirinya akan melibatkan banyak pihak yang terkait dengan penanganan pascapanen.



BAB II KONDISI SAAT INI

1. Tanaman Pangan

Khusus untuk tanaman pangan, komoditas padi menjadi prioritas utama untuk mendapatkan perhatian. Hasil penelitian BPS MT 1994/95 dan MT1995 menunjukkan bahwa kehilangan hasil pada kegiatan panen dan pascapanen padi masih cukup tinggi yaitu 20,51%. Secara nasional, kehilangan hasil tersebut bila dirinci adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kehilangan Hasil Panen dan Pascapanen Padi

No	Tahap Kegiatan	Prosentase Susut
1.	Pemanenan	9,52
2.	Perontokan	4,78
3.	Pengangkutan	0,19
4.	Pengeringan	2,13
5.	Penggilingan	2,19
6.	Penyimpanan	1,61
	Total	20,51

Sumber : BPS (1995)

Sementara itu, hasil penelitian Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil yang berkerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Padi Sukamandi tahun 1999, menunjukkan bahwa

kehilangan hasil yang terjadi pada kegiatan pemanenan adalah sebesar 4,38% dan tahap perontokan 4,34%. Besarnya produksi padi yang dapat diselamatkan tergantung sejauhmana teknologi pascapanen dapat diterapkan di lapangan. Salah satu teknologi yang sangat penting untuk dapat mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan mutu hasil adalah penggunaan teknologi alat dan mesin (alsintan) pascapanen. Berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Tanaman Padi (Balitpa) Sukamandi tahun 1996, penggunaan sabit bergerigi dapat menekan tingkat kehilangan hasil sebesar 1,78% dibanding sabit biasa dan penggunaan pedal dan power thresher masing-masing dapat menekan tingkat kehilangan hasil 2,78% dan 3,03% dibanding pelaksanaan dengan system gebot/banting. Apabila pemanenan padi dilakukan dengan system berkelompok 20-30 orang per Ha dan perontokan dengan menggunakan powerthresher dapat menekan kehilangan hasil dari 15%-16% menjadi 4,31%-4,91% dibandingkan dengan system individu atau keroyokan dan perontokan dengan cara banting atau gebot.

Untuk komoditas jagung, disamping produksinya yang masih rendah, pemanfaatan hasil jagung belum optimal. Sebagaimana telah diketahui seluruh hasil jagung mulai daun, batang, buah, klobot dapat dimanfaatkan untuk kepentingan industri pakan. Namun hingga saat ini sebagian besar belum dilakukan.

2. Hortikultura

Komoditas hortikultura dikenal sangat tidak tahan lama dan sangat mudah menurun kualitasnya. Buah-buahan dan sayuran merupakan komoditas yang penanganan pascapanennya

masih sangat lemah. Bawang merah dan cabe sebagai misal, adalah komoditas hortikultura sayur-sayuran yang sewaktu-waktu dapat melimpah hasilnya (panen raya), harga langsung mengalami penurunan yang mencolok dan kerusakan hasil hampir-hampir tidak dapat dicegah. Persoalan pascapanen untuk komoditas seperti ini diatasi dengan perbaikan sistem penyimpanan, dan pengembangan pengolahan lanjutan.

Hal yang hampir sama terjadi pada buah-buahan, seperti pisang, jeruk, dan mangga yang penanganan pascapanennya masih sangat tradisional. Pisang sebagai misal, tidak mengalami penanganan pascapanen yang cukup memadai dari petani, pedagang pengumpul hingga penjual akhir. Akibatnya banyak buah pisang yang lepas dari sisirnya dan menyebabkan semakin turunnya kualitas buah.

3. Perkebunan

Kehilangan hasil pada tanaman perkebunan umumnya disebabkan oleh cara dan waktu panen yang belum tepat. Disamping itu, kendala jarak antara kebun dengan pabrik pengolah terutama dihadapi oleh perkebunan rakyat, menyebabkan banyaknya kerusakan hasil panen. Karet rakyat sebagai misal hingga saat ini sulit untuk ditingkatkan mutunya. Hasil karet rakyat umumnya tidak dapat langsung diolah pabrik, sehingga karet tersebut dapat menurun kualitasnya.

Masalah yang sama dialami pula oleh kelapa sawit, kakao, kopi dan komoditas perkebunan lainnya, kerusakan hasil tidak kecil. Upaya untuk mengatasi masalah ini sangat kompleks apalagi budaya/prilaku panen pekebun masih sangat rendah. Disamping itu, sistem ijon juga berkembang di usaha perkebunan.

Pekebun seringkali bukan pemanen hasil, rendahnya rasa kepemilikan pada hasil seringkali menimbulkan rendahnya semangat untuk menangani pascapanen secara baik.

4. Peternakan

Keberhasilan usaha peternakan ditentukan 30% oleh faktor genetik ternak dan 70% oleh manajemen tatalaksana usaha peternakan yang dikelola oleh peternak. Salah satu yang menjadi perhatian penting adalah aspek kesehatan hewan. Intensitas serangan penyakit yang menyebabkan kematian ternak muda akan menimbulkan kerugian ekonomis bagi peternak. Selanjutnya, sanitasi bagi hasil ternak; daging, susu, telur dan kulit juga merupakan perhatian penting pascapanen ternak.



BAB III

KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Penurunan Kehilangan Hasil

Tujuan utama dari peningkatan penanganan pascapanen hasil pertanian adalah untuk mengurangi kehilangan hasil. Menurunnya kehilangan hasil baik yang disebabkan kehilangan fisik maupun menyusutan/penurunan kualitas sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan bahan baku industri. Lebih lanjut, bagi produk tanaman pangan, kehilangan hasil berarti ancaman terhadap ketersediaan pangan. Panen yang optimal akan mendorong peningkatan pendapatan petani dan terpenuhinya kebutuhan industri.

2. Peningkatan Mutu

Mutu hasil pertanian hingga saat ini masih sangat bervariasi, mulai dari yang bermutu sangat baik hingga sangat buruk. Namun demikian jumlah hasil yang bermutu kurang baik sangat banyak. Berbagai kasus ditolaknya produk pertanian Indonesia di luar negeri disebabkan rendahnya mutu hasil. Disamping itu, rendahnya mutu akan menyebabkan daya saing produk lokal dengan impor akan melemah.

Peningkatan mutu agar sesuai dengan standar mutu internasional adalah tantangan paling besar dalam pascapanen. Persoalan mutu menyangkut aspek yang sangat luas yang dimulai dari varietas, lahan, teknologi budidaya, perlindungan tanaman hingga cara panen dan perlakuan pascapanen berikutnya.

3. Penganekaragaman Hasil

Diversifikasi hasil pertanian sangat diperlukan untuk paling tidak dua hal, yakni; meningkatkan pendapatan dan mencegah terbuangnya dengan sia-sia hasil pertanian, baik hasil utama maupun sampingan. Upaya penganekaragaman hasil harus dilakukan mengingat selain selama ini tidak seluruh hasil pertanian dapat diserap oleh pasar juga akan membuka pasar baru bagi komoditas tersebut.

Upaya penganekaragaman hasil diharapkan tumbuh dari inisiatif dan kreativitas petani, memanfaatkan kemampuan setempat dengan harapan akan menumbuhkan keterkaitan erat dengan penanganan pascapanen komoditas.

4. Penggunaan Teknologi Moderen

Diharapkan penggunaan teknologi panen dan pascapanen akan semakin meningkat. Negara-negara pesaing Indonesia terutama negara-negara maju telah menggunakan teknologi tinggi dalam proses panen dan pascapanen, apabila kita tidak menggunakan teknologi yang tepat maka dapat dipastikan akan semakin tertinggal.

Disadari bahwa keterbatasan aksesibilitas petani pada teknologi pascapanen sangat rendah, oleh sebab itu fasilitasi pemerintah sangat diperlukan. Disamping itu, keterlibatan swasta sebagai produsen sarana dan teknologi pascapanen juga sangat diharapkan.

BAB IV PERMASALAHAN

1. *Kelembagaan Panen dan Pascapanen Belum Berkembang*

Kelembagaan dalam pengertian; perilaku, aturan dan organisasi panen dan pascapanen di tingkat petani belum berkembang. Pengetahuan dan kesadaran petani sebagai produsen dan juga sebagai salah satu pelaku pasar masih kurang. Pada umumnya mereka masih memperlakukan hasil produksinya secara apa adanya. Beberapa masalah kelembagaan dalam pascapanen hasil pertanian yang dapat diinventarisasi antara lain :

a. Sistem Panen

Panen seringkali dilakukan dengan sistem keroyokan/individual dimana terjadi proses untuk mengedepankan kecepatan panen. Hal ini menyebabkan kurang diperhatikannya hasil panen, Sistem panen beregu/kelompok perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan.

b. Perilaku Pemanenan

Dalam pemanenan hasil pertanian, pada umumnya aktivitas panen tidak dilakukan petani sendiri, pemanen yang berperilaku buruk seringkali berbuat curang, mencuri, menyembunyikan hasil.

c. Umur Panen

Umur panen sangat mempengaruhi besarnya kehilangan hasil dan menurunnya mutu. Panen

pada usia hasil yang relatif muda menyebabkan penurunan mutu yang sangat *significant*.

d. *Faktor Sosial lainnya*

Munculnya pengasag, penjarah juga merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian secara lebih seksama. Disamping itu perubahan perilaku dalam penyerapan teknologi anjuran memerlukan bimbingan yang terus menerus.

2. *Keterkaitan On Farm dan Off Farm Belum Mantap*

Lokasi usahatani yang terpencar-pencar dengan luasan yang sempit serta jauh dari lokasi agroindustri yang mengolah, menyebabkan lemahnya penanganan pascapanen hasil pertanian. Perusahaan agroindustri pada umumnya tidak mempunyai lahan budidaya sendiri, tetapi sangat tergantung kepada pasokan bahan baku dan petani sekitarnya. Keadaan ini mengandung kesulitan manajemen yang tinggi karena beragamnya masing-masing usaha dan lemahnya kemitraan akibat kurangnya pemahaman pihak petani dan pengusaha agroindustri dalam pengelolaan hasil yang baik.

3. *Mutu Produk Olahan Masih Rendah*

Mutu produk olahan sangat terkait dengan aspek penerapan teknologi pengolahan. Pengolahan hasil pertanian sebagian masih menggunakan teknologi yang sederhana serta peralatan pengolahannya yang masih belum memadai. Rendahnya penggunaan teknologi ini diakibatkan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia pelaku masih rendah dan kurang tersedianya teknologi dan peralatan pengolahan di tingkat perdesaan. Lemahnya

pembinaan dan penerapan jaminan mutu mempunyai andil terhadap rendahnya mutu produk yang dihasilkan agorindustri. Rendahnya kesadaran akan pangan yang bermutu dan aman sebagian kalangan konsumen, sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan mutu hasil pertanian.

4. *Penggunaan Teknologi Pascapanen Sangat Minimal*

Teknologi panen dan pascapanen yang telah ada ternyata tidak dimanfaatkan oleh petani. Rendahnya pemanfaatan ini disebabkan (a) tidak tersedianya alsin di tingkat petani, (b) walaupun tersedia manajemen pengelolaannya masih sangat lemah (c) alsin panen dan pascapanen masih sangat mahal (d) adanya masalah sosiologis menyangkut penggunaan teknologi dan tenaga kerja manusia. Secara keseluruhan hal ini akan menyebabkan penggunaan sarana dan teknologi panen dan pascapanen menjadi sangat kurang.



BAB V

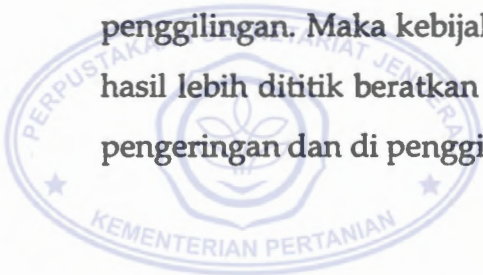
KEBIJAKSANAAN PENANGANAN PASCAPANEN

Kebijaksanaan penanganan pasca panen didukung oleh aspek legal dalam bentuk Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1986 tentang "Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian" dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang System Budidaya Tanaman.

Kebijakan operasional penanganan panen dan pasca panen secara terfokus diarahkan pada 2 (dua) hal yaitu :

1. Upaya Penyelamatan Hasil

Kebijaksanaan yang ditempuh adalah upaya penyelamatan hasil dari kehilangan dan kerusakan waktu panen dan pasca panen. Hal ini mengingat bahwa tingkat kehilangan hasil terutama pada tanaman padi tertinggi terjadi pada tahap panen, perontokan, pengeringan, dan di penggilingan. Maka kebijaksanaan operasional penyelamatan hasil lebih dititik beratkan pada tahapan panen, perontokan, pengeringan dan di penggilingan.



Pada tanaman hortikultura, upaya penyelamatan kehilangan hasil dan kerusakan waktu panen dan pasca panen dititikberatkan pada tahapan panen, sortasi, pengangkutan dan penyimpanan

Pada tanaman perkebunan difokuskan kepada pemanenan, sortasi, pengangkutan dan penyimpanan. Sedangkan pada peternakan difokuskan kepada pemanenan, penyimpanan dan pengangkutan

2. Upaya Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu hasil terus diupayakan agar petani mendapatkan nilai tambah dalam mengelola usahatannya, dan tidak hanya menjual hasil sebagaimana biasanya. Peningkatan mutu dapat dilakukan melalui peningkatan perbaikan pengolahan pascapanen.

Untuk mencapai mutu hasil yang baik diperlukan adanya standarisasi dan penerapannya di lapangan sehingga jaminan mutu hasil dapat dilakukan secara obyektif dan ada jaminan bagi konsumen untuk memperoleh hasil yang benar-benar bermutu. Peran serta produsen dan pedagang/eksportir sangat diperlukan dalam pelaksanaan standarisasi ini sesuai fungsinya masing-masing.

BAB VI

STRATEGI PENANGANAN PASCAPANEN

Faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam penanganan pascapanen di masa yang akan datang antara lain :

1. Aspek Kebijakan

Keberpihakan pada kegiatan penanganan pascapanen dibandingkan dengan kegiatan pra panen lebih diupayakan proporsional. Oleh karena itu perlu partisipasi dari semua pihak untuk menangani masalah pascapanen secara menyeluruh dan berkesinambungan.

2. Koordinasi Lintas Sektoral

Pengembangan penanganan pascapanen kedepan dilakukan melalui pendekatan koordinasi antar kelembagaan terkait baik di tingkat pusat, daerah dan di lembaga penyuluhan.

Koordinasi tersebut dimaksudkan antara lain untuk mensinkronkan program dan pelaksanaan perbaikan penanganan pasca panen, agar dapat memberikan hasil/dampak yang maksimal.

3. Aspek Teknologi Pascapanen

- a. Meningkatkan peran teknologi pascapanen melalui penambahan jumlah alat dan mesin pasca panen. Dalam penambahan alsin tersebut perlu memperhatikan jenis alat dan mesin yang secara teknis dan ekonomi layak untuk dikembangkan serta kondisi sosial memungkinkan. Dalam pengembangan alsin tersebut menyediakan fasilitas kredit alsin dengan tingkat suku bunga rendah dan persyaratan lunak perlu dilakukan.
- b. Pengkajian/uji terap alat dan mesin pasca panen
Inovasi baru teknologi pascapanen perlu terus dikajiterap di lapangan dan disosialisasikan kepada pengguna jasa alsin.
- c. Pengkajian kebutuhan ril alsin pasca panen secara spesifikasi di masing-masing daerah dan identifikasi kebutuhan riel alsin pasca panen pada suatu wilayah sentra produksi.
- d. Pemasyarakatan penggunaan alsin panen dan pascapanen melalui kampanye dan demonstrasi.
- e. Mendorong industri kecil atau usaha perbengkelan/pengrajin alsin pascapanen, pengusaha jasa alsin pasca panen dan petani untuk dapat bekerjasama dan saling melakukan kemitraan. Mutu produk alsinta seyogyanya betul-betul terjamin karena itu *Good*

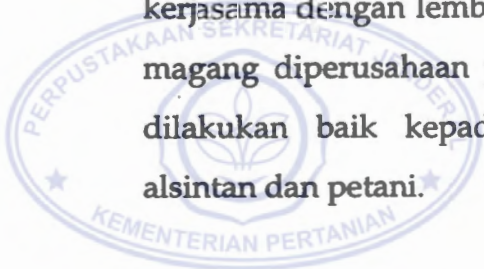
Manufacturing Practices harus diterapkan dalam memproduksi alsintan baik oleh pabrik maupun bengkel pengrajin. Hal yang juga penting dalam memproduksi alsin pasca panen adalah harga jual hendaknya dapat terjangkau oleh masyarakat, hal ini dapat diupayakan selain melalui peningkatan efisiensi usaha juga melakukan produksi massal. Disamping itu jaminan purna jual dari produsen alsintan harus ditepati agar pengguna alsitan tidak mendapatkan kesulitan apabila memerlukan suatu suku cadang alsintan dimaksud

4. Aspek Kelembagaan

Pelaku pascapanen (petani/kelompok tani), usaha yang bergerak dalam pascapanen, dan industri pengolahan hasil primer, perlu diperkuat agar mereka mampu meraih nilai tambah

5. Aspek Sumber Daya Manusia

Peningkatan mutu SDM dilakukan melalui pelatihan/kursus, kerjasama dengan lembaga pelatihan seperti perguruan tinggi, magang diperusahaan yang telah maju. Sedangkan pelatihan dilakukan baik kepada petugas maupun para pengelola alsintan dan petani.



6. Aspek Permodalan

Perlu diupayakan adanya skim khusus untuk asin pascapanen dengan persyaratan yang mudah, suku bunga rendah dan dapat dijangkau oleh petani/kelompok tani atau Kelompok UPJA yang membutuhkan



BAB VII

SASARAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN

1. Penurunan Kehilangan Hasil Pasca Panen

Penyelamatan hasil saat panen dan pasca panen meningkat seiring dengan meningkatnya perbaikan penanganan pascapanen, kesadaran petani, peran serta masyarakat, penggunaan teknologi serta keterpaduan program. Diharapkan dari penanganan pasca panen hasil pertanian ini dapat menyelamatkan hasil sampai pada taraf yang lebih meningkat sekitar 2 - 5 %. Dan kehilangan hasil dapat ditekan kepada taraf dimana kehilangan hasil tidak dapat ditolerir lagi.

2. Peningkatan Mutu Hasil

Mutu hasil pertanian diharapkan akan lebih meningkat, sehingga daya tahan dan harga jual akan lebih baik. Disamping itu peningkatan mutu diharapkan sesuai dengan standar mutu internasional.

3. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani

Penanganan pascapanen yang baik diharapkan selain meningkatkan mutu dan kuantitas hasil panen juga diharapkan meningkatkan pendapatan petani serta sekaligus hendaknya meningkatkan kesejahteraannya.

BAB VIII PROGRAM PENANGANAN DAN PASCAPAN

Program penanganan panen dan pasca panen hasil pertanian yang secara mendasar mampu memperbaiki kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, harus merupakan program meliputi keseluruhan sistem panen dan pasca panen, dan menyangkut seluruh aspek yang terkait mulai dari aspek sumberdaya manusia, budidaya, hingga revitalisasi peralatan. Untuk mencapai apa yang diharapkan terutama turunya kehilangan hasil dan meningkatnya mutu hasil maka diperlukan program yang terencana dan berbasis kepada pelaku utama yakni petani.

1. Penyelamatan Hasil Panen

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan pendapatan petani, salah satu kegiatan yang ditempuh adalah menekan kehilangan hasil terutama pada saat panen, pengangkutan dan proses pengolahan hasil. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan hasil

- a. Peningkatan kesadaran akan pentingnya penanganan panen dan pascapanen melalui gerakan penanganan panen dan pascapanen ;
- b. Pengembangan demonstrasi, kampanye dan latihan pascapanen;

proses produksi dan penanganan pasca panen yang konsisten. Dalam rangka pembinaan mutu hasil pertanian dan olahannya, maka kegiatan yang akan dilakukan berupa :

- a. Bimbingan teknis penerapan jaminan mutu
- b. Apresiasi SNI dan standard internasional produk olahan
- c. Pemantauan, analisa dan evaluasi mutu produk olahan
- d. Pembinaan dan fasilitasi sistim jaminan mutu produk segar dan olahan.

3. Pengembangan Sarana dan Teknologi Pasca Panen

Dalam rangka penanganan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian kegiatan yang akan dilakukan di bidang pengembangan sarana pertanian antara lain :

- a. Mengembangkan peralatan pengering dan lumbung pangan
- b. Bimbingan manajemen pengembangan sarana alat mesin pengolahan hasil pertanian baik secara sosial, teknis maupun ekonomis
- c. Menjalin kerjasama dengan peneliti, perekayasa, pelaku usaha pengolahan, petani dan pengusaha alat mesin pertanian dalam pengembangan sarana pengolahannya
- d. Bimbingan teknis dan pembinaan kelompok usaha pengolahan hasil pertanian dan pembinaan pemanfaatan UPJA dan lain-lain

- e. Bimbingan teknis pemanfaatan modal baik dari skim kredit perbankan maupun dari skim kredit PUKK atau dari BLM
- f. Pengembangan benkel dan persewaan alat dan mesin pascapanen di tingkat lokalita
- g. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (pelatihan) dalam bidang pengembangan sarana pengolahan hasil pertanian di pedesaan.

4. Penumbuhan Unit/Usaha Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)

Penumbuhan dan pengembangan UP3HP merupakan upaya terobosan untuk mempercepat proses berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian di pedesaan. Upaya ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi rakyat, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani serta pengembangan wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Upaya ini diarahkan kepada unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian skala rumah tangga, kecil dan menengah di pedesaan untuk mengatasi permasalahan penyediaan sarana prasarana, kesenjangan keterkaitan antara subsistem produksi, pengolahan dan penawaran hasil pertanian dalam suatu system dan usaha agribisnis.

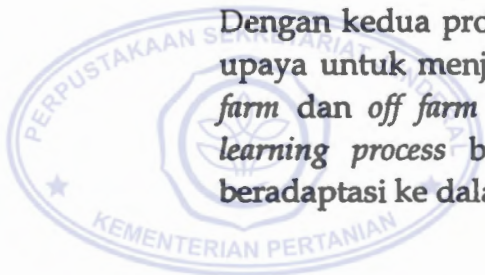
Kegiatan penumbuhan dan pengembangan UP3HP antara lain meliputi :

- a. Pengembangan kelembagaan UP3HP
- b. Pengembangan usaha agroindustri komoditas pertanian
- c. Peningkatan kualitas sumberdaya aparat, petugas UP3HP dan pelaku usaha pengolahan
- d. Pemberdayaan kelompok usaha pengolahan hasil untuk menerapkan manajemen dan teknologi tepat guna sehingga dapat meningkatkan daya saing
- e. Revitalisasi peralatan pengolahan

5. Pengembangan Keterkaitan/Kemitraan Usaha

Dalam rangka melibatkan pelaku agroindustri besar terutama untuk memperbaiki penanganan pascapanen usahatani/ternak, maka program yang dapat dilakukan antara lain adalah :

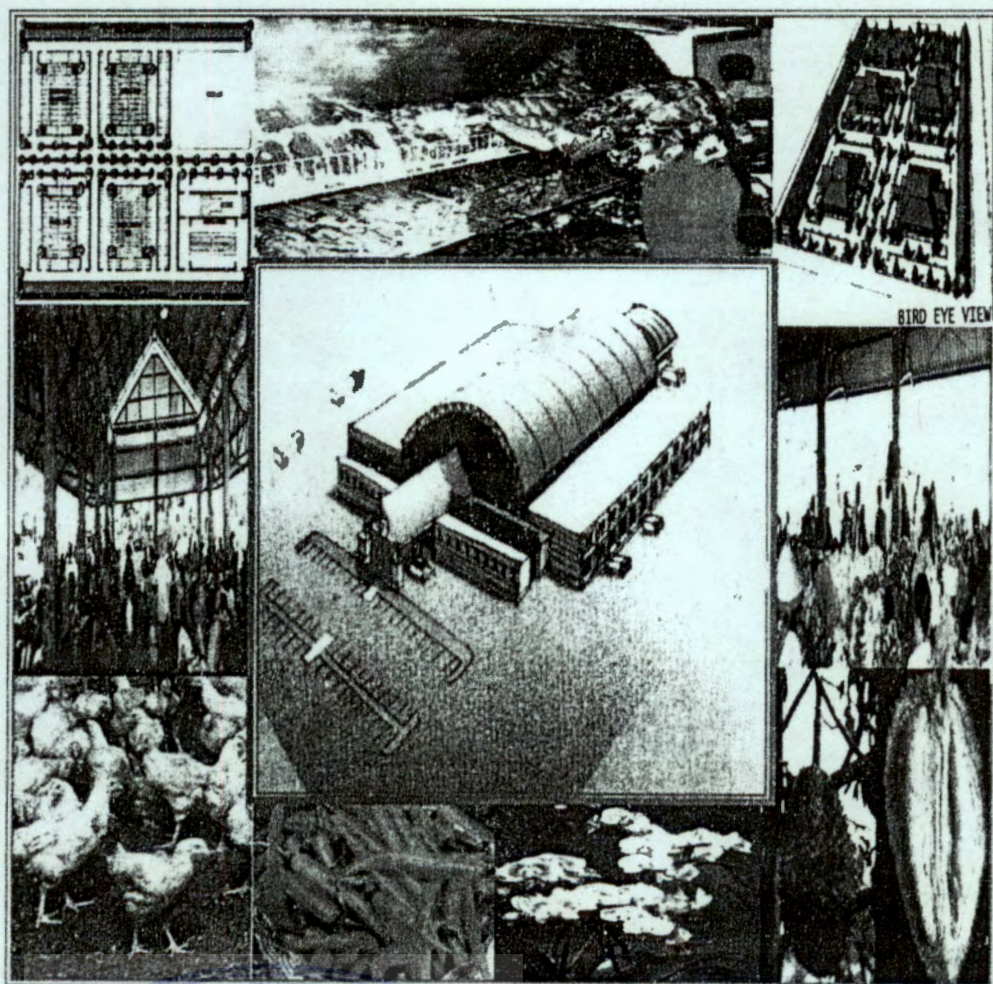
- a. Mendorong terciptanya hubungan usaha yang berkelanjutan antara pelaku agribisnis/petani penghasil produksi dari sektor *on farm* sebagai penyedia bahan baku dengan pengusaha besar yang memerlukan bahan baku.
 - b. Mendorong terciptanya rantai kegiatan *off farm* antara pelaku agroindustri skala rumah tangga/kecil sebagai bahan baku untuk industri lanjutan yang dikelola oleh pelaku agroindustri skala besar.
- Dengan kedua program tersebut diharapkan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan kegiatan *on farm* dan *off farm* dapat di atasi, sekaligus sebagai *learning process* bagi masyarakat pedesaan untuk beradaptasi ke dalam era industri pedesaan



- c. Merevitalisasi agroindustri yang sudah ada, terutama pemenuhan kapasitas terpasang bagi agroindustri yang selama ini *under capacity*.
- d. Mendorong tumbuhnya agroindustri baru terutama yang bersifat padat modal dan atau teknologi tinggi yang terintegrasi dengan produksi petani, pekebun dan peternak.



GRAND DESIGN PENGEMBANGAN TERMINAL DAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS



**DIREKTORAT JENDERAL
BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2002**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian Sub Terminal Agribisnis dan Terminal Agribisnis	4
1.3 Manfaat dan Tujuan Pembentukan TA dan STA	4
1.3.1 Manfaat Pembentukan TA dan STA	4
1.3.2 Tujuan Pembentukan TA dan STA	6
1.4 Pembentukan TA dan STA.....	8
1.4.1 Bentuk dan Fungsi TA dan STA.....	8
1.5 Mekanisme Kerja TA dan STA.....	9
1.6 Kewenangan Pembinaan TA dan STA.....	10
II. TAHAPAN PEMBANGUNAN TA DAN STA	11
2.1 Skenario Fase Pengembangan TA dan STA	13
2.2 Skenario Pembangunan TA dan STA	15
2.3 Pola Pembangunan TA dan STA	18
2.3.1 Penyediaan Lahan	18
2.3.2 Pemilikan TA dan STA	18
2.3.3 TA dan STA Pemerintah	18
2.3.4 TA dan STA Koperasi	19
III. PROGRAM PENGEMBANGAN	34
4.1. Penyediaan Lahan	34
4.2. Tata Ruang, Operasional dan Pengelolaan.....	35
V. PENUTUP	36
VI. LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
I. Tabel 2.1. Tahapan Pembentukan STA dan TA.....	15
II. Tabel 3.1 Jenjang Kelembagaan dan Pelaku Jaringan TA dan STA	23
III. Tabel 3.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana TA dan STA	24
IV. Tabel 3.3. Matrik Pelaku Pasar Tiap Ordo Pada Sistem Pemasaran Spasial	32



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
I. Gambar 2.1 Mekanisme Pengembangan TA dan STA.....	12
II. Gambar 2.2. Tahapan Pengembangan TA dan STA	16
III. Gambar 3.1. Rantai Pemasaran Komoditi Pertanian.....	28
IV. Gambar 3.2. Sistem TA dan STA	30
V. Gambar 3.3 Tinjauan Spasial TA dan STA	31



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk pertanian baik segar maupun dalam bentuk olahan seperti sayuran, buah, daging, telur dan ikan merupakan produk-produk yang memiliki arti penting dan strategis. Namun dalam pengembangannya, masih banyak menghadapi permasalahan baik mulai dari aspek produksi, pasca panen, pengolahan hasil, pengemasan, distribusi sampai kepada aspek pemasarannya.

Untuk menciptakan produk-produk pertanian yang berdaya saing harus dicirikan antara lain berorientasi pasar, meningkatkan pangsa pasar khususnya di pasar internasional dan mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (*capital-driven*), pemanfaatan inovasi teknologi (*innovation-driven*) serta kreativitas sumberdaya manusia (*skill-driven*) dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja yang tidak terdidik (*factor driven*). Oleh karena itu mekanisme pasar perlu diciptakan sedemikian rupa agar proses pembentukan harga yang bebas dan memadai, mekanisme pasar yang berkeadilan dapat berjalan, maka perlu dibangun tatanan khusus bagi produk agribisnis yang berbeda dengan tatanan untuk pasar maupun produk lainnya yang ada di pasar.

Sejalan dengan hasil diatas, juga perlu dibangun dan dikembangkan institusi pelayanan pemasaran yang dinamakan Terminal Agribisnis (TA) di sentra-sentra konsumen dan Sub Terminal Agribisnis (STA) di sentra-sentra produksi.

Permasalahan yang seringkali menjadi faktor pembatas bagi perkembangan produk-produk unggulan agribisnis di sentra konsumen antara lain aspek pemasaran dimana begitu banyak pihak yang terlibat dalam mata rantai distribusinya serta struktur pasar yang tidak sempurna, sehingga dapat menimbulkan in-efisiensi dalam sistem pemasaran tersebut.

Pembangunan dan pengembangan TA dan STA ini juga didorong oleh :

- 1) Perkembangan atau perubahan permintaan konsumen, dimana tuntutan konsumen akan kemudahan mendapatkan produk berkualitas, kemasan menarik dan aman dikonsumsi semakin besar.
- 2) Pesatnya perkembangan pusat-pusat konsumsi terutama di kota-kota besar, tumbuhnya pasar-pasar produk berkualitas (supermarket, minimarket), restoran, hotel-hotel, rumah sakit, industri pengolahan, jasa boga, distributor, dan eksportir.
- 3) Globalisasi dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, pasar domestik menjadi bagian dari pasar internasional, dan persaingan pasar yang semakin ketat menuntut efisiensi di semua unit usaha dalam sistem agribisnis, termasuk didalamnya efisiensi dalam pemasaran hasil-hasil pertanian, baik segar maupun produk olahan.

Pembangunan dan pengembangan TA dan STA dibutuhkan karena tuntutan era perdagangan saat ini dan mendatang serta perubahan preferensi konsumen, juga diperlukan dalam upaya memperbaiki mekanisme pemasaran hasil pertanian saat ini, dimana kondisi pemasaran agribisnis umumnya sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kemampuan posisi tawar dari petani produsen yang umumnya disebabkan oleh sifat alamiah

komoditi pertanian yang mudah rusak, musiman, heterogen dalam ukuran, volume besar (*bulk*) dan mutu serta lemahnya kondisi sosial-ekonomi, sehingga kurang memungkinkan terciptanya suatu transaksi yang adil.

- 2) Biaya transaksi yang relatif besar yang ditunjukkan oleh relatif besarnya selisih harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar oleh pengolah, pedagang atau konsumen.
- 3). Penguasaan informasi tidak sama (*asimetris*) antara petani produsen dengan pembelinya. Keadaan ini menyebabkan pembeli pada posisi penentu harga.
- 4) Struktur pasar oligopsonistik yang dapat menyebabkan pembeli pada posisi penentu harga.
- 5) Adanya faktor eksternalitas yang menyebabkan kegagalan pasar.
- 6) Keterkaitan fungsional antara petani produsen, pedagang, pengolah dan distributor tidak disertai dengan keterkaitan kepentingan dan keterkaitan organisasi, yang dapat menyebabkan hambatan serius dalam kontinuitas bahan baku untuk agroindustri.
- 7) Perubahan harga ditingkat konsumen belum bisa direfleksikan pada harga di tingkat produsen, sehingga produsen tidak bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar, akibatnya rangsangan bagi produsen berkurang atau dapat menyebabkan alokasi sumberdaya yang tidak efisien.
- 8) Kurangnya infrastruktur dan institusi pelayanan pemasaran yang menghambat kelancaran distribusi komoditi dan produk olahan pertanian serta pengendali pasokan.

Perbedaan sifat alamiah komoditi dan produk hasil pertanian, kegunaan dan pasar produk, sosial-budaya masyarakat, perilaku pelaku agribisnis memberikan petunjuk bahwa strategi pengembangan sistem

pemasaran tidak mungkin dilakukan secara seragam untuk setiap lokasi dan komoditi, termasuk institusi pelayanan pemasarannya, karena itu, model TA dan STA dapat beragam menurut jenis komoditi, lokasi, waktu, pemilikan dan pengelola serta model pengembangan agribisnisnya.

1.2 Pengertian Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis

Terminal Agribisnis (TA) adalah institusi pelayanan pemasaran di pasar (sentra konsumen) sedangkan Sub Terminal Agribisnis (STA) adalah institusi pelayanan pemasaran di sentra produksi, yang berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli hasil-hasil pertanian, baik transaksi fisik (lelang, langganan, spot, gadai), maupun non fisik (kontrak, pesanan, *future market*, *virtual market*).

TA juga berfungsi dalam pelayanan informasi (harga, pasar dan agribisnis) dan pelayanan ekspor (karantina, bea cukai, dll.). Sedangkan STA juga berfungsi dalam pembinaan mutu (peningkatan mutu : sortasi, grading, pengemasan dan jaminan mutu produk : pelabelan tanda SNI), pelayanan informasi (harga, pasar dan agribisnis), penyediaan sarana produksi, tempat promosi, dan tempat musyawarah para pelaku agribisnis dalam merancang bangun pengembangan agribisnis (manajemen lahan, pola tanam, target produksi, dll.) untuk memenuhi permintaan pasar sasaraannya.

Antara TA dan STA masing-masing independen (bukan *underbow*), tetapi dihubungkan oleh sistem informasi.

1.3 Manfaat dan Tujuan Pembentukan TA dan STA

1.3.1 Manfaat Pembentukan TA dan STA

TA dan STA sebagai institusi pelayanan pemasaran diharapkan dapat bermanfaat untuk :

Pola Pengembangan Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis

- 1) Meningkatkan pendapatan bagi para petani, pedagang dan pengolah melalui perolehan nilai tambah dari kegiatan pembinaan : grading, sortasi, pengemasan, pengolahan, dan distribusi pemasaran hasil agribisnis, serta efisiensi perolehan sarana produksi.
- 2) Memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisiensi pemasaran komoditas agribisnis melalui :
 - a. memberikan kesempatan dan tempat bagi para petani untuk menjual hasil produksinya serta tempat bagi pedagang, dan pengolah untuk membeli produk agribisnis,
 - b. TA dan STA merupakan tempat transaksi dan pusat distribusi (lokal, regional, antar pulau, dan antar negara),
 - c. memperbaiki struktur pasar, cara transaksi dan jaringan pemasaran,
 - d. tempat perolehan informasi dan promosi produk hasil-hasil agribisnis,
 - e. membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemasaran antara : TA-TA; TA-STA, dan STA-STA.
- 3) Mempermudah pembinaan mutu hasil agribisnis melalui :
 - a. kelompok untuk memudahkan transfer teknologi, baik teknologi produksi, maupun pengemasan dan pengolahan,
 - b. kelompok untuk melakukan grading, sortasi, dan pengemasan,
 - c. TA dan STA menyediakan air bersih, es, gudang, *cool room*, *cold storage* sesuai dengan kebutuhannya,
 - d. TA memfasilitasi perkarantinaan dan bea cukai untuk memudahkan kepentingan ekspor hasil-hasil agribisnis.

Pola Pengembangan Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis

- e. STA wadah pembinaan peningkatan mutu produk, penanganan dan pengemasan hasil-hasil agribisnis,
- 4) Mengubah pola pikir petani kearah pola pikir agribisnis.
STA menjadi wadah bagi pelaku agribisnis untuk merancang bangun pengembangan agribisnis, mensinkronkan kebutuhan dan permintaan pasar dengan manajemen lahan, pola tanam, dan terget produk serta kebutuhan saprodi dan permodalan serta jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan.
- 5) Meningkatkan keunggulan bersaing produk hasil-hasil agribisnis melalui :
 - a. pengembangan produksi didasarkan atas permintaan pasar,
 - b. efisiensi dalam produksi dan pemasaran,
 - c. peningkatan dan jaminan mutu produk,
 - d. pengendali pasokan.
- 6) Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui jasa pelayanan pemasaran dan berkembangnya usaha-usaha berbasis hasil-hasil pertanian.

Dengan demikian baik TA maupun STA diharapkan dapat berfungsi sebagai *"growth center"* (sumber pertumbuhan baru) yang menggerakkan ekonomi kerakyatan.

1.3.2 Tujuan Pembentukan TA dan STA

1) Meningkatkan Efisiensi Pasar.

Pengelola TA/STA bekerja sama dengan petani produsen, koperasi atau pedagang pengumpul untuk memasarkan produksinya di TA/STA, sehingga mata rantai pemasaran akan menjadi pendek. Dengan demikian, semenjak awal segera setelah panen, produk

sudah menjalani pengolahan sehingga sampah atau bagian yang tidak bermanfaat secara komersial tidak ikut terbawa ke kota dan dapat dimanfaatkan di lahan usaha tani.

2) Memperkuat Posisi Rebut Tawar Petani

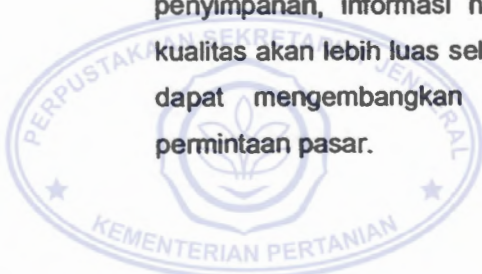
Apabila pasar semakin efisien, maka perilaku pasar menjadi lebih pasti, sehingga petani produsen diharapkan akan mendapatkan bagian keuntungan yang lebih baik. Kedudukan petani (*bargaining position*) dibandingkan dengan para pelaku pasar lainnya akan meningkat.

3) Sumber Informasi Harga

Dengan sistem transaksi yang fair, dimana akses informasi pasar diantara pelaku pasar sudah relatif baik, maka diharapkan akan terwujud mekanisme pembentukan harga yang transparan dan mencerminkan kekuatan pasar, sehingga petani juga akan menerima tingkat harga yang wajar. Dengan harga yang wajar diharapkan petani akan dapat lebih bergairah dalam meningkatkan produksi dan kualitasnya, sehingga pendapatannya akan lebih baik. Dalam rangka penyediaan informasi harga yang lengkap, mutakhir dan mudah, maka perlu dibangun jaringan sistem informasi antara TA dan STA maupun pasar lain. Untuk mendukung hal tersebut maka sistem informasi yang dimaksud perlu difasilitasi dengan perangkat komputer.

4) Meningkatkan Nilai Tambah Produk.

Dengan tersedianya berbagai sarana pendukung (pengolahan, penyimpanan, informasi harga dan lain-lain), maka peningkatan kualitas akan lebih luas sehingga nilainya pun akan meningkat serta dapat mengembangkan diversifikasi produk sesuai dengan permintaan pasar.



5) **Menambah Segmentasi Pasar.**

Dengan meningkatnya efisiensi pemasaran, maka pasar akan mampu melayani keperluan yang lebih luas, seperti : pasar ekspor, pasar swalayan, hotel dan restoran, perdagangan antar pulau dan sebagainya.

6) **Meningkatkan Mutu dan Sanitasi Pasar.**

Diharapkan dengan bentuk pasar dan manajemen yang lebih baik, mutu dan sanitasi pasar akan dapat ditingkatkan.

7) **Pembinaan Pelaku Pasar**

Lembaga transaksi ini diharapkan juga berfungsi sebagai media baik langsung maupun tidak langsung untuk pembinaan para pedagang. Dengan contoh yang baik sehari-hari maupun melalui program pelatihan secara khusus, maka kemampuan para pedagang dapat ditingkatkan kualitasnya.

8) **Pengendali Pasokan**

Pada waktu panen raya, sudah dipastikan harga komoditi hasil pertanian akan jatuh, sehingga diperlukan adanya unit usaha yang dapat mengendalikan pasokan untuk dapat harga yang stabil.

1.4 Pembentukan TA dan STA

1.4.1 Bentuk dan Fungsi TA dan STA

- 1) TA dan STA merupakan suatu tempat dimana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Penjual diwakili oleh pedagang penampung (*primary wholesalers*), selanjutnya pedagang grosir menjual kepada pengecer. Pedagang penampung (*primary wholesalers*) dapat pula menjual langsung kepada eksportir, pasar swalayan dan distributor lain berdasarkan kontrak langsung.
- 2) TA dan STA menyediakan ruang transaksi, tempat penyimpanan dengan pendingin (*cold storage*) yang disewakan kepada pedagang grosir (*intermediate wholesalers*) pelayanan informasi pasar yang meliputi informasi potensi penawaran (*supply*) dan permintaan

(demand) produk, perkembangan harga dan penyediaan sarana transportasi. Disamping itu juga disediakan sarana penunjang seperti jasa perbankan, bea cukai, sertifikasi, perparkiran, keamanan dan lain sebagainya.

- 3) Pengembangan TA dan STA ini dikelola oleh sentral manajemen profesional dalam bentuk suatu perusahaan induk yang masing-masing dikelola oleh tim yang ahli di bidang masing-masing dan pengelolaannya dilakukan secara independen. Fungsi-fungsi yang mutlak diperlukan terdiri dari bidang operasional yang melayani pelayanan kegiatan transaksi secara transparan, bidang pengembangan yang menangani promosi dan informasi harga dan bidang sarana dan pembiayaan yang menangani pembiayaan, organisasi dan sarana.

1.4.2 Mekanisme Kerja TA

Kegiatan transaksi antara lain penjual dan pembeli di TA berlangsung setiap hari. Dengan demikian sumber pasokan produk yang akan diperdagangkan harus terjamin dan kontinyu dari produsen (STA, produsen, pedagang pengumpul). Disamping itu produk pertanian impor juga dapat dipasarkan di TA.

1.5 Peranan TA dan STA

Peran TA dan STA dapat dikelompokkan menjadi peran :

- 1) Konsentrasi. Beragam produk dari berbagai tempat dikumpulkan pada satu tempat dalam jumlah yang efisien untuk diperdagangkan.
- 2) Pembentukan harga, yang transparan, wajar, menggambarkan kekuatan permintaan penawaran, akses informasi yang lebih baik, dan ditentukan melalui mekanisme yang disepakati bersama (misalnya melalui mekanisme lelang).

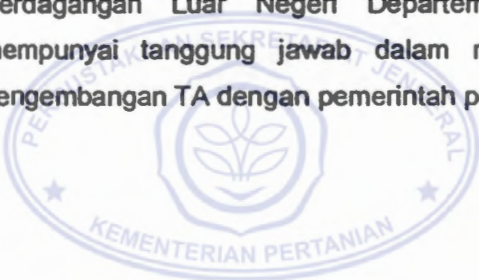
- 3) Distribusi. Sebagai simpul distribusi dari produsen/importir secara cepat dan efisien ke pengecer/eksportir.
- 4) Penyelesaian transaksi, melalui berbagai mekanisme pembayaran serta dukungan berbagai pelayanan seperti perijinan, perbankan, dan sebagainya.
- 5) Mengurangi biaya bongkar muat dan penanganan produk dalam jumlah yang efisien.
- 6) Sumber informasi. Sebagai simpul pengumpulan dan penyebaran berbagai informasi perdagangan.
- 7) Berbagai bentuk pelayanan penunjang. Sertifikasi, pemeriksaan higienis, penyimpanan, custom, dan sebagainya.

1.6 Kewenangan Pembinaan TA dan STA

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah departemen Dalam negeri mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasikan ketersediaan lahan yang sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang pembangunan daerah dengan pemerintah propinsi, kabupaten dan kota.

Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan STA dengan pemerintah kabupaten.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan TA dengan pemerintah propinsi dan kota.

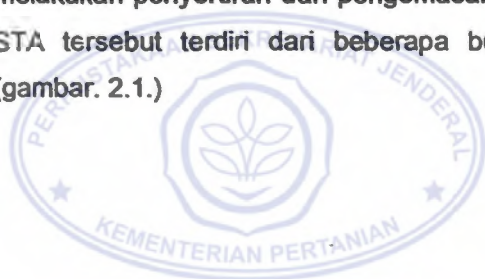


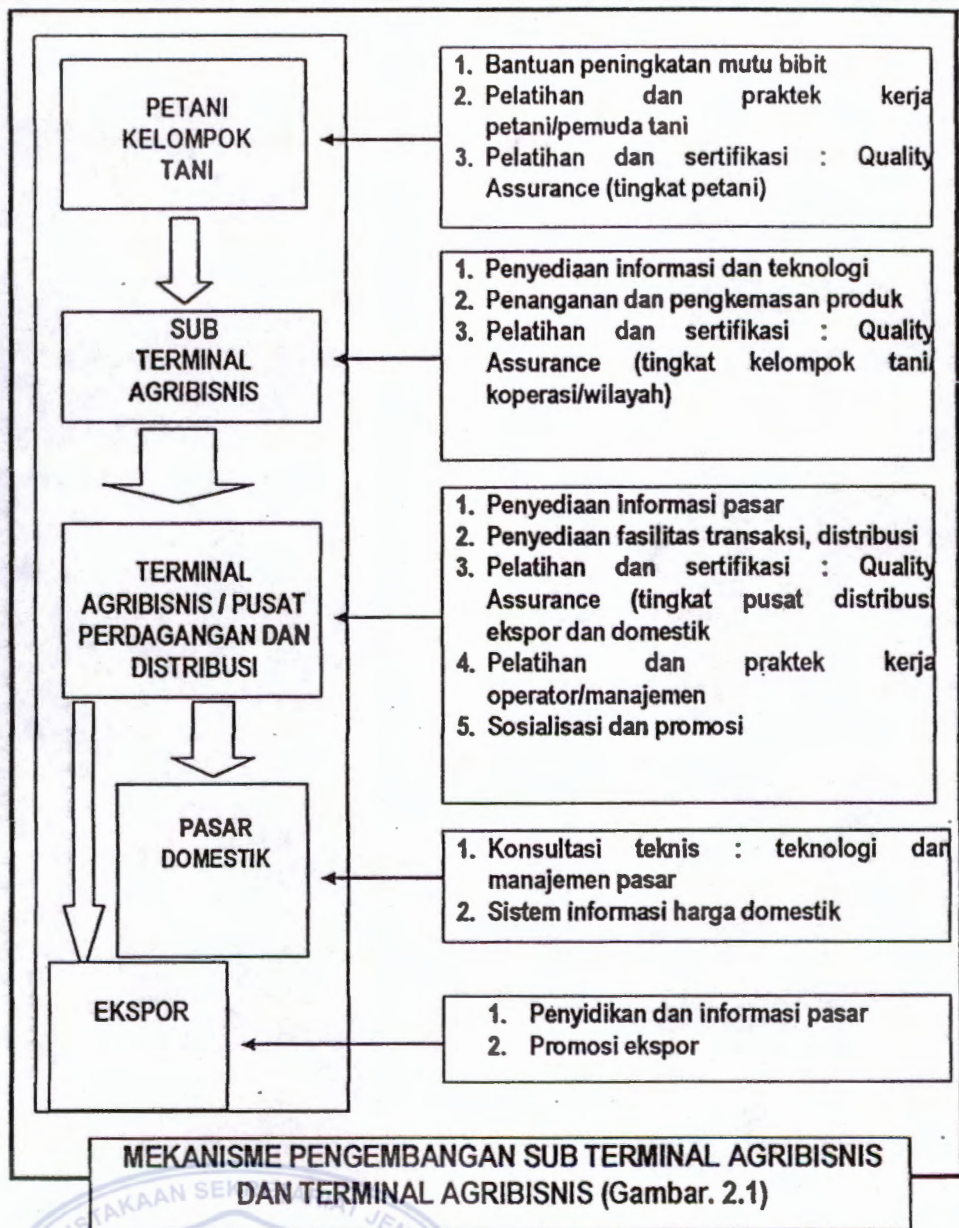
II. TAHAPAN PEMBANGUNAN TA DAN STA

TA dan STA pada hakekatnya adalah pasar tempat transaksi hasil produksi petani produsen dan selanjutnya didistribusikan kepada konsumen akhir atau dipergunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan lebih lanjut. Pasar tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang menuju pasar distribusi modern; di pasar ini diharapkan terjadinya praktek perdagangan yang adil melalui sistem pembentukan harga yang transparan.

Pegembangan TA dan STA dapat merupakan institusi baru yang komplementer dengan pasar lain termasuk pasar induk yang ada atau dapat pula dengan memperbaiki sistem pasar yang sudah ada dengan prinsip proses evolusi yang dipercepat, melalui berbagai program pembangunan sistem pemasaran dalam kerangka pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Dalam kerangka mengembangkan sistem pemasaran dan distribusi komoditi pertanian modern melalui TA dan STA terdapat dua simpul penting yang harus diperbaiki. **Simpul pertama** adalah ditingkat sentra produksi dan **simpul kedua** adalah sentra konsumsi. Mekanisme di sentra produksi diubah dari "penjualan satu-satu" (antara petani dan pedagang) menuju sistem kelompok dalam STA. Selanjutnya STA tersebut akan dikembangkan menjadi *pool* komoditas, dimana petani baik sendiri maupun melalui koperasi atau organisasi pemasaran mengumpulkan komoditasnya di tempat pengumpulan, kemudian melakukan penyortiran dan pengemasan yang siap diangkut ke TA. Keberadaan STA tersebut terdiri dari beberapa buah dan berlokasi di berbagai tempat (gambar. 2.1.)





Pengembangan TA di sentra konsumen dilengkapi dengan fasilitas transaksi, kamar pendingin (*cold storage*), *freight forwarding*, sertifikasi, sarana informasi, bea-cukai, dan lembaga keuangan (bank). Komoditas yang masuk ke TA dapat berasal dari koperasi, petani, maupun pedagang dari berbagai daerah.

Untuk mengubah dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diharapkan tersebut (pembentukan TA) membutuhkan waktu beberapa tahun.

Berbagai fasilitas di TA dimaksudkan untuk menunjang terjadinya transaksi dengan cepat dan pembentukan harga secara transparan. Pembeli yang melakukan penawaran di TA adalah pedagang grosir (*intermediate wholesalers*), yang selanjutnya akan mendistribusikannya kepada pedagang pengecer, eksportir, hotel dan restoran serta distributor lainnya yang dapat membeli langsung dari TA. Selanjutnya TA dan STA dapat dimanfaatkan sebagai lembaga distribusi bahan kebutuhan masyarakat yang dipasok dari produsen nasional, seperti : minyak goreng, gula, beras, telur, daging, susu dan sebagainya yang lebih banyak dilakukan pasar luar dalam TA dan STA. Dalam hal ini peran strategis TA dan STA adalah dalam hal informasi pasar, pemenuhan permintaan konsumen, pemesanan serta pembayaran kolektif.

2.1. Skenario Fase Pengembangan TA dan STA

Proses transformasi dari kondisi sistem pemasaran tradisional, seperti selama ini menuju terciptanya sistem pemasaran modern membutuhkan waktu dan dibagi dalam beberapa tahapan (fase). Tahapan ini diperlukan karena berkaitan dengan target yang direncanakan. Dalam kondisi seperti saat ini beberapa fase yang dapat dilakukan dapat dibagi menjadi empat bagian besar, yaitu Fase 1: Persiapan; Fase 2 : Penyusunan Business Plan dan Sosialisasi; Fase 3 : Pembangunan Fisik; dan Fase 4 : Tahapan Operasionalisasi.

1) Fase 1 : Persiapan

Tahap persiapan adalah tahapan yang harus dilakukan untuk dapat lebih mengetahui kondisi pasar sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain *feasibility study* sampai kepada perancangan awal sistem TA dan STA. Output kegiatannya berupa rekomendasi konseptual.

2 Fase 2 : Penyusunan Business Plan dan Sosialisasi

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan pendalaman dari kegiatan pada fase 1 untuk menentukan kegiatan fisik dan non fisik selanjutnya, seperti penyusunan business plan, perancangan yang lebih rinci terhadap sistim distribusi, sarana fisik dan sistem operasi (manajemen) mempersiapkan petani produsen di sentra produksi, negosiasi dengan investor, melakukan sosialisasi, promosi dan mengevaluasi tahap sebelumnya. Pada fase ini diharapkan diperoleh dukungan publik, pelaku pasar maupun investor.

3) Fase 3 : Pembangunan Fisik

Tahap pembangunan fisik adalah tahapan yang dilakukan dengan asumsi hasil evaluasi menyimpulkan kegiatan yang menjadi agenda pada tahap ini selain pembangunan fisik TA dan STA, antara lain pemberdayaan petani dengan penyuluhan yang dikaitkan dengan perkoperasian dan non-koperasi serta pedagang. Inti dari kegiatan tersebut adalah memberikan pengertian kepada para petani dan pedagang sebagai pelaku pasar akan rencana membentuk sistem pemasaran alternatif yang lebih menguntungkan. Selain itu, juga kegiatan promosi kepada pelaku pasar lain dilakukan. Promosi berisi berbagai insentif dan kemudahan didalam TA dan STA maupun keunggulan-keunggulan lain. Lembaga pengelola mulai dibenahi dan ditata perangkat lunaknya berupa antara lain pelatihan SDM. Kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara simultan dan inter-departemen. Output kegiatan ini adalah infrastruktur fisik dan kelembagaan TA dan STA

4) Fase 4 : Operasi

Tahap ini merupakan tahap pembangunan infrastruktur fisik dan kelembagaan menuju operasionalisasi (pelaksanaan) dimana sistem

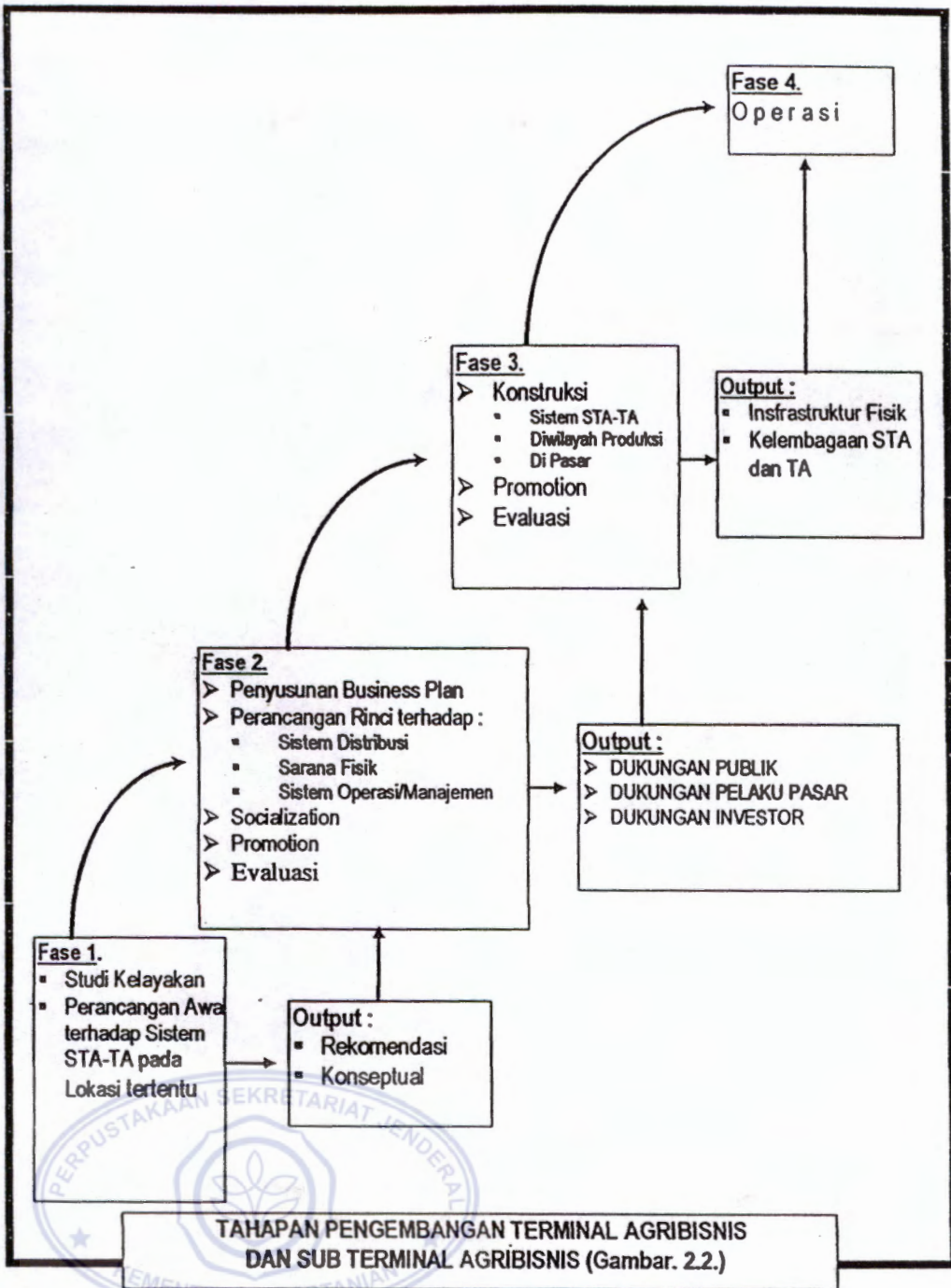
pemasaran telah beroperasi dengan baik yang dibarengi dengan proses perbaikan secara berkelanjutan.

Kegiatan pengembangan pemasaran dapat dikemukakan dalam bentuk pentahapan sebagaimana pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2 berikut.

Tabel. 2.1 Tahapan Pembentukan STA dan TA

Fase	Kegiatan
I Persiapan	- Feasibility Study 1. Identifikasi dan mencari informasi peta aliran komoditas dari sentra produksi ke sentra konsumsi, berupa jenis, jumlah, musim, asal, tujuan untuk menjaga kesinambungan. 2. Indikasi manfaat sosial ekonomi dan jaringan distribusi yang baru
II Penyusunan Business Plan dan Sosialisasi	- Perancangan Awal Sistem STA dan TA - Penyusunan Business Plan - Desain (rancang bangun) rinci terhadap : 1. Sistem distribusi 2. Sarana fisik 3. Sistem operasi/manajemen - Sosialisasi - Promosi - Evaluasi
III Pembangunan Fisik	- Konstruksi : 1. Sistem TA/STA 2. Persiapan pelaku pasar 3. Pembangunan fisik di sentra produksi 4. Pembangunan fisik di sentra konsumsi - Promosi - Evaluasi - Uji coba sampai kepada pelaksanaan pemasaran di TA yang sebenarnya.
IV Operasi	Sistem pemasaran telah beroperasi dengan baik pada STA dan TA





2.2 Skenario Pembangunan TA dan STA

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pembangunan TA untuk semua calon TA maupun STA sebaiknya dilakukan dalam beberapa tahap. Usulan ini didasarkan kepada beberapa alasan, sebagai berikut :

- 1) Relatif besarnya investasi awal yang diperlukan untuk membangun TA dan STA
- 2) Perkiraan arus komoditas yang akan dilayani (ditransaksikan) didalam TA dan STA adalah bertahap. Pada awalnya sekitar 10 %, kemudian meningkat 30 % sampai pada maksimal 70 %
- 3) Tahapan atau fase yang dilakukan untuk pembangunan TA dan STA juga terdiri dari beberapa tahap.

Namun demikian tetap tidak dilupakan bahwa pembangunan TA dan STA tetap dapat dilakukan sekaligus apabila investasi mencukupi. Untuk itu skenario pembangunan yang direncanakan, diajukan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan TA dan STA sekaligus lengkap. Syaratnya dana investasi mencukupi.
- 2) Pembangunan bertahap. Dimulai dari pembangunan fasilitas minimal apa yang harus dipersiapkan agar kegiatan transaksi komoditas utama dapat berjalan. Dengan demikian yang perlu dilakukan adalah : 1) penyiapan sebagian lahan yang tersedia, 2) pembangunan bangsal sayuran atau buah-buahan atau bangsal beras-palawija, 3) pembangunan pelataran parkir dan fasilitas umum (musholla, WC), 4) rumah makan dan sebagian kios luar, 5) penyediaan listrik dan air bersih, serta 6) alat timbang dan kereta dorong. Pada tahap berikutnya dibangun bangsal lain, pasar luar, pusat

informasi pasar, kantor, ruko, rumah makan, bangunan penunjang, maupun alat transportasi.

2.3 Pola Pembangunan TA /STA

2.3.1 Penyediaan Lahan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota mempunyai tanggung jawab untuk penyediaan lahan yang akan diperuntukkan bagi lokasi TA dan STA, serta mekanisme kerjasama tersebut dapat dibuat sesuai dengan kesepakatan (seperti : sebagai penyertaan modal pemerintah, pemberian konsesi, sewa lahan dan lain-lain), tetapi tidak tertutup kemungkinan disediakan oleh pihak swasta.

2.3.2 Pemilikan TA dan STA

Pemilikan atau para pelaku yang membiayai pembangunan TA dan STA dapat bervariasi antar daerah, dimana kemungkinannya dapat sebagai berikut :

- 1) Pemerintah.
- 2) Koperasi
- 3) Swasta

2.3.3 TA dan STA Pemerintah

TA dan STA sebagai institusi pelayanan publik dimana pembangunan dan pembinaannya menjadi kewajiban pemerintah, termasuk dalam menentukan pengelolannya, pemanfaatannya, penentuan organisasi dan tata kerjanya, ketentuan imbalan jasa penggunaan fasilitas, ketentuan tarif penggunaan fasilitas, jasa dan hasil produksi, serta prosedur pelaksanaan pemasarannya.

Keuntungan dari TA dan STA Pelayanan Publik ini diantaranya :

- 1) Para petani mempunyai kesempatan memasarkan hasil produksinya dengan biaya pemasaran yang relatif murah, namun harga jual didasarkan pada mekanisme pasar.

- 2) Para Petani/Kelompok/Koperasi mempunyai peluang untuk berusaha dengan memanfaatkan fasilitas di TA dan STA seperti :
 - a. Penyelenggaraan transaksi pemasaran.
 - b. Kios saprodi, rumah makan.
- 3) Pemerintah dapat melayani masyarakatnya dan menerima hasil dari jasa pelayanannya.
- 4) Sumber pendapatan asli daerah.

2.3.4 TA dan STA Koperasi

Petani umumnya memiliki luas lahan yang relatif kecil, kemampuan pengelolaan usaha dan analisis terhadap lembaga perbankan, informasi dan teknologi umumnya masih lemah. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan memudahkan pembinaan adalah dengan melalui pembentukan kelompok tani.

Selanjutnya petani-nelayan anggota kelompok dapat bergabung membentuk Koperasi Agribisnis dan para petani-nelayan dalam wadah koperasi dapat membangun dan mengelola TA dan STA. Oleh sebab itu, dalam sistem pengelolaan TA dan STA dipilih oleh pengurus koperasi atau kelompok.

Dengan dibangun dan dikelolanya TA dan STA oleh koperasi diharapkan :

- 1) Koperasi yang beranggotaan pelaku agribisnis dapat memperoleh keuntungan karena pemilikan dan pengelolaan TA dan STA.
- 2) Para pelaku dapat melakukan grading, sortasi, pengemasan dan pengolahan dan pemasaran secara bersama-sama dalam wadah koperasi, sehingga nilai tambahnya pun dapat dinikmati bersama oleh seluruh anggota koperasi.

- 3) Dengan berkelompok berkoperasi petani-nelayan dapat menekan biaya pengadaan sarana produksi, biaya sortasi, grading, pengemasan dan pengolahan, biaya pemasaran, serta dapat memperkuat posisi tawar petani.
- 4) Membina rasa kebersamaan dan gotong royong antar sesama petani serta merupakan wadah yang efektif dalam kegiatan penyuluhan, terutama dalam proses transfer teknologi.

Dalam wadah TA dan STA koperasi ini, maka peraturan tentang organisasi dan tata kerja, ketentuan imbal jasa penggunaan fasilitas serta ketentuan distribusi hasil usaha, dirumuskan dan disepakati oleh anggota koperasi agribisnis.

Berdasarkan kesepakatan anggota dan para pengurus koperasi, dapat saja pengelola TA dan STA, melakukan hal-hal sebagai berikut : 1) memasarkan hasil produksinya ke STA, 2) membangun serta mengembangkan jaringan distribusi pemasaran, 3) bekerja sama dengan KOPAS (Koperasi Pasar), 4) memasok bahan baku industri pengolahan, supermarket, dan para eksportir.

2.3.5 TA dan STA Swasta

Kemitraan dalam agribisnis merupakan salah satu instrumen perekat untuk menstimulir keselarasan dan keserasian kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan diantara pelaku agribisnis. Dengan terwujudnya kemitraan usaha diantara pelaku agribisnis tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah yang diterima secara wajar antara pelaku kemitraan.

Dalam kemitraan usaha, pada umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan mitra sebagai pemilik dan pengelola TA dan STA dengan

banyak petani atau kelompok tani. Perusahaan mitra (pemilik dan pengelola TA dan STA) pada umumnya mempunyai kekuatan monopsonistik, sehingga mampu mengendalikan harga. Sebaliknya para petani produsen pada umumnya *price taker* baik dalam harga input (sarana produksi) maupun dalam produk yang dijualnya. Untuk mengendalikan hubungan eksploitatif perusahaan mitra, maka kelembagaan (aturan main) diperlukan untuk meredistribusikan struktur hak-hak dan kewajiban aturan representasi, mempertinggi rasa kebersamaan dan moralitas, sebelum menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Peranan pemerintah diperlukan dalam rangka mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani serta mempertinggi kebersamaan dan moralitas diantara pelaku agribisnis.

Pada kemitraan diatas, perusahaan swasta dapat membangun dan mengelola TA dan STA sendiri, dan membeli hasil produksi para petani kemudian perusahaan mitra tersebut dapat memasarkan ke pasar-pasar sasarannya (supermarket, eksportir atau pasar-pasar tradisional) atau menjualnya di TA dan STA. Dengan demikian, nilai tambah distribusi dan pemasaran dinikmati perusahaan itu sendiri.

Keuntungan dibangunnya TA dan STA Kemitraan ini antara lain :

- 1) Adanya jaminan pasar bagi petani
- 2) Sebagai alih modal untuk mengatur masalah permodalan bagi petani.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kemitraan adalah efisiensi ekonomi harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam keputusan usaha kemitraan agar dapat berkembang berkelanjutan. Kalau kemitraan hanya didasarkan pada pertimbangan moral atau sosial, seringkali kemitraan ini sangat tergantung pada kebijaksanaan pimpinan perusahaan atau pemegang kekuasaan yang ada sekarang.

Pola Pengembangan Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis

Kalau perusahaan mitra tidak efisien dapat mengakibatkan kemampuan membeli produksi hasil para petani produsen menjadi lebih rendah dari harga pasar yang ada, akibatnya para petani dapat menjual hasil produksinya ke pedagang lain atau langsung ke pasar. Sebaliknya kalau petani tidak efisien dapat rugi, atau perusahaan mitra dapat lebih banyak membeli dari luar petani (kelompok) mitranya yang harganya lebih murah. Demikian pula kalau koperasinya tidak efisien, akan ditinggalkan oleh para anggota dan mitranya. Kalau keadaan ini sampai terjadi akan membahayakan kelangengan kemitraan tersebut



III. STRUKTUR ORGANISASI TA DAN STA

3.1 Bentuk Kelembagaan

Dalam kaitan dengan pengembangan institusi pelayanan pemasaran tersebut, model kelembagaan TA dan STA yang dikembangkan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut.

STA berada di lokasi sentra produksi (Kabupaten atau kecamatan), maka pemilik sekaligus pelaksanaanya selain pihak pemda, swasta juga dimungkinkan lembaga koperasi. Apabila koperasi, maka petani diharapkan menjadi anggota dari koperasi tersebut. keberadaan STA terutama ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di sentra produksi. Departemen/instansi seperti Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan menengah, Pemda, serta asosiasi tingkat lokal berperan sebagai pembina (Tabel 3.1)

Tabel. 3.1 Jenjang Kelembagaan dan Pelaku jaringan TA dan STA

	Jenjang Kelembagaan			
	Produsen	TA	STA	Target Pasar
Pelaku	Petani Kelompok Tani	Badan Usaha Regional Tk. Propinsi	Koperasi/Pedagangan LSM Lokal Tk. Desa atau Kec.	Pasar Institusi Wet Market Eksportir
Kegiatan	Penanaman Pemanenan Pasca panen	Volume besar Perdagangan Pengangkutan Fasilitas lain	Penyortiran Pengemasan Perdagangan	
Sarana Penunjang	Telekomunikasi Transportasi	Tempat transaksi Cold storage Freight Forwarder Sertifikasi Perbankan Bea Cukai Informasi/data	- Tempat penyimpanan (sederhana) - Telekomunikasi - Transportasi	
Fasilitator	- Dinas Pertanian, PPL - Pemda - KUD	- Deptan - Depperindag - Pemda - INKUD - Swasta - Asosiasi	- Deptan - Depperindag - Depkop PPK - Pemda - Swasta	

Sementara organisasi pengelola TA lebih mengarah kepada pengelolaan pihak swasta. Kalaupun pihak pemda ikut didalamnya, terbatas pada pemilik sebagian kecil saham/modal. Dasar pertimbangannya adalah bahwa TA dan STA adalah pasar, sehingga harus dikelola secara bisnis dan pengelola bisnis yang umum berhasil adalah pihak swasta dibanding pemerintah.

Dengan demikian peran pemda dalam TA maupun STA lebih banyak pada fasilitator, pengenalan standardisasi, pembinaan mutu, serta aspek perkarantinaan dan kepabeanaan.

3.2 Sarana dan Prasarana Pendukung TA dan STA

Komoditi hasil-hasil agribisnis yang transaksi jual belinya dilakukan di TA dan STA dapat beragam mulai komoditi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan, karenanya kebutuhan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha di TA dan STA ini dapat beragam pula tergantung jenis komoditi, jenis dan frekuensi kegiatan, cara transaksi dan pola pengelolaan TA dan STA-nya.

Sebagai gambaran kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan di TA dan STA tercantum dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2. Kebutuhan sarana dan prasarana TA dan STA

No.	Kegiatan dan kebutuhan sarana prasarana	Sasaran	TA	STA
1	<i>Transaksi hasil-hasil pertanian</i> • Tempat transaksi sesuai cara transaksinya • Timbangan, keranjang, box, sarana lainnya • Ruang administrasi dan keuangan (kasir) • Tempat bongkar muat	• Memperlancar transaksi yang adil dan transparan. • Pembayaran lancar dan aman.	ya ya ya ya	ya ya ya ya

Pola Pengembangan Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis

2	<u>Distribusi</u> * Sarana transportasi * Gudang * Cool room * Cold storage * Keranjang, box	* Efisiensi distribusi * Distribusi tepat waktu, jumlah dan sasaran * Kerusakan produk minimum	ya ya ya ? ya	ya ya ya ya ya
3	<u>Komunikasi / Informasi</u> * Telpn, fax * Komputer * Operator * Internet	* Kebutuhan pasar atau TA segera dapat diinformasikan ke sentra produsen (STA). * Memperbaiki efisiensi pemasaran. * Pembagian margin antar pelaku makin adil.	ya ya ya ya	ya ya ya ya
4	<u>Promosi</u> * Ruang promosi * Displai, tempat peragaan contoh produk	Mempromosikan produk-produk yang dapat dipesan atau ditawarkan.	? ya	ya ya
5	<u>Peningkatan dan jaminan mutu</u> * Sanitasi, air bersih * Tempat dan sarana sortasi, grading dan pengemasan * Pembinaan mutu produk * Pengujian mutu produk.	* Jaminan mutu * Produk bersih, sehat dan menarik, sesuai dengan permintaan pasar	ya ya ya ?	ya ? ya ya
6	<u>Pembinaan Petani/kelompok</u> * Balai /ruang pertemuan petani * PPL * Ruang pertemuan pedagang	* Pembinaan kelompok * Wadah tempat bertemunya para pelaku bsinis, terutama para petani untuk merencanakan pola tanam, pengembangan usaha dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.	ya ya ?	? ? ya
7.	<u>Lembaga Keuangan (Perbankan)</u>	• Biaya produksi petani • Modal kerja pemasaran pedagang		

8.	<u>Penyediaan sarana produksi</u> * Kios saprodi	* Menyediakan kebutuhan sarana produksi.	ya	?
9.	<u>Rumah makan, kios</u>	* Menyediakan makanan minuman dan kebutuhan pelaku bisnis	ya	ya
10.	<u>Penginapan/tempat istirahat</u>	* Menyediakan jasa untuk istirahat bagi pelaku bisnis	?	ya
11.	<u>Sosial</u> * Rumah Ibadah * Tempat Kaki lima	* Tempat beribadah * Tempat berjualannya pedagang kaki lima	? ?	ya ya
12.	<u>Kebersihan lingkungan</u> * Pengelola sampah	* Menjaga kebersihan, kesehatan dan kenyamanan	ya	ya

Kebutuhan jenis sarana dan prasarana TA dan STA di atas, juga akan tergantung kepada keragaman jenis komoditi yang ditransaksikan, penanganan dan pengembangan produk.

3.3 Mekanisme Jaringan Kerja TA dan STA

Sistem TA dan STA dikembangkan berdasarkan pemahaman terhadap kondisi produksi dan distribusi pertanian di Indonesia. Sistem produksi dan distribusi pertanian Indonesia dibangun oleh rangkaian yang panjang para pelaku usaha mulai dari petani hingga konsumen.

Petani yang jumlahnya banyak dan berskala kecil berhadapan dengan para pedagang pengumpul dalam transaksi produk pertaniannya. Dalam hubungan transaksi tersebut petani umumnya menjadi "price-taker" dan memiliki ketergantungan ekonomis kepada para pedagang. Pedagang pengumpul sendiri seringkali berjenjang mulai dari pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kabupaten, dan seterusnya. Pada tingkat

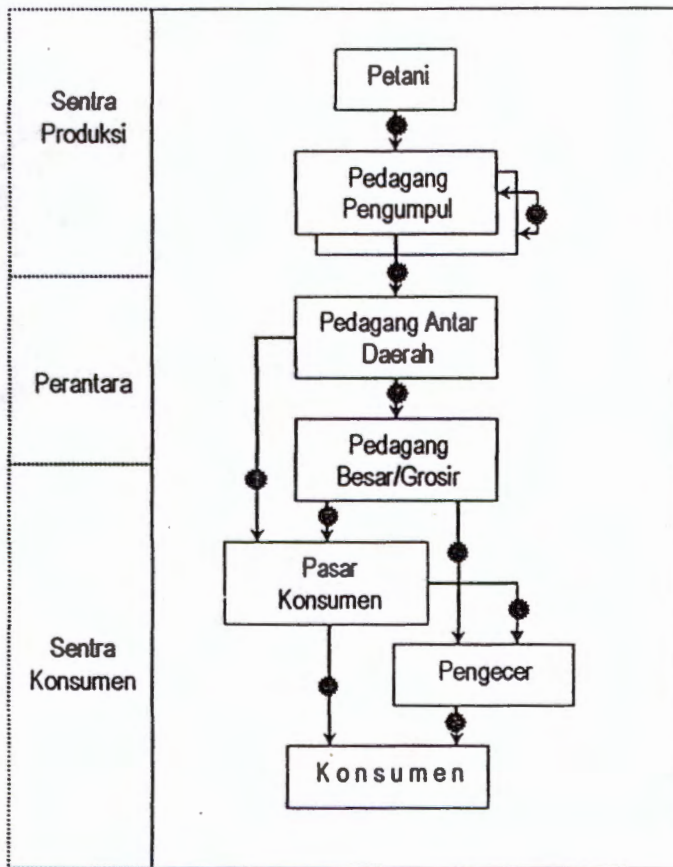
sentra produksi ini umumnya sarana untuk melakukan kegiatan perdagangan modern (sarana sortasi, penyimpanan, pengemasan, dll) umumnya sangat terbatas.

Pada tingkat intermediasi (perantara) peran pedagang besar (grosir) sangat dominan. Umumnya para pedagang menguasai sarana (terutama transportasi) dan memiliki jaringan yang luas dan kuat diantara para pedagang perantara, baik pedagang antar daerah maupun pedagang antar pulau. Pengaruh pedagang grosir tersebut sangat mempengaruhi penetapan harga bahkan kinerja seluruh sistem perdagangan. Kondisi tersebut tidak selalu berarti negatif karena pada kondisi tertentu para pedagang besar adalah pelaku yang menjalankan banyak fungsi pemasaran, seperti manajemen resiko, peningkatan skala usaha (scaling up) untuk efisiensi, investasi informasi dan mediasi dan sebagainya yang tidak akan tersedia jika peran para pedagang tersebut dihilangkan.

Pada sentra konsumen, para pengecer memegang peranan besar dalam melayani konsumen. Namun pada saat yang sama terjadi inefisiensi karena tidak terdapat pasokan yang secara sistematis dapat melayani kebutuhan yang berbeda diantara para pengecer yang berbeda. Misalnya, jika hotel dan restoran menginginkan mutu sayur yang baik, maka proses sortasi harus dilakukan sendiri dari pasokan pedagang besar atau grosir yang sama atau juga harus menyediakan sarana penyimpanan sendiri. Sebaliknya, pedagang eceran yang tidak membutuhkan mutu produk yang terlalu baik terpaksa harus membayar harga yang lebih mahal untuk proses sortasi yang sama.

Dalam seluruh rantai pemasaran seperti pada gambar 3.1, secara umum banyaknya titik transaksi telah menjadi salah satu sumber inefisiensi, ketidak-handalan, dan ketidakpastian dari sistem pemasaran yang ada. Kondisi akhirnya harus ditanggung oleh konsumen dalam bentuk

harga yang lebih tinggi, oleh produsen dalam bentuk harga yang lebih rendah, dan oleh para pelaku pemasaran sendiri dalam bentuk biaya yang lebih mahal. Pada akhirnya kondisi tersebut berakibat pada rendahnya daya saing dalam pasar global : menghadapi persaingan produk impor dan daya saing memasuki pasar internasional.



Keterangan : ● Titik Transaksi (Gambar. 3.1.)

Gambar 3.1 Rantai pemasaran komoditi pertanian

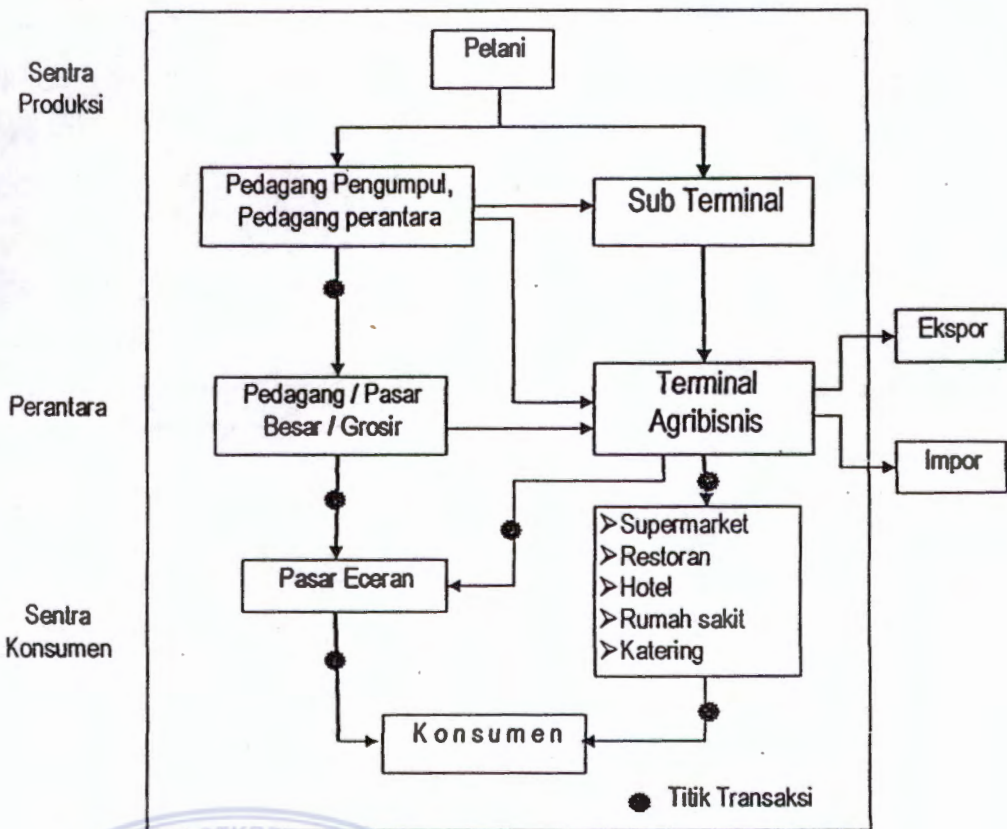
Diperlukan usaha yang komprehensif untuk melakukan pembenahan atas kondisi sistem pemasaran tersebut. Pembenahan dan perbaikan yang akan dilakukan haruslah mampu memberikan alternatif

yang lebih baik dilihat dari kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Untuk itu diperlukan pemahaman terhadap fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak, sehingga dapat disusun suatu sistem yang tetap mampu menjalankan fungsi yang ada, bahkan meningkatkannya, dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih tinggi. Para petani melakukan fungsi panen, pengumpulan, pembersihan dan sortasi awal. Para pedagang pengumpul umumnya melakukan fungsi pengumpulan sehingga sesuai dengan pertimbangan efisiensi angkutan, melakukan pengemasan sederhana, penimbangan dan pemberian informasi harga kepada petani. Pedagang perantara umumnya melakukan fungsi pengangkutan, sedangkan pedagang besar melakukan sortasi lanjutan, pembersihan lanjutan, penanganan produk lebih lanjut, pengemasan lanjutan, 'scaling up', bargaining harga dan pencarian informasi. Para pengecer besar umumnya melakukan fungsi penyimpanan, pengemasan lanjutan, dan pemajangan (*display*), sedangkan para pengecer kecil umumnya hanya melakukan pemajangan.

Sistem TA dan STA dikonseptualisasikan untuk menjadi alternatif sekaligus bentuk kongkrit pengembangan dan peningkatan dari sistem pemasaran konvensional diatas. TA dan STA dipandang sebagai alternatif karena memang tidak diarahkan untuk menggantikan sama sekali seluruh sistem pemasaran yang sudah ada, tetapi diarahkan untuk mampu melayani kebutuhan yang berbeda dari konsumen yang berbeda. Dipandang sebagai pengembangan karena dalam sistem TA dan STA diterapkan berbagai perangkat dan pengaturan pemasaran modern yang sulit diharapkan dapat diperoleh dari sistem yang konvensional.

Seperti terlihat pada gambar 3.2 dan gambar 3.3 berikut, dalam sistem TA dan STA petani akan diarahkan untuk memproduksi produk yang bermutu, terutama melalui peningkatan kemampuan teknologi. Produk tersebut kemudian ditangani pasca panennya (sortasi,

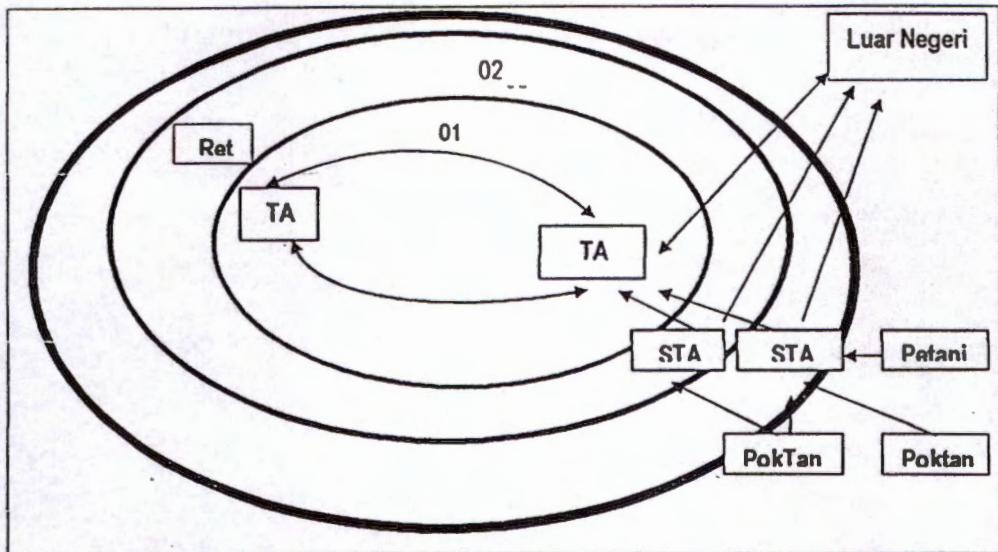
pembersihan, pengemasan) dan dikumpulkan oleh STA. STA juga akan berperan dalam mendukung pengembangan teknologi petani melalui pemberian informasi, selain sebagai pusat informasi harga dan pasar. STA tersebut kemudian menjualkan produk petani di TA sebagai pasar grosir/pusat perdagangan. Jika STA dimiliki oleh koperasi primer yang beranggotakan petani, maka TA diharapkan dapat dimiliki oleh koperasi sekondernya.



Gambar 3.2. Sistem TA dan STA

TA merupakan pasar grosir dan kelembagaan pemasaran yang memberikan berbagai jasa pelayanan pemasaran. TA akan dibangun di sekitar sentra konsumsi dan diarahkan untuk mampu melakukan seluruh fungsi dan pelayanan perdagangan dan pemasaran modern (pengemasan,

penyimpanan, 'custom', transaksi, pembayaran, dll), baik untuk produk yang diperdagangkan pada pasar domestik maupun internasional.



Gambar 3.3 Tinjauan Spasial TA dan STA

Konsumen TA terutama adalah lembaga perdagangan/pemasaran yang membeli dengan skala besar, membutuhkan kualitas yang tinggi, dengan keragaman jenis produk yang cukup tinggi; yaitu supermarket, restoran, hotel, rumah sakit, jasa katering, dan sebagainya.

Dalam sistem TA dan STA tersebut keberadaan sistem pasar konvensional tidak dihilangkan. Petani tetap dapat menjual produknya ke pedagang pengumpul atau pedagang perantara. Demikian juga peran pedagang grosir, dan pedagang eceran pada sistem pasar konvensional. Bahkan para pelaku usaha pada sistem konvensional tersebut dapat pula bertransaksi dengan TA dan STA. Hal yang akan menjadi proses 'seleksi' adalah kemampuan untuk melayani konsumen dengan lebih baik, mampu

memberikan mutu produk yang sesuai, harga yang sesuai dan pelayanan yang sesuai.

Secara umum penataan sistem pemasaran komoditas pertanian segar diperkirakan terfokus di ibukota propinsi dan kota-kota besar. Seperti Kota Medan didukung oleh daerah-daerah di sekitarnya sebagai pemasok komoditas produksi pertanian yang mengalir ke ibukota propinsi sebagai sentra konsumsi. Begitu juga sebaliknya beberapa produk dari ibukota propinsi (produk nasional) mengalir ke daerah pendukungnya.

Di TA produk diterima oleh pedagang penampung (primary wholesalers) dan selanjutnya dijual (baik secara langsung maupun lelang) kepada pedagang grosir (intermediate wholesalers). Disamping itu eksportir, supermarket dan distributor lainnya dapat membeli langsung dari pedagang pedagang penampung (Tabel 3.3)

Tabel. 3.3. Matrik Pelaku Pasar Tiap Ordo pada sistem Pemasaran Spasial

Pelaku Pasar	Ordo 3 Desa/Kec	Ordo 2 Kabupaten (STA)	Ordo 1 Propinsi (TA)
Pemasok/Penjual	Petani	Koperasi, Petani, Pedagang Pengumpul	Koperasi, Pedagang Pengumpul, Pedagang Kabupaten
Pembeli	Pedagang Pengumpul	- Pedagang Penampung (Primary wholesalers) - Pedagang Grosir (Intermediate wholesalers) - Eksportir - Supermarket - Distributor lainnya	- Pedagang Penampung (Primary wholesalers) - Pedagang Grosir (Intermediate wholesalers) - Eksportir - Supermarket - Industri pengolahan - Distributor lainnya
Komoditas Utama	Sayuran, buah, bunga, ikan, dan ternak	Sayuran, buah, bunga, ikan, daging	Sayuran, buah, bunga, ikan, daging
Komoditas lain yang diperdagangkan		Buah impor, beras, telur, produk nasional, dll.	Buah impor, beras, telur, produk nasional, dll.

Adakalanya TA memiliki identitas berdasarkan komoditas utama yang ditransaksikan, walaupun sebenarnya setiap TA memperdagangkan banyak komoditas. Misalnya, jika TA yang dibangun di Kendari utamanya

melakukan transaksi penjualan ikan, maka TA Kendari disebut TA ikan. Sedangkan salah satu TA di Medan disebut TA Sayur dan Buah karena utamanya memperdagangkan kedua komoditas tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan fasilitas bagi masing-masing TA yang disesuaikan dengan jenis dan skala kegiatan pelayanannya. Dengan demikian, pembentukan beberapa TA didasarkan pada skala optimal jumlah konsumen dan produsen yang dilayaninya. Hal ini juga untuk menjaga agar konsumen dari berbagai wilayah terlayani dengan baik dan tidak terjadi penumpukan di satu tempat yang menyebabkan kemacetan atau in-efisiensi.

Disamping memperdagangkan produk dalam negeri, maka TA juga dapat memperdagangkan produk impor agar pembeli mendapat berbagai jenis produk yang dibutuhkan. Oleh sebab itu fasilitas yang dimiliki TA harus cukup lengkap dan arealnya pun harus relatif luas. Hal ini membutuhkan investasi pengembangan yang relatif besar. Investasi tersebut dapat bersumber dari pemerintah, koperasi, swasta maupun pinjaman luar negeri. Sementara pemilik atau pelaksana TA dapat terdiri dari pemerintah, swasta atau koperasi.



IV. PROGRAM PENGEMBANGAN

TA dan STA sebagai institusi pelayanan pemasaran diarahkan untuk berpihak kepada para petani selaku produsen utama komoditas pertanian sebagai tempat transaksi jual beli dan kegiatan lainnya. Oleh sebab itu institusi ini, sudah waktunya untuk dikembangkan secara terkoordinasi oleh berbagai pihak, sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi dengan penyediaan pola umum pengembangan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis dengan berbagai program pengembangan.

Kebijaksanaan dalam pembangunan dan pengembangan TA dan STA merupakan tanggung jawab Menteri Pertanian melalui sub unit kerja yang diberi kewenangan, yaitu Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Sedangkan dalam operasionalnya berbagai pihak memiliki tugas dan tanggung jawab seperti uraian berikut :

4.1 Penyediaan Lahan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota mempunyai tanggung jawab untuk penyediaan lahan yang akan diperuntukkan bagi lokasi TA dan STA, serta mekanisme kerjasama tersebut dapat dibuat sesuai dengan kesepakatan (seperti : sebagai penyertaan modal pemerintah, pemberian konsesi, sewa lahan dan lain-lain), tetapi tidak tertutup kemungkinan disediakan oleh pihak swasta.

Kebijaksanaan penyediaan lahan untuk pendirian dan lokasi infrastruktur TA dan STA disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan jangka panjang. Jadi apabila pada tahap awal baru dibangun sebagian saja, tetapi lahan untuk pengembangan sudah tersedia, sehingga tidak menghambat pengembangan selanjutnya. Infrastruktur TA dan STA tersebut didirikan dalam suatu lahan beberapa hektar yang mudah diakses oleh pembeli, sehingga jaringan prasarana

transportasi harus tersedia dan mudah dijangkau, yang kesemuanya tergantung kepada potensi komoditas yang akan dilayani.

4.2 Tata Ruang, Operasional dan Pengelolaan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan TA dan STA, maka tata ruang yang diterapkan :

1. Pada areal TA dan STA yang sudah disediakan untuk bangunan fisik hanya 30 persen, lapangan terbuka 20 persen dan prasarana jalan dan prasarana lainnya (tempat pembuangan limbah, taman, ruangan informasi, ruangan pertemuan, kantor pengelola dan lain sebagainya) 50 persen.
2. Tidak boleh lebih dari 20 persen kegiatan didalam TA dan STA diluar memperdagangkan hasil pertanian.
3. Tidak ada hak kepemilikan, baik untuk toko maupun untuk kios (lapak) dan lapangan terbuka, yang ada hanya penyewaan yang diperhitungkan berdasarkan usia bangunan.
4. Apabila selama tiga bulan, kios dan toko tidak melakukan kegiatan, hak penyewaannya diserahkan kepada petani atau pedagang lainnya yang membutuhkan.
5. Pemilik dan pengelola TA/STA tidak mengutamakan komersialisasi, tetapi memperlancar kegiatan kemersiasilasi oleh para pelaku agribisnis, seperti mengembangkan jaringan informasi, melakukan promosi dan pelatihan kepada para petani yang memasarkan hasilnya ke TA /STA.

Program pengembangan TA diharapkan di setiap propinsi khususnya di setiap kota dapat dikembangkan satu TA, sedangkan di setiap kabupaten dapat dikembangkan beberapa STA sebagai jaringan pendukung, sesuai dengan potensi ekonomis dari komoditas pertanian yang dihasilkan. Sampai saat ini status dan pengembangan TA dan STA dapat dilihat pada (lampiran).

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa :

1. Pembangunan dan pengembangan TA sebagai institusi pelayanan pemasaran di sentra konsumen dan STA sebagai institusi pelayanan pemasaran di pasar produsen di sentra produksi merupakan syarat perlu bagi pengembangan agribisnis, pembangunan sistem dan usaha-usaha berbasis agribisnis di lokalita, karenanya upaya-upaya pembangunan dan pengembangannya perlu terus dilakukan.
2. Model TA dan STA dapat bervariasi berdasarkan karakteristik dan jenis komoditi, kondisi pelaku agribisnis, pola pengembangan agribisnis, pemilik dan pengelola TA dan STA.



PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TERMINAL AGRIBISNIS/SUB TERMINAL AGRIBISNIS

Wilayah/ Propinsi	Lokasi	Komoditi Unggulan	Tahapan Pengembangan	Pengelola	Keterangan
Sumatera Utara	Merek	Hortikultura	Studi kelayakan	Pemda Propinsi Sumatera Utara	Dilakukan Oleh Deptan
Sumatera Barat	Kab. Solok	Hortikultura	Operasional	KUBA Sungai Nanam Sepakat	Usulan Daerah
	Kab. Agam	Hoertikultura	Studi Kelayakan	Pemda Kab Agam	Pembangunan Awal dari Deptan
Sumatera Selatan	Jaka-Baring Palembang	Hortikultura	Studi kelayakan		Usulan Daerah
	Sentra-sentra produksi (Oku&Oki, MUBA, Linggau)	Hortikultura manggis, duku, salak dan durian	Sosialisasi Gagasan kepada Instansi Terkait		Usulan Daerah
	Pagar Alam	Hortikultura	Studi kelayakan		Usulan Daerah
Riau	Kodya Batam	Semua Sub Sektor	Studi Kelayakan		
Jambi	Kab Muara Bungo	Hortikultura	Rencana Studi Kelayakan		Usulan Daerah
Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Hortikultura	Operasional	Kelompok Usaha "Cipta Usaha"	Rehab bangunan dibantu Deptan
Lampung	Bandar Lampung	Hortikultura dan Tanaman pangan	Rencana Studi Kelayakan		Usulan Daerah
	Lampung Timur	Semua sub sektor	Rencana Studi kelayakan		Usulan Pemda Lampung Timur
Banten	Cilegon/Serang	Semua Sub Sektor	Rencana Studi Kelayakan	Pemda Propinsi Banten	Usulan Daerah
	Tangerang	Semua Sektor	Operasional	PT. Selarasgriya	Koordinasi jaringan pemasaran difasilitasi oleh Deptan
DKI Jakarta	Pluit-Jakarta Utara	Semua sub sektor	Studi kelayakan	PD. Pasar Jaya	Akan dikerja- samakan dengan pihak Australia

	Pasar Induk Kramat Jati	Hortikultura	Pembangunan Tahap ke dua (Modernisasi Sistem)		Disain Sistem sesuai dengan Konsep TA Deptan
	Marunda-Jakarta Utara	Semua sub sektor	Rencana Realisasi Fisik	PT. ACI GLOBAL NIAGA	Pengurusan Dokumen Izin Pembebasan Lahan
Jawa Barat	Sukabumi	Hortikultura,	Operasionalisasi	BP2IKP dan Koperasi Mulla	Perlu pembenahan Manajemen
	Kuningan	Hortikultura	Operasional	Pemda Kab Kuningan	Usulan Daerah
	Majalengka	Hortikultura	Operasional	Pemda Kab. Majalengka	Usulan Daerah
	Cirebon	Hortikultura, peternakan	Operasional	Pemda Kab. Cirebon	Dilakukan oleh Deptan
Jawa Tengah	Kab. Brebes	Hortikultura	Operasional		Dilakukan oleh Deptan
	Kab. Magelang	Hortikultura	Studi Kelayakan	Pemda Kab Magelang	Usulan Daerah
	Kab. Semarang	Hortikultura	Operasional	Pemda Kab Semarang	Murni Investasi Pemda Tk II Kab Semarang
DI. Yogyakarta	Kab. Sleman	Hortikultura	Operasional	Pemda Kab Sleman	Usulan Daerah
	Yogyakarta	Hortikultura	Operasional	Swasta	
Jawa Timur	Purwodadi-Pasuruan	Hortikultura dan Agrowisata	Operasionalisasi	SPAT-Pasuruan	
	Sidoardjo	Seluruh Sub Sektor	Studi Kelayakan		Dilakukan Oleh Deptan
B a l i	Tabanan	Hortikultura; dan Agrowisata	Operasional	Kelompok Tani Kab. Tabanan	Rehab Banungan dibantu oleh Deptan
	Singaraja	Hortikultura;	Operasional	STA Candi Kuning	
Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Hortikultura	Operasional dan Pengembangan	Pemda Batola	Usulan Daerah



Kalimantan Barat	Kota Potianak	Hortikultura	Studi kelayakan	Pemda Propinsi KalBarat	Dilakukan Oleh Deptan
Kalimantan Timur	Balikpapan/Samarinda	Hotikultura dan Tanaman pangan	Rencana Studi Kelayakan		Usulan Daerah
Sulawesi Selatan	Ujung Pandang/Gowa	Hortikultura	Operasional	Pemda Propinsi Sulsel	Studi kelayakan oleh Deptan
Sulawesi Utara	Minahasa	Hortikultura	Tahap Usulan	Pemda Kab Minahasa	Usulan Daerah
	Tondano	Hortikultura	Tahap Usulan	Pemda Kab Tondano	Dana Pembangunan Awal dari Deptan
Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Perikanan Hortikultura	Studi kelayakan	Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara	Dilakukan Oleh Deptan



GRAND STRATEGY

UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (UP3HP)



**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

2002

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
II. KONDISI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DI INDONESIA...	2
III. KONDISI YANG DIHARAPKAN	6
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	8
V. STRATEGI PENGEMBANGAN UP3HP	10
VI. PROGRAM PENGEMBANGAN UP3HP	12



I. PENDAHULUAN

Pembangunan agroindustri di tanah air merupakan suatu keharusan dalam rangka menuju masyarakat industri yang berbasis pertanian, hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat pedesaan menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, adanya ketimpangan pembangunan antara kota dengan desa sehingga urbanisasi cukup tinggi dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, pengangguran yang tinggi, devisa yang kecil serta ketahanan pangan yang lemah.

Pada sisi lain, kegiatan di sektor pertanian (on farm) saat ini merupakan sumber penghasilan sebagian besar masyarakat pedesaan, tetapi belum dapat memberikan kehidupan yang layak karena nilai tambah dari kegiatan on farm pada umumnya belum dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum mampunya produk-produk pertanian merespon perubahan tuntutan konsumen saat ini yang menuntut kualitas tinggi, kontinuitas pasokan, ketepatan waktu penyampaian, serta harga yang kompetitif.

Perbaikan teknologi produksi dan panen diharapkan dapat diterapkan pada kegiatan on farm, sedangkan pada kegiatan off farm, perbaikan teknologi pasca panen dan pengolahan dapat diterapkan melalui program pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP), yaitu suatu lembaga yang berupaya untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan agroindustri di pedesaan.

Program ini merupakan upaya untuk mempercepat penumbuhan dan pengembangan unit-unit agroindustri skala rumah tangga, skala kecil dan menengah di pedesaan, kelompok-kelompok rumah tangga tangga/petani/kelompok tani/koperasi yang memiliki potensi untuk mengembangkan agroindustri difasilitasi oleh UP3HP. Kegiatan yang akan difasilitasi oleh UP3HP adalah mengatasi permasalahan kesenjangan keterkaitan antara subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, kelangkaan sarana dan prasarana, serta skala usaha, pembinaan sumberdaya manusia baik aparat maupun pelaku usaha pengolah hasil pertanian skala rumah tangga, skala kecil dan skala menengah.

II. KONDISI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DI INDONESIA

Industri hasil pertanian yang merupakan salah satu bentuk agroindustri menghasilkan berbagai produk hasil pertanian olahan dalam bentuk makanan yang disukai konsumen. Produk hasil pertanian olahan ini tersedia untuk kepentingan dalam negeri dan untuk tujuan ekspor. Industri hasil pertanian yang berkembang meliputi industri hasil pertanian besar (pabrik), industri menengah dan kecil, industri makanan jajanan atau rumah tangga.

Sampai dengan tahun 2000 agroindustri hasil pertanian olahan tetap survive menghadapi krisis ekonomi. Peranan agroindustri hasil pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional khususnya terhadap sektor industri dapat ditunjukkan dari perkembangan sebagai berikut:

- a. Ekspor produk-produk hasil industri hasil pertanian, cenderung mengalami peningkatan dari US\$ 755 juta pada tahun 1998 menjadi US\$ 955 juta pada tahun 2000, atau meningkat rata-rata 22,5 % per tahun
- b. Jumlah perusahaan industri hasil pertanian menengah dan besar juga semakin bertambah dari 5.375 unit usaha pada tahun 1998 menjadi 5.612 unit usaha tahun 2000. Demikian juga nilai produksinya yang tahun 1998 mencapai Rp. 94.568 milyar menjadi Rp. 125.855 milyar pada tahun 2000. Selanjutnya jumlah tenaga kerja kumulatif tahun 1998 sebanyak 540.923 orang, maka pada tahun 2000 bertambah hingga mencapai 836.000 orang
- c. Dilihat dari industri kecil hasil pertanian yang berjumlah sekitar 52.524 pada tahun 1998, meningkat menjadi 82.430 pada tahun 2000 yang melibatkan karyawan sejumlah 594.923 orang (GAPPMI, 2001). Sebagian besar dari industri kecil ini merupakan industri hasil pertanian lokal.



Apabila dilihat dari tabel 1 dan 2, maka terlihat adanya sumbangan yang cukup besar dari industri kecil makanan olahan terhadap perekonomian Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Industri Hasil Pertanian (Makanan) di Indonesia

	1998	1999	2000
Industri menengah - besar	5.375	5.459	5.612
Karyawan (orang)	540.923	509.666	836.000
Total penjualan (milyar rupiah)	94.568	107.897	125.855
Nilai tambah (milyar rupiah)	35.621	45.910	44.736
Industri kecil	52.524	67.214	82.430
Karyawan (orang)	402.558	521.157	594.923
Total penjualan (milyar rupiah)	6.592	7.466	8.319
Nilai tambah (milyar rupiah)	1.702	2.085	2.204
Industri rumah tangga	719.668	789.901	828.140
Karyawan (orang)	1.487.258	1.645.003	1.722.711
Total penjualan (milyar rupiah)	10.642	11.189	11.218
Nilai tambah (milyar rupiah)	3.291	3.731	3.605
TOTAL	777.567	862.574	916.182
Karyawan (orang)	2.730.739	2.975.826	3.153.634
Total penjualan (milyar rupiah)	111.802	126.552	145.392
Nilai tambah (milyar rupiah)	40.614	51.726	50.545

Sumber : GAPMMI, 2001

Tabel 2. Ekspor Produk Agroindustri Pangan Tahun 1998 - 2000

(Juta dollar)

Uraian Barang	1998	1999	2000
Coklat Olahan	120.5	127	106.3
Kerupuk udang	2.4	5.8	6.9
Buah / sayur olahan	113	219.6	187.7
Minuman olahan	14.9	20.8	24.5
Ikan olahan	219.7	199.5	219.1
Kopi olahan	2.1	0.9	0.4
Teh olahan	4.8	5.1	3.9
Gula pasir dan gula lainnya	0.9	4.4	3.5
Makanan olahan lainnya	126.9	221.3	226.9
Total Ekspor	605.2	804.4	779.2

Dalam PJPT II, agroindustri termasuk industri hasil pertanian yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Industri ini mempunyai keunggulan komperatif yang tinggi, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan dapat ditempatkan di daerah pedesaan.

Industri kecil dan rumah tangga harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga mampu bersaing di pasar domestik. Karena sesuai dengan ciri-ciri industri ini, antara lain :

- Kebanyakan mengolah bahan baku alam di sekitarnya, dan tidak terlalu tergantung impor (walaupun gula dan kedele ternyata diimpor)
- Umumnya dikerjakan oleh keluarga dan kerabatnya
- Hasil produksinya dipasarkan dalam pasar lokal dalam radius yang sempit, sehingga biaya distribusinya tidak mahal.

Dengan demikian agroindustri hasil pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pemabangunan, tetapi pada kenyataannya dilapangan keadaan pengolahan hasil pertanian yang ada masih sangat jauh dari harapan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kelembagaan Pengolahan Belum Berkembang

Kelembagaan dalam pengertian ; perilaku, aturan dan organisasi panen dan pascapanen di tingkat petani belum berkembang. Pengetahuan dan kesadaran petani sebagai produsen dan juga sebagai salah satu pelaku pasar masih kurang. Pada umumnya mereka masih memperlakukan hasil produksinya secara apa adanya.

2. Keterkaitan On Farm dan Off Farm Belum Mantap

Lokasi usaha tani yang terpencar-pencar dengan luasan yang sempit serta jauh dari lokasi agroindustri yang mengolah, menyebabkan kurang terintegrasinya bahan baku dengan industri pengolah. Perusahaan Agroindustri pada umumnya tidak mempunyai lahan budidaya sendiri, tetapi sangat tergantung kepada pasokan bahan baku dan petani sekitarnya. Keadaan ini mengandung kesulitan manajemen yang tinggi karena beragamnya masing-masing usaha dan lemahnya kemitraan akibat kurangnya pemahaman pihak petani dan pengusaha agroindustri dalam pengelolaan hasil yang baik.

3. Mutu Produk Olahan Masih Rendah

Mutu produk olahan sangat terkait dengan aspek penerapan teknologi pengolahan. Pengolahan hasil pertanian sebagian masih menggunakan teknologi yang sederhana serta peralatan pengolahannya yang masih belum memadai. Rendahnya penggunaan teknologi ini diakibatkan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia pelaku masih rendah dan kurang tersedianya teknologi dan peralatan pengolahan di tingkat perdesaan. Lemahnya pembinaan dan penerapan jaminan mutu mempunyai andil terhadap rendahnya mutu produk yang dihasilkan agroindustri. Rendahnya kesadaran akan pangan yang bermutu dan aman sebagian kalangan konsumen, sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan mutu hasil pertanian.

4. Penggunaan Teknologi Pascapanen Sangat Minimal

Teknologi pengolahan yang telah ada ternyata tidak dimanfaatkan oleh petani. Rendahnya pemanfaatan ini disebabkan (a) tidak tersedianya alsin di tingkat petani, (b) walaupun tersedia manajemen pengelolaannya masih sangat lemah (c) alsin panen dan pascapanen masih sangat mahal (d) adanya masalah sosiologis menyangkut penggunaan teknologi dan tenaga kerja manusia. Secara keseluruhan hal ini akan menyebabkan penggunaan sarana dan teknologi panen dan pascapanen menjadi sangat kurang.



III. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. *Penyerapan Hasil Pertanian Meningkat*

Tujuan utama dari peningkatan pengolahan hasil pertanian adalah untuk menyerap hasil pertanian. Lebih lanjut, bagi produk tanaman pangan, kehilangan hasil berarti ancaman terhadap ketersediaan pangan. Panen yang optimal akan mendorong peningkatan pendapatan petani dan terpenuhinya kebutuhan industri.

2. *Peningkatan Mutu*

Mutu hasil pertanian hingga saat ini masih sangat bervariasi, mulai dari yang bermutu sangat baik hingga sangat buruk. Namun demikian jumlah hasil yang bermutu kurang baik sangat banyak. Berbagai kasus ditolaknya produk pertanian Indonesia di luar negeri disebabkan rendahnya mutu hasil. Disamping itu, rendahnya mutu akan menyebabkan daya saing produk lokal dengan impor akan melemah.

Peningkatan mutu agar sesuai dengan standar mutu internasional adalah tantangan paling besar dalam pascapanen. Persoalan mutu menyangkut aspek yang sangat luas yang dimulai dari varietas, lahan, teknologi, budidaya, perlindungan tanaman hingga cara panen dan perlakuan pascapanen berikutnya.

3. *Penganekaragaman Hasil*

Diversifikasi hasil pertanian sangat diperlukan antara lain untuk: meningkatkan pendapatan dan mencegah terbuangnya dengan sia-sia hasil pertanian, baik hasil utama maupun sampingan. Upaya penganekaragaman hasil harus dilakukan mengingat tidak seluruh hasil pertanian dapat diserap oleh pasar.

Upaya penganekaragaman hasil diharapkan tumbuh dari inisiatif dan kreatifitas petani, memanfaatkan kemampuan setempat dengan harapan akan menumbuhkan keterkaitan erat dengan penanganan pascapanen komoditas.

4. *Penggunaan Teknologi Modern*

Diharapkan penggunaan teknologi panen dan pascapanen akan semakin meningkat. Negara-negara pesaing Indonesia terutama negara-negara maju telah menggunakan teknologi tinggi dalam proses panen dan pascapanen, apabila kita tidak menggunakan teknologi yang tepat maka dapat dipastikan akan semakin tertinggal.

Sangat disadari bahwa keterbatasan aksesibilitas petani pada teknologi pascapanen sangat rendah, oleh sebab itu fasilitasi pemerintah sangat diperlukan. Disamping itu, keterlibatan swasta sebagai produsen sarana dan teknologi pascapanen juga sangat diharapkan.



IV. TUJUAN DAN SASARAN

A. Maksud dan Tujuan

Maksud program pengembangan UP3HP adalah sebagai salah satu upaya fasilitasi bagi pemberdayaan pelaku usaha pengolah hasil pertanian agar dapat menerapkan manajemen mutu, manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna dan memudahkan mengakses sarana pengolahan dan permodalan serta pemasaran hasil.

Tujuan program pengembangan UP3HP adalah :

1. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian sehingga mampu memperbaiki pendapatan pelaku usaha pengolah hasil pertanian
2. Meningkatkan mutu dan daya saing produk-produk agroindustri
3. Menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi produk hasil pertanian
5. Mengurangi tingkat urbanisasi dan menyeimbangkan pembangunan antara kota dan desa
6. Kegiatan pengolahan hasil pertanian dipedesaan akan memberikan kepastian pasar bagi produk-produk pertanian

B. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh yaitu :

1. Memacu peningkatan keunggulan kompetitif produk olahan komoditas pertanian serta keunggulan komparatif wilayah menjadi pertumbuhan agroindustri
2. Memacu pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penumbuhan agroindustri yang sesuai di wilayah yang dikembangkan
3. Membangun sarana pendukung bagi berkembangnya agroindustri pedesaan
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan di sektor lain seperti jasa, transportasi, perbankan dan lain-lain

C. Sasaran

Sasaran pengembangan UP3HP selama 5 tahun ke depan diarahkan pada penumbuhan 330 unit UP3HP di 30 provinsi dan seluruh kabupaten/kota yang akan memfasilitasi pemberdayaan pelaku usaha pengolah komoditas hasil pertanian menjadi produk olahan yang layak jual baik pangan maupun non pangan terhadap 82.500 rumah tangga



V. STRATEGI PENGEMBANGAN UP3HP

1. Pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian difokuskan pada aspek off farm
2. Pengembangan agroindustri komoditas unggulan pertanian dilakukan dengan sistem agribisnis terpadu yang dilakukan oleh pelaku usaha
3. Untuk mewujudkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian skala usaha ekonomi
4. Pengembangan kader-kader potensial untuk menjadi kader penggerak atau pelopor UP3HP (memberikan konsultasi, menjadi contoh dan tempat belajar, sumber data dan informasi)
5. Kegiatan fasilitasi dalam pemberdayaan kelompok usaha
6. Tahapan strategis yang harus dilakukan dalam pemberdayaan kelompok usaha

Pengorganisasian, Jaringan Kerja dan Pendanaan Program Pengembangan UP3HP:

1. *Pengorganisasian*

Pengorganisasian di tingkat pusat sebagai koordinator adalah Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian. Ditingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dengan tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan UP3HP. Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Teknis dengan tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan UP3HP. Di tingkat Kecamatan akan dibentuk satgas Sub UP3HP dengan tugas dan fungsi sebagai advisor teknis dalam hal penerapan manajemen mutu, penerapan teknologi tepat guna dan memfasilitasi penumbuhan kelompok usaha. Anggota binaan adalah kelompok usaha, yang terdiri dari para pelaku usaha pengolah hasil pertanian skala rumah tangga, skala kecil dan skala menengah.



2. Jaringan Kerja Lintas Sektoral

Jaringan kerja lintas sektoral dalam program pengembangan UP3HP untuk bahan baku melibatkan seluruh subsektor di lingkup Departemen Pertanian. Sebagai unsur penunjang akan melibatkan Departemen Keuangan, Perbankan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kesehatan, Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM, Perusahaan Air Minum, PLN

3. Pendanaan

Untuk kegiatan fasilitasi dibiayai dari dana APBN, APBD Propinsi / Kabupaten / Kota. Sedangkan untuk modal usaha bagi para pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit bank dan non bank, dan bantuan permodalan lainnya.



VI. PROGRAM PENGEMBANGAN UP3HP

Program UP3HP ini diluncurkan mulai tahun anggaran 2001 dengan langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain :

1. Identifikasi potensi wilayah
2. Sosialisasi program pengembangan UP3HP
3. Penumbuhan UP3HP di 2 Kabupaten terpilih
4. Pelatihan petugas dan pelaku usaha
5. Revitalisasi peralatan pengolahan hasil pertanian
6. Pembinaan lokasi lama
7. Monitoring dan Evaluasi

A. Pemberdayaan pelaku usaha

Lembaga UP3HP berupaya memfasilitasi pemberdayaan pelaku usaha agar mampu menggunakan potensi dan kreatifitasnya sendiri untuk melakukan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian guna mensejahterakan anggotanya.

Pemberdayaan kelompok adalah upaya memfasilitasi kelompok usaha agar mampu menggunakan potensi dan kreatifitasnya sendiri melakukan usaha pengolahan hasil pertanian guna mencapai kesejahteraan para anggotanya.

Kemitraan merupakan bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh pengusaha menengah atau usaha besar.

B. Pembinaan

Pembinaan sumber daya manusia adalah untuk mempersiapkan setiap pihak yang terkait dalam program pengembangan UP3HP agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selain pembinaan SDM, UP3HP juga melakukan pembinaan kelembagaan oleh petugas Sub UP3HP dilakukan melalui kelompok usaha yang diperkirakan satu unit Sub UP3HP akan membina 10 kelompok.

C. Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan pengendalian dilakukan melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengendalian dilakukan berdasarkan perencanaan yang memperhatikan asas akuntabilitas kinerja program. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi terkait.

Disamping itu pula dilakukan pengawasan jalur masyarakat melalui pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat seperti KTNA, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Akademis, Pers, Aparat Desa, Anggota Kelompok Usaha, Petugas UP3HP dan SUP3HP yang dilaksanakan dalam suatu pertemuan atau forum transparansi.

Guna melihat kinerja kegiatan program diperlukan laporan rutin maupun pelaporan pengendalian yang lebih ketat dan lengkap. Jenis-jenis pelaporan terdiri dari :

1. Laporan pengendalian dan evaluasi oleh tim teknis kabupaten dan tim pembina propinsi serta tim pembina pusat
2. Laporan pencapaian sasaran fungsional dan dampak program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan
3. Laporan insidentil bila diperlukan.

Format laporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan agar dituangkan dalam juklāk yang disusun oleh tim pembina propinsi dan juknis yang disusun oleh tim teknis kabupaten.

D. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan UP3HP diarahkan pada masalah pengolahan hasil pertanian skala kecil meliputi :

1. Meningkatkan kegiatan agroindustri yang sudah ada
2. Mengembangkan kegiatan agroindustri agar memenuhi skala usaha ekonomi yang berbasis pada keunggulan spesifik wilayah, memiliki potensi untuk mengakses pasar domestik dan ekspor
3. Menerapkan sistem manajemen mutu produk olahan hasil pertanian dengan menetapkan GMP dan HACCP untuk meningkatkan daya saing
4. Menyediakan fasilitas pendukung yang tidak mampu disiapkan oleh masyarakat pedesaan
5. Mengembangkan cara-cara pengolahan dengan teknologi tepat guna

6. Meningkatkan dan memperluas pasar produk olahan melalui promosi dengan memberikan informasi pasar
7. Mengupayakan pendanaan dengan pola sistem pinjaman lunak
8. Mempersiapkan petani untuk merawat dan memelihara peralatan agar dapat berproduksi dan tidak cepat rusak
9. Sosialisasi program UP3HP kepada instansi dan pelaku agroindustri





